

A stylized world map in a darker teal color is centered in the background. A dashed white circle is drawn around the map, and a light green corner graphic is in the top right.

MENUJU ERA BARU DOKUMENTASI

BLASIU SUDARSONO

EDITOR: MUSIANA YUDHAWASTHI

MENUJU ERA BARU DOKUMENTASI

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

MENUJU ERA BARU DOKUMENTASI

BLASIUS SUDARSONO

EDITOR: MUSIANA YUDHAWASTHI

LIPI PRESS

© 2016 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

Katalog dalam terbitan

Menuju Era Baru Dokumentasi/Blasius Sudarsono – Jakarta: LIPI Press, 2016.
xviii+258; 14.8 x 21 cm.

ISBN: 978-979-799-862-2

1. Dokumentasi

2. Informasi

025

Editor : Tantrina Dwi Aprianita
Proofreader : Noviasuti Putri Indrasari dan Risma Wahyu H.
Desainer isi : Chairunissa Leli, Meita Safitri dan Ariadni
Desainer sampul : Rusli Fazi

Cetakan pertama : November 2016



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp: (021) 314 0228, 314 6942. Faks.: (021) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
PENGANTAR PENERBIT.....	ix
KATA PENGANTAR DEPUTI BIDANG JASA ILMIAH	xi
PRAKATA	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
BERBAGAI PERSEPSI TENTANG DOKUMENTASI	17
A. Persepsi, Visi, dan Ekspektasi Manajer	19
B. Persepsi Pustakawan	21
C. Penggunaan Kata Dokumentasi di Internet.....	24
D. Arti Kata Dokumentasi dari Sumber Formal	28
E. Penggunaan Kata Dokumentasi Masa Kini	30
F. Rangkuman.....	31
BAB III	
KELAHIRAN DOKUMENTASI DI EROPA.....	33
A. Paul Otlet	35
B. Suzanne Briet.....	44
C. Frits Donker Duyvis	51
D. Siyali Ramamrita Ranganathan.....	53
E. Rangkuman.....	54

BAB IV	
AWAL DOKUMENTASI DI INDONESIA	55
A. Tonggak Perjalanan Dokumentasi di Indonesia	56
B. Memikirkan Makna Dokumentasi MIPI.....	59
C. Peraturan Presiden tentang Dokumentasi dan Perpustakaan	69
D. Rangkuman	83
BAB V	
DOKUMENTASI YANG TERLUPAKAN	85
A. Situasi Amerika Serikat	89
B. Situasi Indonesia	94
C. Rangkuman.....	100
BAB VI	
GERAKAN DOKUMENTALIS BARU (<i>NEO-DOCUMENTALIST</i>) ..	103
A. Warden Boyd Rayward.....	105
B. Michael Keeble Buckland.....	105
C. Niels Windfeld Lund	108
D. Document Academy	109
E. Joacim Hansson.....	111
F. Maurizio Ferraris	112
G. E. A. Pleshkevich.....	113
H. Rangkuman	117
BAB VII	
FOKUS PADA DOKUMEN.....	119
A. Masa Pra-2003.....	120
B. Masa Pasca-2003.....	123
C. Rangkuman	132
BAB VIII	
KONVERGENSI LEMBAGA DOKUMENTER	135
A. Ide Konvergensi	135
B. Kolaborasi Internasional.....	140
C. Rangkuman.....	147
BAB IX	
LOGIKA DOKUMENTASI.....	149
A. Pola dalam Berpikir	149
B. Logika dan Pengetahuan	151

C. Proses Berpikir	156
D. Tiga Sudut Pandang	159
E. Rangkuman	164
BAB X	
RANGKAIAN DIAGRAM PEMIKIRAN	167
Rangkuman	186
BAB XI	
BIBLIOGRAFI KRONOLOGIS LITERATUR ASING TENTANG DOKUMENTASI	187
BAB XII	
PENUTUP	237
DAFTAR PUSTAKA	243
INDEKS	249
BIOGRAFI PENULIS	253
BIOGRAFI EDITOR	257



PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas adalah salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku berjudul *Menuju Era Baru Dokumentasi* ini memuat hasil pemikiran dan pengalaman selama bertahun-tahun tentang Ilmu Dokumentasi, suatu bidang ilmu yang masih jarang dibahas. Penulis menawarkan konsep “Logika Dokumentasi”, suatu konsep berpikir yang logis tentang makna dan arti dokumentasi. Selain itu, penulis juga memberikan penjelasan bahwa suatu kegiatan dokumentasi tidak sebatas pada objek pustaka saja.

Buku ini berusaha mengajak pembaca untuk kembali mempelajari, memahami, dan mengembangkan ilmu dokumentasi baru. Diharapkan buku ini dapat dijadikan rujukan bagi para pembelajar, pengajar, dan pemerhati ilmu dokumentasi serta pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lembaga pemangku kebutuhan, baik lembaga pendidikan maupun lembaga yang melaksanakan dan bertanggung

jawab atas praktik dokumentasi sehingga nantinya ilmu dokumentasi dapat lebih dipahami dan dikembangkan lebih baik lagi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press

KATA PENGANTAR DEPUTI BIDANG JASA ILMIAH LIPI

Dengan gembira saya menyambut terbitnya buku *Menuju Era Baru Dokumentasi*, sebuah buku yang bercerita tentang perjalanan panjang pencarian makna kata “dokumentasi”, sebuah pencarian yang dipicu oleh adanya kontradiksi antara dokumentasi dan perpustakaan. Dikuatkan dengan adanya tafsir lain dari sisi nonpustakawan akan kata itu, menjadikan perlunya memaknai kata dokumentasi yang idealnya menjadi rumusan atau teori umum dokumentasi (*General Theory of Documentation*).

Tentu dapat dipertanyakan mengapa harus ada teori umum tersebut. Dokumentasi sepertinya sudah diketahui oleh setiap orang atau dianggap dengan sendirinya diketahui sehingga tentu tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja sesuai tafsir mereka masing-masing. Namun, bagi penulis yang pada waktu itu kebetulan memimpin lembaga dengan nama dokumentasi, menyadari pentingnya pemahaman dasar akan dokumentasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sebuah ungkapan sederhana bahwa praktik itu tentu ada teori atau ilmunya maka dokumentasi harus dicari teori atau ilmunya.

Penelusuran tentang aktivitas dokumentasi, baik di Indonesia maupun di Eropa menjadi hal yang menarik untuk dilakukan. Dari

upaya tersebut ditemukan bahwa ilmu dokumentasi memang pernah terlupakan, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia sendiri. Kebangkitan dokumentasi ditandai dengan dibukanya School of Documentation Studies di University of Tromso, Norwegia pada 1996. Kerja sama dengan University of California di Berkeley melahirkan *Document Academy Meeting* (DOCAM) yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2003. Pertemuan ini merupakan ajang bagi para dokumentalis baru (*neo-documentalist*) untuk mendiskusikan “Ilmu Dokumentasi Baru” yang berfokus pada studi dokumen. Dokumentasi menjadi sangat mendasar dengan adanya kesadaran “konvergensi lembaga-lembaga dokumenter”.

Lalu, bagaimana dengan lembaga-lembaga dokumenter di Indonesia kini? Apakah Ilmu Dokumentasi Baru sudah menjadi awal dalam penyelenggaraan tugasnya? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Buku ini memang baru mengantar pada pintu masuk untuk mendalami Ilmu Dokumentasi Baru. Namun, dengan membaca dan memahami uraian buku ini diharapkan akan terpicu pijar baru yang dapat menyalakan gairah pembelajaran atas makna dokumentasi, khususnya bagi lembaga-lembaga dokumenter di Indonesia, baik yang menggunakan kata dokumentasi dalam namanya maupun berbagai nama lain, asalkan tugas dan fungsi lembaga itu adalah dokumentasi.

Jakarta, Medio Agustus 2016

Prof. Dr. Bambang Subiyanto, M.Agr.

KATA PENGANTAR

*Information is power
Library is information, so
Library is power*

Jargon itu menancap kuat dalam benak saya dan selalu menjadi kebanggaan kami, mahasiswa Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Perpustakaan 1988, yang kerap diremehkan mahasiswa jurusan lain—meski sama-sama menyandang jaket kuning. Jurusan Ilmu Perpustakaan dipandang sebagai jurusan yang tidak menarik. Bernaung di bawah bendera Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia), tetapi tidak pernah belajar sastra dan digolongkan dalam jurusan non-bahasa. Jurusan ini lebih berkuat pada penggunaan alat bantu komputer untuk meringkas waktu dan tenaga untuk melakukan tugas teknis semata.

Ketika meneruskan jenjang pendidikan Strata 2 (S2) di bidang keilmuan yang sama dengan pengkhususan Ilmu Kearsipan pada 2000, saya membaca sebuah literatur dengan judul *The Organizing of Information* karya Arlene G. Taylor. Ada hal yang menarik disampaikan oleh Taylor mengenai konteks pengelolaan informasi. Menurut

Taylor, ada berbagai konteks yang memerlukan sistem temu kembali untuk berbagai tujuan dan pada akhirnya disimpan untuk diabadikan. Taylor menegaskan bahwa selain berbagai jenis perpustakaan, institusi yang perlu mengelola informasi yang dimilikinya adalah lembaga kearsipan, museum, dan galeri. Membaca penjelasan Taylor, dalam benak saya bertambah pemahaman bahwa semua objek yang memiliki informasi perlu dikelola dalam sebuah sistem. Objek itu bisa beragam wujudnya dan tentu memiliki nilai tinggi untuk disimpan selamanya. Di sini saya menjadi yakin bahwa “saudara” perpustakaan bukan hanya lembaga arsip, tetapi juga museum dan galeri.

Ketika pencerahan ini saya sampaikan di lingkungan akademis, tidak ada sambutan yang berarti. Bahkan, salah satu teman angkatan di S2 yang kebetulan bekerja di museum kecewa karena tidak ada keinginan jurusan untuk membentuk pengkhususan Ilmu Museum (Museologi). Hal yang cukup mengganggu saya adalah alasan ekonomi menjadi halangan jurusan ini belum atau tidak perlu diberi tempat untuk dikaji sebagai bagian dari ilmu informasi atau mungkin cabang dari ilmu perpustakaan sebagaimana ilmu kearsipan.

Pada akhirnya, saya tidak lagi berada di lingkungan kemahasiswaan setelah lulus S2. Saya memilih menjadi guru di sebuah sekolah nasional plus yang memiliki kurikulum yang sangat terencana dan detail. Melalui pelatihan oleh para konsultan sekolah kami di Tallahassee Florida, saya diminta membuat perencanaan belajar yang mampu mengoptimalkan kecerdasan jamak siswa. Di sinilah saya merasakan betapa pentingnya objek sebagai sumber kajian siswa. Dalam proyek kerja siswa, saya tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber tertulis. Kami perlu mempelajari objeknya dalam berbagai bentuk, baik objek hidup maupun mati. Saya mulai merangkai pemanfaatan lembaga-lembaga yang mengelola objek-objek belajar kami, di perpustakaan, lembaga arsip, museum, galeri bahkan kebun raya, kebun binatang, dan taman tematik. Dalam penyusunan proyek

belajar tersebut, saya merasakan pentingnya informasi—yang dimiliki oleh semua lembaga tersebut—dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi rujukan para siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka.

Sebagai contoh, akan saya ceritakan sedikit mengenai sebuah proyek yang harus diselesaikan oleh siswa SMA di sekolah saya. Proyek itu kami beri nama Phinisi. Dalam proyek itu, siswa harus mampu mempresentasikan secara detail tentang Phinisi. Mereka harus menggali data sebanyak mungkin tentang kapal Phinisi dan pencarian data tidak dibatasi. Siswa harus mampu menggali data dari berbagai sumber, seperti buku, hasil penelitian, film, foto, bahkan juga melalui wawancara langsung dengan para pelaku. Kami membuat jadwal penelusuran ke perpustakaan, lembaga arsip, galeri, dan museum, melakukan ekspedisi langsung serta tinggal di pusat pembuat kapal Phinisi di Desa Bira, Bonto, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya ingin memperlihatkan bahwa dalam membangun kecerdasan siswa, lembaga pemilik informasi tidak dapat dilihat secara terpisah, semua data saling terhubung. Kemampuan siswa yang tertinggi adalah ketika mampu merangkai data yang tersebar menjadi rangkaian informasi yang bermakna dan menjadi pengetahuan dalam hidupnya. Di sinilah saya mulai menyadari kebutuhan kolaborasi antarlembaga dan kemampuan pengelola setiap lembaga memaknai *value* informasi yang dimiliki. Penghargaan terhadap *value* tersebut akan menghasilkan kumpulan data yang tak ternilai harganya.

Dalam perjalanan mencari format kolaborasi antarlembaga informasi tersebut, pada 2007 melalui sebuah diskusi di internet, Allah Swt. mengatur pertemuan kembali antara saya dengan salah satu dosen pada masa kuliah S1, Bapak Blasius Sudarsono. Ajakan beliau untuk menulis bersama belum dapat saya penuhi karena kesibukan mengajar. Namun, ketertarikan memaknai *value* informasi ini menginspirasi saya untuk mendirikan sebuah komunitas yang kami namakan Komunitas Jelajah. Jelajah merupakan kependekan

dari Jejak Langkah Sejarah, komunitas yang mencoba mengajak anggotanya memperhatikan lembaga-lembaga, seperti perpustakaan, lembaga arsip, museum, kebun binatang, kebun raya, dan taman tematik lainnya. Kami membuat program belajar yang menyenangkan untuk semua usia di mana mereka secara tidak sadar diajak belajar melalui berbagai media di berbagai lembaga informasi. Dalam perjalanannya, komunitas ini juga melakukan kegiatan penelitian dan apresiasi terhadap lembaga informasi. Salah satu acara tahunan kami adalah Museum Awards. Acara ini kami gagas setelah menelaah hasil penelitian kami tentang kondisi museum-museum di DKI Jakarta. Acara yang tahun ini menginjak tahun kelima, merupakan acara swadaya komunitas dan akhirnya pada 2016, kami berhasil meneliti seluruh museum di Indonesia.

Di sela-sela membangun Komunitas Jelajah inilah, saya menjawab tantangan Pak Blasius Sudarsono untuk menelaah buku “Perpustakaan untuk Rakyat”, yang ditulis beliau bersama almarhumah adik kelas saya Ratih. Saya akhirnya merasa sangat perlu mencari guru yang dapat mencerahkan saya tentang konsep-konsep yang saya pahami mengenai berbagai lembaga informasi. Kira-kira pada 2014, saya belajar serius tentang konsep baru dokumentasi di bawah bimbingan Pak Blasius. Kami banyak berdiskusi, mempelajari makna dokumentasi, dan telaah hasil penelusuran pustaka Pak Blasius Sudarsono tentang hal tersebut.

Bersama beliau, saya juga mencoba menggaungkan komunitas belajar Kappa Sigma Kappa. Saya baru sadar bahwa jargon yang saya tulis di awal kata pengantar ini merupakan bukti adanya masa krisis jati diri ilmu perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. Pada 1950-an elaborasi terminologi, seperti ilmu informasi, temu kembali informasi, manajemen informasi, menjadi bukti bahwa istilah “informasi” pada akhirnya menggantikan istilah “dokumentasi”. Sangat tidak tepat menyebut lembaga-lembaga tersebut (perpustakaan, museum, lembaga arsip, kebun raya, kebun binatang, taman tematik) sebagai

lembaga informasi, melainkan lebih tepat disebut sebagai lembaga dokumentasi.

Saya tidak hendak membeberkan berbagai konsep dokumentasi baru yang ditulis oleh Pak Blasius Sudarsono dalam buku ini. Namun, sebuah diagram yang berjudul “Dokumen sebagai Pusat Ilmu Dokumentasi Baru” menjawab tuntas keraguan akan apa sebenarnya objek atau dokumen itu. Dengan perkembangan teknologi informasi dan membanjirnya bentuk media baru, konsep objek atau dokumen apakah hanya dapat dipandang dalam satu sisi? Lebih lanjut dalam buku itu, Pak Blasius Sudarsono menjelaskan secara kronologis perkembangan konsep dokumen yang melandasi gerakan dokumentasi baru. Dimulai dari konsep Suzanne “Lady of Antelop” Briet ... “*a document is a proof in a support fact*”, yang dilengkapi oleh Michael K. Buckland, dan disempurnakan oleh Niels W. Lund dengan “*a complementary theory of document*”. Poin penting yang perlu dicermati adalah konsep dokumentasi itu sendiri. Pak Blasius Sudarsono menjelaskan semuanya secara bertahap dan meringkasnya dalam diagram. Diagram ringkas dan jelas tersebut berjudul “Semesta Dokumentasi”, mencoba menggambarkan apa saja yang terjadi pada proses dokumentasi. Lagi-lagi saya menemukan *bahwa* perpustakaan, lembaga arsip, museum, kebun binatang, kebun raya, taman tematik melalui proses tersebut. Melalui diagram tersebut, jelas terdeteksi induk keilmuan yang tepat untuk menaungi perpustakaan, ilmu kearsipan, dan museologi adalah ilmu dokumentasi. Hal yang selanjutnya patut direnungkan, Pak Blasius Sudarsono juga menguraikan bagaimana dokumentasi terlupakan di dunia. Beliau juga mengungkapkannya analisis hilangnya dokumentasi dan profesi dokumentalis di Indonesia.

Sebuah perjalanan panjang, berliku, dan mendaki dalam memaknai dokumentasi dalam pribadi, filosofi, dan profesi seorang Blasius Sudarsono. Adakah tokoh lain yang begitu mencintai dunia dokumentasi seperti Blasius Sudarsono? Apa yang telah ditemukan

dan dicapai oleh beliau harus terus dikaji dan disempurnakan oleh generasi muda. Buku ini cukup mudah dipahami meskipun pendekatan penulisannya semi ilmiah. Hal yang pasti, buku ini masih berpeluang untuk terus dikembangkan karena “pada awalnya adalah kehendak manusia untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan atau dirasakannya” dan itu tidak akan selesai sebelum tutup usia.

Garasi Condet, 15 Agustus 2016

Editor,

C. Musiana Yudhawasthi

BAB I PENDAHULUAN

Pengetahuan manusia tidak diperoleh dengan logika terlepas dari pengalaman, atau pengalaman terlepas dari logika, melainkan melalui penerapan logika pada pengalaman.

Semua kebenaran merupakan produk identifikasi logis terhadap fakta pengalaman.

(Rand, 2003, 167)

Buku ini disusun dari pengalaman selama bertugas dan usaha berpikir logis atas pelaksanaan tugas itu. Proses berpikir dilakukan dengan menerapkan kaidah analisis dan kritis. Hasilnya mungkin masih jauh dari karya ilmiah karena sekadar berbagi pengalaman panjang berteman dengan dokumentasi. Hal yang disampaikan dalam buku ini memang menyangkut kaidah dasar terkait tugas dari lembaga tempat saya bekerja. Ada rasa menyesal karena tidak segera menuliskan semua pemikiran itu menjadi sebuah buku. Namun, saya tetap bersyukur karena menjelang akhir perjalanan panjang itu, saya justru menemukan perkembangan pesat dalam ilmu dokumentasi yang semula belum dikenal.

Setelah lebih dari empat dasawarsa (tepatnya 42 tahun), saya baru dapat menghadirkan cerita tentang pertemanan tersebut. Buku ini menjadi cerita perjalanan saya berteman dan hidup bersama dengan dokumentasi. Cerita ini juga semacam pertanggungjawaban atas pertemanan itu. Buku ini adalah himpunan pemikiran—mungkin lebih tepatnya lamunan—saya tentang makna dokumentasi. Semua ini berawal dari usaha memahami, menghayati, dan merumuskan maknanya. Buku ini merupakan cerita perjalanan tentang apa pun yang saya lihat, rasakan, lamunkan, dan pikirkan mengenai dokumentasi dalam perjalanan panjang itu.

Pertemanan selalu diawali dengan perkenalan. Bukan perkenalan yang secara langsung, namun melalui komunikasi tertulis antara saya dan lembaga yang menggunakan kata “dokumentasi” sebagai bagian dari namanya. Komunikasi itu terjadi pada bulan Mei sampai Juli 1973. Wajar jika muncul pertanyaan apa sebenarnya lembaga pusat dokumentasi ilmiah itu. Dugaan awal adalah museum ilmiah. Ternyata bukan artefak yang dikoleksi, namun pustaka ilmiah yang dihimpun. Orang awam lebih mudah mengenalnya sebagai perpustakaan ilmiah. Sampai di sini sudah muncul pertanyaan yang mendasar bagi saya, yaitu apa perbedaan antara dokumentasi dan perpustakaan?

Waktu itu saya sudah mendengar perdebatan atau—bisa dikatakan—kontradiksi antara perpustakaan dan dokumentasi. Ada dua pusat di lembaga tempat saya bekerja, yaitu pusat bibliografi dan pusat perpustakaan. Kegiatan di pusat bibliografi itulah yang sering disebut kegiatan dokumentasi, misalnya penelusuran literatur, layanan referensi, penyusunan bibliografi khusus, dan pembuatan abstrak atau indeks artikel ilmiah. Sementara itu, pusat perpustakaan memang berfokus pada kegiatan perpustakaan, yaitu menghimpun pustaka ilmiah, memprosesnya sebelum ditambahkan pada koleksi perpustakaan, dan melayani pemakai yang datang, baik untuk membaca di tempat maupun meminjam buku untuk dibawa pulang.

Di pusat perpustakaan itulah saya ditugaskan, khususnya di bagian teknis perpustakaan. Masalah teknis perpustakaan menjadi fokus saya pada waktu itu sehingga permasalahan dokumentasi untuk sementara lenyap dari perhatian saya.

Pada 1989, saya ikut merintis program National Biodiversity Information Network (NBIN) di Indonesia. Saya bertanya mengapa tugas itu diserahkan kepada kami yang tidak memiliki pengetahuan biologi. Wakil Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjawab, “Justru lembaga kalian adalah lembaga dokumentasi.” Jawaban itulah yang menancap kuat dalam benak saya. Ternyata ada tafsir lain mengenai arti dan makna dokumentasi selain tafsir dari lembaga tempat saya bekerja. Pada waktu itu, kegiatan dokumentasi yang dilaksanakan memang masih terbatas pada dokumentasi literatur atau pustaka. Dalam jawaban itu, saya merasakan adanya gugatan telak atas tafsir pemaknaan yang hanya terbatas pada dokumentasi pustaka. Merintis jaringan informasi keanekaragaman hayati berarti harus membangun basis data non-literatur juga. Adakah dan bagaimanakah penjelasan tentang dokumentasi nonpustaka? Bagaimanakah pemaknaan dokumentasi oleh masyarakat pada umumnya?

Ada beragam pemahaman masyarakat tentang arti kata “dokumentasi”. Salah satu contoh pemakaian kata tersebut adalah untuk menamai seksi suatu kepanitiaan. Biasanya seksi ini bertugas mengabadikan kegiatan dengan kamera foto atau kamera audio-visual. Rekaman peristiwa yang sesungguhnya terjadi dinamakan rekaman atau film dokumenter. Di bidang komputer, kata “dokumentasi” berarti *source code*, yaitu suatu program komputer yang berupa deretan perintah tertulis yang harus dilakukan oleh komputer. Di sektor industri, dikenal dokumentasi produk berupa manual atau keterangan tentang cara kerja suatu produk. Dalam bidang proses pabrik, ada istilah dokumentasi proses, yaitu berupa urutan prosedur tertulis yang harus diikuti secara taat asas untuk menghasilkan produk dengan

tingkat mutu tertentu (ISO 9000). Di bidang permuseuman, artefak disebut juga dokumentasi masa lalu. Gedung tua disebut dokumentasi arsitektur masa lalu yang harus dilestarikan. Dokumentasi digunakan untuk menyebut dokumen sebagai bukti dalam pengadilan. Arsip juga menjadi dokumentasi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Lebih lanjut, observasi permukaan atas persepsi masyarakat tentang dokumentasi diuraikan dalam Bab II.

Beragam persepsi tersebut mengindikasikan perlunya kesepakatan tentang arti dan makna dokumentasi. Mulailah saya mencari arti dan makna kata dokumentasi. Logis jika kemudian saya mencarinya terlebih dulu dalam surat keputusan pembangunan lembaga tempat saya bekerja. Namun, hal tersebut tidak terlalu jelas diterangkan dalam surat keputusan tersebut. Pencarian saya selanjutnya menemukan pijakan sebagai dasar merumuskan arti dan makna dokumentasi. Ketentuan itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 mengenai Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). UU itu berbunyi bahwa salah satu kewajiban MIPI adalah "... menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia (Pasal 3 Huruf d.)."

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa tidak hanya kepustakaan yang didaftar, namun juga benda-benda lain (nonpustaka) yang berharga untuk ilmu pengetahuan. Inilah yang saya anggap benih pemaknaan dokumentasi secara umum.

Aturan lain tentang dokumentasi juga ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah. Peraturan Presiden ini secara tegas menyebutkan bahwa dokumentasi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah dokumentasi pustaka (Pasal 1). Di dalam penjelasan dari Peraturan Presiden itu tegas disebutkan bahwa:

Istilah “Dokumentasi” dalam Peraturan Presiden ini diartikan khusus “Dokumentasi Pustaka” atau “Dokumentasi Literair” dan untuk menegaskan bahwa “dokumentasi benda” (*dokumentatie corporeel*) yang termasuk bahan-bahan dokumentasi bagi museum-museum dan gudang-gudang tidaklah termasuk dalam Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini dapat dikatakan kuno, namun belum dicabut atau diganti. Hal terpenting adalah memaknai apa yang ada dalam peraturan itu untuk merumuskan konsep dokumentasi di Indonesia. Penjelasan rinci tentang MIPI dan konsep dokumentasinya serta Peraturan Presiden tersebut disampaikan dalam Bab IV. Dalam urutan pemikiran saya, bab ini memang terjadi lebih dulu dibanding dengan pembelajaran saya mengenai Kelahiran Dokumentasi di Eropa (Bab III).

Timbul pertanyaan mengapa konsep dokumentasi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 itu tidak dijabarkan dan tidak diterapkan? Padahal benih dalam UU No. 6 Tahun 1956 itu mengamanatkan dua objek dokumentasi, yaitu pustaka dan benda-benda. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961, diketahui ada dua jenis dokumentasi, yakni Dokumentasi Pustaka atau Dokumentasi Literair dan Dokumentasi Benda (*dokumentatie corporeel*). Sayangnya, Peraturan Presiden itu hanya mengatur Dokumentasi Pustaka. Bagaimana aturan untuk Dokumentasi benda? Logisnya tentu harus ada juga konsep dokumentasi umum (*general documentation*). Sampai sejauh itu, saya belum berhasil menemukan referensi yang membahas mengapa dokumentasi umum tidak diatur. Informasi yang ada hanya membahas tentang praktik atau pengantar dokumentasi pustaka.

Keadaan itu membuat saya tergerak memikirkan konsep umum dokumentasi dalam sebuah pemikiran logis. Sejak saat itu, logika dokumentasi menjadi tajuk suatu konsep yang harus saya realisasikan. Logika dokumentasi yang saya maksudkan sebenarnya sederhana,

yaitu menerangkan secara logis kegiatan dokumentasi yang tidak sebatas objek pustaka saja. Dokumentasi hendaknya mencakup berbagai objek. Jika objeknya pustaka, tentu koleksinya menjadi koleksi suatu perpustakaan. Jika objeknya adalah spesimen botani maka koleksinya dinamakan herbarium. Jika koleksinya tumbuhan hidup, disebut kebun raya (*living documentation*). Demikian seterusnya sehingga diperlukan konsep umum dokumentasi yang dapat menerangkan berbagai rupa kegiatan tersebut.

Secara sederhana, logika berarti cara-pikir yang masuk akal. Dengan demikian, logika dokumentasi adalah pendekatan berpikir yang masuk akal tentang arti dan makna dokumentasi. Suatu cara sederhana dan belum tentu dapat diterima sebagai metode akademis. logika dokumentasi sekadar menemukan salah satu pintu masuk dalam mempelajari ilmu dokumentasi. Dalam berpikir untuk memahami sesuatu, saya memakai pendekatan “tiga kata pertanyaan”, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Untuk itu, saya bertolak dari perjalanan sejarah dokumentasi kita, baik internasional maupun nasional. Menelusuri kembali peristiwa yang pernah terjadi dengan dokumentasi. Sebagai hasil penelusuran, buku ini baru membahas “apa” dan “mengapa” ilmu dokumentasi. Pembahasan tentang “bagaimana” adalah pembelajaran tentang ilmu dokumentasi itu sendiri. Dengan kata lain, buku ini baru mengantar pembaca ke gerbang ilmu dokumentasi.

Upaya mencari, merenungkan, dan merumuskan logika ini ternyata memerlukan waktu cukup lama. Hambatan utama adalah belum ditemukannya referensi yang dapat digunakan untuk mendukung pemikiran saya. Selain itu, sebagai praktisi saya mengalami kegalauan antara perpustakaan dan dokumentasi, yaitu antara memikirkan konsep kepastakawanan dan konsep dokumentasi, antara falsafah kepastakawanan dan logika dokumentasi. Selanjutnya, saya justru merencanakan menyampaikan pidato dalam rangka mengakhiri tugas

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan materi filsafat kesetiaan. Judul pidato yang semula saya rencanakan adalah “Kesetiaan Pustakawan”. Namun, otoritas kedinasan meminta saya menyampaikan materi tentang dokumentasi. Akhirnya, saya menyampaikan pidato pamit pada 28 Februari 2013 dengan judul “Memaknai Dokumentasi”.

Sebagai kelanjutan pidato tersebut, saya menjanjikan untuk segera menyelesaikan buku *Logika Dokumentasi*. Saya kembali mulai menelusuri referensi yang saya perlukan. Sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya terjadi. Dari penelusuran literatur yang saya lakukan, ternyata ilmu dokumentasi berkembang sangat cepat dengan munculnya gerakan dokumentalis baru (*neo-documentalist movement*). Buku yang saya anggap tinggal finalisasi harus saya rombak total. Banyak perkembangan ilmu dokumentasi yang belum pernah saya ketahui. Sejak berkenalan dengan dokumentasi, saya sudah akrab dengan nama Paul Otlet dan Henri La Fontaine, sebagai Bapak Dokumentasi. Hanya saja, saya belum pernah benar-benar menekuni karya mereka karena kebanyakan karya mereka berbahasa Prancis. Mengenai kelahiran dokumentasi di Eropa selengkapnya akan disampaikan dalam Bab III.

Di Amerika Serikat, konsep dokumentasi yang lahir di Eropa juga kurang mendapat perhatian pada awal kelahirannya—sampai saat Michael Keeble Buckland menyadari hal tersebut (Buckland & Lund, 2013). Kesadaran itu bermula dari keheranan Buckland atas bangkai burung yang disimpan di Museum Zoologi di kampus Berkeley pada 1987. Dia berpendapat bahwa fungsi kumpulan bangkai burung itu setara dengan fungsi koleksi buku di perpustakaan. Hanya saja dia belum menemukan referensi sebagai pendukung “teori”-nya itu. Barulah pada 1988, dari Warden Boyd Rayward, Buckland menerima sebuah pamflet tulisan Suzanne Briet berjudul *Qu'est-ce que la documentation?* (Apakah dokumentasi itu?). Dokumen itulah yang memberi Buckland

pencerahan bahwa “dokumen” juga bisa berwujud hewan, baik hidup maupun sudah mati.

Gerakan dokumentasi yang dicetuskan Paul Otlet dan Henri La Fontaine secara resmi pada 1895 memang tidak banyak dikenal di Amerika Serikat. Di Amerika, fungsi sejenis dokumentasi memang dilakukan oleh kelompok perpustakaan khusus dan pustakawan khusus. Barulah setelah Buckland melakukan gerakan pembelajaran kembali karya tulis tentang dokumentasi oleh dokumentalis Eropa, muncul gairah belajar yang lebih terarah dan kuat. Gerakan itu tidak hanya di kampus, tetapi juga melalui organisasi profesional, dalam hal ini American Society for Information Science and Technology (ASIS&T). Karya para pendahulu gerakan dokumentasi di Eropa banyak dipelajari dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dari terjemahan itu, saya belajar mengenai lahirnya dokumentasi.

Buckland mulai mempelajari konsep dokumentasi yang lahir di Eropa karena membaca tulisan Suzanne Briet yang juga dikenal sebagai *Lady of Documentation*. Teori yang disampaikan Buckland tentang koleksi bangkai burung pada 1987 ternyata sudah dipikirkan Briet pada 1951, hampir empat puluh tahun sebelumnya. Ini yang membuat Buckland sadar perlu mempelajari sejarah dan bukan selalu mengikuti paham *Fordism*. Kesadaran Buckland ini juga karena jasa Rayward memberikan pamflet Briet kepadanya. Semula, Warden Boyd Rayward, pada 1968 meneliti sisa kejayaan Paul Otlet di Belgia dan menjadikannya sebuah disertasi. Penelitian Rayward seakan membangkitkan kembali peran Paul Otlet dari kubur yang tidak terawat di Mundaneum, Belgia. Paul Otlet yang sudah terlupakan itu sekarang diakui dunia sebagai Bapak Internet (Wright, 2014).

Pada 1996, Niels Windfeld Lund membuka studi dokumentasi dengan pendekatan baru di Universitas Tromso, Norwegia. Lund menjadi pelopor kembalinya ilmu dokumentasi. Pada awalnya ide Lund ditolak karena dokumentasi itu dianggap sudah kuno. Pendapat

ini memang biasa diucapkan dan didengar, termasuk di Indonesia. Dukungan dari Rayward dan Buckland mengukuhkan niat Lund. Bersama Buckland, Lund membangun Document Academy yang merupakan kerja sama antara Kampus Berkeley dan Tromso. Akademi ini mengadakan pertemuan tahunan secara bergiliran sejak 2003 di Berkeley dan Tromso. Kini Document Academy Meeting (DOCAM) menjadi pertemuan internasional tahunan yang rutin digelar. Dalam DOCAM, disampaikan hasil studi dan teori baru tentang ilmu dokumentasi. DOCAM merupakan wadah gerakan dokumentalis baru. Gerakan baru ini dipelopori oleh Rayward, Buckland, dan Lund. Gerakan ini merupakan realisasi opini yang disampaikan Rayward dan Buckland kepada Lund (Buckland & Lund, 2013) “... *You have history with you and together we represent the neo-documentalist movement.*”

Selanjutnya, muncul pemikir-pemikir lain, seperti Joacim Hansson, E.A. Pleshkevich, dan Maurizio Ferraris. Masih banyak pihak dari berbagai disiplin keilmuan lain yang tertarik mempelajari dan memikirkan ilmu dokumentasi baru. Uraian mengenai gerakan dokumentalis baru disampaikan dalam Bab VI. Sebelumnya, ada baiknya kita pelajari bersama tentang kenyataan bahwa dokumentasi itu memang pernah terlupakan. Uraian mengenai dokumentasi yang terlupakan selengkapnya disampaikan dalam Bab V.

Gerakan dokumentalis baru telah melahirkan ilmu yang meletakkan dokumen sebagai objek dan fokus studi. Dokumen dilihat secara multidisiplin. Dokumen tidak hanya terbatas pada benda dua dimensi yang mati, tetapi juga dapat berwujud tiga dimensi, baik mati maupun hidup. Dalam era digital ini, mungkin lebih banyak dokumen berbentuk digital atau maya, baik terlahir digital maupun yang dijadikan digital. Dokumen dapat dilihat dari segala arah atau 360° sehingga begitu banyak studi dokumen dimungkinkan. Tentu dalam terbitan ini belum dapat disampaikan secara lengkap semua titik pandang tersebut. Namun, paling tidak, dapat disampaikan

upaya menjawab pertanyaan apa dokumen itu dan mengapa ada dokumen. Selain itu, untuk melihat fungsi utama dokumen serta karakternya. Uraian mengenai dokumen dalam buku ini diberi judul “Fokus pada Dokumen”, disampaikan pada Bab VII.

Telah disebutkan sebelumnya, ada kontradiksi antara dokumentasi dan perpustakaan. Bagaimana relasi dengan lembaga lainnya, seperti dengan lembaga kearsipan—yang sering disebut lembaga arsip saja? Dua lembaga ini (perpustakaan dan arsip) mempunyai kesamaan fungsi. Dua lembaga tersebut sama-sama mengelola koleksi. Jika perpustakaan mengelola koleksi pustaka atau buku, lembaga arsip mengelola arsip. Lembaga lain yang juga memiliki fungsi mengelola koleksi, misalnya museum yang mengelola koleksi artefak, herbarium yang mengelola koleksi spesimen tanaman, kebun raya yang mengelola tanaman hidup, kebun binatang yang mengelola hewan hidup, dan masih banyak yang lain. Semua koleksi tersebut pada dasarnya adalah dokumen.

Khusus tentang perpustakaan, arsip, dan museum (*libraries, archives, and museums* (LAM), dunia internasional telah mencanangkan gerakan konvergensi tiga lembaga tersebut. Kanada, pada 2004, mulai menggabungkan National Library of Canada (NLC) dengan National Archives of Canada (NAC) menjadi National Library and Archives of Canada (NLAC). Pemikiran konvergensi di Amerika Serikat juga diawali sekitar masa itu. Pada 19 Juli 2005, Rare Books and Manuscripts Section (RBMS) dari Association of College and Research Libraries (ACRL), salah satu divisi American Library Association (ALA), menerima dana dari Institute of Museum and Library Services (IMLS) untuk melakukan kegiatan penelitian misi budaya dari perpustakaan, arsip, dan museum guna menguatkan komunikasi dan kolaborasi ketiga lembaga tersebut.

Di pihak akademisi, Rayward telah melontarkan prospek *digital convergence* pada lembaga informasi, seperti perpustakaan, arsip, dan

museum. Rayward mengangkat wacana tentang informasi elektronik dan kemungkinan integrasi fungsi perpustakaan, arsip, dan museum (Marty, 2014). Menurut Marty, Rayward adalah akademisi pertama yang mengemukakan konvergensi ini. Hal itu bertolak dari artikel Rayward pada 1996 berjudul “Libraries, Museums and Archives in the Digital Future: The Blurring of Institutional Distinctions” yang disampaikan dalam *Second National Preservation Conference* di Canberra yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Australia. Dengan teori dan ketajaman analisisnya, kaum akademisi sudah terlebih dulu memikirkan kemungkinan yang kiranya terjadi mendahului pemikiran para praktisi. Interaksi akademisi dan praktisi perlu diwadahi dalam semacam *scientific colloquium* (kolokium keilmuan).

Jika dunia internasional sudah mewujudkan konvergensi antar-pengelola dokumen, tentu dapat kita pertanyakan bagaimana Indonesia merespons perkembangan tersebut. Konvergensi ini sepertinya masih membutuhkan waktu yang relatif lama. Saat ini, baik perpustakaan, arsip, maupun museum di Indonesia masih dikelola secara sendiri-sendiri, dan belum ada kerja sama untuk menuju konvergensi. Harus ditekankan di sini bahwa konvergensi tidak harus berarti penyatuan organisasi. Konvergensi lebih melihat pada dokumen, dalam hal ini pustaka, arsip, dan artefak sebagai pembawa informasi dan pengetahuan. Konvergensi yang dimaksud adalah dalam menyediakan akses terhadap dokumen tersebut.

Fokus konvergensi tersebut adalah pada dokumen. Pemahaman *theory of documentality* atau dokumentalitas menjadi akselerator konvergensi lembaga dokumenter (perpustakaan, arsip, dan museum). Dengan memahami dan menggunakan konsep dokumen menurut ilmu dokumentasi baru, menerima dan mewujudkan konvergensi menjadi lebih mudah. Dapat dikatakan bahwa konvergensi lembaga dokumenter mensyaratkan penguasaan ilmu dokumentasi. Saya berpendapat bahwa ilmu dokumentasi menjadi ilmu murni yang

diperlukan dalam mengelola lembaga dokumenter. Situasinya seperti ilmu matematika yang diperlukan oleh ilmu fisika. Mempelajari ilmu dokumentasi menjadi keharusan untuk dapat mengelola lembaga dokumentasi. Uraian tentang konvergensi lembaga dokumenter disampaikan pada Bab VIII.

Dengan munculnya tren konvergensi lembaga-lembaga dokumentasi, ilmu dokumentasi baru menjadi pendekatan yang tepat untuk dapat memahami konvergensi tersebut. Dengan memahami dan menghayati ilmu dokumentasi baru, konsep konvergensi menjadi lebih mudah diterima. Bahkan tanpa tujuan konvergensi saja, pemahaman dan penghayatan ilmu dokumentasi baru akan menjadi roh penggerak lembaga dokumenter. Bagaimana pemahaman dan penghayatan itu dapat dicapai? Inilah hal yang perlu dicari jawabannya. Saya berpendapat perlu ada metode logis dalam menerima dan menjabarkan konsep dokumentasi. Inilah yang saya maksudkan dengan logika dokumentasi. Hal yang saya sampaikan dalam buku ini sudah banyak mengalami perbaikan dari versi lama yang pernah saya sampaikan dalam pidato saya pada 28 Februari 2013. Namun, seperti yang pernah saya nyatakan pada 1992, "... Pada awal mula adalah kehendak manusia untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan atau dirasakannya." Hal itu masih tetap berlaku dan dapat digunakan dalam memaknai dokumentasi baru sampai pada teori dokumentalitasnya. Uraian yang menjadi inti pemikiran saya ini saya sampaikan pada Bab IX.

Untuk melengkapi Bab IX, saya menyampaikan perkembangan pemikiran saya dalam bentuk rangkaian diagram. Rangkaian diagram itu disampaikan dalam Bab X. Titik awal pemikiran adalah adanya kontradiksi antara perpustakaan dan dokumentasi. Ide dasar merumuskan logika dokumentasi sebetulnya sederhana saja, yaitu untuk meyakinkan sejawat pustakawan bahwa dokumentasi tidak hanya terbatas dokumentasi pustaka. Konsep umum dokumentasi

menjadi sangat penting untuk dipahami dan dihayati. Konsep inilah yang selayaknya digunakan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan dokumentasi pustaka. Dalam lingkup perpustakaan, kegiatan dokumentasi biasanya diartikan sebagai pembuatan indeks, pembuatan intisari karangan atau abstrak, penyusunan bibliografi, dan penelusuran literatur dalam rangka layanan informasi ilmiah. Oleh karena itu, dalam diagram pemikiran saya juga terasa pengaruh teknis perpustakaan. Tentu rangkaian diagram tersebut masih memerlukan penajaman sehubungan perkembangan ilmu dokumentasi baru yang sedemikian luas cakupannya.

Dalam menelusuri jejak langkah ilmu dokumentasi di Indonesia, saya menemukan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 20 anggota The International Federation for Information and Documentation (FID) yang selalu ikut dalam pertemuan tahunan (Briet, 1951). Keanggotaan Indonesia pada waktu itu memang diwakili oleh Organization for Scientific Research (OSR), yaitu organisasi non-pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia lalu membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) pada 1956. Salah satu sasaran awal kerja MIPI adalah menjadikan MIPI sebagai salah satu pusat dokumentasi dan penerangan di bidang ilmu pengetahuan di Indonesia. MIPI berhasil membangun Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) pada 1965. OSR selanjutnya dilebur dalam MIPI. Dengan sendirinya, keanggotaan RI untuk FID diwakili oleh MIPI, yang dalam hal ini adalah PDIN. Kegiatan dokumentasi di Indonesia pada periode 1950–1965 menjadi menarik untuk diteliti.

Mengapa ilmu dokumentasi menjadi terlupakan di Indonesia? Hal itu menarik untuk ditemukan jawabannya. Dari mana atau siapa pemikir konsep dokumentasi dalam Undang-Undang Pembentukan MIPI, yang secara eksplisit menyatakan "... mendaftar kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berada di Indonesia". Mengapa konsep dokumentasi

tersebut tidak dijabarkan? Bagaimanakah pemahaman para anggota panitia persiapan pembentukan PDIN tentang ilmu dokumentasi? Wajar jika panitia persiapan pembentukan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961. Namun, saya mempertanyakan pemahaman para anggota panitia yang mempersiapkan Peraturan Presiden 1961 tentang Ilmu Dokumentasi.

Dokumentasi memang pernah terlupakan, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Kebangkitan kembali minat meneliti dan mempelajari konsep dokumentasi Eropa di Amerika Serikat muncul kembali sejak 1988. Dunia internasional baru pada 2003 kembali menegaskannya dengan gerakan dokumentasi baru. Apakah ilmu dokumentasi juga akan dibangkitkan kembali di Indonesia? Saya berpendapat “HARUS”. Ilmu dokumentasi yang kini menjadikan dokumen adalah pusatnya dan dipelajari dari berbagai aspek secara komprehensif, akan menjadi ilmu murni bagi lembaga dokumenter. Lembaga dokumenter adalah perpustakaan, lembaga arsip, museum, galeri, monumen, dan situs. Konsep konvergensi sudah menjadi tren dunia saat ini. Apakah kita akan lebih tertinggal dalam peredaran internasional?

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai referensi yang mengajarkan teori umum atau teknis dokumentasi. Buku ini mengajak pembaca untuk kembali mempelajari, memahami, dan mengembangkan ilmu dokumentasi baru. Dalam buku ini, saya menceritakan perjalanan panjang saya dalam upaya menemukan makna dokumentasi. Bercerita tentang luasnya cakupan ilmu dokumentasi baru serta menyampaikan angan-angan saya tentang kembalinya ilmu dokumentasi di Indonesia. Perlu saya ceritakan tentang pemaknaan yang saya sebut sebagai “Logika Dokumentasi”. Saya mengharapkan ada pihak yang mau menyempurnakan konsep atau pemikiran umum tentang dokumentasi. Semoga buku ini dapat menjadi prolog kembalinya ilmu

dokumentasi baru di Indonesia secara konseptual dan tidak sekadar teknis dan teknologis saja.

Bab XI dalam buku ini menyampaikan bibliografi kronologis literatur asing tentang dokumentasi. Bibliografi ini kiranya dapat menjadi titik tolak bagi siapa saja yang berminat mempelajari ulang dokumentasi. Upaya saya mencari dan menyusun referensi asing kiranya dapat digunakan oleh siapa saja yang tertarik dengan ilmu dokumentasi. Dapat dipastikan bahwa bibliografi ini belum lengkap. Upaya menyempurnakannya dari siapa pun tentu sangat dinanti. Namun yang pasti, menjadi tugas kita bersama untuk menyusun bibliografi sejenis tentang literatur Indonesia sendiri. Perlu saya ulangi dan garis bawahi pendapat Buckland tentang dokumen “Dari dokumen-lah kita belajar”. Jadi, jika kita ingin belajar, kita harus memahami dokumen. Oleh karena itu, ilmu dokumentasi adalah keniscayaan.

Pendapat ini memang belum menjadi pendapat umum. Agar masyarakat memahaminya, tentu harus ada upaya advokasi. Upaya advokasi akan lebih mengenai sasaran jika persepsi masyarakat luas tentang arti dan makna dokumentasi diketahui. Idealnya memang harus dilakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Namun, hal itu belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam Bab II disampaikan pengamatan permukaan atas persepsi masyarakat tentang dokumentasi.



BAB II BERBAGAI PERSEPSI TENTANG DOKUMENTASI

Memaknai terminologi dokumentasi dapat dimulai dengan menyimak persepsi masyarakat mengenai istilah tersebut. Bagaimana masyarakat memahami dan menggunakan istilah dokumentasi perlu diidentifikasi dan dihimpun. Hasil identifikasi ini akan memberi pedoman bagi langkah merumuskan pengetahuan tentang dokumentasi. Idealnya, dilakukan penelitian mendalam mengenai persepsi ini. Sayangnya, kesempatan meneliti dengan metode yang sah belum diperoleh. Hanya saja, dari berbagai kejadian, muncul informasi menarik terkait persepsi tersebut. Memang pernah dilakukan wawancara singkat terhadap para manajer dan pustakawan dari sebuah lembaga ilmiah. Selain itu, dicari pemaknaan dokumentasi dari sumber formal. Hasil dari berbagai kejadian itulah yang dilaporkan dalam bab ini. Namun sebelum menyampaikan uraian hasil wawancara itu, ada baiknya simak terlebih dulu kejadian berikut.

Ada hal berbeda dalam pesta pernikahan putra seorang sejawat pustakawan. Perbedaan muncul saat pembawa acara mengundang salah satu tamu kehormatan untuk maju ke pelaminan guna diabadikan dalam foto bersama pengantin. Bukan kata “diabadikan”, juga bukan kata “foto” atau “diambil gambarnya”, namun yang dipilih adalah kata “didokumentasikan”. Tidak diketahui secara pasti, apakah

pilihan kata itu suatu kesengajaan. Mengapa kata itu yang dipilih? Namun faktanya, kata “didokumentasikan” digunakan untuk padanan kata “difoto” atau “diabadikan” atau “diambil gambarnya”.

Pada kenyataannya, kata “dokumentasi” sering digunakan untuk hal-hal lainnya. Lembaga formal tidak jarang memiliki unit kerja yang disebut unit dokumentasi. Ada lembaga lain yang menyatukannya dengan fungsi perpustakaan sehingga menjadi unit dokumentasi dan perpustakaan. Bahkan, di kalangan pustakawan sering menggunakan akronim “pusdokinfo” dengan menggabungkan fungsi perpustakaan, dokumentasi, dan layanan informasi. Makna tiga kata itu sepertinya tidak disadari perbedaannya. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana sebenarnya kata dokumentasi itu digunakan dan dimaknai. Idealnya memang harus diadakan penelitian mendasar atas pemahaman dan pemaknaan masyarakat atas kata dokumentasi. Namun, saya belum berhasil menemukan penelitian seperti itu. Adakah pribadi atau pihak yang berminat meneliti permasalahan tersebut?

Meskipun bukan penelitian mendalam dan sudah lama sekali dilakukan (2003), pernah dilakukan wawancara singkat kepada sekitar 30 manajer di suatu lembaga ilmiah. Waktu itu, lembaga tersebut merencanakan menyusun kebijakan dokumentasi. Untuk tujuan penyusunan kebijakan, saya hanya ingin mengetahui tiga hal: 1) pemahaman; 2) pandangan; dan 3) harapan para manajer atas dokumentasi. Hasil wawancara itu mungkin sudah tidak relevan lagi, namun saya tidak menemukan penelitian yang lebih baru. Temuan itu tetap saya sampaikan, paling tidak, dapat menjadi indikator guna menyusun dugaan untuk masa depan. Begitu beragam pemahaman para manajer tentang makna dokumentasi. Namun, yang dapat segera diduga adalah bahwa pengetahuan tentang dokumentasi yang konseptual memang bukan perhatian mereka. Hal itu dapat dipahami karena kebanyakan kegiatan—yang mereka sebut sebagai kegiatan

dokumentasi—dilakukan dengan asumsi bahwa semua orang juga dapat melakukannya.

A. PERSEPSI, VISI, DAN EKSPEKTASI MANAJER

Umumnya, kalangan manajer memahami bahwa dokumentasi tidak hanya terbatas pada dokumentasi literatur. Hanya sebagian kecil saja yang menganggap dokumentasi adalah perpustakaan. Beberapa dari mereka baru menyadari betapa pentingnya permasalahan dokumentasi. Para manajer tersebut membutuhkan dokumentasi, tetapi tidak mengetahui cara yang terbaik dan cocok untuk unit kerja mereka. Pemahaman mereka atas kata “dokumentasi” beragam dan belum mengarah pada suatu konsep yang jelas. Mereka masih berpikir secara sektoral dan belum ada pemahaman tunggal tentang dokumentasi. Ada pula yang belum melaksanakan. Kalaupun dilaksanakan juga masih seadanya. Para manajer itu mengatakan kesadaran tentang pentingnya dokumentasi belum ada karena belum pernah diberikan ilmu tentang dokumentasi dengan benar.

Bahkan, ada juga yang tidak mengetahui apa tepatnya definisi dokumentasi meski mengatakan bahwa dokumentasi terkait dengan perpustakaan. Namun, ada juga yang berpendapat objek dokumentasi bukan hanya buku saja. Mereka menyebutkan objek dokumentasi, misalnya data, dokumen administrasi, berbagai macam kegiatan—termasuk yang mereka sebut dokumentasi *human activities* yang menurut mereka jarang didokumentasikan. Ada yang mengatakan bahwa dokumentasi adalah sistem penyimpan berbagai macam kegiatan. Dikatakan bahwa dokumentasi meliputi seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dari segi manajemen penting sekali. Sistem dokumentasi yang disusun secara baik harus digunakan sebagai acuan untuk siapa pun yang berada di situ dan melangkah ke masa yang

akan datang. Pemahaman progresif dikatakan seorang manajer yang berpendapat bahwa penerapan *knowledge management* berawal dari penerapan dokumentasi yang benar.

Pandangan atau visi para manajer tentang dokumentasi itu menarik untuk disimak. Pada dasarnya, mereka mengharapkan sistem dokumentasi yang dapat mendukung pekerjaan, termasuk dalam manajemen dan menggerakkan organisasi. Hal ini tecermin dari jawaban di bawah ini:

- 1) Kalau menurut saya sudah bagian dari sistem manajemen modern.
- 2) Masalah dokumentasi ini memang kelihatannya bagi kami memegang peranan penting dalam menjalankan organisasi.
- 3) Saya sangat berkepentingan dengan bentuk pendokumentasian karena menyangkut kebijakan, menyangkut instruksi tertulis, lisan, dan diskusi yang rata-rata tidak terdokumentasi.
- 4) Di dalam organisasi apa pun yang dilaksanakan oleh unit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi harus terdokumentasi.
- 5) Organisasi perlu diluruskan. Surat-menyurat terdokumentasi dengan memakai prosedur tetap.
- 6) Harus ada kebijakan intern dalam suatu lembaga.
- 7) Bangsa kita bangsa jelek dalam dokumentasi. Hampir semua kita, termasuk saya mungkin, itu saja kita tidak terbiasa menyimpan seluruh dokumentasi dengan baik.

Jawaban atas pertanyaan tentang harapan mereka untuk dokumentasi adalah perlunya kepemimpinan dalam lembaga yang melaksanakan fungsi dokumentasi. Mereka menyadari bahwa kebanyakan belum memahami secara benar proses dan cara-cara dokumentasi yang sesuai dengan unit kerja mereka. Ditekankan bahwa dokumentasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada dokumentasi literatur. Umumnya, mereka menghadapi kendala dalam tenaga pelaksanaanya.

Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan di bidang dokumentasi dalam arti luas sangat diharapkan. Kebijakan lembaga hendaknya diputuskan dengan mempertimbangkan tingkat penerapannya yang riil. Sistem dokumentasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas mereka.

B. PERSEPSI PUSTAKAWAN

Persepsi atau pemahaman kata dokumentasi pernah juga sepintas dikumpulkan dari kalangan pustakawan. Dalam grup diskusi di dunia maya dilontarkan pertanyaan “Apa yang ada dalam benak Anda apabila mendengar kata dokumentasi?” Berikut adalah sebagian jawaban mereka.

- 1) Kegiatan mengemas informasi dengan menggunakan kaidah/metode tertentu sehingga menjadi sumber-sumber informasi.
- 2) Tulisan, gambar, atau suara yang disimpan sebagai bahan untuk mengingat, untuk diacu, dan untuk bahan bukti.
- 3) Informasi terekam dalam berbagai bentuk, baik tercetak maupun tidak tercetak (bahan bukan buku), yang dihasilkan oleh individu ataupun lembaga.
- 4) Berubah fungsi menjadi arsip dan perlu dipertahankan oleh individu atau lembaga apabila dibutuhkan untuk pembuktian, akuntabilitas, dan informasi lebih khusus.
- 5) Berkaitan dengan suatu aktivitas atau kegiatan, seperti foto, dan lain-lain.
- 6) Dokumentasi lebih cenderung pada pengertian kegiatan itu sendiri.
- 7) Dokumentasi adalah arsip/*archives*.
- 8) Sistem untuk repositori luaran suatu organisasi secara sistematis sehingga semua dokumen (*print* dan *e-format*) dapat terkumpulkan, terakses setiap saat baik oleh internal maupun pengguna

- ekternal (*dissemination*). Datanya dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai (*assessment*) kinerja organisasi.
- 9) Bukan ilmu, tetapi proses/kegiatan untuk mendokumentasikan kegiatan atau peristiwa dalam bentuk media apa pun yang bisa dijangkau dan dimengerti manusia secara simbolik
 - 10) Hasil kodifikasi dalam berbagai bentuk media.
 - 11) Aktivitas yang menangani/mengelola dokumen.
 - 12) 1) mengambil foto/rekaman video kegiatan, 2) mencatat dokumen/buku yang kita punya.
 - 13) Benda yang menyimpan berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, bisa berupa fosil purbakala, manuskrip yang bernilai sejarah, rekaman informasi dalam bentuk cetak, audio visual, disket, CD, dan lain-lain.
 - 14) Segala sesuatu yang tercatat, apa pun bentuk catatan tersebut, bisa dalam bentuk cetak ataupun digital.
 - 15) Rekaman tercetak (tertulis atau gambar) dari suatu peristiwa.
 - 16) Hasil rekaman dari suatu acara/peristiwa.
 - 17) Sistem penyimpanan dokumen (informasi) yang tertata (terorganisasi).
 - 18) Kumpulan informasi, baik tercetak maupun terekam, yang disimpan agar jika dibutuhkan sewaktu-waktu dapat dilihat lagi.
 - 19) Penulisan dari suatu aktivitas. Penulisan dalam ruang lingkup yang luas, bisa dalam bentuk tertulis, terketik, terfoto, dan seterusnya.
 - 20) Misalnya, saya membuat program basis data/pangkalan data untuk perpustakaan maka bentuk nyata dari dokumentasi adalah manual untuk memakai program, penjelasan dari kode-kode program, dan kegiatan yang saya lakukan selama saya membuat program.
 - 21) Seksi dokumentasi di kepanitiaan yang mengurus foto-foto kegiatan selama acara berlangsung.

- 22) Kegiatan penyimpanan dan penataan dokumen perusahaan untuk digunakan kembali.
- 23) Proses pembuatan dan penyusunan berkas-berkas (dokumen), kegiatan membuat, mengumpulkan, dan menyusun hasil suatu peristiwa.
- 24) Proses pendataan dari berbagai gejala yang ada berbentuk arsip, baik fisik maupun digital.
- 25) Bisa diasosiasikan sebagai dokumen foto atau bagian dari kepantinaan yang biasanya bertugas memotret (sie dokumentasi), tetapi bisa juga diasosiasikan sebagai satu atau beberapa buah dokumen yang sudah tersusun.
- 26) Semua amatan tentang objek, baik *image* diam (tercetak) maupun *image* yang bergerak, termasuk hasil rekamannya dari suatu kegiatan manusia.
- 27) Kegiatan mengelola informasi sedemikian rupa sehingga jika suatu waktu diperlukan dapat mendapatkan informasi yang dimaksud dengan cepat dan tepat serta dapat memperlancar kegiatan badan induk yang menaunginya.
- 28) Jika saya pertama kali mendengar kata dokumentasi—mungkin karena sudah terbiasa dengan apa yang terekam di alam bawah sadar saya—yang terpikir adalah yang berkaitan dengan foto-foto. Sejak kecil (SD atau SMP) kita tahu bahwa dalam setiap acara (gereja atau Agustusan, atau lainnya) selalu ada Seksi Dokumentasi. Seksi ini selalu berkaitan dengan urusan foto-foto.
- 29) Rekaman peristiwa atau hal lain dalam berbagai bentuk.
- 30) Catatan lengkap/detail mengenai sebuah proses atau kegiatan.
- 31) Menyimpan suatu informasi (dalam bentuk apa pun) yang bukan milik umum atau informasi yang diperlukan suatu badan. Sifatnya biasanya rahasia, walaupun tidak rahasia, tidak untuk dipamerkan dan biasanya informasi ini berharga mahal, tergantung yang membutuhkannya.

32) Dokumentasi adalah salah satu bagian atau departemen dalam suatu organisasi kantor atau suatu organisasi kegiatan yang bertugas mengumpulkan bahan (tulisan/gambar, cetakan/elektronik) yang berkaitan dengan tugas atau kegiatan organisasi tersebut.

Beragam jawaban tersebut menunjukkan bahwa mayoritas jawaban merujuk pada dokumentasi sebagai proses atau kegiatan. Secara lebih khusus, dokumentasi adalah proses merekam objek, baik berupa objek audio, objek video, maupun objek audio-visual. Kelompok kedua adalah mereka yang mengatakan dokumentasi sebagai hasil dari proses atau kegiatan dokumentasi. Selanjutnya, pihak yang mengatakan dokumentasi adalah kumpulan atau himpunan hasil proses atau kegiatan dokumentasi. Terakhir adalah pihak yang mengatakan dokumentasi sebagai lembaga atau unit kerja yang melakukan proses dokumentasi.

C. PENGGUNAAN KATA DOKUMENTASI DI INTERNET

Bagaimana kata “dokumentasi” digunakan saat ini? Jika uraian terdahulu melaporkan persepsi atas kata “dokumentasi”, diinginkan juga gambaran bagaimana kata tersebut digunakan dalam jaringan maya. Untuk menjawabnya, perlu diamati pemakaian kata dokumentasi di media internet. Telah dilakukan penelusuran di internet pada Maret 2013. Berikut adalah beberapa contoh temuan yang diperoleh dari penelusuran di internet menggunakan mesin pencari Google dengan memakai kata kunci “dokumen” dan “dokumentasi”. Tujuan pencarian di internet ini untuk memberi gambaran atas penggunaan dua kata tersebut dalam keseharian hidup kita dalam dunia maya. Hal itu juga dapat mencerminkan pemaknaan kata dokumentasi. Telah

ditemukan banyak sekali kata “dokumentasi” maupun kata dasarnya “dokumen”. Semua temuan tersebut dipilah dan dipilih agar tidak banyak duplikasi yang tidak perlu. Berikut gambaran semesta kata dokumen dan dokumentasi. Di sini sengaja saya tidak merangkum temuan tersebut dengan tujuan agar keanekaragaman penggunaan kata “dokumen” dan ”dokumentasi” dilihat apa adanya seperti tercantum di Internet.

1. Dokumen

- a. Dokumen merupakan salah satu hal yang sangat penting karena merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi, atau negara. Tanpa dokumen, kita akan kehilangan data-data yang diperlukan untuk kegiatan kantor/organisasi masa yang akan datang. (<http://yurikeriestia.blogspot.co.id/2012/06/prngertian-dokumen-dan-dokumentasi.html>)
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas dari manfaat dan kegunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif. (<https://adzelgar.wordpress.com/2009/02/02/studi-dokumen-dalam-penelitian-kualitatif/>)
- c. Pesanan legalisasi dokumen akademik dilakukan secara online melalui aplikasi Layanan Dokumen Akademik Universitas Indonesia. (https://www.researchgate.net/publication/50389266_FUNGSI_DOKUMEN_ELEKTRONIK_DALAM_PROSES_PEMERIKSAAN_PERKARA_PIDANA_STUDI_DI_PENGADILAN_NEGERI_KOTA_MALANG.)
- d. Komisi Eropa ingin mempermudah pengakuan dokumen-dokumen pribadi antarnegara anggota Uni Eropa. (http://catatanelfrida.blogspot.co.id/2015_09_01_archive.html)
- e. Fungsi Dokumen Asuhan Keperawatan dalam Melindungi Profesi Perawat. (<http://forum.cacaoweb.org/index.php/topic,346101>)

- f. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. (www.hukumperseroanterbatas.com/dokumen-perusahaan/dokumen-perusahaan/)
- g. Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda bersejarah (dokumen ini dikumpulkan di museum). (<http://danang-leo-handoko.blogspot.co.id/2012/09/mengidentifikasi-dokumen-dokumen-kantor.html>)
- h. Pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan dokumen dengan menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik secara terpadu, dapat dimulai dengan menyiapkan beberapa perangkat keras, jaringan koneksi lokal dan memahami cara pengelolaan manual dokumen fisik yang selama ini dilakukan. (<http://sistemmanajemendokumenelektronik.blogspot.co.id/>)
- i. Istilah perpustakaan digital digunakan untuk pertama kali dalam bidang pendigitalan dokumen dan pembangunan sistem untuk dokumen digital. (www.stikes-sismadi.ac.id/2012/12/elibrary.html)

2. Dokumentasi

- a. Dokumentasi adalah materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem (termasuk pokok bahasan-pokok bahasan yang harus dikuasai oleh pemakai). (<http://andrelestat-various.blogspot.co.id/2010/05/menyiapkan-dokumen.html>)
- b. Sambil mengerjakan proyek ini, sebuah Dokumentasi Teknik disusun. Dokumentasi teknik tersebut memuat semua informasi

- yang menyangkut aspek-aspek instalasi dan teknik. (<http://nusantara.dl.uni-leipzig.de/content/below/documentation.xml>)
- c. Linux mempunyai dokumentasi yang sangat komprehensif untuk mendukung setiap program yang diberikan. (<https://www.scribd.com/doc/41344417/Buku-Panduan-Linux-Lengkap>)
 - d. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam analisis, desain dan dokumentasi sistem serta memahami kaitan antarsub-sistem. (<https://fajarseptiansyah.wordpress.com/2012/12/11/teknik-dan-dokumentasi-sistem-informasi-akuntansi/>)
 - e. Dokumentasi keperawatan merupakan tindakan mencatat setiap data yang didapat oleh perawat dalam sebuah dokumen yang sistematis. (<https://www.scribd.com/document/112837529/APLIKASI-DOKUMENTASI-KEPERAWATAN>)
 - f. Jadi bisa disimpulkan dokumentasi yang baik dari sebuah acara itu penting. (<http://fotokita.net/blog/2011/11/tips-foto-dokumentasi-event-dengan-cara-berbeda/>)
 - g. Beberapa hari lalu saya diberi link video tentang dokumentasi tur band metalcore indie asal Bandung yang lagunya udah lama ngga gue denger sejak SMA. (<http://blackenzeru.blogspot.co.id/2012/12/an-oath-of-allegiance-dokumentasi.html>)
 - h. Jadi memang sudah lama sekali tidak ada catatan perjalanan, yang biasanya suka kutulis sebagai dokumentasi sendiri. (<https://zulliesikawati.wordpress.com/category/aktivitas/page/2/>)
 - i. Bab ini mengajarkan Anda untuk mempersiapkan dokumentasi untuk menggambarkan aspek dari suatu sistem informasi. (<https://www.scribd.com/doc/315162102/Memahami-Situasi-Si>).
 - j. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah melalui Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi. (http://litbang1.rssing.com/chan-9480422/all_p1.html)

D. ARTI KATA DOKUMENTASI DARI SUMBER FORMAL

Menutup bagian ini, disampaikan arti kata dokumentasi menurut apa yang pernah ditulis tentang kata itu. Sebelum menelaah lebih lanjut permasalahan dokumentasi, perlu dipahami benar arti kata tersebut. Hal ini dilakukan mengingat ada pernyataan bijak tentang pentingnya memahami arti suatu kata.

- 1) Kita harus mempelajari arti kata.
- 2) Gunakan hanya kata yang benar-benar kita pahami artinya.
- 3) Teruslah mempelajari dan memahami kata-kata baru sehingga kesadaran kita secara terus-menerus berkembang.

Arti kata dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, 338) adalah:

- 1) Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan.
- 2) Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English mengartikan *documentation* dengan dua hal, yaitu "*documenting* atau *being documented*", dan "*documents provided as evidence or proof of something*" (Hornby, 1990). Dengan demikian, *documentation* dapat berarti:

- 1) proses mendokumentasikan,
- 2) keadaan atau hasil yang telah terdokumentasi, dan
- 3) kumpulan dokumen sebagai bukti atau pertanggungjawaban akan sesuatu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mendefinisikan pengertian dokumentasi. Namun, ada peraturan di bawahnya yang berupa

peraturan menteri atau peraturan lembaga lain setingkat eselon satu atau di bawahnya yang mengatur tentang batasan dokumentasi. Berikut adalah kutipan tentang batasan dokumentasi dari satu lembaga dan dua kementerian kita. Meski hanya dari tiga lembaga, diharapkan bahwa lembaga itu mewakili komunitas ilmuwan, kementerian terkait kebijakan dan layanan informasi, dan kementerian terkait administrasi negara dan pemerintahan.

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh LIPI (Peraturan Kepala LIPI 02/E/2010).

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 /Per/M. Kominfo/07/2010).

3. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara (Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012).

Banyak lagi variasi batasan kata dokumentasi yang digunakan dalam berbagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008. Tentu sangat menarik untuk menginventarisasi semua batasan yang

dianut oleh kementerian dan lembaga pemerintah yang ada. Hanya saja belum semua berhasil ditemukan.

Dari yang sudah diuraikan, untuk sementara dapat dikatakan bahwa penggunaan kata “dokumentasi” tidak terbatas hanya pada pengertian dokumentasi pustaka saja. Logikanya, pustakawan atau perpustakaan di Indonesia yang sudah terlebih dahulu mengenal kata dokumentasi memperluas makna kata itu disertai pengembangan konsep tentang dokumentasi. Namun amat disayangkan, kebanyakan pustakawan kita enggan keluar dari pemikiran sempit kepustakawanan dan masih terkungkung dalam pola pemikiran perpustakaan tradisional.

E. PENGGUNAAN KATA DOKUMENTASI MASA KINI

Kata dokumentasi kini ditengarai lebih sering muncul. Tidak hanya digunakan dalam percakapan, namun juga tertulis dalam media massa. Secara sederhana, penggunaan kata itu banyak dikaitkan dengan makna dokumentasi sebagai bukti dari suatu peristiwa yang sudah berlalu. Ada rasa skeptis dalam masyarakat kita akhir-akhir ini menyangkut kebenaran dalam peristiwa masa lalu. Upaya mencari kebenaran tentu tidak dapat melupakan catatan sejarah dalam bentuk dokumen. Kesadaran akan sejarah masa lalu dan upaya menulis sejarah saat ini untuk bukti bagi masa depan diekspresikan dengan kata “dokumentasi” atau “pendokumentasian”.

Kata “dokumentasi” ternyata digunakan dalam banyak bidang ilmu atau profesi. Dalam bidang kedokteran, dikenal istilah “dokumentasi medis” atau “rekam medis”. Dikenal juga istilah “dokumentasi keperawatan” dan “dokumentasi kebidanan”. Dokumentasi dalam bidang tersebut penting karena masalah yang ditangani menyangkut hidup dan mati, juga karena kelengkapan dokumentasi tersebut ter-

kait urusan asuransi kesehatan. Bagi perawat, tindakan profesional ke perawatan hanya diakui jika ada dokumentasi yang benar dan lengkap. Dengan kata lain, dokumentasi digunakan sebagai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dan juga bila ada gugatan hukum.

Dalam bidang budaya maupun bahasa, istilah dokumentasi juga digunakan. Adi Budiwiyanto pada 15 Oktober 2015 mengunggah pernyataan berikut di internet:

“Pendokumentasian bahasa belakangan ini gencar dilakukan oleh para peneliti bahasa. Hal itu dilakukan mengingat banyak bahasa yang masih dituturkan pada saat ini terancam kepunahan. Jika satu bahasa punah, tentu tidak mungkin dilakukan pengecekan data terhadap penutur jati dan tidak mungkin pula dilakukan pengumpulan sejumlah data tambahan. Dalam hal ini, dokumentasi bahasa tidak hanya dianggap sebagai repositori data untuk penelitian ilmiah, tetapi dokumentasi bahasa juga berperan penting dalam pemertahanan bahasa” .

Banyak contoh penggunaan istilah dokumentasi dalam berbagai bidang. Untuk mengetahui secara lengkap penggunaan terminologi ini, diperlukan penelitian atau minimal survei secara menyeluruh. Tentu upaya itu memerlukan waktu dan kesinambungan studi lebih lanjut. Hampir semua bidang keilmuan atau profesi memakainya dengan makna masing-masing. Namun dapat diduga, semua tafsir tersebut berawal dari makna dasar atau hakikat dokumentasi.

F. RANGKUMAN

Dalam bahasa Jawa, ada istilah salah kaprah. Salah kaprah adalah kesalahan yang telah umum dilakukan dan dianggap benar dan bukan salah lagi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Saya berpendapat bahwa banyak di antara kita yang kurang sabar dalam memaknai apa yang kita lakukan, juga memaknai kata yang kita ucapkan. Sebagai orang yang bekerja dalam lembaga dokumentasi, saya mengidealkan salah

kaprah semacam itu tidak terjadi pada istilah dokumentasi. Oleh karena itu, memaknai dokumentasi menjadi sesuatu yang tetap saya pikirkan dan tuliskan dalam buku ini. Banyak pribadi atau pihak yang mengucapkan atau bahkan melakukan kegiatan dokumentasi. Namun, tetap harus dipertanyakan apakah mereka benar-benar memahami konsep dokumentasi yang tepat. Dengan pemahaman yang benar tentang konsep dokumentasi, diharapkan dapat menjadi roh yang menggerakkan kegiatan dokumentasi yang mereka lakukan. Untuk mencari roh ini, dapat disimak mengenai ide awal dokumentasi dilahirkan. Pada bagian selanjutnya, diuraikan kisah kelahiran dan perkembangan dokumentasi di Eropa.

BAB III KELAHIRAN DOKUMENTASI DI EROPA

Upaya memaknai sesuatu secara logis akan mudah jika ditelusuri sejak sesuatu itu ada. Sejalan dengan itu, upaya memaknai dokumentasi sebaiknya ditelusuri dari awal dokumentasi itu lahir. Menelusuri dari lahir dan sepanjang keberadaannya atau perkembangannya akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang makna yang dicari. Dalam bab ini akan dibahas saat-saat kelahiran dan perkembangan dokumentasi di Eropa. Oleh karena itu, akan disampaikan karya dan pemikiran tiga tokoh terpenting, yaitu Paul Otlet, Suzanne Briet, dan Frits Donker Duyvis. Meskipun hanya sepiantas, disampaikan juga pandangan Ranganathan dari India tentang dokumen. Ranganathan sendiri adalah tokoh perpustakaan dari India. Selain itu, tidak lupa diuraikan tentang organisasi internasional dokumentasi serta pencapaiannya—meskipun organisasi itu sekarang sudah tidak ada.

Gerakan dokumentasi lahir pada akhir abad 19, tepatnya pada 1895, ditandai dengan berdirinya International Institute of Bibliography (IIB). Dua pribadi bersahabat yang berbeda usia 14 tahun, yaitu Paul Otlet (1868–1944) dan Henri La Fontaine (1854–1943), adalah orang yang mendirikan IIB. Pada 1931, IIB berubah menjadi International Institute for Documentation (IID). Pada 1937, IID

ditata ulang menjadi International Federation for Documentation (FID). Sebelum FID akhirnya melebur pada 2002, sempat berganti nama menjadi International Federation for Information and Documentation, meski tetap disingkat FID. Tulisan Paul Otlet mengenai dokumentasi yang terpenting adalah *Traité de documentation* (1934) dan *Monde: Essai d'universalisme* (1935). Tidak salah jika Buckland menyebut Paul Otlet sebagai Bapak Bibliografi, Dokumentasi, dan kini lebih dikenal sebagai ilmu informasi. Bahkan dunia akhirnya mengakui Paul Otlet sebagai Bapak Internet (Wright, 2014).

Awal cerita diingatnya kembali dokumentasi adalah melalui disertasi Rayward di University of Chicago pada 1968. Disertasi ini kemudian diterbitkan untuk FID oleh All-Union Institute for Scientific and Technical Information (VINITI) Rusia pada 1975. Dikatakan oleh Stephanie Manfroid dan Jacques Gillen (2013) bahwa Rayward telah “...to rescue him from obscurity, publishing in 1975 a major biography of the pioneer knowledge entrepreneur and internationalist progenitor of the World Wide Web.” Rayward seakan menggali kerangka Paul Otlet dari kubur dan merangkainya menjadi sebuah biografi. Dari biografi itu, dapat dipelajari apa yang telah dilakukan Otlet bersama Henri La Fontaine dalam bidang dan konsep dokumentasi dan kerja sama internasional. Selain dalam bidang dokumentasi, Paul Otlet dan Henri La Fontaine juga perintis kerja sama internasional. Salah satu kiprahnya adalah mendirikan Central Office of International Associations pada 1907.

Figur penggerak dokumentasi lain, khususnya di Prancis adalah Suzanne Briet (1894–1989). Hal ini bermula dari keheranan Buckland atas bangkai burung yang disimpan di Museum Zoologi Universitas California di Berkeley. Sebelum berangkat ke New South Wales, Buckland mengunjungi museum tersebut. Dengan heran, ia melihat bangkai burung yang disimpan di tempat itu dan mengatakan hal sebagai berikut:

“...where I was impressed by some cabinets with shallow trays containing rows of dead birds. It seemed irrational to be using prime central campus space for trays of dead woodpeckers. A charitable explanation was that they were considered objects with which researchers might discover and from which students might learn. If so, this was, functionally, a kind of library. The dead birds were not books, but both served the same function—they were varieties of “documents.”

Keheranan dan pertanyaan Buckland terjawab setelah Rayward memberi dan memintanya membaca dokumen Briet berjudul *Qu'est-ce que la documentation?*. Bertolak dari membaca hasil studi Rayward, Buckland, dan para pembelajar lainnya, penulis berbagi cerita tentang Paul Otlet dan Suzanne Briet.

A. PAUL OTLET

Uraian berikut disarikan dari beberapa tulisan Rayward dan beberapa penulis lain. Studi Rayward tentang Paul Otlet sangat luar biasa. Studi itu merujuk pada lebih dari 345 dokumen. Jumlah itu disusun dalam sebuah daftar yang berjudul *Bibliography of the Works of Paul Otlet*. Selain itu, harus disebut secara khusus, dua dokumen yang isinya disampaikan di bagian ini, yaitu karya Manfroid dkk. (2013) dan Wright (2014).

Paul Otlet sudah dikenal di lingkup pustakawan dan perpustakaan di Indonesia sebagai Bapak Dokumentasi. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa Otlet juga diakui dunia sebagai Bapak Internet. Paul Otlet lahir dari keluarga kaya raya. Setelah menyelesaikan studi hukum, ia bekerja di biro hukum milik Edmond Pickard. Otlet bekerja di bawah Henri La Fontaine yang kemudian menjadi mitra kerja seumur hidup dalam mengembangkan dokumentasi. Mereka berdua bukanlah pustakawan, melainkan ahli hukum yang tertarik dan mengerjakan bibliografi hukum. Produk awal ini kemudian dikembangkan. Tidak hanya mencakup permasalahan hukum, na-

mun semua subjek yang berhasil mereka temukan. Pengembangan cakupan subjek ini terjadi karena mereka berdua risau dengan begitu banyaknya terbitan ilmiah baru yang harus diketahui oleh ilmuwan. Bagaimana informasi tentang terbitan baru ini bisa segera sampai ke tangan ilmuwan?

1. Ide dan Pemikiran Otlet

Rayward menjelaskan bahwa ide dan pemikiran Otlet terdiri atas tiga unsur utama, yaitu dokumen, jaringan kerja sama, dan organisasi atau lembaga yang disebutnya *Mundaneum*. Dokumen adalah awal dan pusatnya. Otlet berpendapat bahwa pengetahuan memasuk dalam dokumen yang menjadikannya objektif dan menempatkannya pada status sosial tertentu. Namun, dokumen bukan terbatas pada kata yang tercetak. Objek fisik, gambar dan ilustrasi, partitur musik, apa pun yang bernilai sebagai bukti dan yang mendokumentasikan sesuatu dapat disebut dokumen. Pertanyaan sangat mendasar bagi Otlet adalah bagaimana dokumen dalam berbagai wujud dan format itu dapat memberikan atau menyampaikan pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Kerja sama pertukaran informasi pengetahuan menjadi keharusan.

Untuk kerja sama pertukaran informasi pengetahuan, Otlet membayangkan adanya mesin yang mampu: 1) mengubah suara menjadi tulisan, 2) menggandakan tulisan sebanyak yang diperlukan, 3) menyusun dokumen yang mampu menunjukkan setiap rincian informasi dan menghubungkannya dengan informasi sejenis lainnya, 4) menentukan klasifikasi setiap informasi dalam bentuk angka dari dokumen tertentu, 5) menentukan klasifikasi dan penyusunannya secara otomatis, 6) menemukan kembali dokumen untuk tujuan konsultasi dan menyampaikannya langsung pada pencari informasi atau melalui mesin yang dapat mencetak kembali dokumen tersebut,

7) memanipulasi semua temuan informasi untuk mendapatkan kombinasi baru dari data, hubungan ide baru, dan melakukan operasi baru dengan pertolongan angka. Teknologi yang mampu melakukan tujuh fungsi tersebut adalah mesin setara otak bersama.

Lamunan itu begitu melampaui zamannya. Pengetahuan dan informasi dianggap dapat disarikan mampat sehingga dapat ditempatkan di meja kerja dan berada dalam jangkauan tangan, diindeks sedemikian rupa agar dicapai konsultabilitas maksimum. Dunia (yang dideskripsikan dalam keseluruhan buku) berada dalam jangkauan setiap orang. Buku universal (*universal book*) yang disusun dari semua buku yang ada akan menjadi tambahan pada otak—sebagian dari ingatan, mekanisme dan alat eksternal dari pikiran—namun sangat dekat seakan menjadi organ tubuh tambahan atau *exodermic appendage*. Lamunan itu kini terwujud dengan ketersediaan berbagai pengetahuan melalui internet. Oleh karena itu, Otlet diakui sebagai Bapak Internet.

Otlet mengembangkan konsep disiplin keilmuan baru yang ia namakan “dokumentasi”. Berbagai tulisannya menjelaskan konsep dan penerapan dokumentasi. Dua tulisan yang harus disebut di sini adalah *Traité de documentation* (1934) dan *Monde: Essai d’universalisme* (1935). Menurut Rayward, dalam dua karya itu, Otlet menguraikan pendekatan baru pada hakikat pengetahuan dan keterwakilannya dalam bentuk dokumen. Ia sudah membayangkan bahwa suatu saat nanti buku bisa dalam wujud multimedia. Ide akses informasi melalui jaringan dunia kini terwujud melalui internet. Rayward sangat mengagumi visi Paul Otlet yang jauh ke depan. Analisis Otlet kaya ragam teknik, ilmiah, internasionalis, dan sangat memahami fenomena organisasi pada waktu itu. Ekstrapolasi ke masa depan dikerjakan secara sistematis membuat Otlet mampu merumuskan ide inovasi teknologi, kehadiran globalisasi, dan munculnya masyarakat informasi.

Hal yang tercakup dalam dokumentasi tidak terbatas tulisan dan gambar (grafis), namun juga objek lainnya yang mempunyai nilai dokumenter. Nilai dokumenter adalah segala sesuatu yang dapat menjadi potensi pembawa informasi yang bermanfaat, tanpa memandang wujud bendanya. Otlet membayangkan perlunya lembaga atau organisasi dokumenter yang tugas dan fungsinya menjamin tersedianya informasi melalui jasa informasi revolusioner—yang dia sebut kantor atau lembaga dokumentasi. Lembaga ini menghimpun sumber daya informasi dalam berbagai bentuknya sesuai yang diperlukan, seperti teks, gambar, dan objek tiga dimensi. Semua itu dihubungkan dengan metode umum, pembagian tugas secara kerja sama, dan kesepakatan formal. Keberadaannya akan menjadikan perpustakaan sebagai simpul-simpul jaringan informasi dunia.

Menurut Otlet, semua dokumen dalam berbagai bentuk dan format perlu disusun, dirangkai, dan dihubungkan. Oleh karena itu, Otlet memandang perpustakaan, lembaga arsip, dan museum sebagai aspek lembaga tunggal dokumentasi. Dalam hal dokumen tekstual, Otlet berpendapat bahwa perlu diidentifikasi apa saja pengetahuan penting dan baru yang ada dalam dokumen tersebut. Semua duplikat ataupun yang bersifat retorika dan yang memang salah dalam dokumen itu harus dibuang karena tidak diperlukan. Tujuannya untuk menemukan inti informasi yang bernilai. Jika semua itu dapat didokumentasikan (direkam) dalam cara yang standar, semua rekaman itu secara sistematis dapat dihubungkan, disusun, atau disusun ulang menurut konsep kerangka pengetahuan mengikuti pola klasifikasi yang dinamai *Universal Decimal Classification* (UDC).

Dengan dokumentasi, Otlet menekankan pentingnya membuat semacam dokumen baru dalam bentuk gambar, tabel, dan diagram yang menghubungkan, menyorikan, memberi ilustrasi, dan menyederhanakan informasi yang semula beragam dan banyak. Tujuannya untuk menghubungkan dan mengintegrasikan serta memperoleh

representasi lain dari pengetahuan yang muncul dan disebarkan secara acak sehingga informasi atau pengetahuan itu tidak terpecah, tersebar, berulang, mengandung kesalahan, dan tidak lengkap. Proses penyusunan dan penyampaian dalam dokumen baru tersebut oleh Otlet disebut kodifikasi. Semua itu bertujuan untuk membentuk ensiklopedia gaya baru.

Menurut Otlet, lembaga informasi, seperti perpustakaan dan museum, harus bertransformasi atau **dilahirkan kembali menjadi lembaga dokumentasi** yang saling terhubung satu sama lain agar efektif. Isi pengetahuan yang dimiliki hendaknya juga dapat digandakan ulang dalam jaringan dokumentasi yang universal. Semua perhimpunan spesialis dari beragam disiplin ilmu hendaknya terhubung atau masuk dalam jaringan kerja sama ini. Jaringan ini berpola sentralisasi dan sebagai pusatnya adalah Mundaneum yang mengelola akuisisi dan diseminasi pengetahuan pada skala global. Di sekitarnya, akan tumbuh kota dunia (*world city*) yang secara simbolik melambangkan hubungan internasional dalam tatanan baru yang menjunjung nilai luhur dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kegiatan inti lembaga tersebut adalah berkoordinasi secara erat dengan lembaga arsip dan museum, berpusat pada informasi yang dapat diperoleh dari beragam dokumen tercetak dan sumber lainnya yang tersedia. Teknik dokumentasi baru dan beragam alat dokumentasi lainnya disatukan dalam lembaga tersebut untuk menyediakan layanan referensi yang cepat—yang disebut Otlet sebagai fungsi informasi baru—sehingga diperlukan peralatan baru juga. Lembaga dokumentasi seharusnya menjadi semacam bentuk baru ensiklopedia yang dapat menjawab berbagai pertanyaan sehubungan dengan ilmu pengetahuan. Pergeseran dari bibliografi menjadi dokumen baru dengan struktur baru serta pengodean ulang pengetahuan dapat dimungkinkan. Latar belakang filosofis juga menentukan pandangan mekanistik Otlet tentang pengetahuan dan dokumen.

Dokumen ibarat wadah yang berisi butir-butir pengetahuan. Oleh sebab itu, dokumen dapat dirinci atas kelompok-kelompok butir tersebut. Kelompok butir inilah yang oleh Otlet disebut prinsip monografik (*monographic principle*). Dengan prinsip itulah dimungkinkan pengkodean ulang pengetahuan. Penggunaan kartu katalog memungkinkan kerja sama penyusunan basis data bibliografi internasional. Selanjutnya, setiap entri kartu dapat dikelompokkan menurut tajuk subjek tertentu. Dengan UDC, dapat dibedakan kartu berisi data bibliografi dengan kartu berisi data faktual yang menjadi calon informasi dalam menyusun ensiklopedia baru—oleh Otlet disebut *Universal Book of Knowledge*.

2. Organisasi dan Kerja Sama

Dua organisasi pertama yang dibangun Otlet bersama La Fontaine pada 1895 adalah International Institute of Bibliography (IIB) dan International Office of Bibliography (OIB). IIB selanjutnya menjadi International Institute for Documentation (IID) pada 1931 dan akhirnya menjadi International Federation for Documentation (FID) pada 1937. Jika dua lembaga itu adalah titik pusat maka beberapa organisasi satelit yang menyusul dibangun adalah Institut International de Photographie, 1905; Bibliothèque collective des sociétés savantes, 1906; dan Musée de la presse, 1907. Pada 1907, dibangun Brussels Office Central des Associations Internationales. Pada 1910, kantor ini menjadi sekretariat Union of International Associations sesuai keputusan konferensi dalam Brussels World Fair (1910). Rangkaian organisasi tersebut sejak 1910 bertahap sampai 1919 ditempatkan dalam sebuah “istana” yang disebut Otlet sebagai Palais Mondial. Letaknya di bagian sisi kiri Palais du Cinquantenaire di Brusells. Dengan modal dan posisi itulah Otlet bermaksud mewujudkan kota dunia (*World City*). Pada 1920, Otlet membuat semacam *Summer School* yang disebut Université International. Kegiatan itu hanya diseleng-

garakan tiga kali, yaitu pada September 1920, Agustus–September 1921, dan Agustus 1922.

Perang Dunia Pertama memengaruhi ide dan karya Otlet. Jika sebelumnya Otlet selalu mendapat dukungan penuh dari lingkungannya, setelah perang semuanya mulai berubah. Dukungan dari kerajaan berkurang, terlebih dengan tidak diizinkan lagi Palais Mondial di Palais du Cinquanteaire pada 1924. Sejak 1930, secara perlahan ada gerakan mengubah IIB menjadi FID. Akhirnya gerakan ini berhasil, IIB menjadi FID pada 1937. Otlet yang sudah semakin tua seperti harus menyerahkan anak sulungnya diambil dari rumah untuk dibawa ke The Hague-Belanda dan diberi nama baru FID. Kepada F. Donker Duyvis, yang masih muda dan bersemangat, Otlet harus merelakan kepemimpinan FID.

Pada 1939, Pemerintah Kota Brussels mengizinkan Palais Mondial menempati sebagian gedung di Parc Léopold. Otlet menamakannya Mundaneum yang tetap menyimpan koleksi dan *records* dari Palais Mondial. Paul Otlet lalu meninggal pada 1944.

3. Kronologi Pencapaian FID Menurut Michael Buckland (2002)

- 1895** 12 September, Henri La Fontaine dan Paul Otlet mendirikan Institut International de Bibliography (IIB) atau International Institute for Bibliography di Brussels, Belgia. Tujuannya untuk memajukan akses universal pada semua pengetahuan terekam (*to promote universal access to all recorded knowledge*).
- 1895** Konferensi Internasional Bibliografi yang pertama. Selanjutnya, sampai 1994, telah diselenggarakan 55 konferensi internasional sejenis.

- 1895** Bibliografi Universal mulai disusun, sampai tahun 1914 mencapai 11 juta entri.
- 1895** Mulai menerbitkan berbagai publikasi, termasuk pedoman awal *Universal Decimal Classification* (UDC).
- 1903** Prinsip monografi (*Monographic principle*) yang dimaksudkan untuk membedakan dan menghubungkan elemen atau bagian dari suatu teks. Konsep ini sekarang dikenal sebagai konsep *hypertext*.
- 1904-7** *Universal Decimal Classification* (UDC) lengkap pertama kali terbit. Ini merupakan adaptasi dari *Dewey Decimal Classification* (DDC), yakni sistem klasifikasi pertama berdasar pada konsep *facets*.
- 1906** Standar mikrofilm diusulkan oleh Robert Goldschmidt dan Paul Otlet.
- 1924** Upaya reorganisasi menjadi organisasi federasi dokumentasi internasional.
- 1925** Goldschmidt dan Otlet menyatakan perpustakaan mikrofilm jinjing (*portable microfilm library*) sama dengan koleksi buku sepanjang 468 meter dalam perpustakaan konvensional.
- 1931** IIB menjadi Institut International de Documentation (IID).
- 1934** Karya Paul Otlet *Traité de documentation* terbit. Sebuah karya lengkap analisis tentang dokumentasi yang pernah ada.
- 1935** Kongres Internasional pada 1935, di Copenhagen, khusus mendiskusikan tentang teknologi informasi masa itu.
- 1937** Bertransformasi menjadi Federation Internationale de Documentation (FID).

1950–1960-an

Masa penerbitan ulang beberapa karya, seperti karya Otto Frank, *Handbuch der Klassifikation* (1947–60); *Manual on Document Reproduction* (1953–60); Otto Frank, *Handbuch der Reprographie* 4v. (1959–68); dan *On Theoretical Problems of Information*, yang disunting I. A. Mikhailov, diterbitkan di Moscow pada 1969 oleh All Union Institute of Scientific and Technical Information (VINITI).

1960 FID menerbitkan *Kerangka Kebijakan Jangka Panjang* yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 1959.

1970-anMemperbarui riset dan publikasi, termasuk karya Sparck Jones, K. & M. Kay. berjudul *Linguistics and information science* (1973) diterbitkan di New York: Academic dan *Research on the theoretical basis of information*. yang diterbitkan di Moscow oleh VINITI.

1975 Penerbitan *Theoretical problems in informatics*. (1979). diterbitkan di Moscow oleh VINITI.

1986 Menjadi Fédération Internationale d'Information et de Documentation (FID).

FID menyepakati Rencana Strategis Baru yang berjudul “*Participating in Progress*”.

1991 Program profesional baru, yaitu informasi industri dan bisnis finansial (*business finance and industrial information*); kebijakan informasi (*information policy*); ilmu informasi (*information science*); teknologi informasi terpakai (*applied information technology*); proses informasi dan produktivitas (*information processing and productivity*); dan manajemen informasi (*information management*).

- 1991** Definisi ulang dari fungsi FID, yakni pendidikan dan pelatihan (*education and training*); konferensi dan layanan (*conferences and services*); publikasi (*publications*); proyek (*projects*); jaringan pribadi (*personal networks*); dan konsultasi (*consultancy*).
- 1994** Struktur keanggotaan baru disepakati. Resolusi Tokyo, di mana 33 organisasi internasional non-pemerintah bergabung dalam FID menyusun *a strategic alliance to serve better the World Community*.
- 2002** FID melebur ke dalam organisasi baru tersebut.

B. SUZANNE BRIET

Uraian berikut bersumber dari studi Buckland atas Suzanne Briet serta beberapa tulisan penulis lainnya. Buckland menyusun bibliografi karya Briet secara bertahap. Sampai 2005, berhasil ditemukan 113 karya Briet, hampir semua dalam bahasa Prancis. Namun, secara bertahap juga mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tiga nama yang harus disebut adalah Michael Buckland, Mary Niles Maack, dan Ronald E. Day. Tulisan berikut disusun bersumber dari karya mereka.

Briet bernama lengkap Renée-Marie-Helène-Suzanne Briet. Ia lahir di Prancis pada 1 Februari 1894. Sebelum menjadi pustakawan, Briet mengajar Bahasa Inggris dan Sejarah di sebuah sekolah lanjutan. Pada 1924, Briet mendapat sertifikat pustakawan dan mulai bekerja di Perpustakaan Nasional Prancis (PNP). Briet adalah satu dari tiga pustakawan perempuan pertama yang dipekerjakan PNP—yang pada waktu itu masih didominasi karyawan laki-laki. Buckland menyebut Briet sebagai pustakawan, dokumentalis, sejarawan, organisatoris, dan feminis. Briet membangun dan mengelola *Salle des Catalogues et Bibliographies*, sebuah layanan bagi pemakai dengan konsep dasar

modernisasi bibliografi—atau dikenal dengan istilah dokumentasi. Waktu itu, bibliografi masih menjadi koleksi tertutup. Koleksi inilah yang kemudian dibuka bagi masyarakat umum, ditambah layanan konsultasi bibliografis serta kelengkapan indeksnya. Briet menekankan layanannya pada kebutuhan pengguna.

Peningkatan layanan PNP oleh Suzanne Briet juga atas rekomendasi para ahli perpustakaan yang bersidang di Paris pada 1927 dengan sponsor Institut Kerja sama Intelektual dari Liga Bangsa-Bangsa (Institute of Intellectual Co-operation of the League of Nations). Rekomendasi tersebut adalah 1) Setiap Perpustakaan Nasional hendaknya membangun Pusat Informasi Nasional (Nasional Information Center) agar para peneliti mengetahui di perpustakaan atau di koleksi khusus mana materi tercetak atau dokumentasi yang diperlukannya disimpan; 2) Agar pusat informasi nasional itu didanai cukup sehingga dapat menyediakan kartu katalog, bibliografi tercetak, katalog induk dan direktori koleksi khusus di setiap Negara; 3) Agar antarpusat informasi nasional bekerja sama erat menemukan sumber informasi yang diperlukan para peneliti, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Briet aktif di kancah nasional dan internasional, khususnya dalam bidang dokumentasi. Harus diakui bahwa Briet adalah pionir dokumentasi setelah Paul Otlet dan Henri La Fontaine. Ia bahkan mendapat gelar *Madame of Documentation*. Briet ikut membentuk Union Française des Organismes de Documentation (UFOD) pada 1931, sebuah organisasi himpunan para dokumentalis di Prancis. Ia pun terlibat dalam kepemimpinan lembaga tersebut. Perhatian Briet mencakup bagaimana menyiapkan tenaga untuk pelaksanaan dokumentasi. Briet mengembangkan rencana pembelajaran dan mendirikan sekolah pertama bidang dokumentasi di dunia, Institut National de Techniques de la Documentation at the Conservatoire National des Arts et Métiers. Saat peresmian sekolah itu pada 1951,

Briet menjabat direktur sekolah. Briet juga pernah menjabat Wakil Presiden FID.

Tulisan Briet hampir semuanya dalam bahasa Prancis sehingga—menurut Buckland—tidak dapat dibaca kolega Briet di Amerika Serikat. Buckland sendiri baru menyadari pentingnya pemikiran Briet setelah dia menerima *Qu'est-ce que la documentation?* dari Rayward pada 1988. Sejak itulah kalangan yang berminat pada sejarah ilmu informasi dalam lingkup Association for Information Sciences and Technology (ASIS&T) mulai menerjemahkan tulisan Briet, mempelajari serta menyebarkannya di Amerika Serikat. Pemikiran Briet dipublikasikan dalam buku setebal 48 halaman sebagai manifesto dokumentasi yang berjudul *Qu'est-ce que la documentation?* Manifesto ini terbit pada 1951. Dari manifesto inilah kita memahami pandangan atau konsep Briet tentang dokumentasi. Memang ada perbedaan konsep dokumentasi Suzanne Briet dengan konsep Paul Otlet. Namun, dapat dikatakan bahwa apa yang dipikirkan oleh Suzanne Briet merupakan penyempurnaan atas pemikiran awal Paul Otlet.

Pamflet Briet terdiri atas 3 bagian, yaitu 1) *Technique of Intellectual Work*, 2) *A Distinct Profession*, dan 3) *A Necessity of Our Time*. Bagian pertama memaparkan batasan dokumen yang lebih dari sekadar teks. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah binatang juga termasuk dokumen (*Is a living animal a document?*). Dalam bagian ini, Briet menyebutkan tentang antelope yang ditangkap dari hutan dan dipelihara untuk penelitian. Maka tidak heran ada tulisan berjudul *Briet's Antelope: Some thoughts on Suzanne Briet, The Lady and the antelope*. Briet mendefinisikan dokumen sebagai “bukti yang mendukung fakta” (*evidence in support of a fact*). Ide tersebut dikembangkan menjadi dokumen adalah “apa pun wujud fisik atau tanda maupun simbol yang diabadikan atau direkam guna menunjukkan fenomena konseptual ataupun fenomena fisik (*any physical or symbolic*

sign, preserved and recorded to demonstrate a physical or conceptual phenomenon)".

Dengan kehadiran arca, medali, map geografi, dan suvenir pribadi dalam perpustakaan, bagi Breit, istilah yang lebih tepat adalah "dokumentografi" dan bukannya "bibliografi". Definisi Briet tentang dokumentografi adalah enumerasi dan deskripsi dari berbagai jenis dokumen (*the enumeration and description of diverse kinds of documents*). Sebagai contoh deskripsi batuan megalitik, benda ruang angkasa, dan inskripsi kuno di batu. Buckland (1997, 806) menyatakan pemahaman atau uraian Briet tentang dokumen agak kurang tegas. Ia menafsirkan pemahaman Briet bahwa dikatakan dokumen jika:

- 1) *There is materiality: Physical objects and physical signs only;*
- 2) *There is intentionality: It is intended that the object be treated as evidence;*
- 3) *The objects have to be processed: They have to be made into documents; and, we think,*
- 4) *There is a phenomenological position: The object is perceived to be a document.*

Dengan empat sifat di atas, Briet masih menganggap bahwa objek harus berwujud nyata secara fisik. Keberadaan objek itu tentu ada maksud dan tujuannya yang dapat dipakai sebagai bukti. Oleh karena itu, objek tersebut harus diproses untuk menjadi dokumen. Juga secara fenomenologis objek tersebut adalah dokumen. Dalam bagian kedua tulisan itu, Briet mendeskripsikan munculnya profesi baru, yaitu dokumentalis. Briet mengkritisi metode perpustakaan yang dikatakan kurang luwes dan klasifikasi perpustakaan yang kaku. Ini berlawanan dengan dokumentasi—yang dikatakannya—memiliki pendekatan baru yang lebih dinamis dan berfokus pada relasi dengan pemakainya. Ditekankan pula bahwa dokumentalis hendaknya mampu menghasilkan dokumen sekunder (dalam PP No. 20 Tahun 1961 disebut dokumen baru). Dokumen ini disu-

sun menggunakan berbagai teknik intelektual, seperti enumerasi, deskripsi, penyarian (*abstracting*), pengindeksan (*indexing*), analisis, dan sintesis. Reproduksi dari dokumen aslinya juga termasuk dokumen baru. Briet mengatakan contoh dokumen baru adalah jajaran kartu, katalog, *vertical file*, fotograf, ensiklopedia, dan *guidebooks*. Penyusunan dokumen sekunder ini hendaknya memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna atau kelompok pengguna. Pengguna adalah jantung kegiatan dokumentasi.

Pada bagian ketiga, Briet menekankan pentingnya bentuk layanan informasi baru yang aktif untuk kebutuhan sosial masyarakat. Beragam pusat dokumentasi memang ada di Prancis. Beberapa pusat dokumentasi membatasi layanan hanya untuk kalangan sendiri, namun mayoritas pusat dokumentasi tetap membuka layanannya bagi masyarakat umum. Buckland berpendapat bahwa perspektif Briet yang modern dikombinasikan dengan semiotika menjadikannya sangat menarik karena berbeda dalam pendekatan ilmiah dan positivisme yang mendominasi ilmu informasi. Perbedaan pendekatan ini—menurut Buckland—memunculkan banyak pertanyaan terhadap ilmu informasi. Pemikiran Briet tidak hanya untuk masa lalu, namun lebih penting, untuk masa kini dan mendatang. Demikian dikatakan oleh Ronald E. Day.

Pelaksanaan dokumentasi, memerlukan pendidikan yang lebih dari sekadar pendidikan pustakawan. Dalam hal ini, Briet menyusun pola pembelajaran bagi calon dokumentalis. Bermula dari kursus penggal waktu yang dilaksanakan dalam waktu 2 tahun. Pesertanya adalah tenaga pelaksana yang sudah bekerja di pusat dokumentasi. Beberapa di antaranya bahkan menjabat sebagai kepala unit layanan, selebihnya adalah yang bertugas menganalisis dan mengindeks materi, atau tenaga teknis lainnya. Pada tahun pertama, peserta diberikan kuliah oleh para pustakawan, arsiparis, kurator museum, dan kepala pusat dokumentasi. Peserta memperoleh materi dasar pengenalan

konservasi, komunikasi, produksi dokumen, maupun organisasi dan manajemen suatu pusat dokumentasi. Pada tahun kedua, materi diajarkan oleh spesialis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Peserta yang sudah mempunyai ijazah tingkat tertentu dari perguruan tinggi atau universitas yang dapat mengikuti tahap ini. Semua mahasiswa diwajibkan menulis laporan penelitian berkaitan dengan subjek kerja mahasiswa.

Saat terjadi dualisme perpustakaan dan dokumentasi terutama antara Amerika Serikat dan Eropa, Briet mengunjungi Amerika Serikat. Di sana ia menyimak bagaimana praktik perpustakaan dan kepustakawanan. Pendapat pribadinya tentang hubungan perpustakaan dan dokumentasi itu ditulis pada 1954. Menurutnya, pustakawan dan dokumentalis pada dasarnya sama, hanya berbeda fokus perhatian. Perhatian pustakawan berfokus pada koleksi dan pengembangan sarana bibliografis, sedangkan dokumentalis berfokus pada pengembangan karya intelektual kelompok yang dilayani. Pustakawan dan dokumentalis berbeda dalam materi yang diseleksi, bentuk indeks, dan kecepatan pelayanannya. Namun, lembaga dokumentasi sangat tergantung pada perpustakaan. Lebih lanjut, lembaga dokumentasi dapat berfungsi jika ada perpustakaan. Sebaliknya, koleksi perpustakaan akan diperkaya dengan hasil kerja dokumentasi. Idealnya, pustakawan bekerja sama dengan peneliti dan bukan bekerja sendiri-sendiri. Itulah yang dikerjakan para dokumentalis.

Briet juga menaruh perhatian besar pada pendidikan profesional di luar Prancis. Survei internasional dilakukan UNESCO pada 1950 mengenai pendidikan pustakawan dan dokumentalis. Pada tahun berikutnya (Oktober 1951–Februari 1952), Briet menerima beasiswa Fullbright di Amerika Serikat. Ia mempelajari pendidikan profesional pada beberapa sekolah perpustakaan yang terkenal agar dapat menyusun rekomendasi internasional terkait. Secara garis besar, Briet mengatakan bahwa sekolah perpustakaan di Amerika Serikat belum

menjamin pelatihan bagi pustakawan. Hal ini tentu dihubungkan dengan mutu yang diperlukan sebagai profesional dokumentalis. Dokumentalis harus memiliki kepakaran (*subject expertise*) mengenai bidang atau disiplin ilmu dari lembaga kerja mereka. Sekolah perpustakaan di Amerika Serikat juga belum melengkapi mahasiswanya dengan pendidikan khusus teknik dokumentasi. Diakui bahwa kebanyakan profesional yang bekerja pada perpustakaan khusus di AS memiliki *library degree* atau *graduate degrees in their specialty*, namun tidak ada yang memiliki dua-duanya.

Dari semula, Briet menekankan bahwa dokumentalis harus ahli dalam spesialisasi yang diperlukan lembaga kerja. Dengan demikian, dokumentalis akan mampu menyediakan semua bibliografi atau dokumentografi yang dihimpun dari atau oleh peneliti sendiri. Meskipun Briet mengatakan bahwa pendidikan pustakawan di AS belum memberikan teknik dokumentasi, dalam bidang psikologi membaca, organisasi perpustakaan, hubungan masyarakat, dan layanan bagi anak-anak, sekolah perpustakaan di AS lebih maju dibandingkan Prancis. Briet menyebutkan sekolah perpustakaan di AS sudah ada yang mengenalkan mahasiswanya pada istilah *general documentation* seperti mata kuliah *introduction to the organization of information* atau *introduction to reference services*, bukan mata kuliah temu kembali informasi atau reproduksi dokumen. Briet menyampaikan bahwa penggunaan istilah dokumentasi di Eropa lebih menyiratkan konseptualisasi ulang informasi sehingga lebih menunjukkan perkembangan dibandingkan yang dipraktikkan perpustakaan khusus, baik di Amerika Serikat maupun di Inggris. Menurut Briet, pemaknaan pusat dokumentasi di Prancis sekaligus menyangkut koleksi dan layanan. Lembaga budaya baru harus lebih dinamis dan siap mengadaptasi kebutuhan kontemporer. Pernyataan Briet berikut ini perlu kita renungkan kembali.

“The evolution of human knowledge is an on-going compromise between these two intellectual attitudes. Invention and interpretation, reflection and the testing of hypotheses share the intellectual landscape.

Documentation is their servant” (Maack, 2004, 741).

C. FRITS DONKER DUYVIS

Uraian berikut bersumber utama dari karya Buckland (2007) yang berjudul *On the cultural and intellectual context of European documentation in the early twentieth century*, dan merupakan bagian dari buku *European modernism and the information society: informing the present, understanding the past* dengan editor W.B. Rayward. Buku ini diterbitkan oleh Ashgate di Aldershot, UK: .

Pada 1921, Donker Duyvis bergabung dengan IIB untuk merevisi *Universal Decimal Classification* (UDC). Beberapa bidang, khususnya ilmu dan teknologi, mengalami banyak perkembangan sehingga UDC yang terbit pada 1907 dan belum pernah diremajakan itu menjadi ketinggalan zaman. Oleh karena itu, revisi UDC harus dilaksanakan. Donker menjadi sekretaris komite internasional untuk melakukan revisi UDC. Pada 1924, sebuah pertemuan dilaksanakan di Belanda, dipimpin Henri La Fontaine. Namun, diskusi lebih dimonopoli oleh Donker Duyvis dan kawan-kawan dari Belanda. Organisasi IIB mengalami banyak perubahan keanggotaan yang lebih mengarah ke bentuk federasi beranggotakan perwakilan nasional.

Pada 1928, Donker Duyvis diangkat sebagai Sekretaris Jenderal IIB yang ketiga. Setelah IIB menjadi IID (International Institute for Documentation) pada 1931, mulailah fungsi organisasi lebih menguat. Konferensi diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Demikian juga dengan publikasi, seperti *Documentation Universalis* pada 1933–1939, yang kemudian menjadi FID *Communicationes* seiring dengan perubahan nama organisasi dari IIB menjadi FID. Juga terbit revisi lengkap UDC dalam bahasa Prancis pada 1932.

UDC edisi Jerman dan Inggris pun mulai dikerjakan. Di Jerman dilaksanakan oleh Deutscher Normenausschuss, sedangkan di Inggris semula dilaksanakan oleh British Society for International Bibliography dan Association for Special Libraries and Information Borough (ASLIB), setelah itu dilanjutkan oleh British Standards Institution.

Frits Donker Duyvis maju sebagai pengganti Paul Otlet dalam memimpin FID. adalah insinyur kimia yang kemudian mengurus informasi paten. Donker memiliki komitmen yang kuat dalam gerakan *scientific management*. Efisiensi menjadi fokus perhatiannya. Dia sekaligus *co-founder* dan *founding director* Dutch National Institute for Management (NIVE) selama 31 tahun. Kepeloporannya dalam permasalahan standar dan standardisasi menjadikannya memegang jabatan President Netherlands Standards Institute (HCNN). Donker Duyvis yakin bahwa dokumentasi, standar, mesin, dan segala upaya efisiensi adalah hal mendasar yang penting.

Perhatian Donker Duyvis terhadap penerapan dokumentasi, efisiensi, dan standar, tidak hanya pada perpustakaan dan bibliografi, tetapi juga mencakup penerapannya untuk bidang lainnya, seperti penanganan untuk rekaman (*records*) atau arsip. Semangat ini tecermin dari nama lembaga nasional dokumentasi di Belanda, yaitu Nederlandsch Instituut voor Documentatie en Registratuur (NIDER). *Registratuur* sendiri mengandung pengertian *filing* atau sekarang diartikan sebagai *records management*. Buckland dalam artikelnya berjudul *On the Cultural context of European Documentation* (2007) menyebutkan bahwa NIDER dan NIVE memang saling terkait. Donker Duyvis pensiun pada 1959 dan meninggal pada 1961.

Seperti juga Paul Otlet, Donker Duyvis menjadi legenda bagi FID. Buckland berpendapat bahwa sejarah Donker Duyvis perlu segera disusun agar peran pentingnya diketahui lebih luas.

D. SIYALI RAMAMRITA RANGANATHAN

Informasi pada bagian ini bersumber dari artikel yang ditulis oleh Islam (2015) yang berjudul S. R. Ranganathan: library and documentation scientist dan di muat dalam jurnal Current Science, 108 nomor 11.

Pemilik nama lengkap Siyali Ramamrita Ranganathan ini adalah salah seorang pemikir masalah dokumentasi yang berasal dari India. Ranganathan adalah matematikawan yang beralih menjadi pustakawan. Sebagai pustakawan, dia berpikir filsafati memakai jalan *Bhagavad Gita*. Pemikirannya yang sangat terkenal adalah *Five Laws of Library Science* atau Lima Hukum Ranganathan. Hukum ini dapat diterapkan di berbagai layanan perpustakaan.

Ranganathan mengikuti perkembangan konsep dokumentasi di Eropa yang dipelopori Paul Otlet, Henri La Fontaine, dan Suzanne Briet. Dia mengenalkan dan mengembangkan kegiatan dokumentasi di India dengan membentuk The Indian National Scientific Documentation Centre (INSDOC) pada 1950. Dia terlibat aktif dalam The Documentation Committee of the Indian Standards Institution. Bahkan lembaga tersebut ia pimpin sampai pada 1967. Mengenai definisi dokumen, Ranganathan tetap berpendapat bahwa dokumen adalah dua dimensi dan tertulis atau tercetak dan secara fisik harus dapat dipegang. Namun, pendapat ini dikatakan tidak relevan diterapkan pada masa kini, terutama karena adanya dokumen dalam bentuk digital.

E. RANGKUMAN

Munculnya kegiatan dokumentasi disebabkan oleh meledaknya produksi buku, khususnya artikel ilmiah. Menurut Otlet, diperlukan upaya lebih lanjut, bukan sekadar membuat daftar literatur—seperti yang biasa dilakukan perpustakaan. Artikel ilmiah perlu disarikan atau dibuat abstraknya dan ditulis pada kartu yang dapat disusun layaknya kartu katalog perpustakaan. Otlet juga mengembangkan klasifikasi subjek dengan mengadaptasi *Dewey Decimal Classification* (DDC) menjadi *Universal Decimal Classification* (UDC) untuk memudahkan pertukaran informasi. Otlet adalah pionir dalam advokasi standar dan standardisasi. Kartu katalog 12,5 x 7,5 cm termasuk pemikiran Otlet. Hanya Paul Otlet dan Suzanne Briet yang memberikan definisi tentang dokumen yang sekarang dapat digunakan menjadi titik berangkat studi dokumentasi baru. Paul Otlet memang telah memasukkan dokumen tiga dimensi, namun masih sebatas artefak dalam pengelolaan museum. Suzanne Briet yang mulai memasukkan hewan hidup sebagai dokumen jika hewan itu dipelihara untuk maksud (keilmuan) tertentu.

Uraian pada bab selanjutnya menyampaikan hasil penelusuran terkait dokumentasi pasca-kemerdekaan Indonesia. Dua yang dianggap terpenting adalah amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah. Dalam dua produk hukum itulah terdapat benih pemahaman, pelaksanaan, dan pengembangan dokumentasi bagi lembaga pemerintah.

BAB IV AWAL DOKUMENTASI DI INDONESIA

Bab sebelumnya telah menguraikan tentang kelahiran dan perkembangan dokumentasi di Eropa pada akhir abad ke-19. Mengenai kapan pertama kali konsep dokumentasi ini sampai di Indonesia memang tidak mudah dilacak. Namun, dapat diduga bahwa kegiatan itu dibawa ke Indonesia sejak Belanda mulai membangun lembaga penelitian di Indonesia, khususnya di Jawa. Dalam laporan Suzanne Briet, terungkap bahwa pada 1950 Indonesia sudah menjadi anggota Federasi Internasional Dokumentasi (FID). Keanggotaan Indonesia pada FID juga ditulis oleh Kusnoto Setyodiwiryo dalam makalah prasaran Konferensi Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia Pertama di Bandung tahun 1957. Meskipun disebut dalam dua tulisan, tidak dijelaskan apa, mengapa, dan bagaimana dokumentasi yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Informasi awal kegiatan dokumentasi di Indonesia ditemukan dalam dua dokumen negara, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) dan Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 1961. MIPI erat terkait dengan perjalanan awal dokumentasi di Indonesia. Pada 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menganulir

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956. Dengan sendirinya MIPI dibubarkan dan menugaskan Presiden RI membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hal yang disampaikan dalam bab ini adalah seputar kegiatan dokumentasi yang bersumber dari ketentuan atau amanat dua dokumen tersebut. Untuk memberikan gambaran menyeluruh, perlu disampaikan terlebih dulu ringkasan perjalanan aktivitas terkait dokumentasi di Indonesia.

A. TONGGAK PERJALANAN DOKUMENTASI DI INDONESIA

- 1950** Indonesia mulai menjadi anggota (*national member*) International Federation for Documentation (FID). Pada waktu itu diwakili oleh Organization for Scientific Research (OSR), suatu lembaga penelitian non-pemerintah.
- 1956** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956, MIPI dibentuk dengan kewajiban pokok yang keempat, yaitu menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang berada di Indonesia. Sejak saat itu keanggotaan nasional Indonesia di FID diwakili oleh MIPI.
- 1956** Pada tahun 1956, kalangan pustakawan, kearsipan, dan dokumentasi membentuk Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia disingkat PAPADI.
- 1957** Ketua MIPI, Prof. Sarwono, dalam prasarannya pada Konferensi MIPI yang pertama, 7–9 Januari 1957 di Bandung, menyampaikan visi atau pandangan tentang dokumentasi. Ketua MIPI menyebut titik berat usaha yang keenam adalah meletakkan dasar supaya Majelis menjadi salah satu pusat

dokumentasi dan penerangan mengenai soal-soal bertalian dengan ilmu pengetahuan.

- 1959** MIPI membentuk Panitia Dokumentasi untuk menyiapkan pembangunan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN). Luwarsih, Pj. Kepala Bagian Dokumentasi MIPI, menjadi Sekretaris Panitia.
- 1961** Terbit Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Pustaka dan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah.
- 1962** PAPADI berubah nama menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI).
- 1965** Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri *Research* Nasional nomor 107/M/Kpts/Str/65 tanggal 1 Juni 1965. Menteri Riset Nasional pada waktu itu adalah Dr. Sudjono D. Pusponegoro.
- 1965** Bibliotheca Bogoriensis tercatat sebagai *Associate Member* FID.
- 1967** Untuk pertama kalinya Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi ke-33 FID di Tokyo. Luwarsih mewakili sebagai *national member* dan Sahertian mewakili sebagai *associate member*. Sekembalinya ke Indonesia, Luwarsih melaporkan keikutsertaannya dalam konferensi dengan laporan berjudul “Federation Internationale de Documentation (FID) dan Konperensi Ke-33 di Tokyo”.
- 1983** Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII-LIPI) menyelenggarakan Seventh FID/CAO General Assembly and Congress, Yogyakarta, Indonesia, 3–5 Maret 1983. FID/CAO singkatan dari International Federation for

Documentation, Commission for Asia and Oceania yang dibentuk pada 1968.

- 1989** PDII-LIPI ditugaskan merintis Program Nasional Jaringan Informasi Keanekaragaman Hayati (*National Biodiversity Information Network*). Penugasan ini menjadi awal pertanyaan tentang makna lain kata “dokumentasi” selain makna yang dianut kalangan perpustakaan di Indonesia.
- 1992** Muncul pendekatan Blasius Sudarsono untuk memahami kepustakawanan, yaitu pada awal mula adalah kehendak manusia untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan atau yang dirasakannya.
- 1995** PDII-LIPI menyelenggarakan Thirteenth FID/CAO Congress and Assembly dengan tema “The challenge of information system towards the 21st century: Strategic use of information systems in Asia and Pacific countries”, di Jakarta, tanggal 6–8 Juni 1995.
- 2002** FID melebur (*dissolved*). Sebagian kegiatan melebur dalam International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Dengan meleburnya FID, kegiatan dokumentasi di Indonesia sepertinya juga ikut kehilangan orientasi, bahkan dapat dikatakan terlupakan atau dianggap sudah kuno serta harus digantikan dengan jargon baru, yaitu informasi.

Hilangnya orientasi kegiatan dokumentasi diduga karena meleburnya organisasi profesi menjadi satu wadah tunggal, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) pada 1973. Ditilik dari organisasi profesi, untuk pertama kalinya profesi dokumentasi diwadahi dalam organisasi PAPADI. Selanjutnya, PAPADI menjadi APADI. Pada 1973, APADI bersama Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia

(HPCI) bergabung menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Hilanglah juga nama profesi dokumentasi dari lingkungan organisasi profesinya karena semua disatukan dengan nama Pustakawan.

B. MEMIKIRKAN MAKNA DOKUMENTASI MIPI

Bagian ini disusun berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari beberapa nomor Berita MIPI, terutama dari rencana Sarwono Prawirohardjo yang berjudul *Tugas dan rencana kerja Majelis Ilmu Pengetahuan Ilmu Indonesia dalam masa depan dan soal Penghubungannya dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia*. Prasaran Ketua MIPI pada Konferensi Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia I, di Bandung, tanggal 7–9 Januari 1957 sebagaimana dimuat dalam *Berita MIPI*, Vol I No 2, tanggal Maret 1957.

Untuk memaknai kata dokumentasi dalam lingkungan LIPI, tentu perlu disepakati arti kata “dokumentasi” dalam Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN). Selanjutnya, lembaga itu berganti nama menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI). Muncul beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan pada awal dasawarsa 1990, yaitu

- 1) Apa yang dimaksud dengan dokumentasi?
- 2) Apakah bedanya dengan perpustakaan?
- 3) Mengapa masyarakat lebih mengenal PDII-LIPI sebagai perpustakaan?
- 4) Apakah memang kebijakan LIPI mengarahkan PDII-LIPI menjadi perpustakaan?
- 5) Berbagai pertanyaan lainnya dapat diajukan.

Untuk memahami arti kata “dokumentasi”, saya menelusuri kembali sejarah pembentukan PDIN pada 1965. Saya menemukan bukti

bahwa sejak MIPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956, sebenarnya konsep dokumentasi telah dinyatakan.

Tugas MIPI menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 adalah sebagai berikut.

- 1) Memajukan dan membimbing dalam arti kata yang seluas-luasnya usaha dan kehidupan pada lapangan ilmu pengetahuan, dengan berpedoman pada kepentingan nasional pada khususnya, dan kepentingan perdamaian dan umat manusia pada umumnya;
- 2) Memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai soal-soal, rencana-rencana dan usaha-usaha yang bertalian dengan ilmu pengetahuan kepada pemerintah, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, MIPI berkewajiban untuk (Pasal 4):

- 1) Memelihara sebaik-baiknya kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menyelidiki dalam ilmu pengetahuan pada khususnya;
- 2) Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi antara lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, baik yang dimiliki pemerintah maupun yang dimiliki pihak partikelir;
- 3) Menyelenggarakan dan memberi bantuan kepada:
 - a) usaha penyelidikan dalam ilmu pengetahuan
 - b) *usaha penerbitan dalam lapangan ilmu pengetahuan*
 - c) *usaha penyebaran ilmu pengetahuan dalam masyarakat.*
- 4) *Menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia;*

- 5) Mengurus lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan dana-dana untuk memajukan ilmu pengetahuan yang dipercayakan kepadanya;
- 6) Menyelenggarakan perhubungan dengan badan-badan internasional dan badan-badan nasional dari negara-negara lain yang bekerja pada lapangan ilmu pengetahuan;
- 7) Memberi laporan tentang soal-soal, rencana-rencana dan usaha-usaha yang dimintakan pertimbangannya oleh pemerintah dan mengajukan usul-usul kepada kementerian-kementerian tentang kepentingan ilmu pengetahuan atau kepentingan negara yang bertalian dengan ilmu pengetahuan;
- 8) Menyelenggarakan usaha-usaha lain dalam lapangan ilmu pengetahuan yang tidak termasuk perincian usaha-usaha tersebut.

Catatan: teks dalam huruf italic jadi acuan saya dalam memaknai kata dokumentasi.

Pada tanggal 7–9 Januari 1957 diselenggarakan Konferensi MIPI pertama di Bandung. Dalam prasarannya, ketua MIPI menjabarkan titik berat usaha yang akan dilakukan segera yang meliputi:

- 1) menyelenggarakan dan membantu penyelenggaraan pertemuan-pertemuan yang bersifat ilmiah;
- 2) menyelenggarakan hubungan yang baik dengan dan memberi bantuan kepada lembaga-lembaga ilmu pengetahuan serta mengusahakan kerja sama antara badan-badan itu;
- 3) membantu tiap-tiap usaha penyelidikan yang sungguh-sungguh, termasuk pula usaha-usaha perseorangan;
- 4) mengikhtiarkan supaya hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan di Indonesia dapat diketahui di dalam dan di luar negeri;
- 5) membantu usaha-usaha yang bertujuan mempertinggi tingkat-tingkat pengetahuan dan memperbesar hasrat terhadap ilmu pengetahuan dalam masyarakat umum;

- 6) *meletakkan dasar supaya majelis menjadi salah satu pusat dokumentasi dan penerangan mengenai soal-soal bertalian dengan ilmu pengetahuan.*

Gagasan tentang dokumentasi saya temukan dari Angka 4 pada Pasal 4 tentang kewajiban MIPI, yaitu *menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia.*

Selain itu, dalam Pasal 4 Angka 3 juga disebut usaha-usaha:

- a) *penerbitan dalam lapangan ilmu pengetahuan, dan*
- b) *penyebaran ilmu pengetahuan dalam masyarakat.*

Selanjutnya, Angka 6 dari titik berat usaha pertama MIPI, yaitu *meletakkan dasar supaya majelis menjadi salah satu pusat dokumentasi dan penerangan mengenai soal-soal bertalian dengan ilmu pengetahuan.*

Butir pernyataan dalam huruf italic menunjukkan bahwa pusat dokumentasi yang akan diupayakan itu bertugas mendaftarkan kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa inventarisasi kepustakaan dan objek nonpustaka menjadi tugas unit dokumentasi.

Selanjutnya, hasil inventarisasi disusun dalam suatu sistem dokumentasi yang sewaktu-waktu siap digunakan untuk memberikan jasa informasi. Pada waktu itu masih digunakan istilah penerangan untuk kata informasi.

Angka 4 dari Pasal 4 juga menyiratkan salah satu jasa informasi selain kata “penerangan” di atas, yaitu “mengikhtikarkan supaya hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan di Indonesia dapat diketahui di dalam dan di luar negeri”.

Kesungguhan usaha MIPI membangun suatu pusat dokumentasi dan informasi dibuktikan dengan diselenggarakannya rapat pada 21 April 1959 dipimpin Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo, Sekretaris Umum Biro MIPI. Agenda rapat ini membentuk Panitia Dokumentasi dengan tugas mempersiapkan berdirinya Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (MIPI, 1959). Susunan kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Ketua : Drs. Moh. Ali, Kepala Arsip Negara.
- Sekretaris : Nn. L. Pringgoadisurjo, Pejabat Kepala Bagian Dokumentasi Biro MIPI.
- Anggota : Khaw Giok Po, Lembaga Pers dan Pendapat Umum.
RMA Anis, Kementerian PP&K.
Nn. R. Pamuntjak, Kepala Perpustakaan Sejarah Politik & Sosial.
Gusti Endeng, Dokumentasi Markas Besar AURI.
Abubakar Hadi, Arsip Negara.

Di luar lingkungan MIPI, dua kepanitiaan untuk dokumentasi, perpustakaan, dan arsip dibentuk dengan SK Menteri Pertama pada Mei 1960 (MIPI, 1960). Panitia pertama khusus untuk masalah arsip, sedangkan yang kedua untuk dokumentasi dan perpustakaan. Pembentukan dua kepanitiaan ini atas inisiatif Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tugas panitia adalah sebagai berikut.

- 1) Mencari keseragaman dalam sistem, metode, dan teknik perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan serta keseragaman istilah-istilah;
- 2) Merancang surat keputusan presiden dengan peraturan-peraturan mengenai keseragaman perpustakaan dinas, dokumentasi, dan arsip;

- 3) Memberi laporan berkala tentang segala sesuatu yang telah dihasilkan panitia tersebut.

Susunan panitia Dokumentasi dan Perpustakaan adalah sebagai berikut.

Ketua : Mr. P.W. Blogg, Departemen Perhubungan Laut
(merangkap anggota).

Wakil Ketua: O.D.P. Sihombing, Departemen Penerangan
(merangkap anggota).

Anggota : Suwati Sumarsidik, M.A., Sekolah Perpustakaan.
Winarti Partaningrat, M.Sc., MIPI.
Rusina Pamuntjak, M.A., Pengurus PAPADI Cabang
Jakarta Raya.
Kapten Udara Gusti Endeng, Pengurus Pusat PAPADI.
Moeljono, Lembaga Administrasi Negara.
R. Kosim Adisaputra, Kepala Bagian Pendidikan
Dept. Dalam Negeri.

Sekretaris : Hardjono Prawirosoedirdjo.

Pada 30 Mei 1960, diadakan Pertemuan Sekretaris Umum MIPI, Prof. Soediman Kartohadiprodjo dengan anggota-anggota Panitia Persiapan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional membahas laporan Dr. R.J. Russel, konsultan MIPI berjudul *Report on Scientific Research in Indonesian*, bahasan khusus tentang dokumentasi dan perpustakaan. Hadir pada pembahasan tersebut R. Pamuntjak, Gusti Endeng, Khouw Giok Po, A. Hadi, dan Winarti Partaningrat, M.Sc. (MIPI 1960).

Hal yang menjadi pertanyaan saya adalah tugas PDIN sesuai SK Menteri Research Nasional No. 107/M/Kpts/Str/65 tanggal 1 Juni

1965. Menurut SK ini tugas PDIN adalah "... memberi pelayanan akan kebutuhan bahan-bahan bacaan untuk keperluan riset daripada lembaga-lembaga riset di Indonesia."

Tugas itu jelas tugas perpustakaan. Ke mana konsepsi dokumentasi MIPI itu hilang? Saya menduga mungkin itu arahan Dr. R.J. Russel yang mengacu pada dokumentasi literatur saja seperti yang biasa dikembangkan di luar Indonesia. Mungkin laporan itulah yang menjiwai penugasan PDIN.

Sebenarnya konsepsi dokumentasi menurut MIPI lebih luas dan tidak sekadar mengikuti konsepsi Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa dokumentasi adalah "... menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti kata yang luas sebagai hasil kegiatan manusia, dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan tersebut."

Kalaupun pembentukan PDIN harus mengikuti konsepsi Peraturan Presiden, tentu tugas yang tercantum dalam SK Menteri Riset tidak sekadar menyediakan bahan bacaan, namun menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru, seperti diamanatkan Peraturan Presiden di atas. Fokus pada dokumentasi pustaka tidaklah salah. Sebagai lembaga pemerintah, PDIN tentu tunduk pada ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961. Peraturan ini mengatur tentang Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah. Pasal 1 jelas membatasi arti dokumentasi karena menyatakan "... yang dimaksud dengan "Dokumentasi" dalam Peraturan Presiden ini ialah Dokumentasi Pustaka." Lebih lanjut, dalam Penjelasan Peraturan Presiden itu sebagai berikut.

Istilah "Dokumentasi" dalam Peraturan Presiden ini diartikan khusus "Dokumentasi Pustaka" atau "Dokumentasi Literair" dan un-

tuk menegaskan bahwa “dokumentasi benda” (*dokumentatie corporeel*) yang termasuk bahan-bahan dokumentasi bagi museum-museum dan gudang-gudang tidaklah termasuk dalam Peraturan Presiden ini.

Saya juga menemukan salinan keputusan Menteri Research Nasional No. 320/M/Kpts/Str/65 tertanggal 1 Desember 1965, yang merinci Organisasi Baru Departemen Urusan Research Nasional (Durenas)(MIPI, 1966). Dalam Departemen itu, ditetapkan keberadaan Biro Survei dan Dokumentasi yang tugasnya:

- 1) Mengumpulkan data, seperti:
 - a) jumlah lembaga-lembaga ilmiah di Indonesia,
 - b) keadaan fisik masing-masing lembaga ilmiah,
 - c) keadaan *manpower* masing-masing lembaga ilmiah,
 - d) anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan ilmiah daripada masing-masing lembaga ilmiah, dan
 - e) perkembangan ilmiah dalam negeri.
- 2) Mengolah bahan-bahan tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk:
 - a) proyeksi keperluan,
 - b) penentuan strategi riset nasional,
 - c) publikasi, dan lain-lain.

Tugas biro ini lebih dekat dengan konsep dokumentasi MIPI, meskipun tanpa menyebut pendaftaran kepustakaan. Dengan tugas Biro Survei dan Dokumentasi itu, muncul pertanyaan mengapa dibentuk unit dokumentasi lagi. Apakah memang diarahkan bahwa PDIN ditujukan untuk perpustakaan saja sehingga diperlukan ada unit lain yang melaksanakan kegiatan dokumentasi nonpustaka di luar PDIN?

Dalam perkembangannya, PDIN menjadi PDII-LIPI pada 1986. Tugas fungsinya ditetapkan oleh ketua LIPI pada 1987, namun tidak memberi batasan jelas tentang dokumentasi. Tugas PDII-LIPI

menurut SK Ketua LIPI No. 23/Kep/D.5/87 adalah melaksanakan pembinaan dan pemberian jasa dokumentasi dan informasi ilmiah, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua LIPI.

Saat menyiapkan reorganisasi LIPI rincian tugas PDII-LIPI pada 2000, saya mengusulkan agar tugas PDII-LIPI adalah melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pemberian jasa dokumentasi dan informasi ilmiah. Tugas baru yang diusulkan adalah masalah penelitian yang menurut SK Ketua LIPI sebelumnya tidak pernah ada.

Beberapa masukan telah saya sampaikan secara tertulis. Salah satunya menyangkut hakikat dan kebijakan dokumentasi. Berikut petikan yang menyangkut kebijakan umum dokumentasi.

1) Pengertian Dokumentasi dan Informasi

Untuk keperluan pelaksanaan tugas sehari-hari, harus ada kesatuan persepsi atas pengertian dokumentasi dan informasi (*working definition*).

Dokumentasi

- a. Berbagai upaya untuk mengabadikan objek kerja.
- b. Mengabadikan dapat dikatakan juga dengan memelihara objek kerja untuk kegunaan dalam usia yang tidak terbatas.

Jasa Informasi

- a. Berbagai upaya mendayagunakan hasil kerja dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

2) Objek Kerja

- a. Kekhususan objek kerja PDII-LIPI adalah pustaka (literatur ilmiah), berupa data, informasi, dan pengetahuan terekam.

- b. Dalam perkembangannya, bisa mencakup berbagai objek nonpustaka (materi ilmiah non-literatur). Termasuk dalam kelompok ini adalah data, informasi, dan pengetahuan yang belum terekam.
- c. Unit pendukung dalam lingkungan PDII-LIPI mempunyai objek kerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing unit tersebut.

3) Dokumentasi sebagai Ideologi

- a. Sebagai lembaga dokumentasi, hendaknya konsep dokumentasi menjadi ideologi yang harus dianut dan dilaksanakan secara konsisten. Paham, ajaran, semangat, dan tindakan memelihara objek kerja agar berguna dalam usia tidak terbatas harus ada dalam setiap pribadi karyawan PDII-LIPI.
- b. Setiap karyawan harus melaksanakan ideologi ini terhadap objek kerja serta sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya.

Bertolak dari dokumen yang saya sampaikan tadi, permasalahan hakikat dokumentasi yang ditugaskan kepada PDII-LIPI dapat ditentukan. Hal ini perlu didiskusikan dengan pimpinan LIPI agar ada keputusan yang lebih jelas tentang dokumentasi yang menjadi tugas PDII-LIPI itu, apakah hanya terbatas pada dokumentasi pustaka atau menyangkut dokumentasi lainnya. Hal yang sangat mendasar inilah yang harus disepakati terlebih dulu sebelum PDII-LIPI dapat mengambil langkah ke depan. Tanpa pemahaman dasar ini, PDII-LIPI hanya akan tumbuh sebagai pelengkap saja. Pertanyaan ini juga dapat diajukan kepada semua lembaga yang memiliki unit kerja dokumentasi.

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa:

- a. Adanya sebuah Pusat Dokumentasi dan Informasi sudah menjadi cita-cita MIPI sejak berdirinya. Unit tersebut ialah PDIN yang dalam perkembangannya menjadi PDII-LIPI.
- b. Dokumentasi yang dimaksudkan oleh MIPI adalah dokumentasi secara keseluruhan, baik pustaka maupun non-pustaka. Dengan kata lain, dokumentasi di sini adalah dokumentasi dalam arti umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
- c. Objek nonpustaka ditemukan dalam berbagai wujud atau media lain, seperti spesimen, artefak, contoh batuan, prototipe, model, rancangan, arsip, peranti keras ataupun peranti lunak yang mengandung data dan informasi ilmiah.

Sejauh ini, telah dibahas perjalanan kegiatan dokumentasi dalam lingkungan MIPI yang kini dikenal sebagai LIPI. Selain diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1956, dokumentasi juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961. Uraian berikut menyampaikan peraturan tersebut secara lengkap. Penyampaian secara lengkap dimaksudkan untuk membandingkan makna dari dokumentasi yang tersurat ataupun tersirat dari dua aturan yang pernah ada.

C. PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

Tentu muncul pertanyaan mengapa bagian ini membahas sebuah peraturan yang sudah usang bahkan dianggap tidak berguna lagi. Meskipun sudah dimakan usia, tidak dapat dibantah bahwa peraturan ini ada dan pernah dibuat oleh orang pertama di negeri ini. Hal itu membuktikan dokumentasi dan perpustakaan sudah menjadi perhatian pemerintah saat usia negara baru dua windu. Dari peraturan itulah kita dapat merekonstruksi makna dokumentasi. Garis batas dan

tujuan dokumentasi telah dirumuskan. Roh dokumentasi menjadi isi peraturan tersebut.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 yang bobotnya setingkat dengan undang-undang. Saat ada penyelarasan nomenklatur untuk Peraturan Perundangan RI pada 1967, peraturan itu dinamakan Undang-Undang Peraturan Presiden (UUPRPS). Sayangnya, tidak dimanfaatkan secara efektif oleh unit kerja dokumentasi yang sudah ada. Dengan kata lain, tidak segera dijabarkan atau dilaksanakan dengan benar. Peraturan ini pun sampai sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah masih berlaku atau tidak. Sampai sekarang belum ada peraturan lain yang membatalkan atau mencabutnya. Dengan demikian, peraturan tersebut tetap dapat digunakan.

Tidak semua unit kerja dokumentasi menggunakan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1961 sebagai landasan kerjanya. Peraturan itu mungkin sudah tidak dikenal lagi oleh kebanyakan dokumentalis dan pustakawan. Terlepas dari masih tidaknya peraturan ini berlaku, substansi yang disebut dalam peraturan itu perlu dicermati dan direnungkan kembali. Oleh sebab itu, dalam bahasan ini peraturan itu dikutip secara lengkap dalam format dua kolom, yaitu tentang isi dan penjelasannya agar lebih memudahkan menganalisis isi dan pesannya.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1961**

**TENTANG: TUGAS-KEWAJIBAN DAN LAPANGAN
PEKERJAAN DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH**

ISI	PENJELASAN
Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang: 1) tugas-kewajiban dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah; 2) keseragaman dalam sistem, metode dan teknik dokumentasi dan perpustakaan serta keseragaman dalam istilah-istilah yang bersangkutan. Mengingat: pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Nopember 1961. Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Presiden tentang Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah	UMUM Dalam kalangan Pemerintah, sampai kini belum terdapat keseragaman dalam menetapkan tugas-kewajiban dan lapangan pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam bidangnya masing-masing, walaupun dalam praktik tata usaha Negara sehari-hari kebutuhan akan keseragaman itu dirasakan sekali. Peraturan Presiden ini bermaksudkan menetapkan asas-asas keseragaman dalam bidang Dokumentasi dan Perpustakaan. Mengingat bahwa Dokumentasi dan Perpustakaan dalam beberapa hal mempunyai titik-titik persamaan maka tidak ada keberatan untuk mengatur kedua materi ini dalam satu Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ini hanya mengatur keseragaman Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah saja, hingga dokumentasi dan perpustakaan umum yang diselenggarakan bukan diadakan oleh kantor-kantor berita atau redaksi-redaksi surat kabar, dan perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan bacaan-bacaan untuk khalayak ramai, tidak termasuk dalam peraturan ini.

BAB I**TENTANG DOKUMENTASI**

PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan “Dokumentasi” dalam Peraturan Presiden ini ialah Dokumentasi Pustaka.

Pasal 1

Istilah “Dokumentasi” dalam Peraturan Presiden ini diartikan khusus “Dokumentasi Pustaka” atau “Dokumentasi Literair” dan untuk menegaskan bahwa “dokumentasi benda” (*dokumentatie corporeel*) yang termasuk bahan-bahan dokumentasi bagi museum-museum dan gudang-gudang tidaklah termasuk dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Tugas kewajiban Dokumentasi ialah menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti kata yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan tersebut.

Pasal 2

Mengingat bahwa, bahkan di luar negeri pun, mengenai tugas kewajiban Dokumentasi ini masih terdapat perbedaan paham hingga perbedaannya dengan tugas-kewajiban perpustakaan kadang-kadang menjadi kabur, maka dapatlah dipahamkan, bahwa di negara kita pun tugas-kewajiban Dokumentasi di tiap Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya itu masih berbeda-beda juga.

Untuk mencapai keseragaman di dalam bidang Dokumentasi ini maka pada ayat (1) pasal ini ditetapkan tugas-kewajibannya yang pada hakikatnya berbeda dengan tugas-kewajiban Perpustakaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) di bawah ini. Dalam tugas-kewajiban Dokumentasi terkandung kewajiban menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru.

Dokumen baru sebagai hasil-kerja itu hanya dapat diperoleh dengan menggunakan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 di bawah ini.

- (2) Dalam tiap-tiap Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya tugas kewajiban dokumentasi sebagai dimaksudkan pada ayat (1) di atas ini dibatasi hingga hanya meliputi pengetahuan-pengetahuan yang semata-mata diperlukan untuk menyelenggarakan tugas kewajiban dan pekerjaan Departemen; Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya yang bersangkutan.

Pada ayat (2) Pasal ini dianggap perlu menetapkan bahwa tugas-kewajiban kegiatan Dokumentasi itu adalah terbatas pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus berhubungan dengan lapangan pekerjaan tiap-tiap Departemen saja, kecuali jika lapangan pekerjaan Badan Pemerintah yang bersangkutan itu meliputi semua ilmu pengetahuan, seperti pula telah diterangkan dalam penjelasan umum di atas.

Walaupun dalam Peraturan Presiden ini tidak diberikan definisi tentang arti kata “dokumen (pustaka)” yang menjadi bahan dokumentasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dengan istilah “dokumen” atau “dokumen pustaka” itu dimaksudkan tiap-tiap benda yang berwujud tulisan, tercetak, difotokopikan atau direkam dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia. Dokumen benda (korporil) yang menjadi bahan museum dan gudang tidak termasuk dalam pengertian ini.

Dengan “dokumen baru” yang disebut pada ayat (1) Pasal ini dimaksudkan setiap laporan dalam bentuk apa pun dan dengan nilai dan isi bagaimanapun juga yang disusun berdasarkan penyelidikan dokumen-dokumen yang telah ada.

Pasal 3

Dokumentasi menjalankan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- (a) menyediakan keterangan-keterangan yang dikutip, disadur, diterjemahkan, disaring, difotokopi atau direkam dari segala dokumen pustaka;

Pasal 3

Untuk kepentingan keseragaman dalam penyelenggaraan tata-usaha Pemerintah maka dianggap perlu untuk menetapkan pekerjaan-pekerjaan apakah yang harus dijalankan oleh Dokumentasi itu, yaitu pekerjaan-pekerjaan sebagai akibat daripada tugas-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Pasal 2.

<p>(b) memberitahukan perihal tersedianya keterangan-keterangan itu;</p> <p>(c) atas permintaan menyusun suatu dokumen baru sebagai lanjutan daripada usaha dimaksudkan pada huruf a.</p>	<p>Dalam kata-kata menyediakan keterangan-keterangan, sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a Pasal ini tersimpul maksud mengumpulkan dan menyusun “keterangan-keterangan” seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) di atas.</p> <p>Pemberitahuan tentang tersedianya keterangan-keterangan itu lihat huruf b pasal ini, dan penyusunan dokumen baru, sebagaimana disebutkan dalam huruf c pasal ini, dijelaskan menurut pedoman yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.</p>
---	---

<p>Pasal 4</p> <p>(1) Dalam masing-masing Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya tugas-kewajiban dan pekerjaan Dokumentasi sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dijalankan oleh suatu Bagian Dokumentasi.</p> <p>(2) Tingkat Bagian Dokumentasi dalam organisasi Departemen, Jawatan, dan Badan Pemerintah lainnya, ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.</p> <p>(3) Bagian Dokumentasi sebagai dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ahli dokumentasi.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Pasal ini dianggap perlu untuk menentukan bagian manakah dari suatu Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya, yang dapat ditugaskan dan berwenang menjalankan Dokumentasi itu. Untuk keperluan itu dalam organisasi Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya dapat dibentuk suatu Bagian tersendiri, yang tingkatnya ditetapkan menurut kebijakan Menteri yang bersangkutan. Hal yang perlu di dalam hal ini ialah bahwa bagian Dokumentasi ini harus dipimpin oleh seorang ahli dalam kejuruan ini, baik karena pendidikannya yang khusus ataupun karena pengalamannya yang cukup luas dan mendalam dalam bidang ini.</p>
---	---

<p>Pasal 5</p> <p>Sistem, metodik, dan teknik Dokumentasi dilakukan secara seragam menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Cukup jelas</p>
---	--

Pasal 6

Pinjam antardokumentasi dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 6

Untuk menjalankan tugasnya dengan memuaskan adakalanya bagian Dokumentasi harus melakukan pinjam-meminjam dokumen-dokumen yang tidak tersedia padanya itu dari Bagian Dokumentasi Badan Pemerintah lain. Pinjam antardokumentasi ini harus dijalankan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertama.

Pasal 7

Sepanjang bukan untuk keperluan dinas, segala keterangan sebagai hasil kerja Dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam pasal 3 huruf c dapat diberikan kepada pihak luar dengan dipungut pembayaran yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 7

Cukup jelas

**BAB II
TENTANG PERPUSTAKAAN****BAB II****Pasal 8**

- (1) Tugas kewajiban Perpustakaan ialah mengumpulkan, menyusun, dan memelihara buku-buku dan dokumen-dokumen pustaka dengan maksud menyediakannya bagi keperluan pengetahuan, penyelidikan, pengajaran, dan keperluan-keperluan lain yang sejenis.
- (2) Bahan-bahan Perpustakaan sebagai dimaksudkan pada ayat (1) diperoleh dengan jalan membeli dan menukar, begitu pula dengan jalan mengusahakan untuk mendapatkannya dengan cuma-cuma dari manapun dan dari siapapun juga.

Pasal 8

Berlainan halnya dengan tugas-kewajiban Dokumentasi yang unsur kegiatannya pertama-tama adalah menghasilkan suatu dokumen baru, tugas-kewajiban Perpustakaan pertama-tama adalah menyediakan buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang disimpannya untuk sewaktu-waktu dapat digunakan oleh yang memerlukannya.

Untuk kepentingan keseragaman maka pada ayat (1) pasal ini ditetapkan tugas-kewajiban Perpustakaan itu.

Adapun cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyimpan, memelihara, meminjamkan bahan-bahan perpustakaan yang terdapat dalam bagian Perpustakaan suatu Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.

Pasal 9

- (1) Dalam masing-masing Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya dapat diadakan Bagian Perpustakaan, dengan tugas:
 - a. melaksanakan usaha-usaha yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) yang khusus berhubungan dengan tugas kewajiban dan lapangan pekerjaan Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya yang bersangkutan dan untuk digunakan bagi keperluan dalam lingkungan dinasny sendiri;
 - b. mengumpulkan semua jenis penerbitan dinas masing-masing;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan tukar menukar yang bersifat antarperpustakaan;
 - d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan siapa pun juga untuk keperluan penyempurnaan Perpustakaan.
- (2) Tingkat Perpustakaan dalam organisasi Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Bagian Perpustakaan sebagai dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ahli Perpustakaan.

Pasal 9

Berlainan halnya dengan Dokumentasi, yang sudah mulai dapat dibentuk dan merupakan suatu bagian dalam organisasi Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya, walaupun untuk keperluan pembentukannya itu belum tersedia bahan-bahan Dokumentasi yang cukup, pada dasarnya suatu Bagian Perpustakaan baru dapat diadakan di sesuatu Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya, bilamana telah tersedia bahan-bahan perpustakaan yang memang diperlukan untuk keperluan pekerjaan Departemen, Jawatan, atau Badan Pemerintah lainnya itu, dan dalam jumlah yang cukup banyak juga. Karenanya pembentukan suatu Bagian Perpustakaan tersendiri dalam suatu Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya diatur secara fakultatif pada ayat (1) pasal ini.

Ayat ini pun menjelaskan juga macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh Bagian Perpustakaan ini, dan di dalam hal ada dibentuk suatu Bagian Perpustakaan tersendiri sehingga sebaiknya Bagian Perpustakaan ini dipimpin oleh seorang ahli Perpustakaan, baik karena pendidikannya yang khusus maupun karena pengalamannya yang cukup luas dan lama dalam bidang perpustakaan ini.

Adapun tingkatnya, baik dalam organisasi Departemen, maupun dalam organisasi Jawatan, dan Badan Pemerintah lainnya, sepanjang Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya itu termasuk lingkungan kekuasaan Departemen itu, ditetapkan oleh Menteri daripada Departemen yang bersangkutan.

<p>Pasal 10</p> <p>Sistem, metodik, dan teknik Perpustakaan dilakukan secara seragam menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Cukup jelas</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Pinjam antarperpustakaan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Penjelasan Pasal 6 berlaku juga untuk pasal 11 ini.</p>
<p>Pasal 12</p> <p>Sepanjang bukan untuk keperluan dinas, bahan-bahan Perpustakaan dapat dipinjamkan kepada pihak luar dengan dipungut pembayaran biaya yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Cukup jelas</p>
<p>BAB III TENTANG PUSAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN</p>	<p>BAB III</p>
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Bilamana dianggap perlu maka Bagian Dokumentasi dan Bagian Perpustakaan dapat digabung menjadi satu Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan yang dipimpin oleh seorang ahli dokumentasi atau seorang ahli perpustakaan ataupun oleh seorang yang ahli dalam salah satu bidang itu.</p> <p>(2) Tingkat bagian Dokumentasi dan Perpustakaan dalam organisasi Departemen, Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Dalam hubungan penjelasan pasal 9 di atas maka pasal ini hendak mengatur kemungkinan untuk menggabungkan Bagian Dokumentasi dan Bagian Perpustakaan, di dalam hal kedua bagian ini masih dalam taraf perkembangan pula berhubungan erat dengan kebijaksanaan Menteri di dalam tata usaha Pemerintah dalam Departemennya.</p> <p>Di dalam hal hanya dibentuk satu bagian, baik untuk dokumentasi maupun untuk perpustakaan maka pemimpinnnya dapatlah seorang yang ahli dalam salah satu kejuruan ini, baik pendidikannya ataupun karena pengalamannya yang cukup luas dan lama dalam salah satu bidang.</p>

Tingkat Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan, baik dalam organisasi Departemen maupun dalam organisasi Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya, sepanjang Jawatan dan Badan Pemerintah lainnya termasuk lingkungan kekuasaan Departemen itu ditetapkan menurut kebijaksanaan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Di dalam hal dalam Jawatan-jawatan dan Badan Pemerintah lain yang ada dalam lingkungan kekuasaan suatu Departemen diadakan Bagian Dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam pasal 4 dan Bagian Perpustakaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 9, ataupun diadakan Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 13 maka dalam Departemen yang bersangkutan diadakan pusat Dokumentasi dan Perpustakaan yang dipimpin oleh seorang ahli Dokumentasi atau seorang ahli Perpustakaan ataupun oleh seorang ahli dalam salah satu bidang itu.

Tingkat Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan dalam organisasi Departemen ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Kepala Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan bertanggung jawab atas terselenggaranya Dokumentasi dan Perpustakaan sebagai dimaksudkan pada ayat (1) dan berwenang untuk menentukan garis kebijaksanaan dalam urusan Dokumentasi dan Perpustakaan pada umumnya.

Pasal 14

Pada umumnya pada Jawatan-jawatan dan Badan-badan Pemerintah lainnya yang lebih rendah tingkatannya dari Departemen diselenggarakan juga Bagian Dokumentasi dan/ atau bagian Perpustakaan. Oleh karena itu, dianggap perlu agar penyelenggaraan teknis daripada bagian-bagian yang lebih rendah tingkatannya daripada Departemen itu dikoordinasikan.

Penghematan-penghematan dapat pula tercapai.

BAB IV	BAB IV
TENTANG PERATURAN PERALIHAN	
Pasal 15 Penyelenggaraan Dokumentasi dan Perpustakaan yang telah dilakukan di Departemen-departemen, Jawatan-jawatan dan Badan-badan Pemerintah lainnya, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam waktu sesingkat-singkatnya.	Pasal 15 Cukup jelas
BAB V	BAB V
TENTANG PELAKSANAAN	
Pasal 16. Ketentuan-ketentuan lain yang belum/ tidak diatur dalam Peraturan Presiden ini atau yang diperlukan guna memperlancar pelaksanaan ditetapkan oleh Menteri Pertama.	Pasal 16. Cukup jelas
BAB VI	BAB VI
PENUTUP	
Pasal 17 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1961. Presiden Republik Indonesia Soekarno. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1961. Sekretaris Negara, Mohd. Ichsan.	Pasal 17 Cukup jelas

Ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Presiden tersebut membuktikan apresiasi pemerintah terhadap kegiatan dokumentasi dan perpustakaan sangat tinggi. Kebutuhan akan sistem dokumentasi disadari oleh musyawarah kabinet. Banyak hal yang belum diatur dan perlu diatur oleh Menteri Pertama ataupun pejabat lain setingkat menteri. Sayangnya, kalangan dokumentasi dan perpustakaan kurang dapat memanfaatkan peraturan itu dengan baik. Beberapa pokok terpenting dikemukakan di sini sebagai bahan diskusi.

Keberadaan unit dokumentasi dalam lembaga pemerintah menjadi keharusan untuk menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru yang berisi pengetahuan yang diperlukan lembaga guna menyelenggarakan tugas kewajiban dan pekerjaan lembaga terkait. Hal ini agak berbeda dengan keberadaan perpustakaan yang disebut dalam penjelasan peraturan itu sebagai fakultatif.

Lebih lanjut disebutkan:

“Berlainan halnya dengan Dokumentasi, yang sudah mulai dapat dibentuk dan merupakan suatu bagian dalam organisasi Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya, walaupun untuk keperluan pembentukannya itu belum tersedia bahan-bahan Dokumentasi yang cukup maka pada dasarnya suatu Bagian Perpustakaan baru dapat diadakan di sesuatu Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya, bilamana telah tersedia bahan-bahan perpustakaan yang memang diperlukan untuk keperluan pekerjaan”.

Apresiasi yang tinggi atas unit dokumentasi ataupun perpustakaan juga ditunjukkan lewat pernyataan bahwa unit tersebut harus dipimpin oleh orang yang benar-benar ahli di bidang dokumentasi atau perpustakaan. Keahlian tersebut dapat dicapai melalui pendidikan formal atau melalui pengalaman yang cukup luas dan panjang di bidang tersebut. Dalam praktiknya, sampai sekarang, masih saja penunjukan kepala unit dokumentasi atau perpustakaan tidak sepenuhnya mengikuti aturan tersebut. Apakah apresiasi pimpinan

lembaga terhadap unit dokumentasi atau perpustakaan tidak setinggi apresiasi pimpinan lembaga pemerintah pada 1960-an? Ataukah karena peraturan ini tidak pernah disosialisasikan sehingga banyak pimpinan lembaga tidak mengetahui? Atau justru petugas dokumentasi atau perpustakaan tidak acuh terhadap nasibnya sendiri dan tidak mau berjuang?

Hal yang menarik, peraturan itu sebenarnya memberi kesempatan kepada unit dokumentasi dan perpustakaan untuk menghasilkan “penghasilan”. Hal ini disebut dalam Pasal 7 untuk kegiatan dokumentasi dan Pasal 12 untuk kegiatan perpustakaan:

“Sepanjang bukan untuk keperluan dinas segala keterangan sebagai hasil kerja Dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam pasal 3 huruf c dapat diberikan kepada pihak luar dengan dipungut pembayaran yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertama”.

Namun, kesempatan itu tidak pernah digarap lebih lanjut, baik oleh petugas dokumentasi maupun petugas perpustakaan. Tidak jarang terdengar keluhan bahwa unit dokumentasi atau perpustakaan kekurangan dana.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi pustaka dan—secara eksplisit dalam penjelasan juga disebutkan—bukan dokumentasi benda yang menjadi bahan museum dan gudang. Kesimpulannya, pengertian dokumentasi waktu itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada dokumentasi pustaka. Hanya saja, dokumentasi nonpustaka tidak diatur dalam peraturan itu. Tampaknya para petugas unit dokumentasi yang ada di kantor pemerintah tidak mau melakukan dokumentasi di luar objek pustaka. Bahkan dapat diduga, unit dokumentasi dalam lingkup kantor pemerintah yang mengelola data faktual masih sangat terbatas. Kebanyakan unit dokumentasi dalam lingkup kantor pemerintah lebih condong pada pekerjaan perpustakaan dan informasi literatur.

Akibatnya, belum ada sistem yang disepakati untuk pengelolaan dokumentasi nonpustaka.

Hal terakhir yang justru sangat penting dari peraturan tersebut dalam upaya mencari konsep dasar dokumentasi adalah bahwa pada dasarnya kegiatan dokumentasi dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen baru. Selanjutnya, dijelaskan bahwa:

“Dengan “dokumen baru” yang disebut pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan setiap laporan dalam bentuk apa pun dan dengan nilai dan isi bagaimanapun juga yang disusun berdasarkan penyelidikan dokumen-dokumen yang telah ada”.

Penyusunan dokumen baru di sini bertolak dari dokumen yang sudah ada. Belum mencakup menyusun dokumen dari penyelidikan kejadian atau fakta yang langsung dialami dan belum tertulis. Adalah keniscayaan pada masa sekarang, dokumentasi sebagai proses juga harus menghasilkan dokumen baru dari pengetahuan yang belum tertulis, terekam, atau terdokumentasi. Dalam *knowledge management* (KM) atau pengelolaan pengetahuan, ada tahapan untuk mengeksplisitkan pengetahuan yang masih tasit (*tacit knowledge*). Dalam KM, dokumentasi mencakup dua hal mendasar: 1) upaya mengeksplisitkan pengetahuan tasit, dan 2) mengelola pengetahuan eksplisit atau yang sudah terekam atau sudah terdokumentasi.

Masih banyak yang dapat dipertanyakan dan dikembangkan dari adanya Peraturan Presiden tersebut. Suatu studi mendalam perlu dilakukan. Dari peraturan itu sebenarnya dapat dikembangkan konsep atau pemikiran baru sehubungan dengan praktik dokumentasi nantinya. Saya berpendapat bahwa dari peraturan itu akan terwujud konsep dokumentasi umum (tidak terbatas pada pustaka saja). Konsep umum itu perlu disepakati dalam melaksanakan praktik dokumentasi di Indonesia di masa depan. Mengakhiri uraian bab ini, harus disampaikannya perlunya memaknai dokumentasi dengan menyinergikan dua

aturan lama tersebut dan menyusun rumusan baru. Tujuannya agar tercapai suatu makna yang disepakati dunia perdokumentasian di Indonesia.

D. RANGKUMAN

Dua dokumen resmi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 dan Peraturan Presiden atau dikenal sebagai UUPRPS Nomor 20 Tahun 1961) adalah sumber awal konsep dokumentasi di Indonesia. Kedua dokumen tersebut belum sepenuhnya dijabarkan dan dimaknai lebih dalam oleh para pustakawan, dokumentalis, dan arsiparis waktu itu, padahal kedua dokumen tersebut layak dikaji ulang untuk merumuskan konsep dokumentasi yang sangat diperlukan sekarang. Banyak hal dapat dijabarkan dari dua dokumen tersebut yang dapat menjadi kekuatan lembaga atau profesi perpustakaan, dokumentasi, maupun kearsipan. Pertanyaannya, mengapa hal itu tidak dilakukan? Tentu ini akan menjadi topik penelitian yang menarik.

Salah satu dugaan saya, penyebabnya adalah terlupakannya dokumentasi di Indonesia. Hal ini memang memerlukan penelitian lebih mendalam. Ada dugaan bahwa dengan lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), baik dokumentasi maupun kearsipan di Indonesia justru terlupakan. Waktu itu, dengan semangat wadah tunggal, muncul pendapat bahwa terminologi pustakawan (perpustakaan) sudah mencakup dokumentalis (dokumentasi) dan arsiparis (kearsipan). Sayangnya, sukar sekali menemukan referensi tertulis tentang peristiwa yang terkait hal itu. Kalaupun ditemukan, sekadar tulisan terkait kronologi peristiwanya, tanpa tinjauan mendalam mengapa hal itu dapat terjadi. Dokumentasi yang terlupakan memang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, bab selanjutnya membahas dokumentasi yang terlupakan, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia.



BAB V DOKUMENTASI YANG TERLUPAKAN

Judul “Dokumentasi yang Terlupakan” sengaja dipilih karena hal itulah yang saya rasakan selama berkecimpung dalam kedinasan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa dokumentasi menjadi terlupakan. Ternyata tidak mudah menemukan literatur nasional yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tidak ditemukan literatur nasional yang menerangkan mengapa ilmu dokumentasi tidak berkembang di Indonesia. Kalaupun ada, hanya sebagai indikator untuk menerangkan bahwa dugaan terlupakan itu benar. Penelusuran literatur asing berhasil menghimpun beberapa artikel, terutama yang terbit di Amerika Serikat, yang dianggap sebagai kunci membuka misteri terlupakannya dokumentasi. Bab ini membahas isu terlupakannya konsep dokumentasi, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia.

Kata “dokumentasi” pernah akrab di kalangan perpustakaan di Indonesia sebelum dikalahkan dengan kata “informasi”. Kata ini sering dipasangkan dengan kata perpustakaan sehingga pernah terkenal ada istilah “perpustakaan dan dokumentasi” atau “dokumentasi dan perpustakaan”. Kata dokumentasi menjadi terlupakan dengan semakin tenarnya kata “informasi”. Hal itu terlihat dengan lebih seringnya terucap kata “perpustakaan dan informasi” dibandingkan “perpusta-

kaan dan dokumentasi”. Di dalam pendidikan calon pustakawan pun istilah ilmu perpustakaan dan informasi lebih bergema.

Memang masih ada juga pihak yang mendengungkan kata dokumentasi dan informasi. Bahkan masih ada lembaga yang menggunakan kata “dokumentasi” dan “informasi” di dalam namanya. Dalam lingkup pustakawan dan perpustakaan, dikenal “perpustakaan, dokumentasi, dan informasi” yang disingkat menjadi “pusdokinfo”. Akronim ini masih diucapkan atau digunakan, namun pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita mengartikan atau memaknai tiga kata atau akronim itu, khususnya arti dan makna kata dokumentasi?

Meski bekerja di lembaga bernama dokumentasi, kesadaran saya mencari arti dan maknanya tidak muncul sejak awal bergabung (1 Agustus 1973). Pemahaman dokumentasi saya waktu itu masih terbatas pada dokumentasi pustaka. Di antara pustakawan sering muncul pendapat yang berbeda mengenai cakupan kerja perpustakaan dan dokumentasi. Ada yang berpendapat bahwa dokumentasi merupakan bagian dari kegiatan perpustakaan. Ada pula yang berpendapat sebaliknya. Namun, tidak ada yang berupaya menerangkan atau membahas arti dan makna dokumentasi dengan lebih mendalam. Inilah yang disebut kontradiksi dokumentasi dan perpustakaan (Lihat Diagram 1).

Perhatian untuk lebih memaknai dokumentasi baru saya sadari pada awal 1990 saat menerima tanggung jawab untuk memimpin lembaga dokumentasi. Dalam rapat kerja, biasanya ada pertanyaan tentang apa saja yang sudah dihasilkan lembaga induk. Sayangnya, belum ada satu basis-data komprehensif yang menyimpan semua data hasil lembaga induk tersebut sehingga sering muncul pertanyaan “Bagaimana dokumentasinya?” Pertanyaan ini sangat merisaukan saya sebagai pengelola unit kerja dokumentasi. Sebenarnya, tanggung jawab lembaga saya waktu itu terbatas pada dokumentasi pustaka. Namun, saya tetap saja risau mendengar pertanyaan tersebut.

Kulminasi kerisauan tentang arti dan makna dokumentasi terjadi pada sekitar 1989 saat menerima tugas memulai program keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Dari sisi sistem basis-data, dapat dikatakan lembaga yang saya pimpin sangat mampu. Namun, dari sisi disiplin ilmu hayati masih banyak yang perlu dipelajari dan tentu itu tidaklah mudah. Saya sempat berargumen dengan pimpinan lembaga induk dengan pertanyaan sederhana: “Mengapa tugas itu diserahkan kepada kami?” Ternyata jawabannya juga tidak kalah sederhana: “Justru karena lembaga Anda adalah pusat dokumentasi!”

Jawaban itu saya rasakan sebagai gugatan telak atas tafsir arti dan makna dokumentasi yang dianut lembaga yang saya pimpin. Saat itu, lembaga yang saya kelola memang berfokus pada dokumentasi pustaka saja. Jawaban atas pertanyaan itu saya rasakan sebagai tuduhan bahwa ada suatu fungsi yang belum dilakukan, namun harus dilakukan. Berarti ada tafsir lain dari kata dokumentasi, selain tafsir yang hanya mengartikan sebagai dokumentasi pustaka. Apa sebenarnya dokumentasi itu? Sejak 1990, saya mulai melakukan pencarian akan arti dan makna dokumentasi sebagai tanggung jawab jabatan dalam mengelola lembaga dokumentasi.

Upaya mencari arti dan makna dokumentasi saya lakukan dengan observasi permukaan atas pemakaian kata “dokumentasi” di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya, saya melakukan penelusuran atas rekaman kejadian yang terkait dengan dokumentasi. Penelusuran dilakukan atas dokumen pembangunan lembaga dokumentasi di Indonesia. Mengapa lembaga itu harus dibangun? Apa saja tugas dan fungsi dari lembaga tersebut? Bagaimana perjalanan lembaga tersebut? Adakah kebijakan khusus dalam pembangunan dan pengembangan lembaga tersebut? Bagaimana kemungkinan keberadaan lembaga tersebut masa depan?

Semua pertanyaan itu harus dijawab bertolak dari berbagai teori yang ada. Dalam hal ini, berdasarkan teori dokumentasi yang

ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelusuran teori dokumentasi dari dalam negeri hanya menemukan beberapa tulisan tentang bagaimana mengerjakan tugas dokumentasi. Karya yang ditemukan terbatas pada bahasan *how to do*, padahal yang diperlukan adalah bahasan tentang *why to do*, dan atau *how to develop*. Hanya ada satu karya Tjandra P. Mualim yang memenuhi keperluan saya, selain laporan yang ditulis Luwarsih Pringgoadisurjo sesaat setelah mengikuti Kongres FID ke-33 di Tokyo. Memang ada beberapa dokumen ditemukan, namun tidak relevan. Kemudian penelusuran dilanjutkan pada karya tentang dokumentasi yang dihasilkan di luar negeri. Sumber bibliografis yang ditemukan kemudian disusun menjadi bibliografi kronologis yang disertakan juga pada buku ini.

Bibliografi kronologis tersebut dapat melukiskan perkembangan dokumentasi di luar negeri sejak awal lahir sampai kini. Terkait dokumentasi di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, ditemukan juga masa “dokumentasi yang terlupakan”. Seperti sudah diketahui, dokumentasi untuk pertama kali digagas oleh Paul Otlet, seorang ahli hukum dari Belgia. Pada 1985, bersama Henri La Fontaine, ia mendirikan International Institute for Bibliography (IIB). Pada 1937, IIB menjadi International Federation for Documentation (FID). Di Amerika Serikat, pada tahun yang sama dibentuk American Documentation Institute (ADI). Pada 1968, namanya diubah menjadi American Society for Information Science (ASIS) dan akhirnya menjadi American Institute for Information Science and Technology (ASIST). Pada masa itulah dokumentasi di Amerika Serikat mulai terlupakan. Ilmu informasi (*information science*) mulai menancapkan hegemoninya. Bahkan sempat terjadi dualisme panjang antara Ilmu Perpustakaan (*library science*) dan ilmu informasi (*information science*). Hasilnya banyak sekolah perpustakaan di Amerika Serikat mengubah nama menjadi School of Library and Information Science. Dapat dikatakan, bahwa kata “dokumentasi” menjadi terlupakan, dan diang-

gap sebagai konsep “kuno”. Konsep atau terminologi baru yang lebih diterima adalah “informasi”. Dalam praktiknya, perpustakaan dan pustakawannya lebih senang lekat pada kata “informasi”. Hal seperti itu juga terjadi di Indonesia. Demikian juga dalam ranah keilmuan, para akademisi lebih merasa senang dan bangga dengan istilah Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IP&I).

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Eropa dan Rusia. Dokumentasi di Rusia disebut *informatics*. Sampai kini, di Eropa, konsep dokumentasi tetap diajarkan dan dipraktikkan. Sekolah dokumentasi pertama didirikan di Prancis. Tidak dapat dipungkiri, pengaruh ilmu informasi juga besar di Eropa. Kebangkitan kembali dokumentasi terjadi setelah Rayward menulis disertasi tentang Paul Otlet dan karyanya pada 1968. Disertasi ini diterbitkan sebagai FID *Publication* 520 pada 1975. Keheranan Buckland atas bangkai burung di museum zoologi di Berkeley terjawab dengan karya Suzanne Briet yang diterimanya pada 1988 dari Rayward. Karya Briet inilah yang memicu Buckland untuk mulai mempelajari gerakan dokumentasi di Eropa akhir abad ke-19. Pada 1996, University of Tromsø di Norwegia mendirikan sekolah ilmu dokumentasi. Kini ilmu dokumentasi baru telah lahir sebagai hasil gerakan kaum dokumentasi baru.

A. SITUASI AMERIKA SERIKAT

Michael Buckland menjawab pertanyaan mengapa dokumentasi menjadi terlupakan di Amerika Serikat dengan artikel berjudul “Documentation, Information Science, and Library Science in the USA” (1996) dalam jurnal *Information Processing and Management* 32(1), 63–76. Tiga pertanyaan mendasar yang diajukan Buckland dalam artikel itu adalah

- 1) Mengapa karya dokumentalis Eropa dilupakan di Amerika Serikat sebelum Perang Dunia Kedua?

- 2) Bagaimana argumentasi ilmu informasi dengan ilmu perpustakaan?
- 3) Jika inovasi teknologi menjadi motor utama dalam ilmu perpustakaan, mengapa tidak ada lagi perhatian pada masa akhir abad ke-19 dan setelah 1950?

Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, Buckland melihat empat pokok bahasan, yaitu tentang

- 1) Technical and Technological Experimentation and Innovation
- 2) Library Science and Technological Innovation
- 3) The Graduate Library School, University of Chicago
- 4) Information Science Versus Library Science

Buckland menulis cukup panjang tentang percobaan teknis dan teknologis yang menghasilkan inovasi di Eropa sejak Paul Otlet memulai upayanya dengan dokumentasi. Ditulis juga upaya yang dilakukan di Amerika Serikat, meskipun tidak sebanyak dan seefektif di Eropa. Buckland menunjukkan bahwa minat berinovasi telah ada di bidang bibliografi, dokumentasi, dan perpustakaan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua di Eropa. Fenomena abad ke-21, misalnya *compact storage, ease of reproduction, remote access to full text, hypertext, equipment capable of sophisticated searching in complex indexing systems*, dan kemajuan lain ternyata sudah dibayangkan dan didiskusikan para praktisi idealis pada International Congress on Documentation tahun 1935. Semua itu terjadi sebelum komputer digital ditemukan.

Buckland menyayangkan bahwa semua inovasi yang muncul di Eropa sebelum Perang Dunia Kedua itu tidak diperhatikan di Amerika Serikat. Pandangan Buckland lalu tertuju pada Sekolah Perpustakaan di University of Chicago. Seperti diketahui, Carnegie Corporation adalah penyandang dana berdirinya Graduate Library School (GLS) di University of Chicago pada 1926 yang hanya menyelenggarakan pendidikan tingkat doktor. Carnegie Corporation berambisi agar

sekolah yang didanai itu akan menjadi sekolah berpengaruh di Amerika, seperti Harvard Law School, atau Johns Hopkins Medical School. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan awal, Buckland meninjau dua karya yang diterbitkan sekolah itu, yaitu karya Pierce Butler *Introduction to Library Science* (1933) dan *Library Quarterly*, jurnal yang diterbitkan sekolah perpustakaan. Artikel yang ditinjau adalah dengan masa terbit 20 tahun pertama.

Tentang buku Butler, Buckland menyebutnya polemik yang menarik. Butler mengakui bahwa buku tersebut bukan karya *masterpiece* dan akan dengan mudah tergantikan, namun pada kenyataannya, buku tersebut tidak segera tergantikan karena tidak ada karya lain dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat yang menggantikannya. Buckland menambahkan bahwa buku itu tetap menjadi *bestseller*, diterjemahkan, dan dihargai sebagai buku klasik. Bahkan pernah disebut sebagai *the major library research text for the next 40 years*. Buckland menyimpulkan buku tersebut dengan kalimat “...*how limited a view of the scope of library science it represents in terms of content, how shallow the concern with science, and, in particular, how conspicuously absent was any evidence of interest in library technology or technological innovation.*”

Tinjauan Buckland terhadap *Library Quarterly* dilakukan dengan membandingkan isi jurnal tersebut (1931–1950) dengan tesis dan disertasi (1928–1935) yang diajukan pada sekolah perpustakaan Berkeley, Chicago, Columbia, Peabody, Illinois, Western Reserve, dan Michigan. Selain itu, Buckland juga membandingkannya dengan artikel 1938–1942 dalam *Journal of Documentary Reproduction*.

Ditemukan bahwa jenis materi yang dimuat di *Journal of Documentary Reproduction* sangat berbeda dengan materi tesis ataupun topik yang dimuat dalam *Library Quarterly*. Bahkan tidak ditemukan satu pun disertasi atau tesis dengan topik tentang aspek teknologi. Menurutnya, sangatlah tidak mungkin pengajar di sekolah

perpustakaan tidak mengetahui bahwa inovasi teknis dan teknologi terkait perpustakaan menjadi perhatian di mana-mana. Otlet dan kawan-kawan di International Institute for Documentation saja sudah sejak 1895 menulis masalah itu, juga American Documentation Institute yang lahir pada 1937. Paling tidak, menurut Buckland, sampai 1950 sekolah perpustakaan di Amerika Serikat memang tidak tertarik dengan aplikasi teknologi. Buckland lalu berandai-andai Carnegie Corporation mendanai sekolah perpustakaan tidak hanya di University of Chicago.

Pada era 1950-an, mulai muncul upaya merekonstruksi, menganalisis, dan menginterpretasi munculnya argumentasi tentang ilmu informasi dengan ilmu perpustakaan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi. Muncul pribadi-pribadi berasal dari luar bidang perpustakaan yang gandrung pada teknologi dan tertarik mencari solusi permasalahan perpustakaan dengan teknologi. Namun, mayoritas pustakawan (yang berorientasi pada sekolah perpustakaan University of Chicago) memandang curiga kepada pihak dari luar—yang seperti-nya merendahkan pustakawan.

Fenomena ilmu informasi kontra ilmu perpustakaan oleh Buckland dipandang sama dengan fenomena yang muncul saat dilakukan gerakan dokumentasi oleh para pemula di Eropa atau oleh Dewey dan Cutter pada akhir abad ke-19 yang menerapkan teknologi dalam kegiatannya. Perubahan memang tidak mudah diterima. Banyak pula yang berpendapat bahwa isu teknologi hanyalah sebagian isu kecil dari banyak isu yang dihadapi oleh perpustakaan. Satu hal yang diyakini bahwa perpustakaan membutuhkan perkembangan, bukan perubahan.

Namun secara perlahan dan pasti, perubahan itu terjadi. Sekolah perpustakaan di Amerika Serikat mulai menerima terminologi ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Disadari bahwa ilmu baru itu perlu diintegrasikan dalam ilmu perpustakaan. Integrasi itu mulai dilakukan

awal dasawarsa 1960-an. Namun, Buckland tetap pada pendapatnya bahwa apa yang dikenalkan itu tidak lebih dari konsep yang sudah disampaikan dalam kalangan FID pada 1930-an. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan teknologi yang waktu itu belum ada dan baru ada pada masa 1960-an.

Akhir dari makalah Buckland sengaja saya salin agar para pembaca dapat menafsirkan bebas pernyataan itu sehingga dapat membuka wacana dan diskusi berkelanjutan. Berikut adalah kutipan dari pendapat Buckland (1996, 74) yang saya pisahkan atas beberapa butir.

- 1) *Our analysis is tentative and raises further questions. However, our conclusion is that these three issues are closely related.*
- 2) *One reason design and technology were of limited interest within library science in the U.S.A. in the second quarter of this century is that the most influential academic group was engaged in a vigorous, well-funded drive to develop a new school of thought with a new and different emphasis.*
- 3) *By the 1930s, the GLS in Chicago and the European documentalists represented different schools of thought with different interests. Such differences are to be expected in any field that is alive.*
- 4) *The period after the Second World War was tension-filled, we suggest, because the dominant non-technological, social science oriented paradigm in U.S. library science, what we might call “the school of Chicago”, was challenged, rivalled, and changed by the return, in part from outside of library science, of a serious interest in design and technology.*
- 5) *The matters that had interested the European documentalists emerged as a powerful force in U.S. library science twenty years later than in Europe.*
- 6) *There were by now new and more powerful machines. There was, after a few years, a new name: “information science”.*

- 7) *The individuals leading the change commonly come from outside of librarianship and there was little association with war-devasted Europe.*
- 8) *The European documentalists of the 1930s, who had written mainly in French and German, were largely forgotten.*

B. SITUASI INDONESIA

Karena merasa menjadi “tertuduh” dalam permasalahan dokumentasi, saya berupaya menguraikan permasalahan dokumentasi di Indonesia secara logis. Pemikiran mengenai logika dokumentasi (LD) tidak pernah lepas dari benak saya, walaupun juga tidak segera menggumpal. Bahkan sampai saat saya harus mengakhiri tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini masih belum tuntas. Oleh karena itu, dalam pidato pamit dari tugas sebagai PNS (28 Februari 2013), saya memakai judul pidato “Memaknai Dokumentasi”. Dengan judul itu, saya bermaksud mengajak sejawat memikirkan makna dokumentasi.

Upaya menuntaskan LD ternyata tidak mudah dan menjadi berkepanjangan. Untuk melengkapi draf LD, saya mulai menelusuri kembali literatur terkait. Kegiatan saya memikirkan LD memang pernah putus sejak 2003 dan fokus perhatian saya lebih pada konsep Kepustakawanan Indonesia (KI). Penelusuran literatur mengenai dokumentasi membuat saya sadar akan ketidaktahuan saya mengenai dokumentasi. Demi terwujudnya LD, saya harus sabar belajar kembali karena dokumentasi telah berkembang pesat dan membuahkan konsep-konsep baru yang sampai saat ini pun belum sepenuhnya saya kuasai.

Sampai akhir tugas sebagai PNS, pemikiran saya tentang arti dan makna dokumentasi masih sangat sederhana. Logika dokumentasi yang saya maksud masih terbatas pada pemaknaan bahwa dokumentasi tidak sebatas pada dokumentasi pustaka saja. Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 1961 memang membatasi dokumentasi yang dimaksud adalah hanya dokumentasi pustaka, bukan dokumentasi korporil. Namun, akan berbeda jika menyimak peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 1956 dijelaskan bahwa tugas terkait dokumentasi dapat ditafsirkan dari Pasal 4, Angka 4, yang berbunyi:

“menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia”.

Saya mempertanyakan mengapa lembaga yang dibentuk berdasarkan UU itu juga tidak menafsirkan Pasal 4 tersebut saat membangun unit dokumentasi di lembaganya. Sepertinya hanya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1956 itu. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi juga mulai terlupakan di Indonesia.

Dari penelusuran literatur asing, saya membaca buku (pamflet) yang ditulis Suzanne Briet pada 1951. Briet menyebutkan bahwa Indonesia sudah aktif menjadi anggota federasi dokumentasi dunia (FID) sejak 1950. Waktu itu yang mewakili Indonesia menjadi anggota nasional FID adalah organisasi ilmiah non-pemerintah. Bagaimana arti dan makna dokumentasi di Indonesia pada waktu itu? Apakah juga hanya fokus pada materi pustaka? Ataukah sudah mencakup juga materi nonpustaka? Dalam buku (pamflet) itu, Briet sudah memasukkan binatang hidup (antelope) sebagai dokumen. Apakah konsep ini juga sudah diketahui di Indonesia waktu itu? Konsep Briet sejalan dengan Pasal 4 dari UU Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan MIPI.

Uraian ini belum masuk pada substansi dokumentasi. Sesuai judul bagian ini, saya hanya akan menyampaikan dugaan mengapa dokumentasi menjadi terlupakan di Indonesia. Saya bertolak dari kejadian di Indonesia yang menyangkut dokumentasi dan per-

pustakaan. Setelah Indonesia menjadi anggota FID pada 1950, lahir Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia disingkat PAPADI pada 1956. Pada 1962, PAPADI berubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia (APADI). Dilihat dari perubahan nama itu, dapat ditafsirkan bahwa PAPADI beranggotakan para ahli. Dengan berubah nama menjadi APADI, apakah dapat ditafsirkan bahwa anggotanya adalah lembaga? Apakah dengan sendirinya urusan konsep atau ilmu dokumentasi lalu menjadi tanggung jawab lembaga yang harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengembangkannya?

Pada 1967, untuk pertama kalinya Indonesia mengikuti konferensi FID. Waktu itu Luwarsih Pringgoadisurjo mewakili Indonesia sebagai anggota nasional FID dan Sahertian Bakhoven mewakili *associate member*. Perlu disimak laporan Luwarsih (1967) sekembali dari sidang tersebut, yang berjudul “Federation Internationale de Documentation (FID) dan Konferensi Ke-33 di Tokyo”. Luwarsih mengawali laporannya dengan uraian tentang FID dengan jelas meski singkat. Tentu laporan sidang di Tokyo kemudian menjadi inti laporan serta apa yang dilihat dan dipahami saat berada di Tokyo. Kutipan berikut diambil dari laporan Luwarsih:

“... di Jepang, baik pemerintah maupun badan-badan industri swasta sudah mengakui pentingnya fungsi dokumentasi untuk menyukseskan riset serta menyadari bahwa pada akhirnya berarti meningkatkan kehidupan bangsanya. Kiranya tak asing lagi kenyataan kesanggupan Jepang untuk mengawinkan penemuan-penemuan dari luar negeri dengan penemuan-penemuan sendiri. Untuk keperluan ini, mereka tidak ragu-ragu mengeluarkan anggaran besar untuk riset. Itu pula sebabnya mengapa pada kebanyakan pusat-pusat industri terdapat suatu bagian dokumentasi atau lazim disebut pusat informasi ilmiah, karena industri-industri menginsafi bahwa informasi tentang penemuan-penemuan dalam dunia Internasional maupun di dalam negeri perlu dikuasai sebelum suatu penemuan baru dapat diterapkan di Jepang”.

Menurut Luwarsih, negara kawasan Asia, kecuali Jepang, masih harus memperjuangkan soal primer, seperti:

- 1) Kesukaran memperoleh tenaga-tenaga dokumentalis yang berpengalaman.
- 2) Kesulitan meyakinkan pemerintah masing-masing bahwa dokumentasi harus diakui sebagai bagian integral dari riset.
- 3) Menarik masyarakat pada umumnya, sarjana riset dan teknologi pada khususnya, mempergunakan fasilitas-fasilitas informasi literatur yang sudah tersedia sebelum mulai suatu proyek.

Sebagai penutup laporan, Luwarsih mengemukakan perlu segera dibentuk Panitia Nasional FID:

Kami berpendapat bahwa sudah waktunya Indonesia memikirkan kemungkinan membentuk panitia nasional FID. Suatu panitia yang aktif akan dapat:

- 1) memupuk kesadaran pentingnya dokumentasi di tanah air.
- 2) membantu Indonesia sebagai anggota aktif dari FID.

Perlu kami sampaikan di sini bahwa panitia nasional ini nanti bukanlah menjadi monopoli dokumentalis-dokumentalis. Sarjana dalam macam-macam bidang harus diikutsertakan, tergantung dari bidang yang akan menjadi ruang lingkup panitia.

Pada 1969, lahir Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia (HPCI). Bergabung dalam himpunan ini adalah para pustakawan khusus yang waktu itu juga sering menyebut dirinya “dokumentalis”. Di Eropa, saat dokumentasi lahir, muncul polemik antara perpustakaan dan dokumentasi. Apakah fenomena ini waktu itu juga muncul di Indonesia? Belum ada referensi tertulis tentang fenomena ini di Indonesia. Waktu saya mulai bekerja sebagai staf perpustakaan pada 1973, di dalam lembaga saja sering terdengar perbedaan sikap antara mereka yang menyebut dirinya dokumentalis dan pustakawan.

Umur HPCI ternyata tidak panjang. Pada 1973, HPCI dan APADI beserta Perhimpunan Pustakawan Daerah Istimewa Yogyakarta meleburkan diri membentuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Pembentukan IPI sebagai salah satu hasil dari Kongres Pustakawan Indonesia, 1973. Tjandra P. Mualim yang waktu itu Ketua Umum HPCI menghadiri kongres dan menyampaikan makalahnya dan saran mengenai organisasi yang akan dibentuk serta keikutsertaan HPCI dalam IPI. Sejak saat itulah HPCI lebur ke dalam IPI. Beberapa aktivis HPCI belum bisa menerima peleburan itu karena belum ada kongres luar biasa pembubaran seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar HPCI. Peristiwa inilah yang menandai terlupakannya dokumentasi di Indonesia.

Makalah Tjandra P. Mualim yang menjadi acuan saya dalam menafsirkan situasi waktu itu. Dengan judul “Perpustakaan Khusus dan Dokumentasi”, makalah itu diajukan dalam Kongres Pustakawan Indonesia, 5–7 Juli 1973, di Ciawi, Bogor. Dalam paragraf pembuka, Tjandra P. Mualim menyebutkan bahwa perpustakaan khusus telah menimbulkan adanya semacam “masalah” dengan adanya aktivitas dan golongan karyawan baru. Aktivitas yang dimaksud ialah “dokumentasi” dan golongan karyawan yang dimaksud itu ialah “dokumentalis”. Selanjutnya, dijelaskan pengertian tentang dokumentasi, dokumentalis, dan perpustakaan khusus.

Keterangan Tjandra tentang dokumentasi dan dokumentalis memberi pengertian bahwa objek dokumentasi adalah pustaka. Tampaknya ada pengaruh paham Amerika Serikat dalam ulasannya atas perpustakaan khusus dan dokumentasi. Saya menduga bahwa waktu itu pun belum jelas benar pengertian dokumentasi di Indonesia. Hal ini juga disebut Tjandra dengan kalimat “... hingga sekarang masih agak kaburlah pengertian orang mengenai ‘dokumentasi’ dan ‘dokumentalis.’” Bahkan dikatakan “... dokumentasi yang relatif dapat dikatakan bahwa ilmu dokumentasi itu masih muda dan masih harus

mencari-cari 'kepribadiannya'." Pernyataan Tjandra menimbulkan kesan dia sendiri belum yakin akan ilmu dokumentasi. Apakah itu juga mencerminkan kondisi para pihak yang menyebut dirinya dokumentalis? Sampai di sini sudah dapat diduga kenapa dokumentasi mudah terlupakan di Indonesia. Penyebabnya, para pelaku sendiri kurang yakin akan dirinya. Ini sangat berbeda dengan yang ditulis Luwarsih dalam laporan 1967.

Sebelum saya menyampaikan dugaan pribadi atas terlupakannya dokumentasi di Indonesia, berikut kutipan sebagian makalah Tjandra P. Mualim pada bagian kesimpulan dan saran:

- 1) Lepas dari besar kecilnya, pekerjaan dokumentasi amat tergantung (dan bahkan dalam banyak hal) bersumber pokok pada pekerjaan-pekerjaan perpustakaan yang lazim.
- 2) Karena luas ruang lingkup maka pekerjaan dokumentasi memerlukan teknik-teknik penyimpanan dan penemuan kembali yang lebih *sophisticated*, lebih cepat, dan akurat.
- 3) Seorang dokumentalis memang tidak perlu paham mengenai teknik-teknik perpustakaan, tetapi tidak dapat bekerja tanpa mereka-mereka yang paham dengan teknik-teknik tadi. Dan adalah lebih ideal kalau seorang dokumentalis selain menguasai subjeknya, juga menguasai teknik-teknik tersebut. Seorang dokumentalis memang tidak perlu paham.
- 4) Seorang dokumentalis, walaupun dia tidak bekerja di dalam suatu perpustakaan, dia harus berhubungan erat dan memakai *service-service* perpustakaan.
- 5) Perpustakaan yang paling dapat memenuhi kebutuhan seorang dokumentalis dan di mana dokumentasi dapat dikerjakan dengan lancar ialah perpustakaan di mana koleksinya terarah dan terseleksi, di mana teknik-teknik penyimpanan serta penemuan kembali sudah maju: dengan perkataan lain, suatu perpustakaan khusus.

Melihat ini semua, saya ingin mengajukan saran-saran berikut. Dokumentalis atau pustakawan khusus (*special librarian*) atau *information officer* atau *literature searcher Indonesia* sebaiknya diajak bergabung di dalam keluarga besar pustakawan Indonesia karena:

- 1) Ketergantungan mereka pada pustakawan serta perpustakaan Indonesia;
- 2) Keadaan perpustakaan dan profesi pustakawan Indonesia yang belum mencapai taraf jumlah yang diharapkan;
- 3) Jumlah mereka yang belum begitu besar serta minat dan perhatian masyarakat cendekiawan Indonesia yang masih kurang besar terhadap profesi dokumentasi.

C. RANGKUMAN

Menjawab mengapa dokumentasi menjadi terlupakan di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Harus dilakukan penelitian ilmiah atas fenomena tersebut dan perlu keseriusan bagi yang berminat melakukannya. Pertanyaannya, apakah ada yang berminat? Namun sebelum itu, tentu ada pertanyaan apakah memang penelitian itu perlu dilakukan? Saya berpendapat perlu mengingat ilmu dokumentasi telah berkembang sedemikian cepat dengan adanya gerakan dokumentasi baru Artinya, ilmu dokumentasi baru harus diajarkan di Indonesia. Untuk membangun keilmuan itu di Indonesia, diperlukan fakta sejarah agar garis ekstrapolasi dapat ditarik ke depan dengan benar.

Dugaan saya, tahun 1973—saat Kongres Pustakawan Indonesia di Ciawi—adalah awal terlupakannya dokumentasi di Indonesia. Agar suatu bidang keilmuan dapat hidup dan berkembang, biasanya selalu dikawal kelompok khusus yang memang menggeluti dan merawat bidang tersebut. Diasumsikan kelompok itu pernah ada di Indonesia dengan adanya APADI dan HPCI. Namun, kelompok itu lebur dalam organisasi baru yang terbukti tidak mengembangkan ilmu. Perlu juga

dipertanyakan apakah APADI dan HPCI waktu itu sudah melakukan aktivitas pembelajaran dan pengembangan ilmu dokumentasi.

Dari makalah Tjandra Mualim, dapat diduga kegiatan itu belum sempat dilaksanakan. Tjandra mengatakan bahwa dokumentasi masih mencari “kepribadian” berhubung sifatnya yang masih baru. Saya sangat mengenal Tjandra Mualim secara pribadi. Ia profesional dalam bekerja, bersemangat, dan tekun. Niat untuk belajar dan mengembangkan ilmu itu tentu ada dalam dirinya. Hambatan yang mungkin muncul adalah bahwa lembaga kerja belum sepenuhnya mendukung kegiatan tersebut. Dapat dipahami, sampai kini pun masih sedikit lembaga sejenis perpustakaan yang memberi kebebasan karyawannya belajar saat jam kerja.

Dari Kongres Pustakawan Indonesia 1973, dapat diduga adanya politik nasional yang mengarah pada wadah tunggal. Sebagai organisasi yang jumlah anggotanya lebih sedikit, HPCI seperti kurang berdaya menghadapi situasi pada waktu itu sehingga peleburan harus terjadi. Hal itu tecermin dari saran Ketua Umum HPCI. Semua dugaan itu memang harus dibuktikan secara akademis. Setelah secara formal, asosiasi dokumentasi sudah tidak ada di Indonesia. Pembelajaran dan pengembangan ilmu dokumentasi menjadi tanggung jawab lembaga dokumentasi dan lembaga pendidikan terkait bidang itu. Namun, adakah kemauan lembaga dokumentasi dan lembaga pendidikan terkait untuk melakukan pembelajaran dan pengembangan ilmu dokumentasi? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan sekaligus menjawab mengapa dokumentasi dapat terlupakan di Indonesia.

Mengakhiri uraian ini, saya sampaikan bahwa konsep atau teori dokumentasi memang terlupakan, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Di dunia internasional saat ini, sudah ada kesadaran kembali membangkitkan dokumentasi baru yang merupakan hasil gerakan para dokumentasi baru. Bagaimana dengan Indonesia? Terbitan ini dimaksudkan untuk mengadvokasi adanya gerakan kembali

belajar ilmu dokumentasi. Untuk menjadi suatu ilmu, diperlukan studi yang mendalam yang selayaknya dilakukan oleh lembaga yang menyangang nama dokumentasi dan lembaga pendidikan. Baik interaksi maupun kerja sama, bahkan sampai pada taraf sinergi, diharapkan dapat menumbuhkembangkan ilmu dokumentasi. Interaksi antar-lembaga atau organisasi sangat diperlukan, bukan sekadar interaksi antarpribadi. Tentu saja ilmu dokumentasi juga harus diajarkan di sekolah yang mendidik tenaga yang akan bekerja di lembaga-lembaga dokumenter.

BAB VI

GERAKAN DOKUMENTALIS BARU (*NEO-DOCUMENTALIST*)

Gerakan dokumentalis baru dipelopori oleh Warden Boyd Rayward, Michael Keeble Buckland, dan Niels Windfeld Lund. Merekalah yang mengawali pembentukan Document Academy dan seri pertemuan Document Academy Meeting (DOCAM). Mereka yang menumbuhkan konsep dokumentasi baru. Selanjutnya, muncul banyak tokoh lain, di antaranya Joacim Hansson, Maurizio Ferraris, dan E. A. Pleshkevich. Tiga tokoh ini melengkapi pemikiran baru tentang dokumentasi. Bagian ini menceritakan secara singkat bagaimana enam tokoh itu memaknai dokumentasi.

Dua referensi utama untuk bagian ini adalah dokumen berikut, selain beberapa dokumen pendukung lainnya.

- 1) Rayward, W. B. (2012). Paul Otlet, an encounter. *Cahiers de la documentation. Bladen voor documentatie*, 2, 71–73.
- 2) Buckland, M. K., & Lund, N.W. (2013). Boyd Rayward, Documentation, and Information Science. *Library Trends*, 62,(2).

Pada dasawarsa 1970-an, berbagai sekolah perpustakaan di seluruh dunia secara bertahap memperluas minat pendidikan dan mendefinisi ulang bidang studi, mencakup fungsi kepastakawanan di luar lembaga perpustakaan. Semua terjadi karena tuntutan pasar

akan tenaga yang memiliki keahlian setara dengan pustakawan untuk bidang di luar perpustakaan. Oleh karena itu, perhatian sekolah perpustakaan juga terarah untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun, hal ini tentu juga tidak terlepas dari keharusan sekolah perpustakaan mendefinisikan ulang jati diri ilmu perpustakaan dan informasi.

Waktu itu, Michael K. Buckland menjabat sebagai dekan sekolah perpustakaan di University of California di Berkeley (1976–1984). Nama sekolah perpustakaan di Berkeley berubah menjadi School of Library and Information Studies dengan cakupan tugas yang diperluas. Sementara itu, Warden B. Rayward dari 1980 sampai 1986 menjadi dekan University of Chicago Graduate Library School. Di Eropa, tepatnya di Norwegia pada 1988, Wienfeld Niels Lund mundur dari Royal School of Librarianship Denmark karena kecewa tempatnya mengajar tidak atau kurang memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam bidang kepustakawanan. Mereka bertiga kemudian menjadi pioner gerakan dokumentasi baru.

“You have history with you and together we represent the neo-documentalist movement.”

Itulah ucapan Rayward dan Buckland kepada Wenfield Niels Lund, dalam arena Second International Conference on Conceptions of Library and Information Science: Integration in Perspective pada 1996. Kata-kata kedua sahabat itulah yang membuat Lund mantap dengan sekolah dokumentasi yang baru dibangunnya di Tromsø. Secara kronologis, cerita perjalanan gerakan itu adalah sebagai berikut.

A. WARDEN BOYD RAYWARD

Rayward belajar di Amerika Serikat pada pertengahan dasawarsa 1960-an dalam program master di University of Illinois, dilanjutkan ke program doktor di University of Chicago. Di tempat terakhir inilah dia menulis makalah tentang sejarah International Federation for Documentation (FID). Setelah menulis makalah, tumbuh minat Rayward mempelajari biografi Paul Otlet. Sebenarnya Rayward ingin menemukan kesamaan Paul Otlet dan Leibniz dalam upaya mereka membangun ensiklopedia gaya baru yang disusun bersumber pada analisis dokumen, ide klasifikasi, dan kemungkinan baru dalam komputasi linguistik. Saat mengerjakan studi itu, Rayward menyadari bahwa pengetahuan tentang Paul Otlet sangatlah kurang—bahkan dapat dikatakan Paul Otlet telah terlupakan. Beberapa pertanyaan mengenai Paul Otlet disusun Rayward dan inilah awal penelitian untuk bahan disertasinya.

Dua kali Rayward meneliti di Brussels, Belgia, yaitu pada 1967 dan 1968. Lokasi penelitian langsung di Mundaneum, menempati sebagian gedung Parc Léopold. Di lokasi inilah Paul Otlet terakhir kali berkantor. Rayward meneliti semua dokumen yang tertinggal dengan teliti dan hati-hati seperti seorang arkeolog menggali situs purbakala. Rayward telah berhasil menemukan kerangka utama untuk upaya rekonstruksi tentang Paul Otlet. Biografi Paul Otlet itulah yang menjadi disertasi yang dipertahankan di University of Chicago pada 1968. Baru pada 1976 disertasi itu diterbitkan untuk FID oleh VINITI, lembaga dokumentasi di Rusia.

B. MICHAEL KEEBLE BUCKLAND

Figur lain yang harus disebut dalam gerakan dokumentasi baru adalah Michael Keeble Buckland. Ia adalah seorang profesor di University of California, Berkeley. Menjelang keberangkatannya memenuhi

undangan Rayward memperbarui kurikulum sekolah perpustakaan di University of New South Wales, ia mampir ke Museum Zoology di kampusnya. Buckland terheran-heran dengan koleksi bangkai burung di museum tersebut. Keheranannya itu diekspresikan dalam kalimat "...*It seemed irrational to be using prime central campus space for trays of dead woodpeckers.*" Kemudian Buckland mendapat penjelasan bahwa bangkai burung itu adalah objek yang digunakan para peneliti agar dapat menemukan hal baru dan para mahasiswa dapat belajar dalam bidang ornitologi. Buckland berpendapat bahwa koleksi tersebut fungsinya sama dengan koleksi perpustakaan. Bangkai burung itu bukan buku, namun berfungsi sama sebagai jenis dokumen. Visi ini tentu mendukung pendapat untuk memasukkan museum sebagai bagian dari studi informasi.

Polemik pribadi dalam benak Buckland itu mendapat solusi setelah dia membaca pamflet Suzanne Briet yang berjudul *Qu'est-ce que la documentation? (Apakah dokumentasi itu?)*. Pamflet ini diterima Buckland dari Rayward. Buckland sadar bahwa konsep yang dipikirkannya ternyata telah ditulis hampir empat puluh tahun sebelumnya oleh Briet, dokumentalis dari Prancis, yang tulisan belum dikenal di Amerika Serikat.

Dari kalimat pembuka tulisan itu, Buckland tersadar bahwa bagi Briet dokumen adalah bukti yang mendukung fakta (*a document is a proof in support of a fact*). Briet melanjutkan dengan kalimat "...*any concrete or symbolic indexical sign [indice], preserved or recorded towards the ends of representing, of reconstructing, or of proving a physical or intellectual phenomenon*". Pandangan Briet tentang dokumen sebagai sesuatu atau "apa saja" dapat dianggap dokumen sesuai dengan apa yang dipikirkan Buckland.

Setelah menyadari hal tersebut, muncul setidaknya lima konsekuensi atau dampak bagi Buckland, yakni sebagai berikut:

- 1) Segera menyelesaikan naskah *Information and Information Systems* (1991), yang berisi manifesto hakikat bidang studi informasi. Kemudian menulis artikel, seperti *Information as Thing* (1992) dan *What is a 'Document'?* (1997); Diskusi dengan Ron Day dalam upaya Day menulis *The Modern Invention of Information: Discourse, History, and Power* (2001). Ia juga menerjemahkan pamflet Briet tersebut (2006).
- 2) Sekembalinya ke Berkeley, Buckland mempelajari karya Suzanne Briet dan pendahulunya, yaitu Paul Otlet, Emanuel Goldberg, dan tokoh pergerakan awal dokumentasi lainnya. Namun, waktu itu dapat dikatakan tidak ada tulisan tentang mereka, kecuali karya Rayward tentang Paul Otlet.
- 3) Buckland berkontribusi dalam revitalisasi American Society for Information Science's Special Interest Group in Foundations of Information Science dan selanjutnya History and Foundations of Information (SIG HFIS). Dengan upaya itu, mulai tampak ada perhatian ASIST pada sejarah yang sebelumnya terlupakan karena fokus pada teknologi saja. Beberapa buku biografi tokoh berhasil diterbitkan Buckland.
- 4) Buckland kembali menaruh perhatian pada gerakan di Prancis, khususnya terhadap Suzanne Briet, termasuk lingkungan dan upaya waktu itu. Ini tecermin dari karya-karya Sylvie Fayet-Scribe.
- 5) Pengembangan visi dokumentalis baru sebagai upaya revitalisasi agenda penelitian dan pendidikan dari sekolah perpustakaan dan informasi. Tugas ini penting dan mendesak seperti dinyatakan Buckland dalam kalimat "...a task made the more urgent by barbarians attacking the programs at Chicago, Berkeley, UCLA, and elsewhere." Dilanjutkan dengan kalimat "*Information schools, then and now, needed to articulate a better rationale for their existence in a research university, where appeals to tradi-*

tion and potential usefulness are not enough. What if—radical thought!—information studies were undertaken because they were just plain interesting?” (Buckland & Lund, 2013, hlm. 305–306)

Pernyataan “keras” Buckland itu disampaikan dalam arena *Second International Conference on Conceptions of Library and Information Science: Integration in Perspective* pada 1996 dengan makalah berjudul “The “Liberal Arts” of Library and Information Science and the Research University Environment”.

C. NIELS WINDFELD LUND

Pionir ketiga gerakan dokumentasi baru adalah Niels Windfeld Lund. Di University of Tromso, Lund membangun sekolah perpustakaan baru yang diberi nama Documentation Studies, sekolah yang dibangun karena kebutuhan pasar—seperti sekolah lain pada umumnya. Norwegia menerbitkan Undang-Undang Deposit yang baru pada 1989. Undang-Undang tersebut mewajibkan deposit semua jenis publikasi tanpa melihat formatnya. Jadi, semua publikasi dalam format apa saja, termasuk dokumen *online* harus didepositkan. Untuk menjawab kriteria deposit itu, otoritas Norwegia di Tromso mengambil keputusan menggunakan “dokumen” dan bukan “informasi” sebagai konsep dasar program dan kegiatan. Oleh karena itu, dibangun program akademik baru di University of Tromso, tanpa menyadari konsep Paul Otlet dan Suzanne Briet sebelumnya—meski ternyata sejalan.

Terminologi “dokumen” dimaksudkan sebagai inti konsep yang mengacu pada semua benda yang berpotensi menerangkan. Dokumentasi sendiri dipahami sebagai “proses” dan “produk”. Studi dokumentasi atau *dokumentasjonsvitenskap* dalam Bahasa Norwegia untuk mudahnya disingkat “Dokvit”. Studi ini mencakup tiga di-

mensi yang saling melengkapi, yaitu 1) aspek kognitif ditujukan bagi pribadi mahasiswa yang harus berkembang; 2) aspek teknologi yang mempelajari fisik dokumen; dan 3) aspek sosial yang mempelajari berbagai hal mencakup budaya, ekonomi, dan peran politik dokumen. Dengan sendirinya, pengajar pada program studi itu juga meliputi para ahli dalam bidang kemanusiaan (*humanities*), ilmuwan ilmu sosial (*social scientist*), dan para ahli komputer (*computer scientists*).

Muncul respons negatif dari sekolah perpustakaan lain di Norwegia waktu itu yang mengatakan bahwa dokumentasi sudah kuno. Oleh karena itu, pernyataan Rayward dan Buckland pada 1996 benar-benar menguatkan tekad Lund. Kemudian mereka bertiga banyak berdiskusi. Pada musim gugur 1999, Rayward mengajar di Tromsø. Diskusi berlanjut tentang pertanyaan apa yang dimaksud dengan dokumentasi itu? Juga bagaimana sebenarnya dokumentasi berakar pada tradisi yang berbeda. Pendekatan sejenis inilah yang biasa diajukan oleh Rayward yang selalu berusaha mencari awal atau sejarah jika harus membahas isu kontemporer.

D. DOCUMENT ACADEMY

Pada 2001, Lund menjadi *visiting professor* di Berkeley. Lund mulai teori dokumentasi mengajar *document theory* sebagai langkah awal untuk menarik minat studi tentang dokumen dan menyemai benih pergerakan dokumentasi baru. Kemudian Document Academy berdiri sebagai forum internasional yang mengkaji dan mendiskusikan apakah dokumen itu, bagaimanakah menciptakan, mengelola, dan menggunakannya. Pertemuan tahunan yang diberi nama Document Academy Meeting (DOCAM) dilaksanakan di Berkeley pada 2003. Pada 2004, Lund dan Rayward mengadakan kuliah *online* bagi mahasiswa doktoral di University of Tromsø; University of Illinois,

Urbana-Champaign; dan di Royal School of Library and Information Science, Denmark.

Semula, DOCAM diselenggarakan antara University of Tromso dan University of California di Berkeley secara bergantian tiap tahun sejak 2003. Pada kesempatan perdana DOCAM 2003 di Berkeley, Lund menyampaikan makalah utama berjudul “Doceo + mentum - Ground for a new discipline.” Makalah itu dibagi menjadi 7 bagian dengan subjudul: 1) *Documentation Science-the same as LIS?* ; 2) *Document - documentation - conceptual traditions*; 3) *Document*; 4) *Document-documentation*; 5) *A general theory of documentation*; 6) *An analytical model for documentation analysis*; dan 7) *A new discipline of documentation*.

Semua bagian makalah itu ditulis di sini karena merupakan awal penampilan kembali ilmu dokumentasi setelah beberapa waktu terlupakan. Pada 2004, dalam kesempatan DOCAM berikutnya, Lund mempertegas bagaimana studi dokumentasi menjadi pilihan bagi sekolahnya di Tromso. Kini judul makalahnya lebih eksplisit, yaitu “Building a discipline, creating a profession: An essay on the childhood of “Dokvit”. Pada DOCAM 2005, Rayward menyampaikan pidato kunci berjudul “The legacy of the new documentation movement.”

Dengan adanya gerakan baru dokumentasi, selanjutnya muncul pemikir dan pemerhati lain, seperti Mary Niles Maack, Bernd Frohmann, Birger Hjørland, Deborah Turner, Stephanie Manfroid, Jacques Gillen, Joacim Hansson, E.A. Pleshkevich, Lyn Robinson, Maurizio Ferraris, dan masih banyak lagi yang mulai mempelajari gerakan dokumentasi yang lahir di Eropa, khususnya Belgia dan Prancis akhir abad ke-19 sampai masa Perang Dunia Kedua. Mereka bukan hanya dari bidang perpustakaan dan informasi, namun juga dari filsafat, ilmuwan sosial, sampai teknik komputer.

Pendekatan berbagai disiplin keilmuan itu menjadikan dokumentasi baru semakin luas dan lengkap. Ini sudah sangat berbeda dengan yang mengenal dokumentasi sebatas dokumentasi pustaka. Apalagi dengan gerakan dari ko-eksistensi menuju konvergensi lembaga perpustakaan, arsip, museum, monumen, dan situs, ilmu dokumentasi baru adalah ilmu intinya. Berikut ini pemikiran tiga pemikir, yaitu Joacim Hansson, Pleshkevich, dan Maurizio Ferraris. Alasan saya menampilkan tiga tokoh ini karena semua pemikiran mereka sebagai akibat adanya gerakan dokumentalis baru. Hansson menekankan perlunya bergeser dari informasi ke dokumen. Ferraris melihat dokumen dari aspek konstruksi sosial, sedangkan Pleshkevich menguatkan teori yang dibuat oleh Ferraris.

E. JOACIM HANSSON

Joacim Hansson dalam blog-nya pada 21 Desember 2010, menulis *Document Studies - an alternative "paradigm" in Library and Information Science?* Judul ini diurai lebih rinci menjadi: 1) Apakah kini kita melihat pergeseran fokus dari ilmu perpustakaan dan informasi IP&I? 2) Apakah mungkin membicarakan kemunculan gerakan dokumentasi baru? 3) Bagaimana jika kita menjadikan sebutan baru, ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi? 4) Adakah dokumentalis baru dalam disiplin itu akan mengubah langkah menjadi sesuatu yang baru dan menggairahkan?

Joacim Hansson menekankan bahwa IP&I yang saat ini terpaku pada konsep informasi, ternyata konsep itu telah kehilangan makna utamanya sehingga tidak menarik lagi untuk dipelajari. Ditambahkan pula bahwa istilah "*information behaviour*" *is on the verge becoming nonsense*. Dalam situasi sekarang, riset mengenai dokumen muncul dengan materi yang mendasar untuk fondasi penelitian dan memberikan prasyarat yang berbeda untuk merumuskan masalah penelitian.

Menurut Hanson, bidang penelitian yang menarik adalah 1) *document use (in daily settings)*; 2) *bibliography*; 3) *the role of documents in research and scholarly communication*; 4) *document architecture*; 5) *studies of document based institutions such as libraries, archives and museums*; dan 6) *document genre theory*

F. MAURIZIO FERRARIS

Sejak 2005, Maurizio Ferraris telah menggagas teori baru yang dinamakan *Theory of documentality* (Ferraris, 2006, 2009, 2014). Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Teori Dokumentalitas. Ferraris memulai diskusi dengan mengetengahkan tiga objek, yaitu objek fisik, objek sosial, dan objek ideal. Objek fisik adalah objek yang berada dalam sistem ruang dan waktu tanpa harus selalu terikat atau terkait dengan subjek. Contoh objek fisik adalah gunung, pohon, batu, binatang, dan sebagainya. Objek ideal tidak tergantung pada ruang dan waktu dan tidak selalu terkait atau terikat pada subjek. Misalnya, seandainya hukum gravitasi tidak ditemukan oleh Newton, melainkan oleh Einstein maka hukum itu akan disebut hukum Einstein, meskipun isinya tetap mengenai gravitasi. Lalu apa yang dimaksud objek sosial itu?

Ferraris berangkat dari pemikiran filsuf Amerika John R. Searle tentang objek sosial. Searle menciptakan hukum *X counts as Y in C*. Maksudnya, dalam konteks C, seorang X adalah perdana menteri Y. Demikian juga selembar kertas X adalah lembar uang kertas Y, dalam konteks X. Secara umum, Searle mengatakan bahwa objek sosial berkedudukan lebih tinggi dibandingkan objek fisik dengan mengikuti hukum tersebut. Uraian lengkap tentang pemikiran Searle terdapat dalam buku *The Construction of Social Reality* (1995). Searle berpendapat bahwa dengan hukum yang sederhana itu, semua fenomena sosial yang kompleks dapat diterangkan.

Menurut Ferraris, rumusan Searle itu perlu dikoreksi dengan hukum yang ia diciptakan, yakni *Object = Written Act*. Hukum ini mengandung makna bahwa objek sosial adalah tindakan sosial minimal dilakukan oleh dua pribadi serta ditengarai dengan fakta tertulis pada kertas, *file* komputer, atau masih tetap menjadi ingatan dalam benak manusia. Dari hukum inilah Ferraris merumuskan *Theory of Documentality* yang saya usulkan terjemahannya menjadi dokumentalitas, dan maknanya adalah kekuatan dokumen (the *power of document*). Inilah salah satu perkembangan mutakhir menyangkut studi dokumen.

Ferraris melanjutkan, jika konsekuen pada *Object = Written Act*, sesungguhnya tidak akan ada masyarakat tanpa tulisan, sebaliknya, bisa ada tulisan tanpa masyarakat. Ferraris mengatakan jika objek fisik seperti gunung, sungai, laut, ataupun objek ideal seperti teori bisa ada tanpa tulisan, dia mengusulkan juga modifikasi dari tesis Derrida *There is nothing outside of the text* menjadi *There is nothing social outside of the text*. Itulah yang Ferraris sebut *documentality* dan akan berkembang ke tiga arah: 1) arah ontologi yang dapat menjawab apa sebenarnya dokumen itu; 2) arah teknologi dengan tugas bagaimana dokumen dipencarkan dalam masyarakat majemuk dan kompleks; 3) arah pragmatis, khususnya pragmatis dalam bidang hukum, tugasnya bagaimana melaksanakan distribusi yang efisien dalam masyarakat masa kini yang kebanjiran atau bahkan mengalami “tsunami tulisan”.

G. E. A. PLESHKEVICH

Menanggapi teori Ferraris tentang dokumentalitas, Pleshkevich menulis:

“The phenomenon of documentality is an object of scientific interest in the modern impetuously developing information society. The interest in its cognition is determined by the increasingly growing significance of documents in the life of the society as a whole and each person separately. All spheres

of public life are penetrated by documental information: science, culture, public, and economic relations are impossible today without documentality. It is documentality that makes information the major resource of the future.”

Mengakui bahwa studi tentang dokumen berkembang dengan pendekatan interdisiplin serta adanya teori dokumentalitas, Pleshkevich berpendapat bahwa perlu dirumuskan teori umum tentang dokumentalitas (*general theoretical knowledge of documentality*). Pleshkevich mengusulkan empat konsep pendekatan tentang studi dokumen yaitu 1) *the legal concepts*; 2) *source-study concepts*; 3) *gnoseological concepts*; dan 4) *management concepts*. Sebenarnya keempat konsep itu tidak berkembang terpisah karena memang ada keterkaitannya. Namun, dapat juga dirinci perbedaannya sehingga dapat dianggap masing-masing sebagai konsep yang independen.

Memandang dokumen dari sisi hukum dan pengadilan mudah dilakukan karena bukti akan kuat bila tertulis. Proses dan keputusan pengadilan, termasuk surat wasiat, memiliki aturan khusus untuk menyusun dokumen hukum. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan terkait yang kemudian disebut kenotariatan (notaris). Praktik pembuatan dokumen memang bermula dari hukum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Briet bahwa dokumen itu sebagai bukti pendukung fakta. Namun, tidak semua yang tertulis disebut dokumen. Hanya tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menjadikan suatu bukti tertulis yang menghasilkan dokumen.

Tentang konsep dokumen sebagai sumber pembelajaran (*source of study*) oleh Pleshkevich diterangkan bahwa paham positivis memandang status “dokumental” dikenakan pada objek terkait dengan proses penelitian. Juga merupakan instrumen penelitian sehingga objek tersebut sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengetahuan. Konsep ini penting dan merupakan langkah maju menuju kerangka teori konsep dokumen sebagai *study-sources*. Memahami dokumen

sebagai sumber, berarti juga memakainya sebagai landasan untuk memahami bahwa dokumentasi dibuktikan dengan adanya dokumen dan pendokumentasian dipahami sebagai kegiatan yang berbasis dokumen.

Konsep gnoseologis erat kaitannya dengan pemahaman bahwa substansi sebuah dokumen adalah informasi atau pengetahuan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa buku memiliki peran sebagai bentuk dokumentasi yang berisi pengetahuan. Evolusi konsep itu ternyata dipengaruhi paham positivisme. Hal yang mungkin kontradiktif dalam upaya identifikasi dokumen sebagai objek kognisi akan menjadi permasalahan kunci dalam ilmu dokumentasi. Harus dicari solusi agar dapat membantu menemukan pengetahuan baru tentang dokumen dan mampu mengembangkan ilmu dokumentasi baru. Sampai saat ini, baru dapat ditemukan arah yang memungkinkan untuk dikembangkannya ilmu dokumentasi baru.

Menyangkut pokok keempat mengenai pengembangan konsep manajerial dari dokumen, Pleshkevich menulis begitu dominannya aspek praktis dan teknis dibandingkan aspek teori. Hal itu juga terjadi pada lembaga ataupun perorangan di Indonesia yang lebih terjerumus dalam pragmatisme. Banyak upaya dilakukan untuk bertransformasi menuju manajemen dokumen dengan teknologi baru (berbicara tentang organisasi baru, peraturan yang mengatur layanan, dan lain sebagainya) tanpa berangkat dari teori yang benar. Semuanya seakan ingin seketika atau instan. Padahal jelas diperlukan proses membangun ilmu dokumentasi melalui penelitian. Fungsinya untuk menghimpun pengetahuan dari beragam bidang ilmu lain yang mendukung pengembangan ilmu dokumentasi baru. Salah satu kemungkinan adalah dengan mengembangkan ilmu dokumentasi baru secara interdisipliner dengan suatu teori umum tentang dokumen dan dokumentasi.

Pleshkevich merinci kronologi empat pendekatan tersebut di atas dalam dua karyanya berjudul “*Formation of the Scientific Concepts about the Documental Forms of Information: The Legal and Source–study Concepts of a Document, Scientific and Technical*”, dan “*The Formation of the Scientific Concepts about the Documental Forms of Information: The Gnoseological and Managerial Concepts of a Document*”. Dua artikel itu terbit pada 2010 dalam *Scientific and Technical Information Processing*, 37(4), 217–249. Satu lagi karya Pleshkevich, yang perlu dibaca untuk lebih mendalami pemikirannya adalah “*The Philosophical Problems of Identifying a Document as an Object of Cognition*”. Artikel itu muncul pada 2013 dalam *Scientific and Technical Information Processing*, 40(4), 245–252. Berikut posisi ilmu dokumentasi menurut Pleshkevich.

Informology	
Noocommunicology	
Documentology	
Scientific Discipline of Documentation	
General Scientific Discipline of Documentation	Special Scientific Discipline of Documentation
Particular discipline	Particular discipline
<ul style="list-style-type: none"> • Theory of document • Theory of document resources • Document linguistics • Documentary automated data retrieval system • Storage technology of document 	<ul style="list-style-type: none"> • Theory of document streams • Scientific discipline of documentation for management • Scientific discipline of film-photo-phono documentation • Scientific discipline of electronic documentation • Mapping science • Theory of science and technology documentation • Theory of special types of document; etc

Sumber: Pleshkevich, 2013.

Gambar 1. Posisi Ilmu Dokumentasi menurut Pleshkevich

H. RANGKUMAN

Gerakan dokumentalis baru yang dipelopori oleh 3 pelopor utamanya, yaitu Rayward, Buckland, dan Lund telah menghasilkan ilmu dokumentasi baru. Muncul pula tiga nama dengan pemikiran mereka atas konsep dokumen, yakni Hansson, Ferraris, dan Pleshkevich.

Harus diakui bahwa ilmu ini belum setenar ilmu informasi yang sudah mendominasi kehidupan perpustakaan dan lembaga sejenis. Kenyataannya, DOCAM sendiri sampai tahun 2016 telah terselenggara secara rutin tiap tahunnya. Dari topik yang pernah dibahas, dapat disimpulkan perkembangan jenis topik bahasan dan beragam disiplin ilmu telah ikut membahas dokumentasi. Bagaimana sebenarnya ilmu dokumentasi baru itu? Bab berikut akan membahas secara singkat tentang ilmu dokumentasi baru tersebut, yang pada dasarnya meletakkan dokumen sebagai pusat studi. Dokumen yang dimaksud memang tidak sebatas dokumen dua dimensi seperti yang sudah biasa dikenal.



BAB VII FOKUS PADA DOKUMEN

Bab ini membahas makna dokumen pada dua masa, yaitu era sebelum 2003 dan era sesudah 2003. Makna dokumen pada saat ini memang berbeda dari makna dokumen yang dikenal sebelumnya. Pertanyaan mendasar tentang dokumen adalah apa sebenarnya dokumen itu. Jawaban atas pertanyaan tersebut berkembang sejak masa Paul Otlet sampai saat sekarang.

Tiga referensi utama pada bagian ini merupakan pandangan dari para dokumentalis baru, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lund, W. N. (2010). Document, text and medium: Concepts, theories, and disciplines. *Journal of Documentation*, 66(5), 734–749.
- 2) Buckland, M. K. (2013). Document Theory: An Introduction. Preprint, Nov 7, 2013. Presented at the *Summer School on Records, Archives, and Memory Studies*, University of Zadar, Department of Information Sciences, Zadar, Croatia, 6–10 Mei.
- 3) Ferraris, Maurizio. (2014). Total Mobilization. *The Monist*, April 97, 2.

Ilmu dokumentasi (baru) telah menjadikan dokumen sebagai pusat objek studi. Dokumen dipelajari dari berbagai arah secara

komprehensif. Studi dokumentasi selalu berawal dengan pertanyaan apakah sebenarnya dokumen itu. Pertanyaan itu sudah muncul saat pertama Paul Otlet mengenalkan ilmu dokumentasi. Buku ini membagi pemahaman atas dokumen dalam dua masa, yaitu masa awal lahirnya dokumentasi sampai munculnya gerakan dokumentalis baru serta masa sesudahnya sampai sekarang. Atau tepatnya 1985–2003 dan 2003 sampai kini.

Mengapa 2003 sebagai tahun penanda? Ini karena secara resmi Pertemuan Tahunan Akademi Dokumen atau DOCAM mulai diselenggarakan untuk pertama kalinya. Saya sebut saja masa Pra-2003 dan Pasca-2003 agar lebih mudah menyebut dan mengingatnya. Tentu pemahaman dokumen pada masa Pra-2003 dapat dikatakan sudah menjadi sejarah. Namun, harus diakui bahwa pengembangan pemahaman dokumen pada masa Pasca-2003 selalu bertolak dari pemahaman masa Pra-2003.

A. MASA PRA-2003

Penemuan mesin cetak dan meluasnya revolusi industri di Eropa mengakibatkan semakin melimpahnya karya cetak dan karya tulis ilmiah. Keadaan ini menjadikan semakin sukar bagi seseorang untuk mengikuti perkembangan, meski dalam bidangnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan itu, Paul Otlet dan Henri La Fontaine mengerjakan apa yang mereka sebut dokumentasi. Mereka berpendapat bahwa buku tercetak memiliki berbagai kelemahan, seperti format kurang luwes, pembagian pada halaman dan paragraf tidak selalu sesuai dengan arti yang dimaksud, dengan narasi sering berulang dan tidak perlu.

Dengan kata lain, menurut mereka, buku kurang efisien dalam menyampaikan pengetahuan. Mereka memikirkan perlu adanya sejenis ensiklopedia berbentuk susunan kartu yang selalu dapat di-

tambah dan dimutakhirkan. Sistem jajaran kartu itu dapat merekam atau mencatat semua pengetahuan umat manusia sehingga pantas disebut otak dunia (*world brain*). Jadi, dokumentasi terkait dengan proses penyeleksian, pengoleksian, penyusunan, dan pengindeksan (manajemen) dokumen.

Tentu segera muncul pertanyaan mengenai apa yang disebut dokumen itu. Perhatian pertama tertuju pada teks tercetak karena dokumen termasuk sebagai bukti maka teks tertulis juga disebut sebagai dokumen. Demikian juga diagram, lukisan, peta, dan foto. Paul Otlet melihat artefak dalam museum juga sebagai sumber pengetahuan sehingga dimasukkan sebagai dokumen. Sampai pada tahap ini, saya menyimpulkan dokumen yang dimaksud Paul Otlet adalah dua dimensi tertulis atau tercetak, atau dalam format lain, serta dalam tiga dimensi tidak hidup. Singkatnya saya sebut sebagai **dokumen dua dan tiga dimensi mati**.

Pada 1951, Suzanne Briet menerbitkan manifestonya tentang dokumentasi. Briet menambahkan bahwa binatang termasuk dokumen. Briet menulis pamflet berjudul *What is documentation*.

“A document is a proof in support of a fact ... is a star a document? Is a pebble rolled by a torrent a document? Is a living animal a document? No. But the photographs and catalogues of stars, the stones in a museum of mineralogy, and the animals that are catalogued and shown in a zoo are documents.”

Briet menyebut antelope (spesies baru yang dipelihara untuk keperluan taksonomi dan penelitian) adalah dokumen primer. Semua deskripsi serta data pengamatan yang dicatat adalah dokumen sekunder. Dengan ditambahkan antelope sebagai dokumen, saya dapat mengatakan bahwa dokumen dilihat secara fisiknya terdiri atas dua kelompok, yaitu dua dimensi mati dan tiga dimensi mati atau hidup.

Secara umum, Briet memberi batasan tentang dokumen sebagai “... *all concrete or symbolic indexial signs, preserved or recorded toward the ends of representing, of reconstituting, or of proving a physical or intellectual phenomenon.*”

Baik Otlet maupun Briet berbicara tentang memori, preservasi, dan perekaman dalam kaitannya dengan dokumen. Agar benar menjadi dokumen yang benar, diperlukan adanya bentuk fisik yang permanen, berfungsi sebagai memori (ingatan) dan dapat disimpan secara fisik. Lebih lanjut, Briet mengatakan “*documentation as “a new cultural technique” and as “a necessity for our time”.*”

Pendapat lain tentang dokumen datang dari Donker Duyvis. Tidak hanya memandang dari sisi fisik atau materi saja, Donker memandangnya juga dari sisi spiritual. Dia menyebutkan tentang dimensi spiritual dokumen (*a spiritual dimension to documents*). Donker memaknai dokumen sebagai ekspresi pikiran manusia, sesuai dengan pendapat Otlet. Donker menggunakan pendekatan tersebut mengikuti kerangka *Anthroposophy* (suatu gerakan spiritual berbasis paham bahwa ada dunia spiritual yang komprehensif pada pikiran yang murni dan hanya dapat diakses oleh tingkatan tertinggi *mental knowledge*). Menurut Buckland, sebagai konsekuensi, Donker Duyvis sangat sensitif pada—apa yang sekarang kita kenal dengan—aspek kognitif media pesan. Donker menyatakan:

“*A document is the **repository of an expressed thought**. Consequently its contents have a spiritual character. The danger that blunt unification of the outer form exercises a repercussion on the contents in making the latter characterless and impersonal, is not illusory In standardizing the form and layout of documents it is necessary to restrict this activity to that which does not affect the spiritual contents and which serves to remove a really irrational variety.*”

Ranganathan dari India mempunyai pemaknaan lain mengenai dokumen. Ranganathan menyatakan dokumen dengan istilah *Micro-*

thought on a flat surface. Ranganathan juga menolak memasukkan materi audiovisual, radio, dan komunikasi melalui televisi sebagai dokumen.

“But they are not documents; because they are not records on materials fit for handling or preservation. Statues, pieces of china, and the material exhibits in a museum were mentioned because they convey thought expressed in some way. But none of these is a document, since it is not a record on a more or less flat surface”.

Ranganathan yakin bahwa dokumen bersinonim dengan hasil pikir yang terekam di kertas, yang dapat dipegang secara fisik, dan dapat dilestarikan sepanjang masa. Di Amerika Serikat, pandangan simplistik dicetuskan Louis Shore dengan mengatakan bahwa dokumen adalah rekaman tekstual, yang dapat mencakup komunikasi audio visual yang disebut *the generic book*. Jesse H. Shera juga sama sederhananya dengan menyebut apa yang dimaksud Louise Shore sebagai *the graphic record*.

B. MASA PASCA-2003

Seperti sudah disebutkan, keheranan Buckland atas bangkai burung di Museum Ornitologi baru terjawab setelah membaca pamflet Suzanne Briet yang diterima dari Rayward. Buckland pun mulai menekuni tulisan para pencetus gerakan dokumentasi di Eropa sejak akhir abad ke-19. Karya Paul Otlet, Henri La Fontaine, dan Suzanne Briet menjadi fokus pembelajaran Buckland. Nama Paul Otlet dan Briet menjadi populer, bahkan menjadi tema lomba karya mahasiswa perpustakaan, termasuk lomba design *T shirt* bergambar *antelope*.

Di Norwegia, Niels W. Lund membuka sekolah ilmu dokumentasi (School of Documentation Studies). Ada tiga alasan pembangunan sekolah tersebut, sebagai berikut:

- 1) Alasan budaya dan politis. Tidak berminatnya pustakawan bekerja di bagian paling utara Norwegia maka perlu dibangun sekolah setempat.
- 2) Adanya minat kuat dari kalangan pustakawan Norwegia untuk mempelajari *real academic program* sebagai landasan ilmiah dalam berprofesi.
- 3) Undang-Undang baru tentang kewajiban Deposit di Norwegia mengharuskan deposit dari semua bentuk publikasi, tidak terbatas hanya pustaka. Pelaksanaan perundangan ini memerlukan ilmu atau studi dokumentasi yang menjadikan dokumen umum (*generic document*) sebagai pusat studinya.

Buckland dan Lund mendirikan Document Academy. Akademi ini menyelenggarakan pertemuan Document Academy Meeting (DOCAM) tiap tahun sejak 2003. Dalam sidang-sidang DOCAM, ditampilkan hasil studi tentang dokumen, ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tanggapan positif atas DOCAM menghasilkan teori baru dokumentasi yang intinya adalah studi dokumen.

Buckland mengatakan bahwa antaranggota suatu komunitas, baik manusia maupun hewan, berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa lisan, maupun menggunakan objek fisik sebagai penanda akan sesuatu. Baik interaksi maupun kontrol sosial itu semakin lama menjadi tidak langsung karena menggunakan dokumen. Kita semakin tergantung pada dokumen. Menurut Buckland, istilah masyarakat dokumen (*document society*) lebih tepat daripada masyarakat informasi (*information society*). Masyarakat dokumen tentu berfokus pada dokumen dan dokumentasi.

Penelusuran Lund akan makna dokumentasi berawal dari mencari arti kata itu dalam kamus kuno bahasa Prancis. Asal mulanya dari bahasa Latin *documentum*. Arti kata ini dalam bahasa Latin terkait dengan contoh, model, pelajaran, mengajar, dan menunjuk-

kan. Dapat disimpulkan bahwa pelajaran yang disampaikan secara lisan adalah sejenis dokumen juga. Arti dan makna tersebut kini sudah terlupakan. Kini selain dilihat sifat bibliografisnya, dokumen jugaterkait dengan sifat hukum dan ilmiah. Dokumen adalah sesuatu yang mendukung fakta dengan bukti tertulis. Dalam sejarahnya, pengadilan selalu memutuskan perkara berdasarkan adanya bukti tertulis ini. Demikian juga dalam lingkup ilmiah. Ilmuwan menulis apa yang mereka temukan ke dalam artikel ilmiah. Siapa yang lebih dulu menulis dokumen ilmiah, dialah yang berhak atas penemuan baru itu. Ada tiga hal yang dapat disimpulkan. Pertama, dokumen pada dasarnya adalah objek tertulis. Kedua, dokumen adalah bukti. Ketiga, dokumen adalah pembawa informasi.

Terkait dengan kenyataan bahwa dunia semakin mendigital, Lund mempertanyakan kedudukan dokumen yang kita buat dengan program pengolah kata itu. Tidak ada wujud fisik dokumen, kecuali kita membuatnya tercetak. Hal ini berlawanan dengan konsep dokumen konvensional. Lund berpendapat bahwa dalam situasi digital, dokumen adalah konsep satuan yang diskrit (dalam hal ini disebut bit), yang diperlukan orang untuk dibaca, dilihat, atau didengar. Oleh karena itu, dokumen tidak harus berwujud objek fisik yang tetap. Hal itu sesuai dengan arti kata dokumen pada masa lalu, makna dokumen sebagai pelajaran maka ujaran ataupun bahasa tubuh juga merupakan dokumen.

Untuk menerangkan makna kata dokumentasi, Lund mengajak kita melihat batasan yang dimuat dalam Kamus *Oxford Latin Dictionary* (1982), yang diedit oleh P.G.W. Glare. Diterangkan bahwa documentation berawal dari dua kata Latin, yaitu “doceo” dan “mentum” menjadi “doceomentum”. Pada entri “doceo” dijelaskan ada lima arti (Lund, 2010, 743):

- 1) *to tell, inform (a person of a fact, etc.);*
- 2) *to instruct (an advocate);*

- 3) *to demonstrate, show (by argument or other means)*
- 4) *to teach a) person instruct in b) (w.inf.) to teach a person to do something, (also w. indir. command), c) (w.indir.qu.), d) (absol) to act as a teacher, teach.*
- 5) *to produce a play*

Arti pertama merujuk pada makna memberi tahu, memberi informasi kepada pihak lain tentang fakta dan sebagainya. Arti kedua menyatakan memberi perintah atau advokasi. Ketiga, mempertunjukkan atau memperlihatkan dengan argumentasi atau cara lainnya. Keempat berarti mengajar, menggunakan informasi atau menggunakan perintah tidak langsung; Juga mengajar seseorang untuk bertindak. Juga berarti bertindak; sebagai guru yang mengajar. Kelima, adalah menghasilkan pertunjukan.

Perbedaan lima arti tersebut terkait dengan situasi sosial yang berbeda dalam menggunakan kata *doceo*. Misalnya, dalam perbincangan pribadi, hukum, mengajar, dan seni. Akhiran *mentum* dalam bahasa Latin menunjuk kata benda tindakan, cara, atau hasil tindakan. Selanjutnya, Lund mendefinisikan dokumen sebagai hasil upaya manusia untuk mengatakan, menginstruksikan, meragakan, mengajar, atau mengadakan pertunjukan, secara singkat mendokumentasikan dengan memakai alat dan cara tertentu.

Konsep Lund ini bisa sangat luas. Hampir semua bisa dianggap dokumen. Namun, pada saat tertentu bisa sangat khusus. Saya cenderung mengatakan: **Semua yang melaksanakan fungsi dokumen adalah juga dokumen.**

Lund membangun teori umum dokumentasi yang disebut *complementary theory of documents*. Menurut teori ini, ada tiga hal komplementer yang tak terpisahkan dalam sebuah dokumen, yakni

- 1) aspek teknis dan teknologis sebuah dokumen;
- 2) peran sosial dari dokumen; dan

- 3) aspek mental, dalam hal ini relasi aspek intelektual dan kognitif antara individu dan dokumen.

... one should view the document from three complementary angles: physical, social, and mental, in combination enabling a complete description. This does not mean that the document possesses each of these features to some degree but that it can be viewed simultaneously as a physical, social, and mental phenomenon. From this perspective is how these dimensions interact with each other in different ways (Lund, 2009, 424).

Sementara itu, Buckland mengamati bahwa keberadaan literatur tentang teori dokumen belumlah memadai. Dia mengutip Lund bahwa secara umum literatur itu dapat dikelompokkan menjadi dua yang bersifat teknis mengenai dokumen itu sendiri dan yang bersifat sosial tentang peran dokumen dalam masyarakat.

1. Sisi teknis

Teori profesional tentang dokumen dan dokumentasi terkait erat dengan dokumen dan isinya (yang bersifat teknis dan teknologis). Pentingnya sebuah dokumen ditunjukkan dengan adanya minat kuat pada beragam segmen dari dokumen itu, termasuk:

- a) bibliografi: terkait dengan deskripsi dokumen dan seleksinya untuk tujuan khusus;
- b) temu kembali informasi: penyortiran dan seleksi rekaman dalam kaitannya dengan relevansi dokumen;
- c) bibliometri: (analisis sitiran) terkait dengan hubungan formal dan kuantitatif antara orang dan dokumen;
- d) kajian teks: termasuk studi interpretatif hubungan antarteks.

2. Sisi sosial

Teori umum dokumen erat kaitannya dengan apa yang dapat dikerjakan dengan dokumen. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun juga terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Coba kita

lihat dokumen pribadi yang kita miliki. Apakah fungsi sosial dari akta lahir kita, kartu penduduk dan paspor. Apakah dokumen itu dibuat hanya untuk diri kita saja? Tentu ada fungsi sosial lain yang mungkin tidak kita sadari. Daftar pertanyaan ini tentu dapat kita teruskan dengan jenis dan fungsi sosial dokumen dan akan menjadi daftar panjang tak terhingga. Dalam daftar panjang itu, akan ada “keberadaan” kita di dalamnya. Dengan kata lain, hidup kita tidak dapat terlepas dari adanya dokumen. Buckland menulis:

“The use of documents involves far more than fact-finding and problem solving. The complex totality of our lives and of our behaviour is our culture. Taylor’s classic definition of culture included “knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.” Documents, then, are used to shape our culture.” (Buckland, 2013, 6)

Lund menyebutkan ada tiga unsur dalam teori komplementernya. Namun, yang belum diterangkan menurut Buckland adalah unsur ketiga, yaitu sisi mental. Selayaknya ada literatur terkait dengan aspek mental dokumen. Ini menyangkut aspek kognisi serta keterlibatan intelektual perorangan dengan dokumen—selain literatur mengenai kebutuhan dan pencarian informasi. Apakah itu ada? Jika ada, di mana dan apa yang dibicarakan? Buckland menjawab tidak ada. Namun, ada sebatas ulasan permukaan yang mengatakan bahwa seharusnya ada literatur sejenis itu.

Literatur tentang aspek kognitif atau intelektual dari dokumen se-
layaknya mendiskusikan relasi mental perorangan terhadap dokumen, baik sebagai pencipta maupun sebagai penerima. Secara umum, dapat diharapkan adanya studi retorika dari pencipta dokumen dan studi semiotika dari para penerima dokumen. Bidang yang lebih khusus, antara lain psikologi pendidikan, hermeneutika, dan teori membaca. Literatur masih sangat sedikit dalam bidang dokumentasi. Menurut

Buckland, isu mendasar adalah bahwa seseorang hanya belajar dari dokumen karena pengaruh kuat dari apa yang sudah diketahuinya. Oleh karena itu, agar terjadi perkembangan, harus ada konsentrasi pada studi mengapa dan bagaimana dokumen digunakan.

Lebih lanjut, Buckland mengatakan bahwa budaya dan masyarakat hidup dan berkembang melalui komunikasi dan kolaborasi. Sayangnya, sudah tidak mudah melakukannya secara langsung karena kendala ruang dan waktu. Bahkan mungkin pihak lain sudah mati. Jalan terbaik adalah kembali ke dokumen. Apakah yang pernah dikatakan, dilakukan, atau ditulis orang yang kita maksud itu termasuk ide dan pemikirannya? Dokumen menjadi perekat masyarakat, terutama karena potensinya dalam memantau, memengaruhi, dan melakukan negosiasi serta relasi antarmanusia. Kita sekarang hidup dalam masyarakat dokumen seperti yang dinyatakan Buckland. Jika pada awalnya manusia berangkat dari kelisanan (*orality*), kemudian berkembang dengan keberaksaraan (*literacy*), kini masyarakat dokumen (*document society*) menjadi sebuah keniscayaan dengan keberadaan “kaki” ketiga, yaitu *documentality* (dokumentalitas).

Teori dokumentalitas (*Theory of Documentality*) dirumuskan oleh Maurizio Ferraris sejak 2005. Dia mengembangkan teori bertolak dari rumusan seorang filosof Amerika Serikat, John R. Searle (1995) tentang *a huge invisible ontology* atau *the ontology of social object*. Untuk menerangkan objek sosial, Searle merumuskan hukum *X counts as Y in C*. Dia mengatakan bahwa objek sosial adalah objek di atas objek fisik. Dijelaskan bahwa dalam konteks (kondisi) (C), objek fisik (X) adalah objek sosial (Y). Faktor terpenting dalam mewujudkan realitas sosial (*social reality*) yang disebut Searle sebagai *collective intentionality*. Rumusan Searle inilah yang dikoreksi oleh Ferraris (2005) dengan merumuskan hukum *Object = Written Act*.

Ferraris membedakan objek menjadi tiga kelompok, yaitu objek fisik, objek sosial, dan objek ide. Jika Searle mengatakan bahwa

objek sosial berkembang dari objek fisik maka Ferraris berpendapat bahwa objek sosial adalah tindakan sosial yang melibatkan minimal dua orang dicirikan dengan ditulis, baik pada kertas, file komputer, maupun hanya dalam benak manusia. Menurut Ferraris, tidak akan ada masyarakat tanpa tulisan atau inskripsi, meski hanya dalam benak manusia. Inilah teori *documentality* atau dokumentalitas. Ketergantungan realitas sosial pada dokumen inilah yang disebut dokumentalitas. Dapat juga disebut sebagai kekuatan dokumen (*the power of document*). Dengan demikian, ungkapan Derida *There is nothing outside of the text*, diubah Ferraris menjadi *There is nothing social outside of the text*.

Dengan semua pemikiran itu, teori dokumentalitas dapat berkembang menuju tiga arah. Pertama, secara ontologi mempertanyakan apakah dokumen itu. Kedua, lebih bersifat teknologis, berusaha menjawab bagaimana dokumen itu dipencarkan dalam masyarakat yang kompleks. Ketiga, lebih bersifat pragmatis, untuk menjamin distribusi dokumen secara efisien dalam masyarakat sekarang yang ditandai dengan ledakan tulisan. Menjawab pertanyaan pertama, Ferraris mengatakan bahwa cakupan dokumentalitas sangat luas, mulai dari ingatan manusia, catatan sederhana, sampai perjanjian internasional. Pemencaran berbasis dokumentalitas akan semakin mudah dengan adanya teknologi digital. Namun, semua yang kita lakukan seperti ini akan dan selalu terekam oleh pihak lain tanpa kita sadari melalui kamera pengawas, di mana-mana.



Sumber: Ferraris, 2012

Gambar 2. Transformasi Menuju Dokumen Lemah dan Kuat (menurut Ferraris).

Ferraris menggambarkan tingkatan atau transformasi jejak (*trace*) menuju dokumen lemah ataupun kuat dengan bangun segitiga berikut.

Sebagai penutup bagian ini, perlu disampaikan pemikiran Buckland menuju masa depan dengan cara ekstrapolasi dari masa dulu menuju masa depan dengan pengandaian tetap memakai komponen yang sama dan kesinambungan perkembangan teknologi masa depan. Ada empat pilar yang harus diperhatikan karena kita hidup bertumpu pada pilar itu. Keempat pilar itu adalah

1. *Penulisan*

Suatu cara merekam pembicaraan, telah dan akan selalu berkembang secara mantap menjadi cara merekam apa pun yang berfungsi sebagai dokumen.

2. *Percetakan*

Pengandaian teks, berkembang menjadi representasi apa pun terutama dengan teknologi tiga dimensi.

3. *Telekomunikasi*

Berdampak pada pergerakan dokumen dan dengan perbaikan yang berlanjut, secara simultan sekaligus menjadi interaksi.

4. *Penyalinan dokumen*

Tidak sekadar penggandaan karena dengan tersedianya kemampuan memperbaiki mutu gambar, dimungkinkan juga analisis terhadap gambar atau dokumen aslinya.

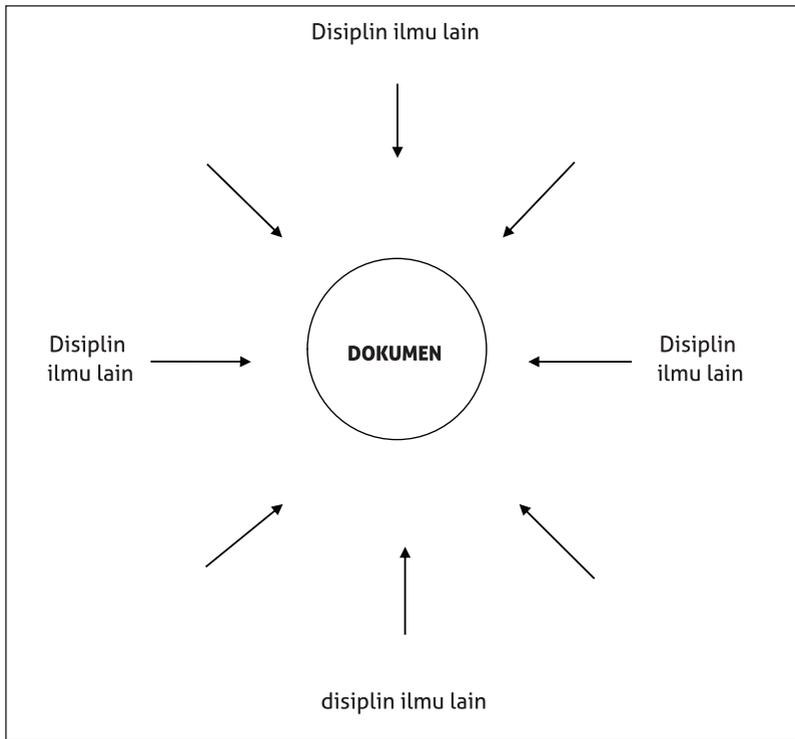
Ekstrapolasi dari masa lalu ini akan menuju perwujudan yang Buckland nyatakan dalam kalimat berikut:

“The simple extrapolation of past trends, then, leads to a characterized by ubiquitous recording, pervasive representations, simultaneous interaction regardless of geographical distance, and powerful analysis of the records resulting from that ubiquitous recording. It is not merely that new technology enables the rise of new document genres. It also allows disparate genres to be woven together much more completely than before, a new tapestry.”

Bertolak dari pemikiran Buckland, dapat digambarkan posisi dokumen yang berada di pusat sebagai objek studi berbagai disiplin keilmuan (Gambar 3).

C. RANGKUMAN

Berawal dari konsep dokumen yang terbatas pada dua dan tiga dimensi yang mati, kemudian berkembang hingga mencakup dokumen tiga dimensi dan hidup. Pengertian dokumen berkembang hingga memasukkan dokumen maya, baik analog maupun digital. Beragam disiplin ilmu dapat membahas dokumen dari titik pandang berbagai disiplin itu sendiri. Hal yang perlu dicatat adalah keterbukaan kaum dokumentasi baru yang dengan senang hati menerima bahasan berbagai disiplin ilmu tersebut. Posisi dokumen sebagai sentral pembelajaran sejalan dengan arah kembang lembaga-lembaga



Gambar 3. Dokumen sebagai Pusat Objek Studi

dokumenter yang semakin konvergen. Lembaga dokumenter adalah lembaga yang melaksanakan fungsi dokumentasi dan tidak hanya terbatas pada perpustakaan dan kearsipan. Konvergensi lembaga dokumenter dijelaskan dalam bab selanjutnya.



BAB VIII KONVERGENSI LEMBAGA DOKUMENTER

Kata kunci pada bagian ini adalah konvergensi dan lembaga dokumenter. Apa itu lembaga dokumenter? Mengapa lembaga dokumenter melaksanakan konvergensi? Bagaimana konvergensi itu dilaksanakan? Apa yang mendasari konvergensi itu?

Lembaga dokumenter dalam bahasan ini adalah semua lembaga yang mempunyai atau melaksanakan tugas pengelolaan dokumen dalam format apa pun. Dapat dikatakan bahwa semua lembaga sebenarnya adalah lembaga dokumenter karena harus mengelola minimal dokumen internalnya dalam format arsip *records*. Namun untuk bahasan di sini, konsentrasi lebih fokus pada lembaga perpustakaan, arsip, dan museum (*libraries, archive, and museum—LAM*). Tiga lembaga ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengelola koleksi. Saat ini masih terbiasa disebut koleksi pustaka, koleksi arsip, dan koleksi artefak. Namun, semua koleksi tersebut dapat disebut “dokumen”, dalam pengertian yang baru.

A. IDE KONVERGENSI

Konvergensi, khususnya atas fungsi perpustakaan, lembaga arsip, dan museum di dunia internasional kembali bergulir dan semakin

cepat bergerak sejak awal abad ke-21. Dikatakan kembali bergulir karena dari semula sebenarnya ketiga lembaga itu memang adalah satu lembaga yang melakukan sekaligus tiga fungsi tersebut. Mulai dikelola terpisah sejak ditemukannya mesin cetak yang mengakibatkan meledaknya karya cetak dan mendominasi koleksi perpustakaan yang semakin cepat dengan jumlah berlipat. Pertumbuhan yang cepat itu sering juga disebut dengan ledakan bahan tercetak (*printed materials*). Koleksi perpustakaan semakin besar sehingga perlu cara atau metode baru dalam mengelola koleksi pustaka itu. Ini yang mendorong munculnya sekolah perpustakaan yang menyiapkan tenaga untuk mengelola koleksi yang tumbuh semakin cepat. Jadi, awal (dibangunnya) sekolah perpustakaan karena ada keperluan dalam penyediaan pustakawan sebagai akibat ledakan pustaka.

Ledakan pustaka, khususnya pustaka ilmiah, juga menuntut suatu cara menghimpun dan menyampaikan informasi tentang sumber pengetahuan itu lebih efektif dan efisien. Ilmuwan seperti tidak mampu mengikuti semua perkembangan artikel ilmiah—meski di bidangnya sendiri. Paul Otlet dan Henri La Fontaine membuat sari karangan dari artikel-artikel itu dan menyalinnya dalam format kartu katalog. Kartu-kartu berisi ringkasan pengetahuan itu disusun secara sistematis menggunakan klasifikasi Universal Decimal Classification (UDC). Dengan susunan tersistem itulah pengetahuan dapat disimpan dan dikelola untuk kepentingan ilmuwan yang memerlukan. Kegiatan menghimpun, menyusun, mengelola, dan melayani permintaan pengetahuan terekam inilah yang disebut Paul Otlet dengan “dokumentasi”. Sejak semula, koleksi museum juga sudah dianggap sebagai “dokumen”. Jadi, ide konvergensi sebenarnya sudah lama dikerjakan sejak era Paul Otlet akhir abad ke-19.

Kini konvergensi perpustakaan, arsip, dan museum sudah menjadi tren di dunia internasional. Di negara maju, konvergensi sudah menjadi kebijakan budaya suatu negara. Hal ini diikuti dengan komit-

men pemerintah untuk menyediakan investasi besar, bahkan beberapa negara menjawab tantangan itu dengan pembentukan lembaga baru serta mendorong diskusi lebih intens antara perpustakaan, arsip, dan museum. Peningkatan kemudahan akses pengetahuan bagi pengguna tiga lembaga tersebut menyebabkan perlunya melakukan konvergensi. Pada dasarnya, koleksi tiga lembaga tersebut adalah sumber pengetahuan. Meski dalam bentuk berbeda, untuk suatu topik pengetahuan, jelas diperlukan sumber pustaka dari perpustakaan, arsip di lembaga arsip, atau artefak dari koleksi museum.

Upaya paling sederhana adalah mempermudah pengguna jasa agar dapat mengakses pengetahuan yang diperlukan tanpa harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Artinya, koleksi tiga lembaga itu harus diintegrasikan dalam satu sistem simpan dan temu kembali pengetahuan. Integrasi sumber daya pengetahuan kini semakin mudah dilakukan karena semuanya dapat disimpan secara digital. Inilah minimal wujud nyata dari konvergensi perpustakaan, arsip, dan museum. Konvergensi bisa berkembang lebih lanjut dengan partisipasi pengguna dalam menciptakan pengetahuan baru sebagai hasil analisis dan sintesis pengetahuan yang dapat diperoleh, baik dari perpustakaan, arsip, maupun museum.

Telah disebutkan bahwa konvergensi bergulir kembali sejak awal abad ke-21. Berikut adalah tonggak kronologi kejadian terpenting di Amerika Serikat, Kanada, dan dunia internasional berdasar penelusuran yang saya lakukan.

2004

Kanada adalah negara pertama yang menggabungkan Perpustakaan dan arsip nasional-nya, yaitu Library and Archives Kanada (LAC) pada 2004. Pemerintah Kanada berkomitmen untuk melaksanakan peran kunci dalam fungsi pengadaan, pelestarian, dan difusi warisan

dokumenter bangsa dan negara. Pemerintah Kanada tanggap dalam menyesuaikan dan menjawab perubahan situasi sosial, budaya serta ekonomi untuk mendukung lembaga dokumenter dalam melayani masyarakat Kanada.

2005

Pada 19 Juli 2005, Rare Books and Manuscripts Section (RBMS) dari Association of College and Research Libraries (ACRL), salah satu divisi American Library Association (ALA), menerima dana dari Institute of Museum and Library Services (IMLS) untuk melakukan kegiatan penelitian misi budaya dari perpustakaan, arsip, dan museum serta untuk menguatkan komunikasi dan kolaborasi dari tiga lembaga tersebut.

2006

Pada 22–23 Juni 2006, di Austin, Texas, diselenggarakan konferensi *Libraries, Archives, and Museums in the Twenty-First Century: Intersecting Missions, Converging Futures?* Dalam konferensi itu, hadir para pemuka (praktisi) perpustakaan, arsip, dan museum untuk mengidentifikasi kepedulian bersama terkait dengan misi bersama dalam mengumpulkan, melestarikan, dan menyediakan akses pada artefak budaya dunia beserta dokumen sejarah terkait.

2008

Online Computer Library Center (OCLC) menyelenggarakan lokakarya perpustakaan, arsip, dan museum. Lokakarya ini menghasilkan laporan *Beyond the silos of the LAMs: Collaboration among libraries, archives and museums*, diterbitkan oleh divisi OCLC Programs and Research.

2009

Dalam konferensi American Society for Information Science and Technology (ASIS&T) diselenggarakan panel dengan tema *Information Organization in Libraries, Archives and Museums: Converging Practices and Collaboration Opportunities*.

2009

Gerakan di Amerika Serikat ini ternyata segera menyebar luas secara internasional bahkan berkembang cakupan lembaga yang terlibat. Dalam simposium yang diselenggarakan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), disepakati perluasan lembaga yang terlibat sehingga menghasilkan perpustakaan, arsip, museum, monumen, dan situs (LAMMS) (*libraries, archives, museums, monuments and sites*).

2011

Association for Library and Information Science Education (ALISE) juga membahas konvergensi perpustakaan, arsip, dan museum serta implikasinya terhadap pendidikan program magister (*graduate professional education*). Pada tahun berikutnya, hal tersebut dilanjutkan.

2014

Panel Royal Society of Canada menyimpulkan tiga pokok terpenting, sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan dan arsip dalam era digital tetap vital bagi masyarakat Kanada. Perpustakaan dan arsip memerlukan tambahan sumber daya untuk memenuhi beragam layanan yang diharapkan. Kesenjangan dalam masyarakat akan menghilangkan

- hambatan warga masyarakat dalam upaya memperoleh apa yang mereka perlukan untuk peningkatan kehidupan.
- 2) Pustakawan dan arsiparis harus bekerja secara lebih harmonis dalam kerangka kerja sama nasional untuk melanjutkan pelestarian warisan tercetak dan mengembangkan serta memelihara akses digital. Lembaga pemerintah pada berbagai tingkatan harus berinvestasi sarana digital untuk selalu meningkatkan upaya ini.
 - 3) Program nasional digitalisasi, harus berkoordinasi dengan “lembaga memori” di seluruh negara untuk merencanakan dan mendanai untuk membawa warisan budaya dan pengetahuan Kanada ke dalam era digital. Hal ini dilakukan agar warga negara tetap yakin untuk memahami masa lalu dan mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman langkah menuju masa depan.

B. KOLABORASI INTERNASIONAL

Berawal pada 2008, *Conference of Directors of National Libraries* (CDNL) merumuskan visi jangka panjang tentang pembangunan perpustakaan dunia digital (*global digital library*). CDNL sepakat membangun suatu sistem distribusi global atas koleksi digital yang komprehensif, terbuka, terhubung tanpa ikatan, dan terakses universal melalui internet. Di dalamnya termasuk akses atas materi dalam koleksi lembaga pengelola warisan budaya ataupun koleksi pribadi, guna kepentingan penelitian, pendidikan, dan pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembangunan ekonomi serta untuk mempromosikan kesepahaman internasional. Hal ini sesuai dengan harapan penguatan kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan lain, seperti profesional dalam bidang warisan budaya, lembaga pengelola warisan budaya, lembaga ilmiah, organisasi pemerintah,

baik nasional maupun internasional, organisasi non-pemerintah, penerbit, lembaga jasa informasi, dan organisasi swasta lainnya.

Dalam kegiatan lain, lembaga-lembaga nonpemerintah yang menangani warisan budaya bertemu secara rutin membahas perihal kepentingan bersama. Pertemuan informal ini disebut LAMMS Coordinating Council. Pertemuan keenam pada Desember 2011 memutuskan mengadopsi *Statement of Principles on Global Cross Sectoral Digitisation Initiatives* serta mempromosikannya di antara para anggota yang terdiri atas:

- 1) International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),
- 2) International Council on Archives (ICA),
- 3) Coordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA),
- 4) International Council of Museums (ICOM),
- 5) International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
- 6) International Council for Scientific and Technical Information (ICSTI)

Enam organisasi itu sepakat pada tujuan bersama dalam mengumpulkan, merekam, menata, menyimpan, melestarikan, dan memberikan akses pada warisan budaya serta karya intelektual dunia dalam bentuk dokumenter. Berikut adalah *Statement of Principles on Global Cross Sectoral Digitisation Initiatives* (2012, 1–2).

1) a shared vision for global digital heritage

To this end IFLA, ICA, CCAAA, ICOM, ICOMOS, and ICSTI adopt the CDNL recommendations and will promote these recommendations through its international constituency:

Notwithstanding the fact that cultural heritage institutions operate in different environments, the above institutions encourage cultural heritage professionals in heritage institutions and/or with private collections to:

- a) *promote, encourage, and support the development of collaborative digital collections of all types;*
- b) *promote and support the connecting of the digital collections of national cultural heritage institutions, and in cross sectoral dialogue with one another, to provide a window to the cultures of the world and to open up their rich and diverse holdings;*
- c) *support cultural and linguistic diversity and multilingualism, and also respect indigenous cultures and cultural property;*
- d) *promote the development of digital tools, products and services and common standards through standard setting organizations within their own organizations and through the International Internet Preservation Consortium (IIPC), and with a particular focus on critical issues such as long-term digital preservation, authenticity, and understanding the needs of our users;*
- e) *ensure that learning on digital collection developments and best practice are shared between cultural heritage professionals, whether in cultural heritage institutions or working with private collections, at a cross sectoral level;*
- f) *increase digital capability and support digital developments by cultural heritage professionals, whether in cultural heritage institutions or working with private collections in the developing world;*
- g) *work for widespread appreciation of the importance of intellectual property issues in the digital age;*
- h) *advocate for solutions to intellectual property issues which strike the appropriate balance between the crucial public interest in*

ensuring access to information and ideas and also the rights of creators to be recognised and rewarded for their work;

- i) advocate for the development of the global digital collections and for regulatory support (particularly through legal deposit and intellectual property regimes) and financial support for digital developments;*
- j) strengthen the strategic collaboration of cultural heritage professionals, through their cultural heritage institutions or through their private collections, with national and inter-national government organisations, publishers, information providers, and other private sector organisations.*

2) long-term access to cultural heritage

IFLA, ICA, CCAAA, ICOM, ICOMOS, and ICSTI

- a) Facilitate discussion and promote understanding of and cooperation on matters of common interest to the international cultural heritage sector in the areas of copyright, cultural heritage protection and recovery, effective advocacy and lobbying at international level, and long term preservation of and access to its institutions cultural heritage.*
- b) Support the promotion, facilitation and advocating for long-term access to the cultural heritage, in all formats, preserved by cultural heritage professionals, whether in private collections, or in the cultural heritage institutions of the world.*
- c) Are committed to cultural and linguistic diversity.*
- d) Promote mutual understanding as well as the sharing of best practices, mutual support and professional networking.*
- e) Seek to facilitate the cross sectoral collaboration of cultural heritage institutions and cultural heritage professionals, and the integration of access to collections for the benefit of the global community.*

3) *interaksi akademisi dan praktisi*

Jauh sebelum konvergensi menjadi praktik dan kesepakatan dunia (pertengahan dasa warsa 1990), Rayward telah melontarkan prospek konvergensi digital (*digital convergence*) pada lembaga informasi, seperti perpustakaan, arsip, dan museum. Rayward memulai mengangkat wacana tentang informasi elektronik dan kemungkinan integrasi fungsi perpustakaan, arsip, dan museum. Hal itu disampaikan Paul F. Marty pada 2014 di *Library Trends*, 62 (3). Artikel itu berjudul “Digital Convergence and the Information Profession in Cultural Heritage Organizations: Reconciling Internal and External Demands”. Mengapa ia menjadi akademisi pertama yang mengemukakan konvergensi? Hal ini bertolak dari artikel Rayward pada 1996 berjudul “Libraries, Museums and Archives in the Digital Future: The Blurring of Institutional Distinctions” yang disampaikan pada Second National Preservation Conference di Canberra yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional Australia. Tulisan kedua Rayward pada 1998 dalam bidang ini berjudul “Electronic Information and the Functional Integration of Libraries, Museums, and Archives” dalam buku *History and Electronic Artefacts*.

Hal menarik yang harus saya sampaikan di sini adalah bahwa Rayward memang termasuk akademisi pertama yang memikirkan konvergensi sejak 1996. Namun, baru pada 2004 konvergensi menjadi kenyataan di Kanada, dengan disatukannya Perpustakaan Nasional Kanada dan Arsip Nasional Kanada menjadi Library and Archives of Canada (LAC). Wacana konvergensi di Amerika Serikat juga baru diawali pada 2005. Dapat saya sampaikan bahwa kaum akademisi memang secara teori dan ketajaman analisisnya sudah lebih dulu memikirkan kemungkinan yang kiranya terjadi mendahului pemikiran para praktisi. Apakah kasus ini terjadi dalam dunia perpustakaan dan kepastakawanan di Indonesia? Sayangnya, selama perjalanan panjang saya (40 tahun) sebagai pustakawan, jarang terjadi *scientific colloquium*

antara akademisi dan praktisi. Kita lebih sering menyelenggarakan seminar atau rapat kerja, tanpa ada dialog ilmiah yang serius antara akademisi dan praktisi.

Mengapa harus terjadi konvergensi? Menurut Rayward hal itu karena dunia semakin mendigital. Sumber daya yang ada dalam perpustakaan, arsip, dan museum mengalami digitalisasi atau memang terlahir sudah digital. Semuanya jadi lebih mudah terakses melalui jaringan global. Pengguna tidak perlu (mau) tahu di mana sebenarnya “informasi” yang dicari itu berada atau dari mana asalnya, padahal pustakawan, arsiparis, dan museolog-lah yang menyiapkan agar semua itu bisa tampil di internet dengan upaya profesional. Di sinilah terjadi beda persepsi antara pengguna dan pihak penyelenggara layanan informasi. Cepat atau lambat hal itu akan berpengaruh pada profesi pengelola sumber daya informasi. Mau tidak mau memang harus ada perubahan orientasi pendidikan calon profesional di bidang perpustakaan, arsip, dan museum.

Sejauh yang sudah dibahas di dalam buku ini, dapat dikatakan bahwa apa saja bisa dilihat sebagai dokumen, selama dapat melaksanakan fungsi dokumen. Dokumen bisa saja dalam bentuk dua dimensi (mati), tiga dimensi mati, tiga dimensi hidup, virtual, dan digital. Semua itu adalah dokumen karena bisa memberikan informasi atau pengetahuan. Apa pun dapat disebut dokumen selama bisa memberikan informasi atau pengetahuan. Apa yang dicari dan diperlukan pengguna adalah pengetahuan tanpa perlu mempermasalahkan wujud fisik dokumennya. Dengan demikian, jika pengetahuan yang ada di setiap dokumen itu dapat diakses serentak, konvergensi dapat terjadi atau dilakukan antarlembaga dokumenter. Ilmu dokumentasi akan menjadi ilmu inti dalam konvergensi perpustakaan, arsip, museum, dan lembaga dokumenter lainnya. Ilmu dokumentasi akan menjadi roh konvergensi antarlembaga dokumenter.

Harus diakui bahwa konvergensi fungsi masih memerlukan waktu untuk diterima di setiap lembaga dokumenter. Apalagi jika konvergensi dipersepsikan sebagai konvergensi fisik organisasi. Sampai sekarang pun masih kuat pendapat yang mengatakan bahwa perpustakaan itu berbeda dengan lembaga kearsipan dan berbeda juga dengan museum. Pendapat ini benar jika hanya melihat fisik lembaga tersebut. Namun jika dilihat dari fungsinya, ketiga lembaga tersebut melakukan fungsi yang sama dalam mengelola koleksi yang dalam hal ini adalah “dokumen”. Dalam setiap dokumen itulah terdapat informasi maupun pengetahuan. Para pengguna tiga lembaga itu pada dasarnya mencari informasi atau pengetahuan. Beragam format dokumen tersebut kini dapat disimpan secara digital. Inilah langkah awal dalam konvergensi fungsi. Secara teknis, diperlukan sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, standar pengelolaan beragam dokumen perlu disepakati.

Sebelum melangkah pada jawaban bagaimana melakukan konvergensi, terlebih dulu harus menyamakan persepsi mengapa konvergensi itu (harus) dilakukan. Uraian sebelumnya dirasa sudah dapat memberi jawaban atas pertanyaan itu. Mengetahui sesuatu tentu harus diikuti dengan langkah berikutnya, yaitu memahami dan selanjutnya menghayati untuk melaksanakannya. Dua langkah berikutnya tentu tidak semudah langkah pertama. Selain memahami keharusan konvergensi, pemahaman akan karakter lembaga dokumenter juga diperlukan. Apakah pustakawan benar memahami lembaga kearsipan dan museum? Apakah arsiparis juga memahami perpustakaan dan museum? Apakah kurator juga akan memahami dengan baik perpustakaan maupun kearsipan? Inilah hal pertama dan mendasar yang harus diselesaikan. Namun, yang utama dan pertama adalah kemauan untuk berkonvergensi. Apakah perpustakaan, arsip, dan museum MAU untuk melakukan konvergensi fungsi?

Kemauan konvergensi fungsi mensyaratkan adanya kesepakatan dari mana berangkat. Dengan memahami konsep baru tentang dokumentasi, saya yakin kemauan lebih mudah terwujud. Dengan kata lain, pemahaman akan ilmu dokumentasi (baru) menjadi syarat membangun kesepakatan atas konvergensi fungsi tersebut. Dapat dikatakan bahwa ilmu dokumentasi (baru) menjadi motor penggerak dalam melaksanakan konvergensi fungsi dari berbagai lembaga dokumenter. Dokumentasi menjadi roh lembaga dokumenter. Oleh karena itu, ilmu dokumentasi menjadi ilmu pokok lembaga dokumenter yang harus dipelajari, dipahami, dihayati, dan selalu dikembangkan.

C. RANGKUMAN

Gerakan konvergensi muncul karena pada dasarnya yang diperlukan dari beragam koleksi itu adalah pengetahuan—yang ada pada jenis koleksi pustaka, arsip, artefak, spesimen, tumbuhan, binatang, dan koleksi beragam lain baik dalam bentuk fisik maupun digital. Semula, pengelolaan beragam koleksi itu dilaksanakan secara terpisah dengan cara dan teknis sendiri-sendiri. Secara fisik, pengelolaan beragam koleksi bisa saja tetap terpisah, namun secara fungsi, beragam koleksi tersebut sebagai “pembawa” pengetahuan memerlukan kesetaraan konsep atau filosofi sebagai wadah pengetahuan. Pengelolaan berbagai koleksi tersebut kini menjadi mudah dipahami dengan pendekatan bahwa yang dikelola adalah dokumen. Dokumenlah yang menjadi objek ilmu dokumentasi. Oleh karena itu, fokus pada dokumen menjadi langkah awal dalam memahami pengelolaan berbagai lembaga dokumenter.

Mengakhiri bab ini, perlu ada pola pikir yang membimbing pemahaman proses dokumentasi yang menjadi fungsi utama sebuah lembaga dokumenter. Sebelumnya, lembaga tersebut berjalan seakan-akan sendiri-sendiri, bahkan kadang tanpa komunikasi di antaranya.

Ke depan, berbagai lembaga tersebut pada dasarnya menangani objek yang sama, yaitu dokumen dalam pengertian yang baru. Logika Dokumentasi diperlukan untuk memahami konsep dokumentasi, baik lama maupun baru. Pada bab selanjutnya dibahas inti dari buku ini, yaitu “Logika Dokumentasi”.

BAB IX

LOGIKA DOKUMENTASI

Bagian ini menjadi inti buku. Bab ini berisi pemikiran mendasar tentang pemaknaan dokumentasi. Sebelum membahasnya, terlebih dulu diuraikan pola dasar berpikir yang digunakan, yakni menguraikan logika umum, pemahaman tentang pengetahuan serta proses pemaknaan yang terjadi tentang dokumentasi. Proses pemaknaan itulah yang menjadi inti uraian bab ini. Selanjutnya, dibahas tiga sudut pandang tentang dokumentasi, yaitu sebagai proses, objek atau produk, dan sebagai ilmu.

Logika Dokumentasi dimaksudkan sebagai patokan (tanda-tanda) jalan dalam tamasya menuju pada pemahaman tentang dokumentasi. Bertolak dari pemahaman, dalam pelaksanaannya tentu diperlukan juga penghayatan. Dengan pemahaman dan penghayatan, diharapkan ada kebenaran dalam melaksanakan (sebagai proses) dan mewujudkan (sebagai produk) serta mengembangkan (sebagai ilmu) dokumentasi.

A. POLA DALAM BERPIKIR

Saya akan menjelaskan terlebih dulu pola dasar berpikir yang saya gunakan dalam mencari cara menerangkan dokumentasi. Pola tiga atau kebertigaan (*triadic*) dan bukan konsep dua atau pasangan

(*dyadic*) menjadi pola dasar saya dalam kegiatan berpikir. Berpikir dengan konsep kebertigaan selalu mengacu pada tiga elemen atau tiga kemungkinan terkait objek yang dipikirkan. Kita sebagai manusia memiliki tiga hal utama, yaitu lahir, hidup, dan mati. Selalu ada tiga hal utama dan pertama dari setiap fenomena. Bukan hanya hitam dan putih, namun selalu ada interaksi antara hitam dan putih yang (secara geometri) terletak di antara hitam dan putih. Interaksi ini menghasilkan abu-abu, baik abu-abu kehitam-hitaman abu-abu keputih-putihan. Pola kebertigaan saya terapkan dalam memikirkan dan menganalisis fenomena.

Tiga elemen pendekatan utama saya adalah

- 1) Karena konsep ini mengenai pola pikir, saya menjadikan “berpikir” sebagai elemen pertama dan utama. Berpikir hendaknya juga a) logis, b) analitis, dan 3) kritis (mengikuti pola kebertigaan).
- 2) Hidup fana kita ini ada dalam konsep ruang dan waktu. Jika digunakan ekspresi matematis, hidup kita adalah fungsi ruang (x,y,z) dan waktu atau $f(x,y,z,t)$. Parameter “x”, “y”, dan “z” dapat dibalik (*reversible*), sedangkan parameter “t” (waktu) tidak dapat terbalik (*irreversible*). Waktu selalu bergerak ke depan dan tidak akan mundur. Parameter “t” inilah yang mengekspresikan “dinamika”. Dengan kata lain, perubahan itu selalu terjadi hidup itu dinamis dan bukan statis.
- 3) Hidup di dunia ini ada dalam sebuah “sistem”. Saya melukiskan sistem dengan bangun grafis sebuah “segitiga sama sisi”. Sisi dan sudut segitiga merupakan kenyataan kebertigaan. Sistem terbagi atas sub-sistem. Sub-sistem juga terdiri dari sub-sub sistem. Dengan demikian pembagian itu dapat menuju tak berhingga. Hanya bangun segitiga sama sisi yang mampu melukiskan sub-sistem dan sub-sub sistem menuju tak berhingga. Segitiga sama sisi itu juga menjadi bagian segitiga sama sisi

yang lebih besar, menuju segitiga sama sisi yang besarnya tak berhingga juga. Pelukisan sistem dalam bangun segitiga sama sisi ini hasil diskusi saya dengan Dr. Nilyardi Kahar (alm.), seorang ahli fisika, pada awal dasawarsa 1980.

B. LOGIKA DAN PENGETAHUAN

1. Mengapa Logika?

Ada banyak keuntungan yang dapat kita peroleh dengan mempelajari logika, yakni mempertinggi kemampuan untuk menyatakan gagasan secara jelas dan berbobot, meningkatkan keterampilan menyusun definisi atas terminologi dan kata-kata serta memperluas kemampuan merumuskan argumentasi dan memberikan analisis secara kritis. Namun, keuntungan yang paling tinggi bagi kita adalah pengetahuan dan pengakuan bahwa akal budi atau nalar kita dapat kita terapkan pada setiap aspek hidup manusia (Sumaryono, 1998).

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa puncak perjalanan logika adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan pencapaian yang menggunakan akal budi dan yang akhirnya berguna bagi kehidupan manusia. Kita menggunakan logika untuk mengenal atau menuju pengetahuan atau memahami pengetahuan. Namun, apa sebenarnya pengetahuan itu?

2. Pengetahuan

Sudarminta (2002) menyebut delapan hal yang secara hakiki diandaikan dan memungkinkan adanya pengetahuan. Kedelapan hal tersebut adalah 1) pengalaman; 2) ingatan; 3) kesaksian; 4) minat dan rasa ingin tahu; 5) pikiran dan penalaran; 6) logika; 7) bahasa; dan 8) kebutuhan hidup manusia. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hal.

Pengalaman

Pengalaman adalah awal dari konstruksi pengetahuan, menjadi hal yang mendasari dan memungkinkan adanya pengetahuan. Ada tiga ciri pokok pengalaman manusia, yaitu bahwa pengalaman manusia 1) beraneka ragam, 2) selalu berkaitan dengan objek tertentu di luar diri kita sebagai subjek, dan 3) terus bertambah dan bertumbuh seiring bertambahnya umur, kesempatan, dan tingkat kedewasaan.

Ingatan

Pengalaman perlu diingat karena tanpa ingatan, pengalaman tidak dapat menjadi pengetahuan. Ingatan tidak selalu benar sehingga agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, perlu dipenuhi dua syarat, yaitu 1) memiliki kesaksian bahwa peristiwa yang diingat itu sungguh pernah dialami, atau disaksikan pada masa lalu, dan 2) ingatan tersebut bersifat konsisten dan dapat menjadi dasar pemecahan persoalan yang sekarang dihadapi.

Kesaksian

Kesaksian adalah penegasan akan sesuatu yang benar oleh seseorang atau beberapa orang saksi atas kejadian atau peristiwa, yang diajukan kepada pihak lain untuk dipercaya. Percaya adalah menerima sesuatu sebagai kebenaran berdasarkan keyakinan akan kewenangan atau jaminan otoritas orang yang memberi kesaksian.

Minat dan rasa ingin tahu

Pada dasarnya, semua manusia ingin mengetahui. Benar jika manusia adalah makhluk bertanya. Subjek yang mengalami sesuatu perlu memiliki minat dan rasa ingin tahu tentang apa yang dialaminya. Minat mengarahkan perhatian pada hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Rasa ingin tahu terkait erat dengan pengalaman kagum atau heran akan apa yang dialami. Kenyataan

tersebut berlaku untuk semua kegiatan mencari pengetahuan. Oleh karena itu, mengajukan pertanyaan yang tepat menjadi langkah awal untuk mendapat jawaban yang benar. Pertanyaan ini dapat diajukan pada diri sendiri, pada diri orang lain, ataupun dicari pada sumber pengetahuan terekam.

Pikiran dan penalaran

Manusia perlu melakukan kegiatan berpikir agar dapat memahami dan menjelaskan apa yang dialami. Terdorong oleh rasa ingin tahu, manusia berpikir dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan persoalan yang dihadapi. Kegiatan pokok pikiran dalam mencari pengetahuan adalah penalaran. Berkat kemampuan menalar, manusia dapat mengembangkan pengetahuannya. Berkat pikiran dan daya penalarannya, manusia tidak harus selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam dan sosial disekitarnya. Sebaliknya, manusia dapat mengubah lingkungan alam dan sosial sekitarnya untuk disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhannya.

Logika

Tidak setiap kegiatan berpikir dapat disebut penalaran. Hanya kegiatan berpikir yang mengikuti asas kelurusan berpikir dapat disebut penalaran. Logika digunakan dalam kegiatan penalaran. Namun, tidak semua hal yang logis selalu menghasilkan kebenaran. Penalaran sebagai kegiatan berpikir logis memang belum menjamin bahwa kesimpulan yang ditarik atau yang dihasilkan pasti benar. Walaupun pengetahuan yang diperoleh dari penalaran yang memenuhi hukum logika belum terjamin kebenarannya, logika tetap merupakan suatu dasar yang amat perlu untuk memperoleh pengetahuan yang benar.

Bahasa

Penalaran juga mengandalkan bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu hal yang mendasari dan memungkinkan adanya pengetahuan pada manusia. Seluruh kegiatan berpikir manusia terkait erat dengan kemampuannya sebagai makhluk yang berbahasa. Berkat kemampuan berbahasa, manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Berkat kemampuan tersebut, manusia bukan hanya dapat mengungkapkan dan mengomunikasikan pikiran, perasaan, dan sikap batinnya, tetapi juga menyimpan, mengingat kembali, mengulas, dan memperluas apa yang sampai sekarang telah diketahuinya.

Kebutuhan hidup manusia

Dalam menjalani hidup manusia memerlukan pengetahuan. Kebutuhan hidup manusia menjadi suatu kondisi yang menyebabkan, mendasari, dan mendorong perkembangan pengetahuan manusia. Keinginan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk dapat hidup merupakan bagian hakiki dari keberadaan manusia. Selain itu, pengetahuan juga merupakan suatu alat, strategi, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan dunia dan lingkungan sosial sekitarnya. Pengetahuan, baik yang umum maupun yang ilmiah, merupakan upaya menafsirkan, memahami, dan—akhirnya juga—menguasai dan memanfaatkan dunia sekitar guna menunjang pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Selain untuk tujuan pemecahan masalah hidup sehari-hari, pengetahuan kadang memang perlu dicari demi dirinya sendiri karena terdorong rasa ingin tahu atau demi cinta akan kebenaran. Manusia tidak hanya butuh menguasai dan memanfaatkan dunia sekitar, tetapi juga mengagumi dan memahaminya. Kemajuan pesat teknologi modern ternyata tidak hanya ditunjang oleh penelitian terapan demi menunjang pemenuhan kebutuhan, tetapi juga oleh penelitian dasar

di laboratorium melalui pelbagai percobaan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Penelitian sejenis itu sering dapat memberikan terobosan baru karena sumber daya alam yang sebelumnya masih tersembunyi menjadi terungkap.

Dikaitkan dengan dokumentasi, kedelapan elemen pengetahuan yang disebut Sudarminta itu saya simpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengalaman itu jenis dan jumlahnya dapat menuju tak ber-hingga sehingga manusia perlu berinteraksi (logis, kritis, dan analitis) dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam untuk mendapatkannya.
- 2) Karena keterbatasan ingatan otak manusia, perlu adanya sistem penyimpanan pengetahuan dan cara menemukan kembali apabila pengetahuan itu diperlukan.
- 3) Kesaksian akan lebih kuat jika tertulis atau terekam (dokumen). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa membuat dokumen adalah keharusan untuk bersaksi dengan benar.
- 4) Bertanya dan/atau menyimak rekaman pengetahuan yang ada, baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan alam adalah langkah awal mencari pengetahuan.
- 5) Berpikir dan bernalar menjadi kemampuan utama dan pertama bagi siapa saja yang belajar.
- 6) Tanpa logika, penalaran tidak mungkin dilakukan. Tanpa pe-nalaran, tidak akan ada pengetahuan yang benar.
- 7) Bahasa penting dalam pembelajaran dan pengembangan penge-tahuan. Interaksi antarpribadi dalam pengetahuan hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- 8) Pengetahuan adalah keniscayaan dalam hidup manusia.

Demikian pentingnya logika dalam upaya mencari pengetahuan. Itulah mengapa dipilih kata logika dan dipasangkan dengan kata dokumentasi dalam upaya mencari kebenaran tentang makna do-

kumentasi. Pemakaian kata dokumentasi haruslah dimaknai secara benar.

C. PROSES BERPIKIR

Memaknai dokumentasi didekati dengan melihat makna pada kalimat berikut:

Pada awal mula adalah hasrat (kehendak) manusia untuk mengekspresikan apa yang dirasakan dan/atau yang dipikirkannya.

Kalimat di atas semula digunakan dalam upaya mencari pendekatan untuk memahami kepustakawanan (Sudarsono, 1992). Seiring perjalanan waktu, kalimat itulah yang digunakan dalam upaya memaknai dokumentasi melalui proses logika berpikir. Selain itu, dilihat dari makna kata dokumentasi yang berarti, baik produk maupun proses, digunakan tiga pendekatan: 1) makna menurut kata kunci, 2) makna dokumentasi sebagai produk, dan 3) makna dokumentasi sebagai proses.

1. Pemaknaan Menurut Kata Kunci

Pada kalimat tersebut, dapat ditentukan kata kunci berikut (dalam huruf tebal).

Pada **awal mula** adalah **kehendak manusia** untuk **mengekspresikan** apa yang **dirasakan** dan/atau yang **dipikirkannya**.

2. Penjabaran Kata Kunci

a. Awal Mula

Menyatakan awal tindakan atau apa yang dikerjakan manusia. Apabila digunakan sistem referensi umum dalam pernyataan fungsi (x,y,z,t) , maka nilai "t" pada Awal Mula ini adalah sama dengan nol ($t = 0$).

b. Kehendak Manusia

Kata kunci ini mengandung makna “sengaja” atau “aktif”, bukan tindakan tanpa maksud. Jadi, memang suatu tindakan yang dikehendaki. Suatu tindakan “sadar”, bukannya tidak sadar. Dalam kehendak ini, manusia menyatakan keberadaan atau eksistensinya. Dalam bahasa filsafati, dapat dikatakan bahwa manusia “mengada”.

c. Mengekspresikan

Padanan kata ekspresi menurut Eko Endarmoko (2007) adalah “cetusan, luapan, pernyataan, ungkapan, air/seri muka, roman muka, rona, rupa, tampang”.

Kamus besar Bahasa Indonesia (1988) menerangkan arti ekspresi adalah 1) pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan dan sebagainya.). 2) pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang.

Lebih lanjut, arti kata mengekspresikan adalah mengungkapkan (gagasan, maksud, perasaan, dan sebagainya) dengan gerak anggota badan, air muka, kata-kata, dan sebagainya.

Dari batasan di atas, dalam ruang lingkup mengekspresikan, terlibat dua pihak, yaitu pihak yang melakukan (bisa tunggal ataupun jamak) dan pihak yang dituju (bisa tunggal ataupun jamak). Juga sudah disebutkan tentang cara atau teknik menyampaikan ekspresi tersebut, misalnya dengan kata-kata, gerak anggota badan, air muka, dan sebagainya (bahasa tubuh). Selain itu, yang penting adalah posisi, baik pihak pertama maupun pihak kedua, dapat dinotifikasikan dalam pernyataan fungsi (x, y, z, t) .

Posisi pihak pertama kita sebut (x_1, y_1, z_1, t_1) , sedangkan posisi pihak kedua adalah (x_2, y_2, z_2, t_2) maka dapat terjadi beberapa kemungkinan, sebagai berikut:

- 1) Jika $x_1 = x_2, y_1 = y_2, z_1 = z_2, t_1 = t_2$, maka akan terjadi ekspresi langsung (suara ataupun bahasa tubuh).
- 2) Jika nilai x_1, y_1, z_1 dan x_2, y_2, z_2 berbeda-beda, namun t_1 dan t_2 sama maka tetap dapat dilakukan ekspresi langsung dengan per-tolongan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- 3) Jika nilai x_1, y_1, z_1, t_1 dan x_2, y_2, z_2, t_2 berbeda-beda maka diper-lakukan upaya **menyimpan sementara** apa yang akan diekspre-sikan itu sampai kondisi butir 1) atau 2) terpenuhi agar terjadi ekspresi langsung.
- 4) Kondisi **sementara** itu untuk waktu yang tak berhingga atau $t = \infty$ dikatakan **abadi**

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses **dokumentasi** sesungguhnya adalah proses **mengabadikan**. Kata mengabadikan sudah dikenal masyarakat luas, khususnya dalam arti mengambil foto. Hal yang belum disebut dalam *Tesaurus Bahasa Indonesia* dan **Kamus Besar Bahasa Indonesia** adalah produk dari ekspresi tersebut. Jika disepakati bahwa dokumentasi adalah proses dan produk, doku-mentasi sebagai produk tentu dapat juga disebut sebagai “dokumen”.

d. Dirasakan

Apa yang dirasakan dapat dibedakan dalam arti dirasakan melalui indrawi dan dirasakan melalui non-indrawi.

- 1) Indrawi
 - a) Dilihat: pemandangan (video)
 - b) Didengar: suara (audio)
 - c) Dicum (aroma)
 - d) Dicecap (rasa)
 - e) Diraba

Objek yang dapat dirasakan dengan indrawi biasanya dapat dikatakan dan juga terukur (kuantitatif).

2) Non-Indrawi

Objek yang hanya dirasakan secara non-indrawi, seperti perasaan hati atau suasana hati, pada dasarnya adalah objek kualitatif. Hanya dapat didekati dengan indikator yang bisa sedikit memberi gambaran secara kuantitatif.

e. Dipikirkan

Objek yang dipikirkan dapat bersifat abstrak, imajiner, khayali, maya, mujarad, niskala, tan wujud, visioner, hipotesis, ideal, konseptual, teoretis, dan transendental.

D. TIGA SUDUT PANDANG

1. Dokumentasi sebagai Proses

- a) Manusia sebagai subjek mempunyai hasrat atau kehendak untuk mengutarakan pikiran dan atau perasaannya. Kepada siapa? Tentu kepada sesama manusia bukan? Sesama manusia ini bisa tunggal maupun jamak. Apakah sesama manusia itu berada di dekatnya? Jika sesama manusia itu berada berdekatan maka ekspresi itu bisa diwujudkan dengan komunikasi langsung, baik verbal ataupun non-verbal.
- b) Objek yang dikomunikasikan tentunya adalah apa yang dirasakan dan atau yang dipikirkannya. Dengan kata lain, komunikasi akan terjadi jika dua pihak itu (komunikator dan komunikan) berada dalam ruang dan waktu yang sama.
- c) Apakah komunikasi mensyaratkan keberadaan pada ruang dan waktu yang sama? Tidak selalu! Dalam dunia yang semakin modern ini, meskipun komunikator dan komunikan tidak berada pada ruang yang sama, apabila tetap dalam keberadaan waktu yang sama maka komunikasi tetap dapat dilakukan dengan bantuan teknologi komunikasi yang disebut telekomunikasi.

- d) Bagaimana jika keberadaan komunikator dan komunikan tidak pada ruang dan waktu yang sama? Jelas akan terjadi penundaan komunikasi langsung itu. Agar apa yang dirasakan dan atau dipikirkannya itu tidak terlupakan, diperlukan sarana pengingat atau penyimpanan sementara.
- e) Selanjutnya, pada saat komunikator dan komunikan berada di tempat dan waktu yang sama maka komunikasi langsung dapat dilakukan dengan menyampaikan apa yang untuk sementara tadi disimpan.
- f) Sarana pengingat atau penyimpanan sementara ini ada dua jenis, yaitu alamiah dan buatan.
- g) Sarana pengingat atau penyimpanan sementara yang alamiah adalah otak. Dengan otaknya, manusia mengingat apa yang akan dikomunikasikan. Otak adalah pusat ingatan manusia.
- h) Sarana pengingat atau penyimpanan buatan dapat diwujudkan dengan berbagai cara, mulai dari membuat tanda dalam bentuk guratan pada dinding gua, pohon, sampai dengan yang begitu canggih dalam wujud alat perekam sesuai perkembangan teknologi. Dengan kata lain, manusia memerlukan cara dan sarana untuk menyimpan atau merekam sementara atas apa yang dirasakan dan atau yang dipikirkannya.
- i) Jika kita melihat jauh ke depan, rentang waktu sementara itu menuju ke masa abadi. Dalam bahasa matematika, kita kenal dengan masa dari $0 \rightarrow \infty$.
- j) Bertolak dari pola pikir itu, saya memakai kata mengabadikan untuk menerangkan makna dokumentasi. Pada dasarnya, kegiatan (proses) **dokumentasi** atau kata turunannya **mendokumentasikan** adalah **pengabdian** atau **mengabadikan**.
- k) Dokumentasi sebagai proses, secara umum dapat dikatakan:
 - i) Pada dasarnya adalah proses siklus. Objek maya didokumentasikan menjadi objek nyata atau digital. Objek

nyata didokumentasikan kembali dokumen nyata lain atau digital (menggunakan TIK). Proses ini dilakukan berulang-ulang.

- ii) Kegiatan mengeksplisitkan pengetahuan taksit dan mengelola pengetahuan eksplisit.
- iii) Langkah dalam penciptaan pengetahuan dan ilmu.
- iv) Simulasi kerja otak.
- v) Fungsi yang harus dilakukan oleh semua orang.

2. Dokumentasi sebagai Produk atau Objek

- a) Apa yang dirasakan dan atau dipikirkan merupakan objek ekspresi manusia. Dengan kata lain, apa yang dirasakan dan atau dipikirkan adalah objek dokumentasi.
- b) Apa yang dirasakan, dapat dibedakan atas yang dirasakan secara indrawi dan non-indrawi (perasaan hati). Ditilik dari wujudnya, apa yang dirasakan itu selalu ada yang dapat dilihat dan diraba atau nyata (*tangible* atau *real*) serta yang tak dapat dilihat atau diraba (*intangible* atau *virtual*).
- c) Objek yang dipikirkan selalu dalam wujud tidak dapat dilihat atau diraba (*intangible* atau *virtual*).
- d) Dengan demikian, terdapat dua objek dokumentasi, yaitu yang nyata (*real, tangible*) dan yang maya (*virtual, intangible*).
- e) Objek virtual dapat berada pada dua lokasi. Lokasi yang pertama, ada dalam diri manusia. Lokasi kedua adalah jika objek itu tidak berada dalam diri manusia.
- f) Objek virtual yang berada dalam diri manusia ada dalam pikiran dan perasaan manusia.
- g) Objek dokumentasi virtual yang tidak berada dalam diri manusia, biasanya ada dalam komputer yang saat ini mayoritas tersimpan dalam bentuk digital. Kita namakan saja objek digital.

- h) Dengan demikian, kita kenal tiga objek dokumentasi, yaitu:
 - 1) objek nyata; 2) objek maya; dan 3) objek digital.
- i) Objek dokumentasi dapat pula disebut **dokumen**. Dengan demikian, dikenal 1) dokumen nyata; 2) dokumen maya; 3) dokumen digital.
- j) Objek dokumentasi (dokumen) nyata dapat berwujud dua dimensi dan tiga dimensi (Otlet, 1934). Artefak dalam museum adalah dokumen.
- k) Objek dokumentasi (dokumen) tiga dimensi dapat dalam status mati dan status hidup (Briet, 1951). Binatang yang dipelihara untuk tujuan khusus adalah dokumen.
- l) Objek dokumentasi (dokumen) tiga dimensi dan hidup dapat menciptakan dokumen baru non-benda, dalam gerak tubuh atau bahasa tubuh (Lund, 2003).
- m) Objek dokumentasi (dokumen) selalu dan akan selalu bertambah dan bahkan dapat dikatakan meledak seiring perkembangan kehidupan manusia.
- n) Maka jelas diperlukan cara untuk menyimpan informasi tentang semua dokumen yang ada dan dilengkapi juga dengan cara menemukan kembali secara cepat saat dokumen itu diperlukan.
- o) Jawaban atas semua keperluan tersebut adalah suatu sistem simpan dan temu kembali informasi (SSTKI) (Sudarsono, 1992).
- p) Selain sistem simpan dan temu kembali untuk informasi (deskripsi) tentang dokumen, diperlukan juga cara menyimpan koleksi dokumen secara fisik ataupun digital.
- q) Dalam hal ini diperlukan Sistem simpan dan tata kelola koleksi dokumen (SSTKKD), baik yang nyata maupun yang maya (digital).
- r) SSTKI dan SSTKKD dibangun dan dikembangkan dengan menerapkan teknik dan teknologi yang sesuai.

3. Dokumentasi sebagai Ilmu

- a) Gerakan dokumentalis baru berhasil membangkitkan kembali ilmu dokumentasi, bahkan muncul teori atau konsep baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Hal ini dapat dipahami karena ilmu dokumentasi baru meletakkan dokumen sebagai fokus studi. Dokumen sebagai objek diletakkan di pusat dan ditinjau serta dipelajari secara komprehensif dari berbagai arah dengan menerapkan berbagai disiplin keilmuan.
- b) Pengertian dokumen juga menjadi semakin luas. Jika waktu awal lahir dokumentasi hanya membatasi pada objek dokumen dua dan tiga dimensi yang mati, kemudian ditambahkan dan mencakup juga objek tiga dimensi hidup. Dengan gerakan dokumentasi baru, yang dimaksud dengan dokumen sudah tidak terbatas pada fisik dokumen, namun juga meliputi semua yang berpotensi dan dianggap sebagai dokumen meski dalam bentuk maya (virtual) sekalipun. **Semuanya adalah dokumen jika memiliki atau melaksanakan fungsi dokumen.**
- c) Kini, ilmu dokumentasi adalah ilmu yang objek garapnya adalah dokumentasi. Inti utama atau mendasar dari dokumentasi adalah **dokumen**. Selanjutnya, area utama kajian dokumentasi adalah 1) Dokumentasi sebagai proses; 2) Dokumentasi sebagai produk (dokumen); dan 3) Dokumentasi sebagai ilmu.
- d) Ilmu dokumentasi berkembang dan mencakup berbagai aspek yang sangat luas. Ilmu dokumentasi diletakkan dalam lingkungan budaya dan kemanusiaan adalah ideal karena kemelekatannya yang kuat antara dokumentasi keseharian hidup umat manusia.
- e) Studi ilmu dokumentasi perlu dibangkitkan kembali dan dikembangkan di Indonesia. Pengembangan ini dapat dimulai dari pengkajian proses dan produk tersebut terlebih dahulu. Pengkajian itu harus dilakukan secara akademik. Artinya, praktik

kaum dokumentalis perlu dikaji oleh para akademisi ataupun para pemerhati masalah dokumentasi.

- f) Hasil kajian tersebut hendaknya dapat ditindaklanjuti menjadi kolokium ilmiah antara para akademisi dan kaum praktisi. Suatu interaksi yang seharusnya secara berkesinambungan dilakukan.
- g) Pengkajian atau penelitian praktik dan fenomena dokumentasi bukanlah monopoli para akademisi. Kini, kaum praktisi semakin punya kesempatan melakukan penelitian. Namun, semua itu kembali lagi pada kebijakan lembaga tempat kaum praktisi bekerja.

E. RANGKUMAN

Uraian tentang logika dokumentasi dapat dirangkum dalam beberapa butir berikut ini.

- a) Dokumentasi pada dasarnya merupakan proses siklus.
- b) Objek nyata dan objek maya didokumentasikan menjadi objek nyata dan digital.
- c) Objek ini didokumentasikan kembali (antara lain memakai TIK) menjadi objek maya baru.
- d) Demikian proses ini terjadi berulang-ulang.
- e) Dokumentasi adalah langkah dalam penciptaan pengetahuan dan atau ilmu pengetahuan.
- f) Dokumentasi adalah kegiatan yang mengeksplisitkan pengetahuan tacit dan mengelola pengetahuan eksplisit.
- g) Dokumentasi adalah simulasi kerja otak.
- h) Dokumentasi adalah fungsi yang harus dilakukan oleh semua orang.
- i) Dokumentasi adalah objek, proses dan ilmu.

Butir-butir tersebut masih memerlukan penjabaran lebih lanjut secara ilmiah agar dapat diturunkan lebih rinci guna menyusun strategi penyelenggaraan dokumentasi. Dalam hal ini, termasuk sistem dan teknologi yang sesuai untuk digunakan. Semua itu adalah ranah Ilmu Dokumentasi.



BAB X

RANGKAIAN DIAGRAM PEMIKIRAN

Menyadari adanya tafsir atas pengertian dokumentasi selain dari tafsir yang dianut kebanyakan pustakawan, mendorong munculnya pertanyaan mendasar: “Apa sebenarnya dokumentasi itu?” Itulah langkah pertama dalam perjalanan panjang mencari makna dokumentasi. Sebagai praktisi, wajar jika pencarian dimulai dari pertanyaan bagaimana lembaga kerja mengartikan dokumentasi. Tentu bisa juga muncul pertanyaan mengapa dan untuk apa lembaga tersebut dibentuk. Hal itu biasanya dapat dipelajari dari Surat Keputusan Pembentukan Lembaga. Sumber lain yang dapat dipelajari adalah berbagai aturan pelaksanaannya. Semua aturan terkait dokumentasi pada tingkat nasional juga harus dipelajari.

Wajar juga—karena bekerja pada lembaga ilmiah—jika berpendapat bahwa praktik itu selalu ada teori atau ilmunya. Oleh karena itu, pencarian selanjutnya berpaling pada ilmu dokumentasi. Sayangnya, pada waktu itu ilmu dokumentasi serasa tidak nyata karena kalah dengan ilmu perpustakaan, yang kini disebut ilmu perpustakaan dan informasi. Pencarian makna ilmu dokumentasi juga dilakukan dengan mempelajari lahirnya dokumentasi di Eropa serta perkembangannya sampai saat ini di tataran internasional. Dalam bab ini disampaikan

rangkain diagram pemikiran sesuai pola pikir yang terjadi pada waktu itu. Berikut adalah uraian singkat masing-masing diagram.

Diagram 1. Kontradiksi Dokumentasi dengan Perpustakaan

Semua yang dipikirkan berawal dari kontradiksi antara dokumentasi dan perpustakaan. Satu pihak berpendapat bahwa dokumentasi adalah bagian kegiatan perpustakaan. Pihak lain berpendapat bahwa perpustakaan adalah bagian kegiatan dokumentasi. Situasi itu memerlukan solusi yang diharapkan dapat diterima sehingga menjadi kesepakatan.

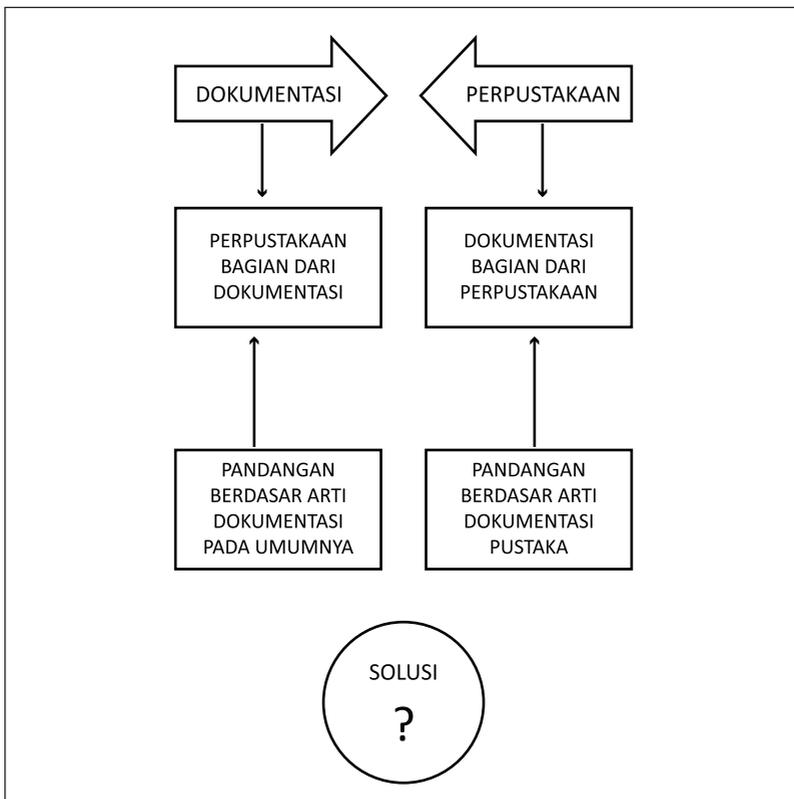


Diagram 1. Kontradiksi Dokumentasi <> Perpustakaan

Diagram 2. Empat Pendekatan Visi Dokumentasi

Urutan empat visi tersebut sesuai dengan urutan proses berpikir waktu itu. Karena bekerja di lingkungan LIPI, tidak salah memulai berpikir mencari dan memahami visi yang dianut LIPI tentang dokumentasi. Upaya ini dilakukan dengan penelusuran atas dokumen terkait, sejak dibentuknya Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 1956. Selanjutnya, menelusuri peraturan yang lebih tinggi yang ada pada sistem negara dan pemerintah Indonesia. Penelusuran ini menemukan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961. Terakhir, harus dicari visi dokumentasi pada tataran internasional. Perlu ditelusuri awal munculnya konsep dokumentasi yang ditandai gerakan di Eropa pada akhir abad ke-19. Visi ini sementara terlupakan sampai muncul kembali pada akhir dasawarsa 1990. Selanjutnya, Gerakan dokumentasi baru pada awal dasawarsa 2000 memunculkan konsep baru ilmu dokumentasi. Empat visi itulah yang digunakan sebagai empat pilar penyangga dalam merumuskan Logika Dokumentasi.

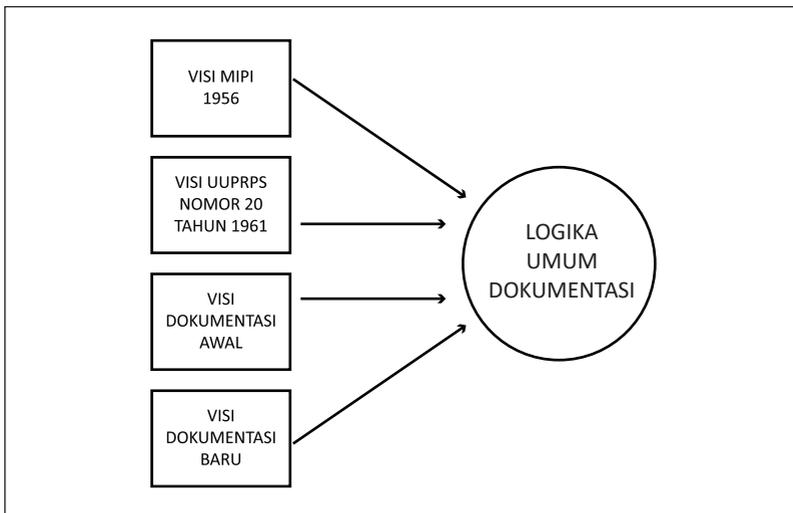


Diagram 2. Empat Pendekatan Visi Dokumentasi

Diagram 3. Kewajiban Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956. Tugas MIPI adalah:

- 1) Memajukan dan membimbing dalam arti kata yang seluas-luasnya usaha dan kehidupan pada lapangan ilmu pengetahuan, dengan berpedoman kepada kepentingan nasional khususnya dan kepentingan perdamaian dan umat manusia pada umumnya.
- 2) Memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai soal-soal, rencana-rencana, dan usaha-usaha yang bertalian dengan ilmu pengetahuan kepada pemerintah, baik atas permintaan, maupun atas kehendak sendiri.

Untuk itu, MIPI berkewajiban:

- 1) Memelihara sebaik-baiknya kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya dan penyelidikan dalam ilmu pengetahuan pada khususnya.
- 2) Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi antara lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh pihak partikelir.
- 3) Menyelenggarakan dan memberi bantuan kepada:
 - a) Usaha penyelidikan dalam ilmu pengetahuan.
 - b) Usaha penerbitan dalam lapangan ilmu pengetahuan.
 - c) Usaha penyebaran ilmu pengetahuan dalam masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia.
- 5) Mengurus lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan dana-dana untuk memajukan ilmu pengetahuan yang dipercayakan kepadanya.

- a) Menyelenggarakan perhubungan dengan badan-badan internasional dan badan-badan nasional dari negara-negara lain yang bekerja pada lapangan ilmu pengetahuan.
- b) Memberi laporan tentang soal-soal, rencana-rencana, dan usaha-usaha yang dimintakan pertimbangannya oleh pemerintah dan mengajukan usul-usul kepada kementerian-kementerian tentang kepentingan ilmu pengetahuan atau kepentingan negara yang bertalian dengan ilmu pengetahuan.
- c) Menyelenggarakan usaha-usaha lain dalam lapangan ilmu pengetahuan yang tidak termasuk perincian usaha-usaha tersebut.

Kewajiban pada Angka 4) itulah yang menjadi awal dari visi dokumentasi yang harus dipikirkan, dirancang, dilaksanakan, dan selalu dikembangkan. Fokusnya adalah *pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia*. Jadi visi dokumentasi mencakup dokumentasi semua objek. Perpustakaan hanya menjadi salah satu hasil kerja dokumentasi, dalam arti kegiatan dokumentasi yang berobjek pustaka.

Diagram 4. Rencana kerja awal MIPI, Januari 1957

Pada Konferensi Pertama MIPI di Bandung 7–9 Januari 1957, Ketua MIPI menyampaikan prasaran tentang tugas dan rencana kerja MIPI dalam masa depan yang disebut enam titik berat usaha. Butir keenam berbunyi: *meletakkan dasar supaya Majelis menjadi salah satu pusat dokumentasi dan penerangan mengenai soal-soal bertalian dengan ilmu pengetahuan*. Hal ini akhirnya juga menjadi kesimpulan nomor XI dari pertemuan selama tiga hari itu. Tertulis dalam laporan pertemuan: *Dianggap sangat perlu mulai sekarang meletakkan dasar-dasar supaya Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi salah satu pusat dokumentasi dalam soal-soal yang bertalian dengan ilmu pengetahuan*. Saat itulah benih dokumentasi yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 1956 ditanamkan.

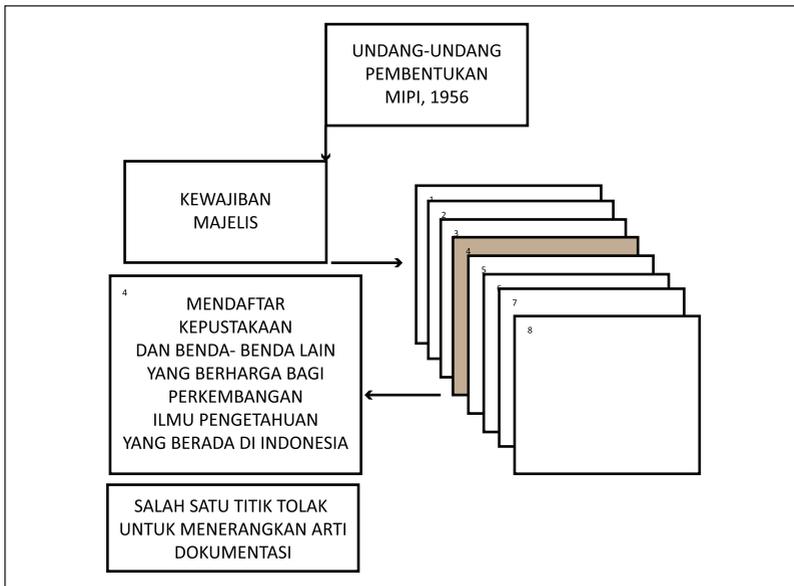


Diagram 3. Kewajiban Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

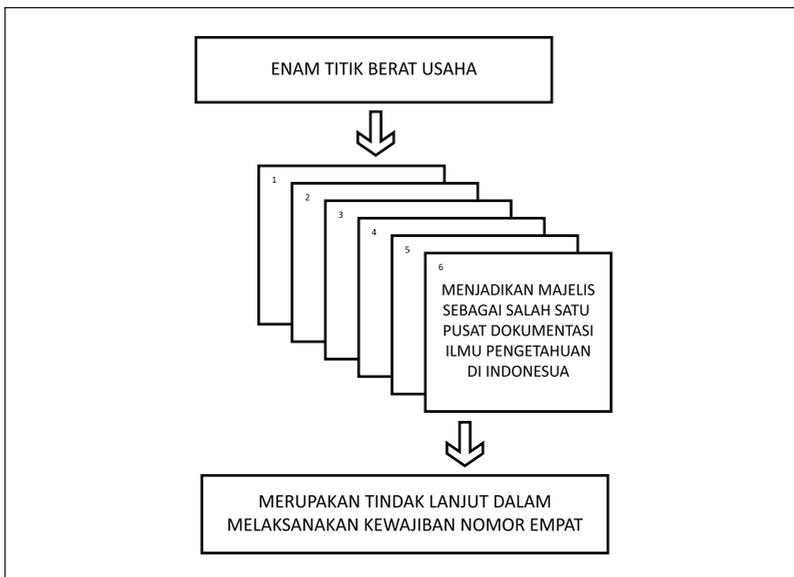


Diagram 4. Rencana Kerja Awal MIPI, Januari 1957

Diagram 5. Konsepsi Dokumentasi MIPI

Diagram ini menjabarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956. UU itu adalah UU yang membentuk MIPI. Dengan demikian konsepsi yang dijabarkan dapat juga disebut Konsepsi Dokumentasi MIPI. Meski sudah dirinci secara logis, namun masih juga menyisakan pertanyaan: “Apakah hasilnya hanya sebuah daftar atau juga mengumpulkan fisiknya juga?” Dalam perkembangan selanjutnya, baik untuk mengelola daftar maupun fisik objek dokumentasi, selalu memanfaatkan perkembangan teknologi yang terkait.

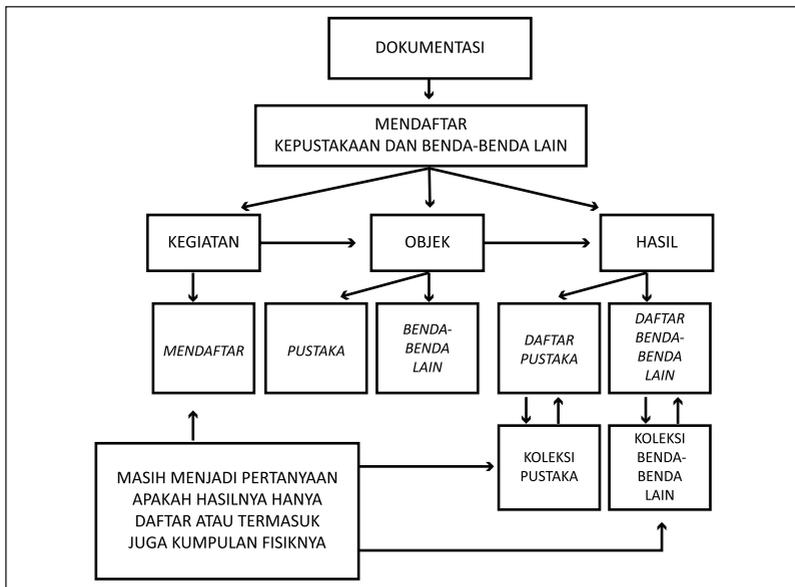


Diagram 5. Konsepsi Dokumentasi MIPI

Diagram 6. Isi Pokok Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961

Setelah mencari dan merumuskan visi dokumentasi pada lembaga internal, upaya berikutnya adalah mencari landasan atau pemikiran dokumentasi pada tataran nasional. Dari upaya ini, ditemukan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961, tentang *Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah*. Diagram 6 merinci isi pokok dari peraturan tersebut.

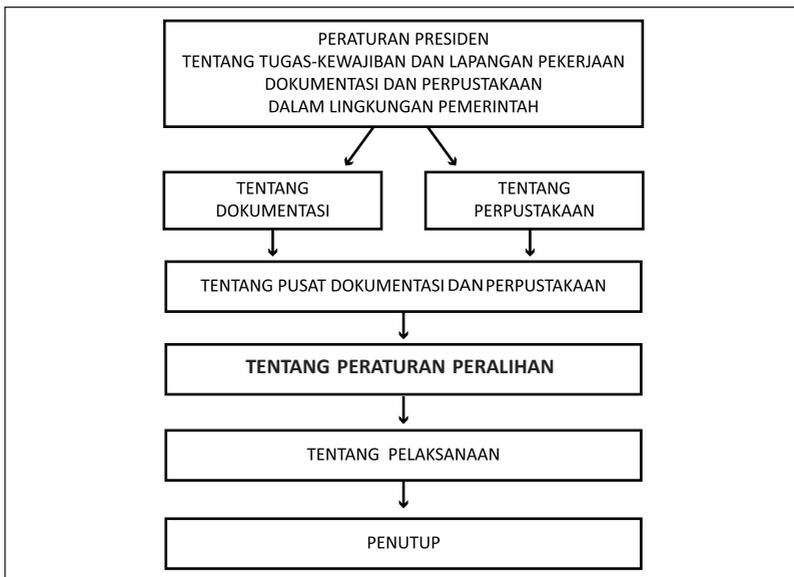


Diagram 6. Isi Pokok Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961

Diagram 7. Dokumentasi Pustaka Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961

Harus diingat bahwa peraturan ini hanya mengatur Dokumentasi Pustaka. Objek dokumentasi benda (*corporeel*) tidak diatur. Perlu diteliti lebih lanjut mengapa peraturan itu tidak mengakomodasi amanat yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1956 yang menyebut: "...benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia". Ini akan menjadi studi menarik dalam bidang perpustakaan dan dokumentasi di Indonesia. Diagram 7 merinci pokok-pokok terpenting dari peraturan tersebut tentang dokumentasi pustaka. Hal yang utama, dokumentasi adalah *menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti luas sebagai hasil kegiatan manusia*.

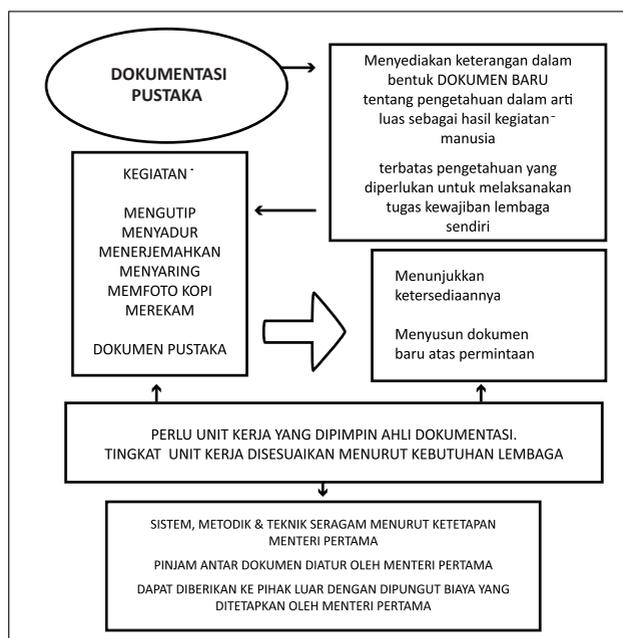


Diagram 7. Dokumentasi Pustaka Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961.

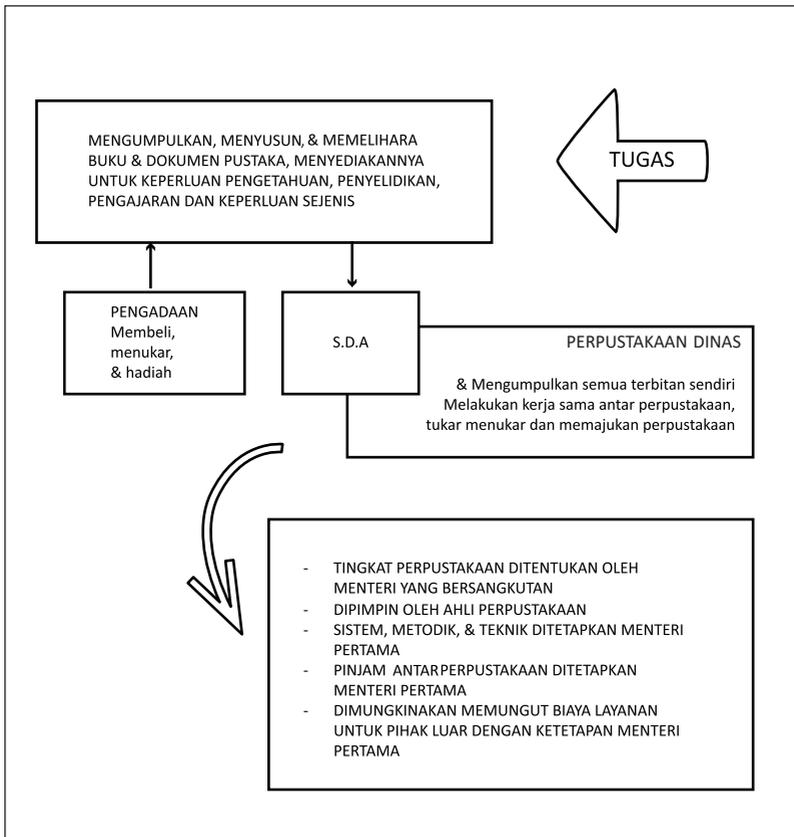


Diagram 8. Perpustakaan Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961.

Diagram 8. Perpustakaan Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961

Keberadaan dan tugas perpustakaan juga diatur dalam peraturan tersebut. Selain perpustakaan secara umum, diatur juga Perpustakaan Dinas yang tugasnya lebih ditekankan pada **mengumpulkan semua terbitan sendiri**. Diagram 8 menggambarkan keterkaitan, keberadaan, fungsi, dan karakter sebuah perpustakaan.

Diagram 9. Unit Dokumentasi dan atau Perpustakaan Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961

Dalam lembaga Pemerintah dimungkinkan dibentuknya pusat atau bagian dokumentasi dan/atau perpustakaan. Tingkat organisasi dalam hal ini pusat atau bagian, ditetapkan oleh menteri. Diagram 9 melukiskan kemungkinan hadirnya unit dokumentasi dan/atau perpustakaan.

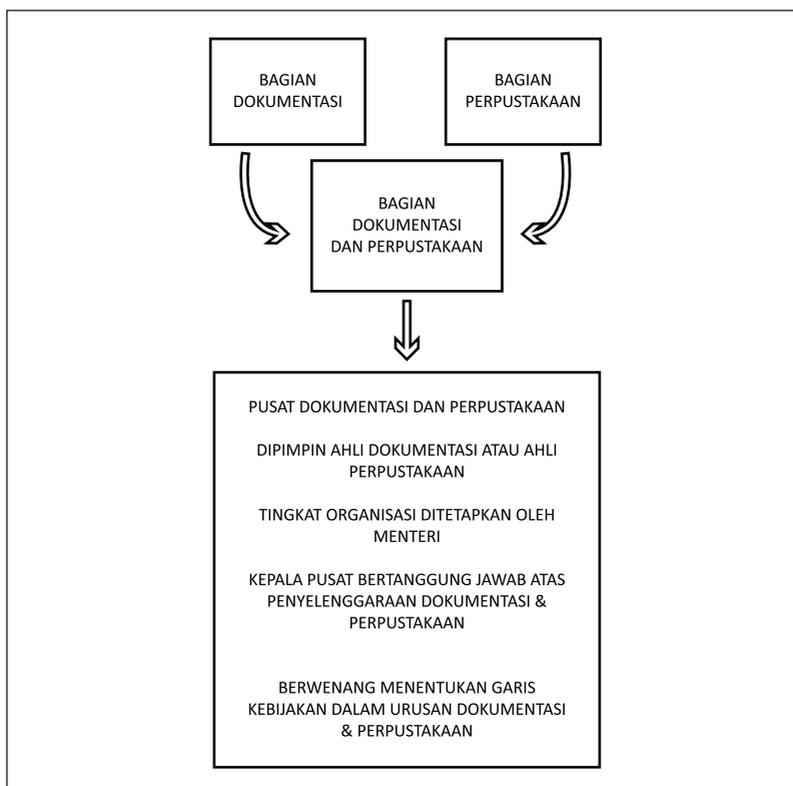


Diagram 9. Unit Dokumentasi dan atau Perpustakaan Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961

Diagram 10. Layanan Dokumentasi dan Informasi Literatur

Dalam perkembangannya, kata “informasi” menjadi sangat populer menggantikan kata “penerangan”. Kata tersebut sering dipasangkan dengan kata “dokumentasi” ataupun “perpustakaan” sehingga muncul terminologi “Dokumentasi dan Informasi” atau “Perpustakaan dan Informasi”. Diagram 10 menggambarkan posisi jasa dokumentasi dan informasi literatur dalam suatu lembaga dokumentasi dan informasi. Disimpulkan bahwa jasa dokumentasi adalah jasa yang menghasilkan modal atau aset bagi jasa informasi.

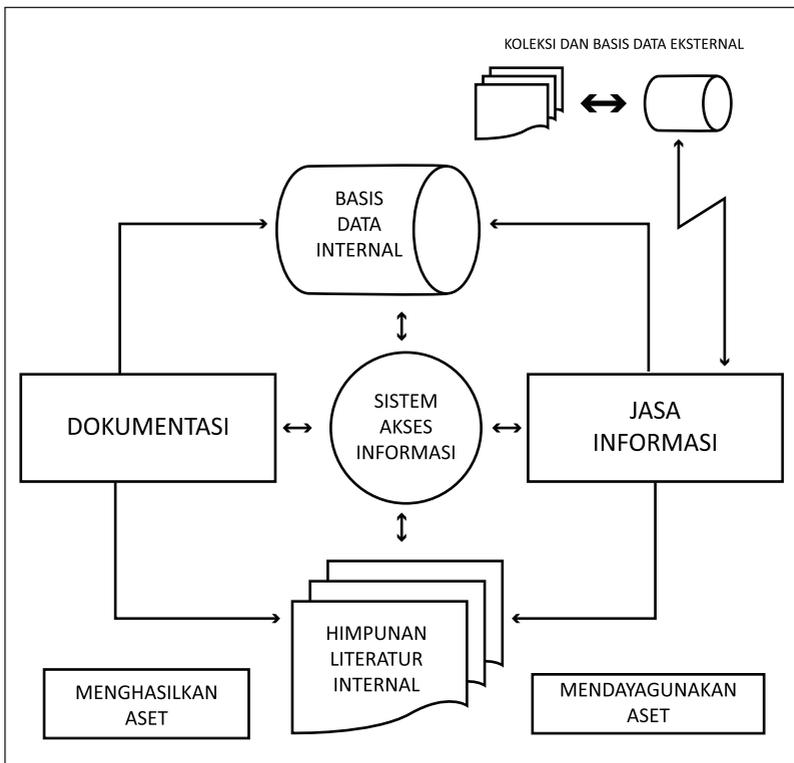


Diagram 10. Layanan Dokumentasi dan Informasi Literatur

Diagram 11. Lingkup Dokumentasi Literatur

Dalam Diagram 11 digambarkan proses dokumentasi literatur secara lebih rinci, namun tetap mendasar. Fokus proses dokumentasi ada pada tiga kegiatan, yaitu deskripsi fisik, deskripsi isi serta mengindeks dua hasil deskripsi tersebut. Selain itu, masih ada sisi lain, yaitu mengelola akumulasi, baik hasil deskripsi serta indeksnya maupun akumulasi dari objek yang didokumentasikan. Dengan kata lain, proses ini bertujuan membangun sistem simpan dan temu kembali, baik objek dokumentasi maupun informasi mengenai objek tersebut dalam suatu sistem.

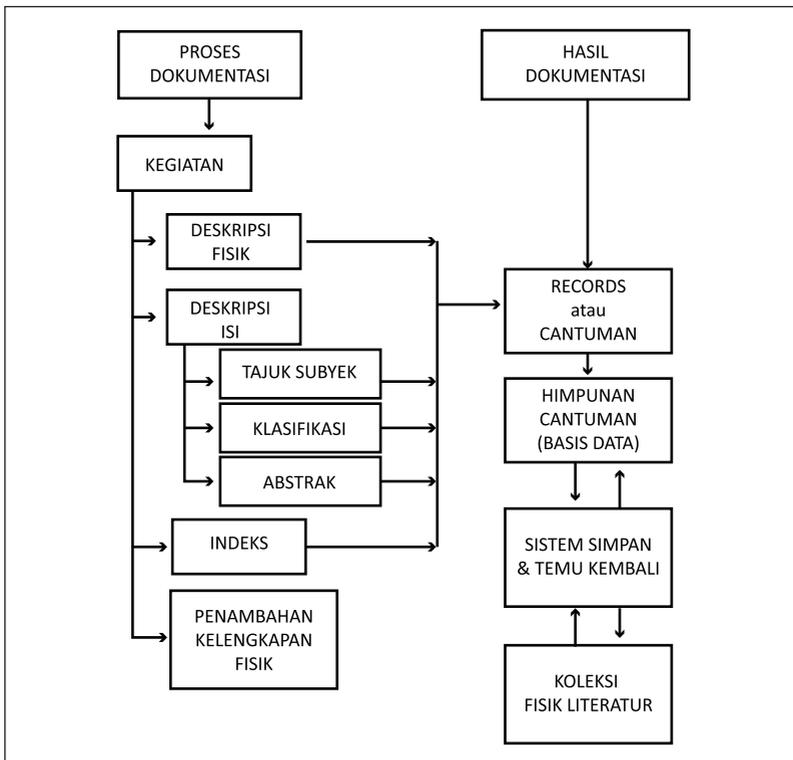


Diagram 11. Lingkup Dokumentasi Literatur

Diagram 12. Jasa Informasi Berbasis Literatur

Jika dokumentasi menghasilkan sistem simpan dan temu kembali akumulasi objek dan/atau informasinya, jasa informasi adalah semua upaya untuk mendayagunakan produk dokumentasi, baik internal maupun eksternal di mana saja (kini juga kapan saja) selama dapat diakses.

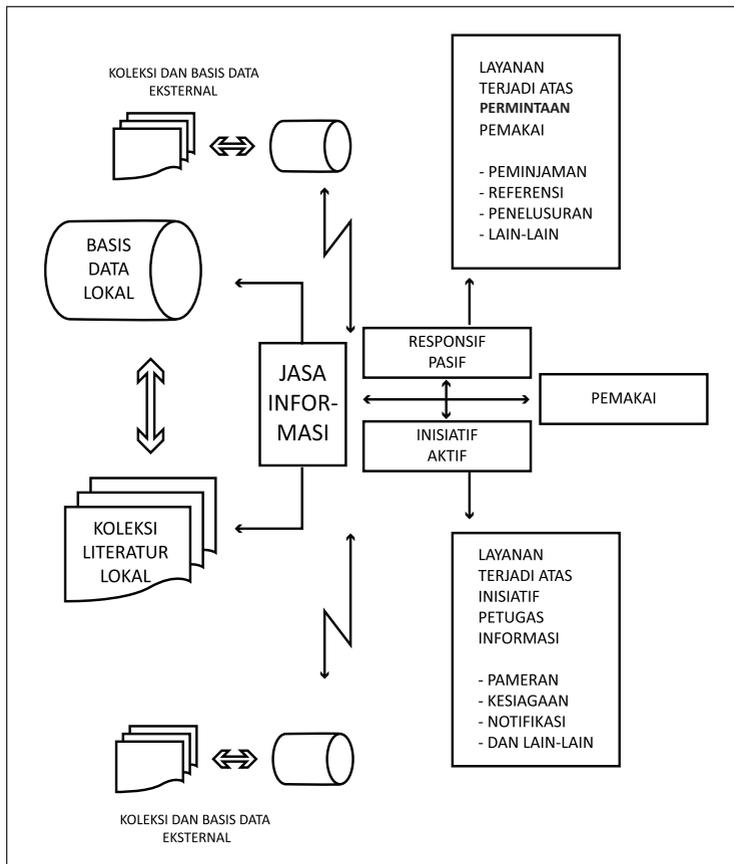


Diagram 12. Jasa Informasi Berbasis Literatur

Diagram 13. Awal Berpikir tentang Ekspresi Pemikiran dan atau Perasaan

Kalimat itu tercetus pada 1992 dalam artikel yang ditulis oleh Sudarsono berjudul “Pendekatan untuk Memahami Kepustakawanan” terdapat dalam buku *Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangan* (1992). Kalimat itulah yang menjadi titik tolak pemikiran Logika Dokumentasi. Diagram 13 menunjukkan kemungkinan atau konsekuensi yang dapat muncul dari adanya kalimat tersebut.

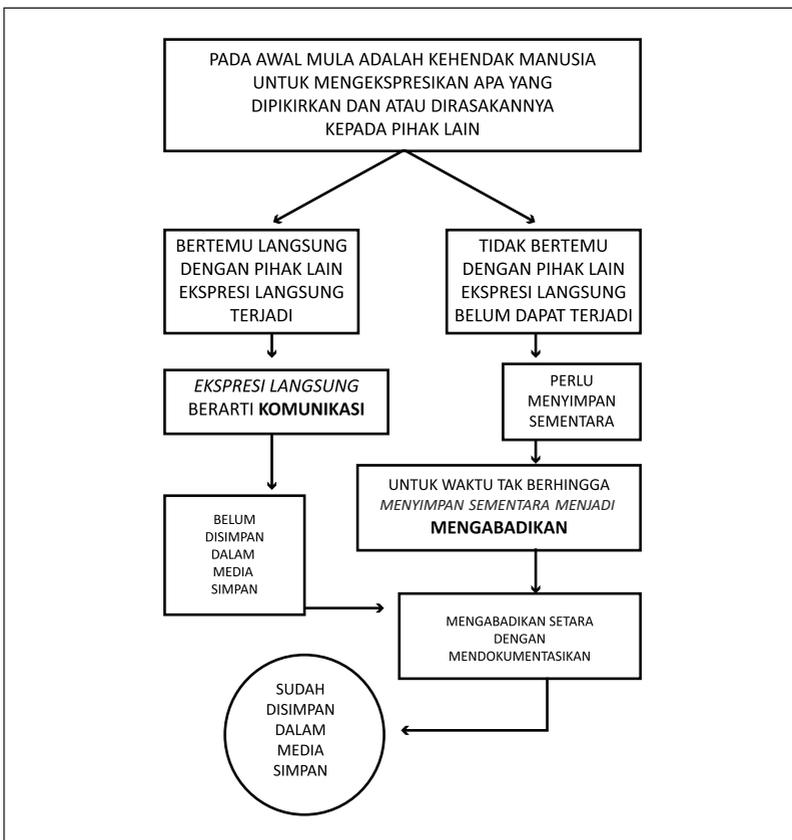


Diagram 13. Awal Berpikir tentang Ekspresi Pemikiran dan atau Perasaan

Diagram 14. Langkah Logis Dokumentasi

Penjabaran lebih lanjut dari kalimat awal dalam Diagram 13 menghasilkan beberapa tindakan logis yang menuju pada kesimpulan bahwa dokumentasi adalah mata rantai dalam lingkaran penemuan atau penciptaan pengetahuan dan/atau ilmu pengetahuan.

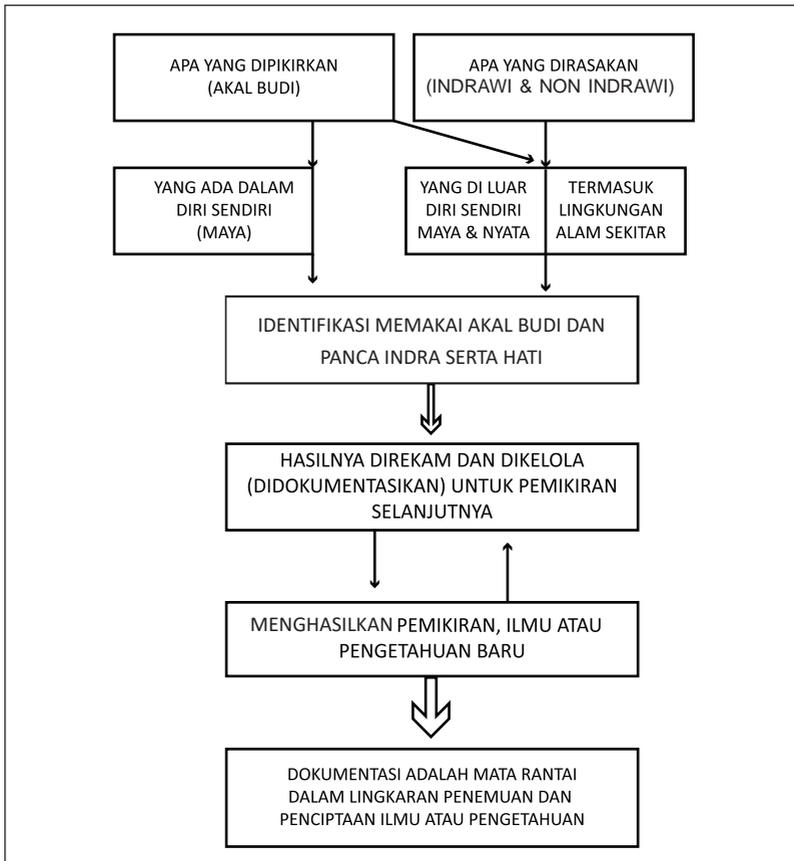


Diagram 14. Langkah Logis Dokumentasi

Diagram 15. Proses Dokumentasi

Berangkat dari merekam apa yang belum terekam dan mengelola apa yang sudah terekam menuju pembangunan sistem simpan dan temu kembali, baik untuk koleksi fisik maupun informasinya.

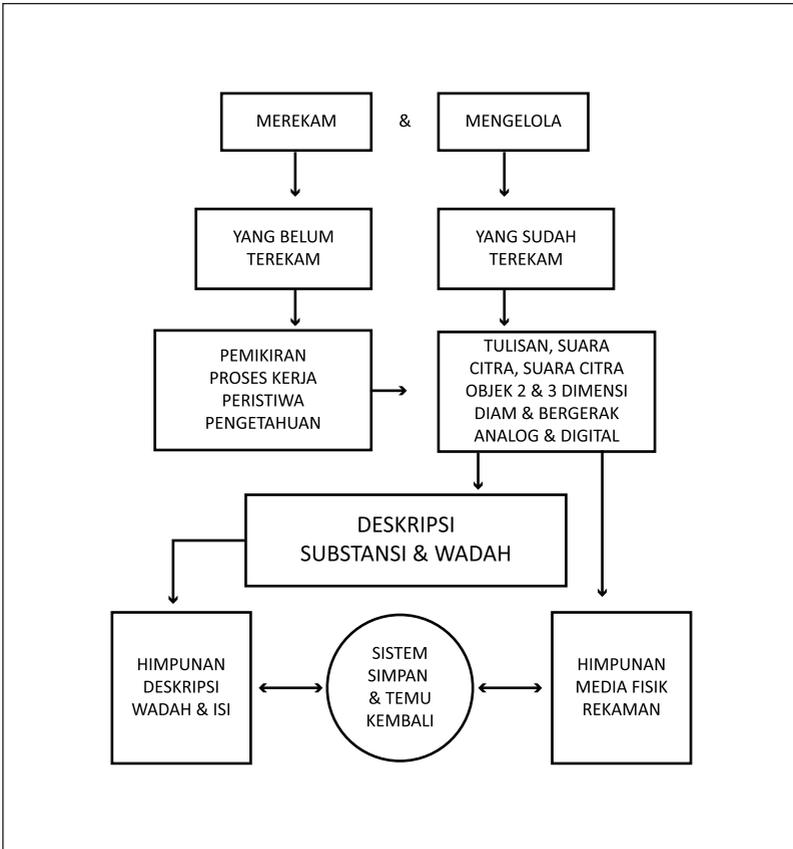


Diagram 15. Proses Dokumentasi

Diagram 16. Semesta Dokumentasi

Merupakan rangkuman pemikiran yang dimaksudkan agar lebih mudah melihat dan memahami konsep dokumentasi secara menyeluruh yang pada kenyataannya selalu berkembang. Logika ini pun harus selalu direvisi atau dikembangkan mengikuti perkembangan Ilmu Dokumentasi (Baru).

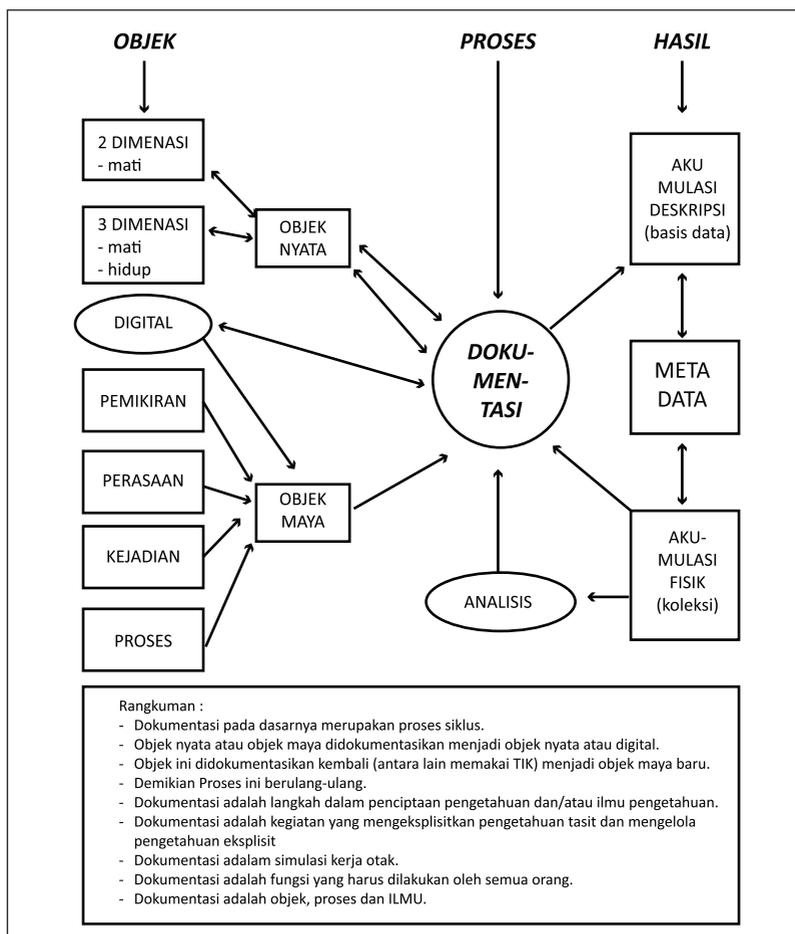


Diagram 16. Semesta Dokumentasi

Diagram 17. Dokumen sebagai Pusat Ilmu Dokumentasi Baru

Kini fokus dokumentasi adalah pada “dokumen”. Dalam hal ini, dokumen dilihat dan dipelajari secara menyeluruh dari setiap bidang keilmuan. Setiap bidang keilmuan juga memerlukan dan melaksanakan dokumentasi.

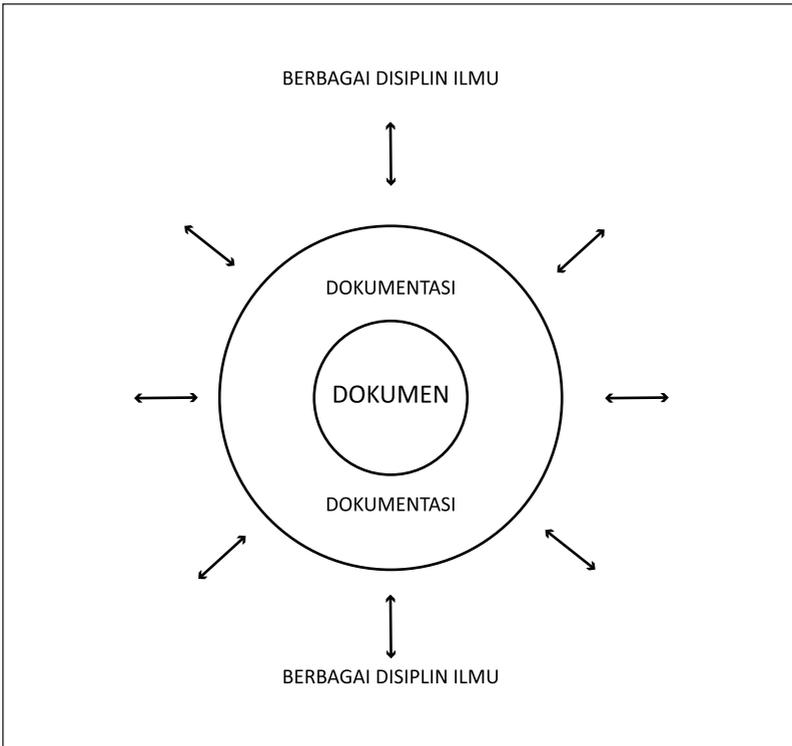


Diagram 17. Dokumen sebagai Pusat Ilmu Dokumentasi Baru

Rangkaian diagram ini juga merupakan dokumentasi pemikiran yang muncul selama proses pencarian makna. Rangkaian diagram ini menjadi ringkasan berbentuk diagram perjalanan beserta hasilnya dalam merumuskan Logika Dokumentasi. Dengan diagram ini, diharapkan proses pemaknaan dokumentasi dapat lebih mudah diikuti dan dipahami.

RANGKUMAN

Rangkaian diagram ini bermula dari adanya kontradiksi antara dokumentasi dan perpustakaan. Disadari perlu ada solusi atas kontradiksi tersebut. Perjalanan panjang mencari makna dokumentasi pun dimulai. Dalam perjalanan itu, ditemukan empat pilar yang kiranya dapat digunakan sebagai landasan arsitektur bangunan dokumentasi di Indonesia. Keempat pilar itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 (dikenal juga sebagai UUPRPS 20 Tahun 1961); Konsep awal dokumentasi Paul Otlet, dan Gerakan dokumentasi baru pada awal dasawarsa 2000. Bertumpu pada empat pilar itu, dibangun pemahaman atas makna dokumentasi baru. Kedudukan pemikiran dokumentasi baru inilah menjadi yang utama dan pertama dalam memahami dan melaksanakan kegiatan lembaga dokumenter. Konvergensi beragam lembaga dokumenter ini karena—dan berdasarkan—konsep ilmu dokumentasi baru yang meletakkan dokumen sebagai fokus objek studi. Semesta dokumentasi dan posisi dokumentasi digambarkan dalam Diagram 16 dan 17 sebagai puncak Logika Dokumentasi.

BAB XI BIBLIOGRAFI KRONOLOGIS LITERATUR ASING TENTANG DOKUMENTASI

Bibliografi dalam sebuah buku biasanya ditampilkan di bagian akhir dan bukan merupakan bagian pokok sebuah buku. Buku ini agak berbeda karena menampilkan bibliografi sebagai bagian pokok, meskipun tetap ditempatkan pada bagian akhir. Hal ini dilakukan tentu bukan tanpa maksud. Meski bibliografi ini menjadi bagian akhir dari buku ini, diharapkan menjadi awal tindak lanjut pembaca. Saya berharap pembaca mendapat gambaran tentang perkembangan menyeluruh terkait **Ilmu Dokumentasi**. Bibliografi Kronologis ini dapat dikatakan sebagai Historiografi Perkembangan Dokumentasi. Sebuah pertanyaan saya ajukan: “Bagaimanakah tanggapan sidang pembaca setelah menyimak bibliografi ini?” Jawaban inilah yang saya maksud sebagai langkah awal.

Harus diakui bahwa ilmu dokumentasi terlupakan dari pemikiran banyak pustakawan di Indonesia. Upaya mengingatkan kembali layak dilakukan. Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengingatkan kembali. Saya melengkapi buku ini dengan menginventarisasi dan menyusun bibliografi khusus tentang dokumentasi. Bibliografi idealnya harus lengkap. Namun—mohon maaf—ternyata belum dapat dilakukan seorang diri. Meskipun begitu, diharapkan pembaca sudi memulai permenungan tentang

apa yang akan dilakukan terkait dengan Ilmu Dokumentasi setelah menyimak bagian ini. Mudah-mudahan cukup ada tanggapan positif terhadap ilmu dokumentasi dan banyak yang kembali mau menekuni, baik untuk memahami, menghayati, maupun mengembangkannya.

Untuk memudahkan pembaca menangkap cerita yang tersirat, saya menyusun bibliografi ini secara kronologis. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti perjalanan “dokumentasi” yang sudah lebih dari satu abad. Paul Otlet dan Henri La Fontaine mendirikan IIB pada 1895. Selanjutnya, menjadi FID pada 1937. Meski kini FID sudah tiada, dengan adanya gerakan dokumentasi baru, kita perlu menyimak kembali ilmu dokumentasi. Dengan adanya DOCAM sejak 2003, minat mempelajari dokumentasi sangat tinggi. Salah satu konsekuensi gerakan dokumentalis baru itu, ilmu dokumentasi dikonstruksi ulang dengan menempatkan dokumen sebagai pusat studi. Dengan demikian, cakupan ilmu “dokumentasi baru” menjadi semakin luas.

DOCAM adalah pertemuan tahunan Document Academy yang awalnya terselenggara atas kerja sama University of Tromsø di Norwegia dan University of California di Berkeley. Dalam bab ini juga sudah disampaikan beberapa makalah dalam DOCAM 2014 sampai 2016. Dari ragam makalah dalam DOCAM, diketahui cakupan studi dokumen memang menjadi luas. Bibliografi ini tentunya diawali dengan karya Bapak Dokumentasi, Paul Otlet dan Henri La Fontaine, pada akhir abad ke-19. Dilanjutkan oleh Suzanne Briet dari awal sampai pertengahan abad ke-20. Baik karya Paul Otlet maupun Suzanne Briet yang ada dalam daftar ini hanyalah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bibliografi lengkap karya Paul Otlet sebagai hasil studi W.B. Rayward dapat diakses pada <http://people.lis.illinois.edu/~wrayward/otlet/otbib.htm>. Karya Paul Otlet dalam bibliografi ini terdaftar pada tahun asli terbit atau pada tahun 1990 saat terbit terjemahannya. Bibliografi lengkap karya Suzanne Briet sebagai hasil

studi M.K. Bucland, dapat diakses di situs School of Information, University of California.

Bibliografi kronologis ini baru sebatas data mentah yang harus selalu disempurnakan dan dimutakhirkan. Banyak pemikiran yang dapat dikembangkan dari data mentah ini. Selanjutnya, dapat diolah agar lebih bermakna dan bernilai akademik. Minimal ada tiga hal terpenting, yaitu 1) siapa saja tokoh dokumentasi dunia? 2) mengapa dan bagaimana mereka memikirkan dan mengembangkan? serta 3) bagaimana pasang surut pemikiran sehingga ilmu dokumentasi kini sangat berkembang mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia?

Seharusnya bibliografi kronologis ini juga mendaftarkan semua literatur dalam negeri sendiri. Sayangnya, saya belum dapat melakukan penelusuran, kecuali beberapa karya dalam negeri yang saya gunakan sebagai referensi dalam menyusun buku ini. Karya itu saya sebutkan di dalam teks, namun tidak saya daftar dalam bibliografi ini. Penelusuran karya nasional tentang dokumentasi menjadi yang pertama harus dilakukan dalam upaya bersama melanjutkan cerita tentang dokumentasi.

Tidaklah berlebihan jika diharapkan ada sekolah perpustakaan yang berminat menekuni, mengajarkan, dan mengembangkan ilmu dokumentasi. Syukur jika sekolah tersebut menjadikan dokumentasi sebagai bidang kekhususannya. Pertanyaan perlu diajukan kepada para praktisi. Kapan praktik perpustakaan kita bisa semakin bersinergi dalam fungsi, dengan berbagai “lembaga dokumenter” lainnya seperti lembaga kearsipan, museum, sinematek, diskotik, herbarium, kebun raya, cagar alam, monumen, situs, dan lain sebagainya?

Sejak semula, Paul Otlet sudah melakukan upaya konvergensi, meskipun baru terbatas pada fungsi perpustakaan, lembaga arsip, dan museum. Dengan perkembangan teknologi digital yang super

cepat, pencari informasi sudah tidak membedakan lagi fisik koleksi. Bagaimana kita menanggapinya?

Pembaca yang ingin mengenal dan mempelajari sejarah sejak lahirnya dokumentasi tentu dapat menyimak bibliografi ini mulai dari lahirnya dokumentasi, yaitu era 1891. Bagi sejawat yang hanya ingin mengetahui gerakan dokumentasi baru beserta teori dan konsep yang juga baru, dapat menyimak bibliografi ini sejak era 1990. Marilah kita mulai simak dan cermati bibliografi kronologis berikut.

1891

Otlet, P. (1891). Something about bibliography. Dalam W.B. Rayward (Transl & Ed.), *The international organization and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier.

1896

Otlet, P. (1896). On the structure of classification numbers. Dalam W. B. Rayward (trans. & ed.) (1990), *The international organization and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier.

1903

Otlet, P. (1903). The science of bibliography and documentation. Dalam W.B. Rayward (Trans. & Ed.), *The international organization and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier.

1906

Otlet, P.& Goldschmidt, R. (1906). On a new form of the book: The microphotographic book. Dalam W.B Rayward (Trans. & Ed.), *The International organization and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier.

1918

Otlet, P. (1918). Trans.formations in the bibliographical apparatus of the sciences. Dalam W.B Rayward (Trans. & Ed.) (1990), *The international organization and Dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier.

1920

Otlet, P. (1920). The international organization of bibliography and documentation. Dalam W.B Rayward (Trans. & Ed.) (1990). *The international organization and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier.

1925

Otlet, P., & Goldschmidt, R. (1925). The preservation and international diffusion of thought: The microphotic book. Dalam W. B. Rayward (Trans. & Ed.) (1990). *The international organization and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier.

1931

Duyvis, F.D. (1931). 4th Report of the Commission internationale de la Classification Décimale. *Documentatio Universalis*, 1(2), 46–54.

1937

Documentation Congress Step toward making 'World Brain.' (October 9, 1937): *Science News-Letter*, 32(861), 228–2.

1938

Bliss, H. E. (1938). Theoretic principles of bibliographic organization. Dalam *International Federation for Documentation, XIVth conference* (pp. C57–65). Oxford-London: The Hague, FID.

Bradford, S. C., & Tooth, A. E. (1938). The international documentation conference. Two impressions. *Library Association Record*, 40(11), 560–562.

Davis, G. W. (1938). Documentation objectives. Dalam *International Federation for Documentation, XIVth conference* (pp. C235). Oxford-London: The Hague, FID.

Duyvis, F.D. (1938). Directories of documentation centres. Dalam *International Federation for Documentation, XIVth conference* (pp. C191–197). Oxford-London: The Hague.

Jenkinson, H. (1938). Archives in their relation to other forms of documentation. Dalam *International Federation for Documentation, XIVth conference* (pp. C11–15). Oxford-London: The Hague, FID.

Library Association. (1938). Documentation [Editorial]. *Library Association Record*, 40(7), 353–4.

Osterloo, N. (1938). The filing of technical documents. Dalam *International Federation for Documentation, XIVth conference* (pp. C75–80). Oxford-London: The Hague, FID.

Vormelker, R. (1938). American practice in information service. Dalam *International Federation for Documentation, XIVth conference* (pp. C239–244). Oxford–London: The Hague: FID.

1940

Duyvis, F. D. (1940). The International Federation for Documentation. *Journal Documentary Reproduction*, 3(3): 176–190.

1945

Bush, V. (1945). As we may think. Dalam Nyce, J.M. & Khan, P. (1991), *From memex to hypertext: Vannevar Bush and the mind's machine* (pp. 85–107). Boston: Academic Press.

1947

Simon, E. N. (1947). A novice on “documentation”. *Journal of Documentation*, 3(2), 238–341.

1948

Bradford, S. C. (1948). *Documentation*. London: Crosby Lockwood.

1950

Bradford, S.C. (1950). *Documentation*. Washington, D.C.: Public Affairs Press.

Briet, S. (1950). Bibliography in the basement. *Special Libraries*, 41, 52–55.

Shera, J. H, & Egan, M. E. (1950). Documentation in the United States. *Journal of the Association for Information Sciences and Technology* 1(1), 8–12.

1951

- Briet, S. (1951). *Enquiry concerning professional education of librarians and documentalists*. Final Report presented to the Joint Committee of the International Federation of Library Associations and of the International Federation for Documentation. (UNESCO/CUA/2). Paris: UNESCO.
- Briet, S. (1951). List of books recommended by institutions for the professional education of librarians and documentalists. Paris: UNESCO. Reprint of Annex IV of: *Enquiry concerning the professional education of librarians and documentalists*. Final report presented by Madame Suzanne Briet to the Joint committee of IFLA and FID.
- Briet, S. (1951). *What is documentation?* Ronald E. Day, Laurent Martinet, & H. G. B. Angheliescu (Ed. & Trans.). Paris.
- Duyvis, F. D. (1951). The UDC: What it is and what it is not. *Revue de La Documentation* 18(2), 99–105.

1953

- Bradford, S.C. (1953). Fifty years of documentation. *Documentation*. London: Crosby Lockwood and Sons.
- Garfield, E. (1953). *Librarian versus documentalist*. Submitted to Special Libraries.

1954

- Schoendorff, E. (1954). Classification for building documentation: General remarks. *American Documentation*, 5(2), 79–92.

1955

- Adair, W.C. (1955). Citation indexes for scientific literature. *American Documentation*, 6(1), 31–32.
- Beyerly, El. (1955). Documentation of science in Yugoslavia and Hungary. *American Documentation*, 6(3), 151–161
- Garfield, E. (1955). Citation indexes for science: A new dimension in documentation through association of Ideas. *Science*, 122(3159), 108–11.
- Garfield, E., & Hayne, R.L (1955). Needed-a national science intelligence and documentation center. Presented at the *Symposium on Storage and Retrieval of Scientific Information* of the annual meeting of the American Association for the Advancement of science (Vol. 18. No 10), December 28, 1955 in Atlanta, Georgia. Diakses pada 03 Februari 2005 dari <http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/natlsciinteldoccenter.html>

1956

- Coblans, H. (1956). United Nations technical assistance and documentation. *American Documentation*, 7(4), 289–293.

1957

- Beyerly, E. (1957). The documentation of western science in the Soviet Union. *American Documentation*, 8(2), 98–102.
- Shera, J. H. (1957). Research and developments in documentation. *Library Trends*, 6(2), 187–206.

1959

Allen, K., & Iberall, A. S. (1959). Soviet documentation: A trip report I. Introduction. *American Documentation*, 10(1), 1–19.

Orr, R. H. (1959). An integrated approach to documentation. *American Documentation*, 10(3), 214–220.

1960

Wagner Jr., F.S. (1960). A dictionary of documentation terms: Kommos. *American Documentation*, 11(2), 102.

1961

Atherton, P., & Clark, V. (1961). A Suggested classification for the literature of documentation: Introduction. *American Documentation*, 12(1), 38–48.

1964

Michailov, A. I. (1964). Donker Duyvis' contribution to the progress of scientific information and documentation. Dalam *F. Donker Duyvis: His life and work* (pp. 30–38). The Hague: NIDER.

Voorhoeve, N. A. J. (1964). F. Donker Duyvis and standardization. Dalam *F. Donker Duyvis: His life and work* (pp. 39–50). The Hague: Netherlands Institute for Documentation and Filing.

Zuuren, P.V. (1964). Donker Duyvis and the NIVE. Dalam *F. Donker Duyvis: His life and work* (pp. 51–64). The Hague: Netherlands Institute for Documentation and Filing.

1965

Report for 1963–1964 of the committee on organization of information to American Documentation Institute. (1965). *American Documentation*, 16(3), 235–241.

1967

Rayward, W. B. (1967). The UDC and FID: A historical perspective. *Library Quarterly*, 37(3), 259–78.

1968

Graziano, E. E. (1968). On a theory of documentation. *American Documentation*, 19(1), 58–89.

Rayward, W. B. (1968). Paul Otlet, a Centennial Tribute. *International Associations*, 20, 55–58.

1969

Schultz, C. K., & Garwig, P. L. (1969). History of the American documentation institute: A sketch. *American Documentation*, 20(2), 152–160.

1972

Grosch, A. N. (1972). Documentation division, SLA [Special Libraries Association]. Dalam A. Kent & H. Lancour (eds.) *Encyclopedia of library and information science* 7, 264–269. New York: Marcel Dekker, Inc.

1974

- Rayward, W. B. (1974). The International Institute for Bibliography and Pierre Nenkoff, a Bulgarian Librarian: An attempt at International Cooperation. *Libri*, 24(3), 209–228.
- Smith, D.E. (1974). The social construction of documentary reality. *Sociological Inquiry*, 44(4), 257–68.

1975

- FID Publications: An 80-year Bibliography, 1895-1975*. (1975). FID 532 The Hague: FID.
- Rayward, W. B. (1975). *The universe of information: The work of Paul Otlet for Documentation an International Organization*. FID Publication 520. Moscow: Published for the International Federation for Documentation by the All-Union Institute for Scientific and Technical Information (VINITI), 390p.

1976

- Science Council of Japan. National Committee for Documentation. (1976). Scientific and technical information services in Japan: introduction. *American Documentation*, 10(3), 176–191.

1977

- Rayward, W. (1977). IFLA-FID-Is it time for federation? *IFLA Journal*, 3(3), 278–280.

1980

- Hales, C. (1980). The Evolution of the International Information System on Research in Documentation (ISORID). *Journal of the American Society for Information Science*, 31(4), 293.
- Rayward, W. B. (1980). Paul Otlet. *World Encyclopedia of Library and Information Services* (1st ed, pp. 418–20). Chicago: American Library Association.

1983

- Maack, M. N. (1983). Women librarians in France: The first generation. *Journal of Library History*, 18(4), 407–49.
- Rayward, W. B. (1983). The development of library and information science. Dalam F. Machlup & U. Mansfield (Eds.), *The study of information: Interdisciplinary voices* (pp. 343–363, 399–405). New York: Wiley.
- Rayward, W. B. (1983). The international exposition and the world documentation congress, Paris, 1937. *Library Quarterly: Information, Community, Policy* 53, 254–268.
- Woledge, G. (1983). Bibliography and documentation - words and ideas. *Journal of Documentation*, 39(4), 266–279.

1986

- Houser, L. (1986). Documents: The domain of library and information science. *Library and Information Science Research*, 8(2) 163–188.

1988

Richards, P. S. (1988). Historical note information science in war-time: Pioneer documentation activities in World War II. *Journal of the American Society for Information Science*, 39(5), 301.

1989

Rayward, W. B. (1991). The times of their lives: A personal reflection on library history and biography. Dalam Frank Upward & Jean P. Whyte (eds). *Peopling a Profession: Papers from the Fourth Forum on Australian Library History, Monash University, 25 and 26 September 1989* (pp. 1–13). Melbourne: Ancora Press.

1990

Buxton, A.B. (1990). Computer searching using UDC numbers. *Journal of Documentation*, 46(3), 193–217.

Farkas-Conn, I.S. (1990). *From documentation to information science: The beginning and early development of the American Documentation Institute - American society for information Science*. New York: Greenwood.

La Fontaine, H., & Otlet, P. (1990). Creation of a universal bibliography: A preliminary note. Dalam W. Boyd Rayward (Trans. & Ed.), *The international organization and dissemination of knowledge: selected essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier.

Rayward, W. B. (1990). *The international organization and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. W. B. Rayward (Ed. & Trans.). Amsterdam: Elsevier.

- Otlet, P. (1990). *International organisation and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*. W. B. Rayward (Ed.& Trans.). Amsterdam: Elsevier.
- Otlet, P. (1990). Rules for developing the decimal classification. Dalam W. B. Rayward (Ed.), *International organisation and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet* (pp. 63–70). Amsterdam: Elsevier.
- Otlet, P. (1990). The preservation and international diffusion of thought: the microphotoc book. Dalam W. B. Rayward (Ed.), *International organisation and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet* (pp. 204–10). Amsterdam: Elsevier.
- Otlet, P. (1990). The science of bibliography and documentation. Dalam W. B. Rayward (Ed.), *International organisation and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet* (pp. 71–86). Amsterdam: Elsevier.
- Otlet, P. (1990). Something about bibliography. Dalam W. B. Rayward (Trans.), *International organisation and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet*, (pp. 11–24). Amsterdam: Elsevier.
- Otlet, P. (1990). The systematic organization of documentation and the development of the international institute of bibliography. Dalam W. Rayward. (Trans.), *International organisation and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet* (pp. 105–111). Amsterdam: Elsevier.
- Otlet, P. (1990). Transformations of the bibliographical apparatus of the sciences. Dalam W. B. Rayward (Trans.), *International organisation and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet* (pp. 148–56). Amsterdam: Elsevier.

Otlet, P. (1990). The union of international associations: A world centre. Dalam W. B. Rayward (Trans.), *International organisation and dissemination of knowledge: Selected essays of Paul Otlet* (pp. 112–29). Amsterdam: Elsevier.

1991

Buckland, M. K. (1991). Information as thing. *Journal of the American Society for Information Science*, 42(5), 351–360.

Buckland, M. K. (1991). Information retrieval of more than text. *Journal of the American Society for Information Science*, 42(8), 586–588.

Buckland, M. K. (1991). *Information and Information Systems*. New York: Praeger.

Buckland, M. K. (1991). Information retrieval of more than text. *Journal of the American Society for Information Science*, 42(8), 586–588.

Rayward, W. B. (1991). The case of Paul Otlet, pioneer of information science, internationalist, visionary: Reflection on biography. *Journal of Librarianship and Information Science*, 23, 135–145.

1992

Buckland, M. K. (1992). *Designing library services for the future: A manifesto*. Chicago: American Library Association.

Buckland, M. K. (1992). Emanuel Goldberg, electronic document retrieval, and Vannevar Bush's memex. *Journal of the American Society for Information Science*, 43(4), 284.

- Rayward, W. B. (1992). Restructuring and mobilising information in documents: A historical perspective. Dalam Vakkari, P. & Cronin, B. (eds) *Conceptions of Library and Information Science: Historical, Empirical and Theoretical Perspectives* (pp. 50–68). London: Taylor Graham.
- Richards, P. S. (1992). Scientific information in occupied France, 1940–44. *The Library Quarterly* 62(3), 295–305.

1994

- Hjerpe, R. (1994). A framework for the description of generalized documents. *Advances in Knowledge Organization*, 4, 173–180.
- Levy, D. M. (1994). Fixed or fluid? Document stability and new media. *European Conference on Hypertext Technology 1994 Proceedings* (pp. 24–31). New York: Association for Computing Machinery.
- Rayward, W. B. (1994). The International Federation for Information and Documentation (FID). Dalam W. A. Wiegand & D. G. Davis, Jr. *Encyclopedia of Library History* (pp. 290–294). New York: Garland Press.
- Rayward, W. B. (1994). Visions of Xanadu: Paul Otlet (1868–1944) and hypertext. *Journal of the American Society for Information Science*, 45(4), 235–250.
- Rayward, W. B. (1994). International Federation for Information and Documentation (FID). Dalam Wayne A. Wiegand & Don G. Davis, Jr (Eds.). *Encyclopedia of Library History* (pp. 290–294). New York: Garland Press.

1995

- Abraham, T. (1995). Documentation strategies: A decade (or more) later. A paper presented at *The Annual Meeting of The Society of American Archivists*, Washington, D.C., August 31, 1995. Diakses 11 Desember 2000 dari <http://www.uidaho.edu/special-collections/papers/docstr10.htm>
- Buckland, M. (1995). The centenary of “Madame Documentation”: Suzanne Briet, 1894–1989. *Journal of the American Society for Information Science*, 46(3), 235–237.
- Buckland, M. K., & Liu, Z. (1995). History of information science. *Annual Review of Information Science and Technology*, 30, 385–416.
- Keenan, S. (1995). From world bibliography to the Internet in 100 years—FID celebrates its centennial. *Journal of Information Science*, 21(5), 402–403.

1996

- Buckland, M. K. (1996). Documentation, information science, and library Science in the USA. Reprint of article published in *Information Processing and Management*, 32(1), 63–76.
- Brown, J.S., & Duguid, P. (1996). The social life of documents. *First Monday*. Diakses 24 Maret 2013 dari <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/466/387>
- Houser, L. (1996). Documents: The domain of library and information science. *Library and Information Science Research*, 8(2), 163–188.

- Rayward, W. B. (1996) The history and historiography of information science: Some reflections. *Information Processing & Management*, 32(1), 3.
- Schamber, L. (1996). What is a document? Rethinking the concept in uneasy times. *Journal of the American Society for Information Science*, 47, 669–671.
- Speitel, T., & Rohrback, J. & Laszlo, J., & Capers, E. (1996). Digital documentation. *The Science Teacher*, 63(3), 40–43.

1997

- Buckland, M. K. (1997). What is a “document”? *Journal of the American Society for Information Science*, 48(9), 804–809.
- Day, R.E. (1997). Paul Otlet’s book and the writing of social space. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 48(4), 310–7.
- Fayet-Scribe, S. (1997). The cross-fertilization of the U.S. public library model and the French documentation model through the French professional associations between World War I and World War II. *Journal of the American Society for Information Science*, 48(9), 782–793.
- Rayward, W. Boyd. (1997). The origins of information science and the work of the International Institute of bibliography/ International Federation for Documentation and Information (FID). *Journal of the American Society for Information Science*, 48, 289–300. Reprinted in the *FID Journal, International Forum for Information and Documentation*, 22, 3–15, in Russian in the Russian edition and also in *Historical Studies in Information Science*, edited by Trudi Bellardo Hahn and Michael Buckland. Medford, N.J.: Information Today, Inc for ASIS.

- Rayward, W. B. (1997). The origins of information science and the International Institute of Bibliography/ International Federation for Information and Documentation (FID). *Journal of the American Society for Information Science*, 48(4), 289–300.
- Rieusset-Lemarie, I. (1997). P. Otlet's Mundaneum and the international perspective in the history of documentation and information science. *Journal of the American Society for Information Science*, 48(4), 301–309.
- Williams, R. V. (1997). The documentation and special libraries movements in the United States, 1910–1960: Introduction. *Journal of the American Society for Information Science*, 48(9), 775–781.

1998

- Boiarsky, C., & Dobberstein, M. (1998). Teaching documentation writing: What else students—and instructors—should know. *Technical Communication*, 45(1), 38–46.
- Buckland, M. K. (1998). Documentation, information science, and library science in the USA. Preprint of article published in *Information Processing and Management* 32, 1, 63–76. Reprinted in T. B. Hahn & M. Buckland (Eds.), *Historical Studies in Information Science* (pp. 159–172). Medford, NJ: Information Today.
- Buckland, M. K. (1998). What is a “digital document”? Preprint of article published in *Document Numérique* (Paris) 2(2), 221–230.
- Tonfoni, G. (1998). *Information design: The knowledge architect's toolkit*. Scarecrow Press.

Tonfoni, G. (1998). Cooperative documentation management. Dalam H. Bunt (Ed.), *Proceedings of the International Colloquium on Multilingual Communication*, University of Tilburg, The Netherland.

Williams, R. V. (1998). The documentation and special libraries movement in the United States, 1910–1960. Dalam T. B. Hahn, & M. Buckland (Eds.), *Historical Studies in Information Science* (pp. 173–180). Medford, NJ: Information Today, Inc.

1999

Agarwal, H. (1999). Is your documentation lean? *The Canadian Manager*, 24(3), 25.

Garfield, E. (1999). From 1950s documentalists to 20th century information scientists-and beyond. *Bulletin of the American Society for Information Science*, Dec 1999/Jan 2000.

Larsen, P.S. (1999). Books and bytes: Preserving documents for posterity. *Journal of the American Society for Information Science*, 50(11), 1.020–1.027.

Tomasi, M. D., & Mehlenbacher, B. (1999). Re-engineering on-line documentation: Designing examples-based online support systems. *Technical Communication*, 46(1).

2000

Garfield, E. (2000). From 1950s documentalists to 20th century information scientists-and beyond: ASIS enters the year 2000 facing remarkable advances and challenges in harnessing the information. *Bulletin of the American Society for Information Science* 26(2), 26–29.

- Hjørland, B. (2000). Documents, memory institutions, and information science. *Journal of Documentation*, 56(1), 27–41.
- Junttila, K. Salanterä, S., & Hupli, M. (2000). Perioperative Documentation in Finland. *AORN Journal*, 72(5), 862–877.
- Spilka, R. (2000). The issue of quality in professional documentation: How can academia make more of a difference? *Technical Communication Quarterly*, 9(2).

2001

- Bawden, D. (2001). Progress in documentation-Information and digital literacies: A review of concepts. *Journal of Documentation*, 57(2), 20–259.
- Buckland, M. K. (2001). The Heritage of public librarianship. Paper presented at the *Opening Plenary session of the Nordic seminar on Public Library Research*, Copenhagen, 10–11 Desember 2001.
- Day, R. E. (2001). Totality and representation: A history of knowledge management through European documentation, critical modernity, and post-fordism. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 52(9), 725–735.
- Frohmann, B. (2001). Discourse and documentation: Some implications for pedagogy and research. *Journal of Education for Library and Information Science*, 42(1), 13–26.
- Halliday, L., & Oppenheim, C. (2001). Progress in documentation: Developments in digital journals. *Journal of Documentation*, 57(2), 260–283.
- Levy, D.M. (2001). *Scrolling forward: Making sense of documents in the digital age*. New York: Arcade.

2002

Bérard, P. (2002). Documentation issues for mathematics in the digital age. Paper presented at *the 68th General Conference and Council of the International Federation of Library Associations and Institutions*, 16–24 Agustus, 2002 in Glasgow. *INSPEL* 36(2002)3,147–161.

Buckland, M. K. (2002). *1895–2002 FID achievements*.

Hjørland, B. (2002). Domain analysis in information science: Eleven approaches - traditional as well as innovative. *Journal of Documentation*, 58(4), 422–462.

2003

Berard, R. (2003). Documentation. Dalam J. Feather & P. Sturges (Ed.), *International Encyclopedia of Information and Library Science*. (2nd. ed). London: Routledge.

Buckland, M. (2003). The artificiality of documents: or, resurrecting the human in information science. Presented at the *Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technology*, SIG History and Foundations of Information Science, Long Beach, CA.

Buckland, M. K. (2003). Five grand challenges for library research. *Library Trends*, 51(4), 675–686.

Søndergaard, T.F., Andersen, J. & Hjørland, B. (2003). Documents and the communication of scientific and scholarly information. Revising and updating the UNISIST model. *Journal of Documentation*, 59(3), 278–320. Diakses 15 September 2012 dari <http://www.db.dk/bh/UNISIST.pdf>

- Hansson, J., Francke, H., Dahlström, M., & Gunnarsson, M. (2003). Documents in library and information science: Sociotechnical dimensions in document genre and architecture studies. Paper presented at *The Annual Meeting of the Document Academy*, Berkeley, CA, 13–15 Agustus 2003. Diakses 02 Maret 2014 dari <http://thedocumentacademy.hum.uit.no/events/docam03.abstracts/boras.paper.html>.
- Keenan, S. (2003). FID (Federation Internationale de Documentation). I. Dalam John Feather & Paul Sturges (Eds). *International encyclopedia of information and library science* (2nd. Ed.,196–198). London: Routledge.
- Levy, D.M. (2003). Documents and libraries: A sociotechnical perspective. Dalam A. Bishop, N. Van House & B. Buttenfield (Eds.), *Digital library use: Social practice in design and evaluation* (25–42). Cambridge: MIT Press.
- Levy, D. M. (2003). From documents to information: A historical perspective. *Presented at DOCAM'03: the annual meeting of the Document Academy*, School of Information Management and Systems (SIMS), University of California, Berkeley. Diakses 02 Maret 2014 dari http://www.thedocumentacademy.org/resources/2003/papers/david.levyDOCAM_paper.html
- Lund, N. W. (2003). Doceo + mentum - a ground for a new discipline Paper to the *DOCAM '03 conference*, SIMS, UC-Berkeley, CA, 13–15 Agustus. Diakses 02 Maret 2014 dari www.thedocumentacademy.org/resources/2003/papers/lund.paper.html
- Pédaque, R. T. (2003). Document: Form, sign and medium, as reformulated for electronic documents. Working paper, version 3, July 8. STIC-CNRS. Diakses 05 Februari 2011 dari http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/05/94/sic_00000594_01/sic_00000594.pdf

- Rayward, W. B. (2003). Knowledge organisation and a new world polity: The rise and fall of the ideas of Paul Otlet. *Transnational Associations/ Associations Transnationales*, 55(1&2)1&2, 4–15.
- Sandergaard, T. F., Andersen, J., & Hjørland, B. (2003). Documents and the communication of scientific and scholarly information: Revising and updating the UNISIST model. *Journal of Documentation*, 59(3), 278–320.
- Tonfoni, G., & Jain, L. (2003). *The art and science of documentation management*. Bristol, UK.
- Wright, A. (2003). *Forgotten forefather: Paul Otlet*. Boxes and arrows. Diakses 1 Agustus 2013 dari <http://boxesandarrows.com/forgotten-forefather-paul-otlet/>

2004

- Basden, A., & Burke, M. E. (2004). Towards a philosophical understanding of documentation: A Dooyeweerdian framework. *Journal of Documentation*, 60(4), 352–370.
- Donovan, M., & Sutter, C. J. (2004). Encouraging doubt and dialogue: Documentation as a tool for critique. *Language Arts*, 81(5), 337.
- Frohmann, B. (2004). *Deflating information: From science studies to documentation*. Toronto: University of Toronto Press.
- Frohmann, B. (2004). Documentation redux: Prolegomenon to (another) philosophy of information. *Library Trends*; 52(3), 387–407.

- Kann-Christensen, N., & Pors, N. O. (2004). The legitimacy of public libraries: Cross-pressures and change processes. *New Library World*, 105(9/10), 330–336.
- Lund, N. W. (2004). Building a discipline, creating a profession: An essay on the childhood of “Dokvit”. Diakses 26 April 2009 dari <http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/966/paper.pdf?sequence=1>
- Lund, N. W. (2004). Doceo + mentum = document - a medium concept, theory, and discipline. Diakses 02 Desember 2008 dari http://www.informationdesign.org/doceo_mentum_-_a_ground_for_a/
- Lund, N. W. (2004). Documentation in a complementary perspective. Dalam Rayward (Ed.), *Aware and responsible: Papers of the Nordic-International Colloquium on Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies* (SCARLID) (pp. 93–102). Lanham, Md: Scarecrow Press.
- Lund, N.W. (2004). *An experimental approach-the importance of Herbert A. Simon for document analysis*. Paper presented at The Document Academy Meeting, Berkeley, 22–24 Oct.
- Maack, M. N. (2004). The Lady and the antelope: Suzanne Briet’s contribution to the French documentation movement. *Library Trends*, 52(4), 719–747.
- Rayward, W. B., Hansson, J., & Suominen, V. (eds). (2004). *Aware and Responsible: Papers of the Nordic-International Colloquium on Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies*. Lanham, MD: Scarecrow Press.

Skare, R. (2004). Complementarity-a concept possible to be achieved in document analysis? Diakses 02 Desember 2008 dari <http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/967/article.pdf?sequence=1>

Skare, R. (2004). The notion of text and the notion of document- What difference does it make? *Annual Meeting of the Document Academy* (DOCAM'04), October 22–24, University of California, Berkeley, United States.

2005

Araceli Torres-Vargas, G. (2005). World brain and Mundaneum: The ideas of Wells and Otlet concerning universal access. *Vine*, 35(3), 156–165.

Bawden, D. (2005). Research and practice in documentation. *Journal of Documentation*, 61(2), 169–170.

Fairthorne, R. A. (2005). 60 years of the best in information research: Progress in documentation. Empirical hyperbolic distributions (Bradford - Zipf-Mandelbrot) for bibliometric description and prediction. *Journal of Documentation*, 61(2), 171.

Francke, H. (2005). What's in a name?: contextualizing the document concept. *Literary and Linguistic Computing*, 20(1), 61–69. Diakses 07 Januari 2014 dari <http://llc.oxfordjournals.org/cgi/rapidpdf/fqh043v2>

Van den Heuvel, C., & Rayward, W. B. (2005, Juli 11). *Visualizing the organization and dissemination of knowledge: Paul Otlet's sketches in the Mundaneum, Mons*. Envisioning a Path to the Future, message posted to http://informationvisualization.typepad.com/sigvis/2005/07/visualizations_.html

- Kopach, R., Sadat, S., & Gallaway, I.D. (2005). Cost-effectiveness analysis of medical documentation alternatives. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 21(1), 126–131.
- Niedenthal, S. (2005). *Documents of light: Three case studies and a preliminary model for organizing light knowledge*. School of Art and Communications (K3) Malmö University, Sweden.

2006

- Buckland, M. K. (2006). A brief biography of Suzanne Renee Briet. Dalam R. E. Day & L. Martinet (Eds.), *What is Documentation?* English Translation of the Classic French Text. Lanham, MD: Scarecrow Press.
- Buckland, M. K. (2006). *Emanuel Goldberg and his knowledge machine: information, invention, and political forces*. Westport, Conn.: Libraries Unlimited.
- Day, R. (2006). A necessity of our time: Documentation as “cultural technique”. Dalam S. Briet (Ed.), *What is documentation?* (pp. 47–63). Metuchen, NJ: Scarecrow Press.
- Day, R. E. (2006). Suzanne Briet: an appreciation. *ASIST Bulletin*, 33(2)December 2006/January 2007 21–22. Diakses 12 Desember 2013 dari <http://www.asis.org/Bulletin/Dec-06/day.html>
- Ferraris, M. (2006). *Documentality*. New York: Italian Academy.
- Forbes-Pitt, K. (2006). A document for document’s sake: A possible account for document system failures and a proposed way forward. *Records Management Journal*, 16(1), 13–30.
- Kroeger, J., & Cardy, T. (2006). Documentation: A hard to reach place. *Early Childhood Education Journal*, 33(6), 389–398.

- Nebelong-Bonnevie, E., & Frandsen, T.F. (2006). Journal citation identity and journal citation image: A portrait of the Journal of Documentation. *Journal of Documentation*, 62(1), 30–57.
- Riles, A. (Ed.) (2006). *Documents: Artifacts of modern knowledge*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Ungan, M. C. (2006). Standardization through process documentation. *Business Process Management Journal* 12(2), 135–148.
- Zacklad, M. (2006). Documentarisation processes in documents for action (DofA): The status of annotations and associated cooperation technologies. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 15(2), 205–28.

2007

- Buckland, M. K. (2007). On the cultural and intellectual context of European documentation in the early twentieth century. Dalam W. Rayward (Ed.), *European modernism and the information society: Informing the present, understanding the past*. Aldershot, UK: Ashgate.
- Day, R. E. (2007). Suzanne Briet: an appreciation. *ASIST Bulletin*, December 2006/January 2007. Diakses 14 Februari 2014 dari <http://www.asis.org/Bulletin/Dec-06/day.html>
- Ferraris, M. (2007). Documentality or why nothing social exists beyond the text. Dalam Ch. Kanzian & E. Runggaldier (Eds.), *Cultures. Conflict-Analysis-Dialogue, Proceedings of the 29th International Ludwig Wittgenstein-Symposium in Kirchberg, Austria*, Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, New Series, 3, 385–401.

- Frohmann, B. (2007). Multiplicity, materiality, and autonomous agency of documentation. Dalam R. Sklare, N. Windfeld Lund, & A. Varheim. (Eds), *A Document (re) turn: Contributions from a research field in Trans.ition* (pp. 27–39). Frankfurt: Peter Lang,
- Frohmann, B. (2007). The role of facts in Paul Otlet’s modernist project of documentation. Dalam W.B. Rayward (Ed.), *European Modernism and the Information Society: Informing the Present, Understanding the Past* (pp. 75–88). Ashgate: Aldershot.
- Lund, N. W. (2007). Building a discipline, creating a profession: An essay on the childhood of “Dokvit”. Dalam Roswitha Skare, Niels Windfeld Lund. & Andreas Vårheim (Eds), *Document (re)turn. Contributions from a research field in Trans.ition* (pp. 11–26). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Mora, M., & Bodomo, A. (2007). Documentation is documentation and theory is theory: A reply to Daniel Avorgbedor’s commentary “documenting spoken and sung texts of the Dagaaba of West Africa”. *Empirical Musicology Review*, 2(4).
- Ørom, Anders. (2007). The concept of information versus the concept of document. Dalam Roswitha Skare, Niels Windfeld Lund & Andreas Vårheim (Eds.). *Document (re)turn. Contributions from a Research Field in Trans.ition*. (pp. 53–72). Frankfurt am Main: Peter Lang
- Rasmussen, K. B., & Blank, G. (2007). The data documentation initiative: A preservation standard for research. *Arch Sci*, 7, 55–71.
- Rayward, W.B. (Ed.) (2007). *European modernism and the information society: Informing the present, understanding the past*. Ashgate: Aldershot.

Skare, R., Lund, N. W., & Vårheim, A. (Eds.). (2007). *A document (re)turn: Contributions from a Research Field in Transition*. Frankfurt: Lang.

Turner, D. (2007). Conceptualizing oral documents. *Information Research*, 12(4). Diakses 23 Januari 2015 dari <http://informationr.net/ir/12-4/colis32.html>

2008

Buckland, M. K. (2008). On the cultural and intellectual context of european documentation. Dalam W. B. Rayward, *European Modernism and the Information Society* (pp. 45–57). Aldershot: Ashgate.

Frohmann, B. (2008). The role of facts in Paul Otlet's modernist project of documentation. Dalam W.B. Rayward (Ed.), *European Modernism and the Information Society* (pp. 75–88). Aldershot, England: Ashgate.

Furner, J. (2008). What is documentation? English Translation of the classic french text. *Libraries & the Cultural Record*, 43 (1), 107–109.

Jecan, S. (2008). Document management vs knowledge management. *Revista Informatica Economica*, 4(48), 87.

van den Heuvel, C. (2008). Architectures of global knowledge: The mundaneum and the world wide web. *Destination Library*, 15, 48–53.

Lund, N. W., & Buckland, M. K. (2008). Document, documentation and the document academy: Introduction. *Archival Science* 8(3), 161–164.

- Payne, E. A., & Ramsay, R. J. (2008). Audit documentation methods: A path model of cognitive processing, memory, and performance. *Auditing: A journal of practice & theory*, 27(1), 151–168.
- Pleshkevich, E. A. (2008). On the question of using the concept of discreteness in documentation science. *Scientific and Technical Information Processing*, 35(1), 12–16.
- Pleshkevich, E. A. (2008). The documentation approach in the theory of archaeography and documentation science: A comparative analysis. *Scientific and Technical Information Processing*, 35(2), 99–103.
- Prior, L. (2008). Repositioning documents in social research. *Sociology*, 42(5), 821–36.
- Rayward, W. B. (2008). *European modernism and the information society: Informing the present, understanding the past*. Aldershot, UK: Ashgate.
- Seitz, H. (2008). The power of documentation in the early childhood classroom. *YC Young Children* 63(2), 88–93.
- Shvetsova-Vodka, G.N. (2008). The place of the scientific discipline of documentation in the system of sciences. *Scientific and Technical Information Processing*, 35(1), 39–43.

2009

- Buckland, M. K. (2009). Narratives, facts and events in the foundations of information science. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* (Online), 36(2), 12. Diakses 23 Mei 2011

- Ducheyne, S. (2009). "To treat of the world" Paul Otlet's ontology and epistemology and the circle of knowledge. *Journal of Documentation*, 65(2), 223–244.
- Fayet-Scribe, S. (2009). Women professionals in documentation in France during the 1930s. (Trans.) Michael Buckland). *Libraries & the Cultural Record*, 44(2).
- Ferraris, M. (2009). Documentality, or Europe. *The Monist* 92(2), 286–314.
- Frohmann, B. (2009). Revisiting "what is a document?" *Journal of Documentation*, 65(2), 291–303.
- van den Heuvel, C. (2009). Web 2.0 and the Semantic Web in Research from a historical perspective. The designs of Paul Otlet (1868–1944) for telecommunication and machine readable documentation to organize research and society. *Knowledge Organization*, 36(4), 214–226.
- Lund, N. W., & Buckland, M. K. (2009). Document, documentation, and the Document Academy: Introduction. *Arch Sci*, 8(3), 161–164.
- Lund, N. W. (2009). Chapter 9: Document theory. *Annual Review of Information Science and Technology*, 43(1), 1–55.
- Lund, N.W., & Skare, R. (2009). Document theory. Dalam Bates, M. & Maack, M.N. (Eds), *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, 3rd ed (pp. 1.632–9). New York, NY: Taylor & Francis.
- Ortega, C. D. (2009). Documentation as one of the origins of the information science and a fertile basis for its grounding. *Brazilian Journal of Information Science*, 3(1), 3–34,

- Pleshkevich, E. A. (2009). The problems of the evolution of theoretical positions in the disciplines of the documental-information cycle (a review). *Scientific and Technical Information Processing*, 36(4), 187–197.
- Robinson, C. (2009). Documentation Dilemmas. *The Journal for Quality and Participation*, 31(4) 35–37.
- Rudakova, N. V. (2009). The department of documentation, information, and advertisement in the OJSC Lenmorniiprojekt. *Scientific and Technical Information Processing*, 36(2), 124–128.
- Skare, R. (2009). Complementarity – a concept for document analysis? *Journal of Documentation*, 65(5), 834–40.
- Sokolov, A.V. (2009). The epistemology of documents (A methodological essay). *Automatic Documentation and Mathematical Linguistics*, 43(2), 57–68.
- Turner, D. (2009). *Conceptualizing oral documents*, unpublished doctoral thesis, University of Washington, Seattle, WA.
- Warwick, C., Galina, I., Rimmer, J., dkk. (2009). Documentation and the users of digital resources in the humanities. *Journal of Documentation*, 65(1), 33–57.

2010

- Chyapite, Y. A. (2010). General document and book theory. *Scientific and Technical Information Processing*, 37(1), 55–59.
- Hansson, J. (2010). Document studies-an alternative “paradigm” in library and information science? Diakses 21 Januari 2013 dari <http://documentationandlibrarianship.blogspot.co.id/search?updatedmin=2010-01->

01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=15

- Hartel, J. (2010). Managing documents at home for serious leisure: A case study of the hobby of gourmet cooking. *Journal of Documentation*, 66(6), 847–874.
- Kallas, J., & Linardis, A. (2010). A question documentation model on the needs of comparative research. *Archival Science*, 10(1), 65–83.
- Kouper, I. (2010). Information about the synthesis of life forms: a document-oriented approach. *Journal of Documentation*, 66(3), 348–369.
- Lund, N. W. (2010). Document, text and medium: concepts, theories and disciplines. *Journal of Documentation*, 66(5), 734–749.
- McKenzie, P.J. & Davies, E. (2010). Documentary tools in everyday life: The wedding planner. *Journal of Documentation*, 66(6), 788–806.
- Pleshkevich, E. A. (2010). The source study concept of general document theory: Theoretical and organizational aspects (a review). *Scientific and Technical Information Processing*, 37(1), 43–48.
- Pleshkevich, E.A. (2010). Formation of the scientific concepts about the documental forms of information. The Legal and Source-study Concepts of a Document. *Scientific and Technical Information Processing*, 37(4), 217–226.
- Pleshkevich, E.A. (2010). The formation of the scientific concepts about the documental forms of information: the gnoseological and managerial concepts of a document. *Scientific and Technical Information Processing*, 37(4), 227–249.

- Rayward, W. B. (Ed. & Trans.). (2010). *Mundaneum: Archives of knowledge (Occasional Paper 215)*. Urbana-Champaign: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science.
- Signer, B. (2010). What is wrong with digital documents? a conceptual model for structural cross-media content composition and reuse, *Proceedings of the 29th International Conference on Conceptual Modeling* (pp. 391–404). Vancouver, Canada, November 2010.
- Turner, D. (2010). Can a document be oral? *43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (pp.1–8).
- Turner, D. (2010). Orally-based information. *Journal of Documentation*, 66(3), 370–383).

2011

- Aspray, Wi. (2011). The history of information science and other traditional information domains: Models for future research. *Libraries & the Cultural Record*, 46(2), 230–248.
- Freeman, R., & Maybin, J. (2011). Documents, practices and policy. *Evidence and Policy* 7(2), 155–170.
- van den Heuvel, C., & Rayward, W. B. (2011). Facing interfaces: Paul Otlet's visualizations of data integration. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(12), 2.313–2.326.
- van den Heuvel, C., & Rayward, W. B. (2011). Mondotheque: A multimedia desk in a global Internet. Dalam K. Börner & M. J. Stamper (Eds.), *Science maps as visual interfaces to digital libraries*.

- Laaff, M. (2011, Juli, 22) Internet visionary Paul Otlet: networked knowledge, decades before Google. *Spiegel Online*. Diakses 14 Januari 2013 dari <http://www.spiegel.de/international/world/internet-visionary-paul-otlet-networked-knowledge-decades-before-google-a-775951.html>.
- Olsen, B. I. *et al.* (2011). Document theory for the design of socio-technical systems: A document model as ontology of human expression. *Journal of Documentation*, 68(1), 100–126.
- Pleshkevich, E.A. (2011). Documentation science in the context of the post non classical development of modern science. *Scientific and Technical Information Processing*, 38(3), 143–147.
- Sköld, O. (2011). On social media and document theory. Dalam I. Huvila, K. Holmberg, & M. Kronqvist-Berg (Eds.), *Information Science and Social Media: Proceedings of the International Conference Information Science and Social Media (ISSOME)* (pp. 73–82). Åbo: Åbo Akademi University.
- Sømhovd, A. J. (2011). *Splitting the world: distributed performance as document*. (Masters Thesis in Documentation Studies), Faculty for humanities, social sciences and education, University of Tromsø.
- Van Acker, W. (2011). Internationalist utopias of visual education: The graphic and scenographic Trans.formation of the universal encyclopaedia in the work of Paul Otlet, Patrick Geddes, and Otto Neurath. *Perspectives on Science*, 19(1), 32–80.
- Yeo, G. (2011). Rising to the level of a record? Some thoughts on records and documents. *Records Management Journal*, 21(1), 8–27.

2012

- Bazerman, C. (2012). The orders of documents, the orders of activity, and the orders of information. *Archival Science*, 12(4), 377–388.
- Buckland, M. K. (2012). Interrogating spatial analogies relating to knowledge organization: Paul Otlet and Others. *Library Trends*, 61(2), 271–285.
- Buckland, M. K. (2012). Lodewyk Bendikson and photographic techniques in documentation, 1910–1943. Dalam Toni Carbo & Trudi Bellardo Hahn (Eds.), *International Perspectives on the History of Information Science and Technology Worldwide* (pp. 99–106). Medford, NJ: Information Today. Diakses 03 November 2014 dari <http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/bendikson2012.pdf> 2012
- Buckland, M. K. (2012). What kind of science can information science be? *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(1), 1–7.
- Ferraris, M. (2012). *Documentality: Why it is necessary to leave traces (commonalities)*. R. Davies, (Trans.). New York: Fordham University.
- Ferraris, M. (2012). *Perspectives of documentality*. Università degli Studi di Torino.
- Grenersen, G. (2012). What is a document institution? A case study from the South Sámi community. *Journal of Documentation*, 68(1), 127–133.
- Hansson, J. (2012). On the documentality of a mummy. Diakses 04 Juli 2014 dari <http://documentationandlibrarianship.blogspot.com/2012/11/on-documentality-of-mummy.html>

Notes on Documentation and Librarianship - Archive 2010–2014

- Hansson, J., Dahlström, M., Kjellman, U. (2012). 'As we may digitize': Institutions and documents reconfigured (Open Access). *Liber quarterly: the journal of European research libraries*, 21(3/4), 455–474.
- Hull, M.S. (2012). Documents and bureaucracy. *Annual Review of Anthropology*, 41, 251–67.
- Ibekwe-SanJuan, F. (2012). The French conception of information science: “Une exception française”? *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(9), 1.693–1.709.
- Latham, K. F. (2012). Museum object as document: Using Buckland's information concepts to understand museum experiences. *Journal of Documentation*, 68(1), 45–71.
- Luyt, B. (2012). How can the study of documentation processes and documents help libraries, archives, and museums? Paper presented at 5th Rizal Library International Conference, *Library Spaces: Building Effective and Sustainable Physical and Virtual Libraries*. Manila, 25–26 Oktober.
- McCann, L. (2012). Conservation documentation in research libraries making the link with MARC data. *Conservation Documentation in Research Libraries*, LRTS 57(1) August 3.
- Olsen, B. I., Lund, N. W., Ellingsen, G., Hartvigsen, G. (2012). Document theory for the design of socio-technical systems: a document model as ontology of human expression. *Journal of Documentation*, 68(1), 100–126.
- Rayward, W. B. (2012). Paul Otlet, an encounter. *Cabiers de la documentation-Bladen voor documentatie*, 2, 71–73.
- Smith, B. (2012). How to do things with documents. *Rivista di Estetica*, 50, 179–198.

- Turner, D. (2012). Oral documents in concept and in situ, part I: Grounding an exploration of orality and information behavior. *Journal of Documentation*, 68(6), 852–863.
- Turner, D. (2012). Oral documents in concept and in situ, part II: Managerial decrees. *Journal of Documentation*, 68(6), 864–881.
- Van Acker, W., & Uyttenhove, P. (2012). Information and space: Analogues and metaphors [Special Issue]. *Library Trends*, 61(2).
- Walsh, J. A. (2012). Images of God and friends of God: the holy icon as document. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(1), 185–194.

2013

- Black, A., & van den Heuvel, C. (2013). Introduction. *Library Trends*, 62(2).
- Buckland, M. K. & Lund, N. W. (2013). W. B. Rayward, Documentation, and information science. *Library Trends*, 62(2), 302–310. (“Essays in Honor of W. Boyd Rayward: Part I,” edited by Alistair Black and Charles van den Heuvel),
- Buckland, M. K. (2013). Document theory: An introduction. Preprint of presentation at *the Summer School on Records, Archives and Memory Studies*, University of Zadar, Department of Information Sciences, Zadar, Croatia, 7 November 2013.
- Buckland, M. K. (2013). The reception of Suzanne Briet in the United States. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* (Online), 39(4), 40.
- Hansson, J. (2013). Documentality as inscribed acts: Ontology, technology, and practice of professional codes of ethics in

- librarianship. *DOCAM'13, Annual Meeting of the Document Academy*, University of Tromsø, Norway, 19–22 Juni 2013.
- Manfroid, S., Gillen, J., & Phillips-Batoma, P.M. (2013). The archives of Paul Otlet: Between appreciation and rediscovery, 1944–2013. *Library Trends*, 62(2), 311–328.
- Mizutani, T. (2013). Art libraries and art documentation in Japan, 1986–2012: progress in networking museums, libraries and archives and the ALC Art Libraries' Consortium. *Art Libraries Journal*, 38(2), 6–10.
- Muddiman, D. (2013). Documentation under duress. The Joint Conference of the International Federation for Documentation (FID) and the Association of Special Libraries and Information Bureaux (ASLIB), Oxford-London, 1938. *Library Trends*, 62(2), 378–401.
- Pleshkevich, E. A. (2013). Documentality as a document's attribute feature. *Scientific and Technical Information Processing*, 40(3): 146–151.
- Pleshkevich, E. A. (2013). The philosophical problems of identifying a document as an object of cognition. *Scientific and Technical Information Processing*, 40(4), 245–252.
- Sköld, O. (2013). Tracing traces: A document-centered approach to the preservation of virtual world communities. *Information Research*, 18(3) paper C09. Diakses 19 Januari 2014 dari <http://InformationR.net/ir/18-3/colis/paperC09.html>
- Smith, B. (2013). Document acts. Dalam Anita Konzelmann-Ziv, Hans Bernhard Schmid (Eds.), *Institutions, emotions, and group agents contributions to social ontology* (Philosophical Studies Series). Dordrecht: Springer.

2014

- Atwood, T. (2014). Words matter: Documents of the departed. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(6).
- Blundell, S. (2014). Documenting the information-seeking experience of remedial undergraduate students. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(4).
- Buckland, M. K. (2014). *Document theory: An introduction*. Berkeley: University of California.
- Buckland, M. K. (2014). Documentality beyond documents. *The Monist* 97(2), 179–18.
- Caffo, L. (2014). Foreword. *The Monist*, 97(2), 159–160.
- Closet-Crane, C. M. C. (2014). Listening to shells and discovering a lost world; epiphanic experiences at the museum. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(9).
- Dewey, S. H. (2014). The continuing relevance of Paul Otlet, the international institute of bibliography/international federation for documentation, and the documentation movement for information science and studies. *InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies*, 10(2).
- Faucher, K. X. (2014). An information metastate approach to documentation. *Journal of Documentation*, 70(4), 503–525.
- Ferraris, M. & Caffo, L. (2014). Documentality. *The Monist*, 97(2), 201–222.
- Ferraris, M., & Torrenco, G. (2014). Documentality: a theory of social reality. *Rivista di Estetica*, 57(3), 11–25.

- Ferraris, M. (2014). New realism, documentality and the emergence of normativity. Dalam M. Dell'Utri & S. Caputo (eds.), *Realism and Ontology without Myths* (pp. 110–124). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing
- Ferraris, M. (2014). Total mobilization. Dalam M. Ferraris & L. Caffo *The Monist*, 97(2), 201–222.
- Grenersen, G. (2014). Interpretations of patterns and actors in the lapp fund documents. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(3).
- Hansson, J. (2014). *On the documentality of future libraries*. Diakses 22 Desember 2014 dari <http://documentationandlibrarianship.blogspot.com/2014/03/on-documentality-of-future-libraries.html>
- Iannaggi, C. M., & Latham, K. F. (2014). Instantiation: academia's pop-up museum. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(2).
- Koepsell, D., & Smith, B. (2014). Beyond paper. *The Monist*, 97(2), 222–235.
- Klaver, I. J. (2014). Dutch landscape painting: documenting globalization and environmental imagination. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(12).
- Latham, K. F. (2014). Experiencing documents. *Journal of Documentation*, 70(4), 544–561.
- Latham, K. F., & Iannaggi, C. M (2014). An (un) session: A copy of a fake of the identical facsimile reproduced from the real original. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(5).

- Lund, N. W., & Skare, R. (2014). Facebook - a document without borders? *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(7).
- Martignani, L. (2014). Feline microchip: an exercise in the sociology of documentality. *The Monist*, 97, 236–245.
- Marty, Paul F. (2014). Digital convergence and the information profession in cultural heritage organizations: reconciling internal and external demands. *Library Trends*, 62(3), 612–627.
- McCotter, M. J. (2014). Trans.medial documentation for non-visual image access. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(10).
- O'Connor, B. C. (2014). DOCAM 2014 Founders Lecture: Photocutionary Acts, Selfies and Public Knowledge. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(1).
- Pacini de Moura, A. (2014). Considerations on the social role of the document according to Paul Otlet. *77th ASIS&T Annual Meeting*, October 31–November 5, 2014, Seattle, WA, USA.
- Rayward, W. B. (Ed.). (2014). *Information beyond borders: international and cultural exchange in the belle époque*. Aldershot: Ashgate.
- Rayward, W. B. (2014). Information revolutions, the information society, and the future of the history of information science. *Library Trends*, 62(3), 681–713.
- Robinson, L. (2014). The future of documents. Pervasive, participatory and multi-sensory: Lyn Robinson explores the impact of a new generation of documents. Diakses 06 Januari 2015 dari <http://www.infotoday.eu/Articles/Editorial/Featured-Articles/The-future-of-documents-98388.aspx>

- Roux, S., & Courbières, C. (2014). Documentary borders: reality or illusion. Knowledge. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(11).
- Salaun, J. M. (2014). Why the document is important ... and how it is becoming Trans.formed. *The Monist*, 97(2), 187.
- Skare, R., & Lund, N. W. (2014). Facebook - a document without borders? *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(7). Diakses dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol1/iss1/7>
- Smith, S. A. (2014). Identifying an archetype: The hipponion tablet and regional variations in the Orphic Gold Lamellae. *Proceedings from the 11th Annual Meeting of the Document Academy*, 1(8).
- Terrone, E. (2014, April). Traces, documents, and the puzzle of “Permanent Acts”. *The Monist*, 97(2), 161–178
- Vasiljević, J. (2014). *Citizenship as lived experience: belonging and documentality after the breakup of Yugoslavia*. The Europeanisation of Citizenship in the Successor States of the Former Yugoslavia (CITSEE) CITSEE Working Paper Series 2014/36.
- Wright, A. (2014). *Cataloging the world: Paul Otlet and the birth of the information age*. New York: Oxford University Press.

2015

- Bates, M. (2015). The information professions: Knowledge, memory, heritage. *Information Research*, 20(1).
- Boell, S. K., & Hoof, F. (2015). Using Heider’s epistemology of thing and medium for unpacking the conception of documents: Gantt charts and boundary objects. *Proceedings from the 12th*

- Annual Meeting of the Document Academy*, 2(3). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/3>
- Colwell, C. W. (2015). From Trans.action to interaction: socio-materiality, reliability and Trans.parency in an age of “unbound documents”. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(18). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/18>
- Cossham, A. (2015). Familiar categories and documentary forms: readers’ perspectives. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(12). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/12>
- Courbières, C., & Roux, S. (2015). Wikia: between documentary simulacra and documented fictions. *Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy*, 2(2). Diakses dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/2>
- Couzinet, V. (2015). A documentologic approach of herbarium: documentary anabiosis and phylogenetic classification. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(16). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/16>
- Ferraris, M. (2015). Documentality - or why nothing social exists beyond the text. Turin.
- Gorichanaz, T. (2015). For every document, a person: a co-created view of documents. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(9). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/9>
- Grenersen, G. (2015). The role of the libraries in the Norwegianization policy 1880–1905. *Proceedings from the 12th Annual Meet-*

- ing of the Document Academy*, 2(11). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/11>
- Hansson, J. (2015). Documentality and legitimacy in future libraries: An analytical framework for initiated speculation. *New Library World*, 116(1/2), 4–14.
- Kosciejew, M. (2015). Disciplinary documentation in apartheid South Africa: a conceptual framework of documents, associated practices, and their effects. *Journal of Documentation*, 71(1), 96–115.
- Lundh, A. H., & Dolatkah, M. (2015) Becoming citizens: dialogical document work in the classroom of the people's home. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(14). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/14>
- Narayan, B. (2015). Chasing the antelopes: A personal reflection. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(19). <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/19>
- Robinson, L. (2015). Imersive information behaviour: Using the documents of the future. *New library world: Charting new developments*, 116(3/4), 112–21.
- Sergeeva, A., Kirillov, B., & Voronina, E. (2015). Analyzing the PVCs documents: a multimodal rate-based approach to understand community's goals and values. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(15). Diakses dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/15>
- Skare, R. (2015). Authenticity-an important property for artistic documents? *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(8). Diakses dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/8>

- Spencer-Scarr, D. C. (2015). Digital engagement: personality is the context of the text. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(13). Diakses dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/13>
- Turner, D. (2015). Reconsidering library collections: Community services as documents, *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(17). Diakses dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/17>
- Vårheim, A. (2015). Public libraries worked in the Tohoku megadisaster. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(10). Diakses dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/10>
- Wijesundara, C., Sugimoto, S., & Narayan, B. (2015). Documenting spatial and temporal information for heritage preservation: A case study of Sri Lanka. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(5). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/5>
- Yerbury, H., & Shahid, A. (2015). The becoming of human rights documents: An exploration of a social media campaign. *Proceedings from the 12th Annual Meeting of the Document Academy*, 2(1). Diakses 23 September 2015 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/1>

2016

- Anderson, R. L., & O'Connor, B. C. (2016). What makes a movie. *Proceedings from the Document Academy*, 3(1), 3. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/3>
- Börjesson, L., Dell'Unto, N., Huvila, I., Larsson, C., Löwenborg, D., Petersson, B., & Stenborg, P. (2016). A neo-documentalist

- lens for exploring the premises of disciplinary knowledge making. Proceedings from the *Document Academy*, 3(1), 5. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/5>
- Buckland, M. K. (2016). The physical, mental and social dimensions of documents. Proceedings from the *Document Academy*, 3(1), 4. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/4>
- Day, R. E. (2016). Sense in documentary reference: Documentation, literature, and the post-documentary perspective. Proceedings from the *Document Academy*, 3(1),6. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/6>
- Gorichanaz, T. (2016). Documents and time. Proceedings from the *Document Academy*, 3(1), 7. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/7>
- Hansson, J. (2016). The documentality of ethics-codes of library ethics as support of professional practice. Proceedings from the *Document Academy*, 3(1), 8. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/8>
- Latham, K. F. (2016). Jungles, rabbit holes, and wonderlands: comparing conceptions of museality and document. Proceedings from the *Document Academy*, 3(1), 9. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/9>
- Lund, N. W. (2016). How it all started: 1996, the first year of dokvit. Proceedings from the *Document Academy* 3(1), 2. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/2>
- Roux, S. (2016).The document: A multiple concept. Proceedings from the *Document Academy*, 3(1), 10. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/10>

- Skare, R., & Latham, K. F. (2016). Tromsø and documentation studies: 20 years young (Editorial). *Proceedings from the Document Academy*, 3(1),1. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/1>
- Weissenberger, L. K. (2016). “Windows” of time: Memory, metaphor, and storytelling as documents. *Proceedings from the Document Academy*, 3(1), 11. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/11>
- Yerbury, H., & Shahid, A. (2016). Transformations: From social media campaign to scholarly paper. *Proceedings from the Document Academy*, 3(1), 12. Diakses 02 Agustus 2016 dari <http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol3/iss1/12>

Menutup bibliografi kronologis ini, perlu disampaikan bahwa daftar ini memerlukan pemutakhiran karena perkembangan ilmu dokumentasi yang cepat. Naskah ini saya selesaikan pada November 2015 sehingga bibliografi kronologis-nya hanya memuat referensi sampai akhir 2015. Namun, perkembangan dokumentasi terbukti sangat cepat dan kebetulan naskah buku ini masih memerlukan waktu untuk penelaahan oleh penerbit. Oleh karena itu, hasil pertemuan DOCAM 2016 akhirnya juga diikuti dalam bibliografi kronologis ini. Saat ini, sudah dan akan selalu dihasilkan banyak literatur yang tidak mudah untuk didaftar secara lengkap. Inventarisasi atas literatur nasional tentang dokumentasi belum dapat dilakukan, padahal inventarisasi ini penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Siapa yang akan melaksanakan? Memang sudah waktunya para peminat dan pelaku studi dokumentasi berhimpun dalam sebuah konsorsium ilmu dokumentasi. Konsorsium inilah yang diharapkan akan menjadi pemeran utama dalam studi dokumentasi di Indonesia. Mungkin masih memerlukan waktu, namun harus dinyatakan dan diusahakan saat ini juga.

BAB XII PENUTUP

Perjalanan panjang mencari makna dokumentasi sampailah pada akhir babak awal. Dikatakan akhir babak awal karena diharapkan akan ada babak selanjutnya sebagai kelanjutan cerita yang lebih akademik. Cerita babak selanjutnya tentu memerlukan pribadi muda yang mau dan mampu berpikir dan bertindak lebih akademik. Sebab tujuan selanjutnya adalah mengajarkan dan mengembangkan kembali ilmu dokumentasi di Indonesia. Kini telah diakui bahwa ilmu dokumentasi baru adalah ilmu yang menempatkan dokumen di titik pusat, sebagai objek studi yang dipelajari secara komprehensif 360 derajat dari berbagai disiplin ilmu. Dapat disebut bahwa dokumen adalah pusat dari perjalanan hidup dan budaya umat manusia.

Jejak perjalanan tersebut terwujud dalam dokumen yang sangat beragam bentuknya. Kelestarian semua dokumen itu menjadi tanggung jawab lembaga dokumenter yang kini dituntut semakin konvergen. Dengan sendirinya, ilmu dokumentasi adalah ilmu inti bagi lembaga dokumenter sehingga wajib dipelajari, dipahami, dan dihayati. Dokumentasi menjadi spirit atau roh semua lembaga dokumenter. Cerita pada babak awal ini pun perlu dikaji secara akademik demi terwujudnya kebenaran. Kolokium dokumentasi perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh pribadi yang mau

menekuni jalan dokumentasi. Perkembangan yang diharapkan adalah adanya konsorsium ilmu dokumentasi di Indonesia. Maukah dan kapan kita dapat mewujudkannya?

Ilmu dokumentasi baru semestinya juga diajarkan di Indonesia. Konsep dokumentasi baru akan menjadi roh dari semua jenis lembaga dokumenter. Agar pemahaman terhadap ilmu ini pada arah yang benar, hendaknya ada kelompok pemerhati yang bersama menyusun buku teks dasar ilmu dokumentasi baru. Memakai istilah akademis, selayaknya ada konsorsium ilmu dokumentasi di Indonesia. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai titik berangkat bagi konsorsium tersebut. Diakui bahwa buku ini baru sebagian dari bahan mentah yang harus dilengkapi dan diproses lebih lanjut menggunakan metode ilmiah yang benar. Oleh karena itu, diharapkan para akademisi ada yang tertarik untuk menggarapnya. Untuk itu, interaksi dengan para praktisi juga sangat diperlukan.

Banyak kejadian nasional masa lalu yang harus diteliti agar ilmu dokumentasi baru—yang akan diajarkan di Indonesia—mengenal akar sejarahnya. Tujuannya agar ekstrapolasi menuju masa depan benar berawal dari titik nol dan merupakan garis yang tidak patah—meski bisa saja berkelok-kelok. Memang sampai kini penelitian sejarah perpustakaan Indonesia belum banyak dilakukan. Hal ini dapat dimengerti, bahkan ASIS&T baru memperhatikan penelitian sejarah setelah ada revitalisasi grup pada 1991 melalui Special Interest Group in Foundations of Information Science (SIG-FIS) yang kemudian berkembang menjadi Special Interest Group in History and Foundations of Information Science (SIG-HFIS).

Indonesia telah menjadi anggota FID sejak 1950. Pada tahun itulah awal lahirnya dokumentasi di Indonesia. Upaya penelusuran referensi tentang awal keterlibatan Indonesia pada FID baru tertelusuri melalui tulisan Luwarsih Pringgoadisurjo yang melaporkan keikutsertaannya pada konferensi FID ke-33 di Tokyo pada 1967.

Menurut Luwarsih, waktu itu adalah pertama kali Indonesia ikut serta dalam pertemuan FID—padahal Indonesia sudah menjadi anggota FID sejak 1950. Hal ini juga disebut Suzanne Briet dalam pamfletnya *Qu'est ce que la documentation* (1951).

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dan apa saja aktivitas Indonesia dalam bidang dokumentasi pada periode 1950–1967. Arsip dari OSR mungkin dapat menerangkan aktivitas masa itu. Namun, di manakah arsip tersebut? Jika dilihat kembali UU Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan MIPI, telah ada benih dokumentasi tersebut pada kewajiban pokok yang keempat, yaitu *menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang berada di Indonesia*. Muncul pertanyaan terkait kewajiban pokok ke-4 itu: “Apakah ada pengaruh konsep dokumentasi FID pada waktu itu dalam menyusun UU tersebut?”

Secara konkret, saya mengusulkan dibentuknya suatu Konsorsium Ilmu Dokumentasi di Indonesia untuk mempelajari, meneliti, dan mengajarkan serta mengembangkannya di Indonesia. Konsorsium ini beranggotakan para pembelajar, pengajar, dan pemerhati ilmu dokumentasi yang didukung atau difasilitasi lembaga pemangku kebutuhan, baik lembaga pendidikan maupun lembaga yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas praktik dokumentasi. Konsorsium Ilmu Dokumentasi harus dipikirkan dan direalisasikan keberadaannya di Indonesia.

Naskah buku ini saya selesaikan pada akhir Oktober 2015. Semula saya berharap pada tahun itu naskah akan terbit. Tahun 2015 menjadi penuh makna karena pada tahun itu tepat:

- 1) Seratus dua puluh tahun lahirnya Ilmu Dokumentasi oleh Paul Otlet dan Henri La Fontaine;
- 2) Delapan puluh lima tahun kelahiran Ibu Luwarsih Pringgoadisorjo, Direktur kedua dari Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional

- (PDIN) yang kini menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI);
- 3) Enam puluh lima tahun Indonesia menjadi anggota Federasi Internasional Dokumentasi (FID); dan
 - 4) Lima puluh tahun usia PDII-LIPI.

Kesimpulannya, tahun 2015 menjadi momentum awal kebangkitan kembalinya ilmu dokumentasi di Indonesia.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua sejawat dan pihak yang telah memungkinkan saya berpikir mengenai dokumentasi. Saya telah berutang intelektual, terutama pada lembaga tempat saya bekerja selama 39 tahun 7 bulan. Jika saya tidak bekerja di lembaga tersebut, tentu saya juga tidak akan pernah berpikir dan mempunyai gagasan seperti yang tertuang dalam buku ini. Dua pribadi yang harus saya sebut adalah Almarhumah Ibu Luwarsih Pringgoadisurjo dan Bapak Zultanawar Tanisan. Ibu Luwarsih yang telah “menjerumuskan” saya dalam tugas dan Bapak Zultanawar yang telah menjadi guru saya dalam melaksanakan tugas dan berpikir.

Tentu banyak sejawat yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang membuat saya selalu memikirkan perpustakaan dan kepustakawanan yang sekarang mengerucut pada ilmu dokumentasi. Buku ini terlahir karena sejawat semua, khususnya sejawat yang tergabung dalam Kappa Sigma Kappa Indonesia, yang mendorong semangat saya menyelesaikan buku ini. Saudari Musiana Yudhawasthi yang juga membantu melihat substansi dan saya minta menulis kata pengantar. Juga peran tidak langsung Saudari Harkrisyati Kamil dan Saudara Agus Rusmana yang sering menjadi tempat saya menggerutu. Buku ini tentu memerlukan kritik dan saran agar dapat disempurnakan. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca.

Terakhir, namun sangat menentukan, saya berterima kasih kepada Jajaran Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah mengizinkan terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI, Prof. Dr. Bambang Subiyanto, M.Agr., yang telah menyambut buku ini dan mengantarkannya kepada sidang pembaca. Ucapan terima kasih tentu juga saya sampaikan kepada Pimpinan dan Staf UPT Balai Media dan Reproduksi atau lebih dikenal sebagai LIPI Press yang telah menyiapkan dan menerbitkan buku ini. Tanpa kerja profesional teman-teman, buku ini tentu tidak terwujud.

Apapun hasilnya, buku ini merupakan ekspresi pemikiran dan/atau perasaan saya. Semoga buku ini bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

- Briet, S. (1951). *What is documentation?* R. E. Day, L. Martinet, & H. G. B. Angheliescu (Ed. & Trans.). Paris.
- Buckland, M. K. (1996). Documentation, information science, and library science in the USA. *Information Processing and Management*, 32(1), 63–76.
- Buckland, M. K. (1997). What is a “document”? *Journal of the American Society for Information* 48(9), 804–809.
- Buckland, M. K. (1998). Documentation, information science, and library science in the USA. Preprint of article published in (1996). *Information Processing and Management* 32(1), 63–76; and reprinted in T. B. Hahn, & M. Buckland (Eds.), *Historical studies in information science* (pp. 159–172.). Medford, NJ: Information Today.
- Buckland, M. K. (1998). What is a “digital document”? Preprint of article published in *Document Numérique*, 2(2), 221–230.
- Buckland, M. K. (2002). *1895–2002 FID achievements*. Diakses pada 7 Desember 2014 dari <http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/fidhist.html>.
- Buckland, M. K. (2006). A brief biography of Suzanne Renee Briet. Dalam R. E. Day & L. Martinet (Eds.), *What is documentation?* English Translation of the Classic French Text. Lanham, MD: Scarecrow Press.
- Buckland, M. K. (2007). On the cultural and intellectual context of European documentation in the early twentieth century. Dalam W. B. Rayward (Ed.), *European Modernism and the Information Society: informing the present, understanding the past* (pp. 45–57). Aldershot, UK: Ashgate.

- Buckland, M. K., & Lund, N. W. (2013). Boyd Rayward (Ed.), Documentation, and information science. *Library Trends*, 62(2), 302–310.
- Buckland, M. K. (2013). Document theory: an introduction. Preprint, Nov 7, 2013, *Presentation at the Summer School on Records, Archives and Memory Studies*. University of Zadar, Department of Information Sciences, Zadar, Croatia.
- Buckland, M. K. (2013). The Reception of Suzanne Briet in the United States. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 39(4), 40.
- Buckland, M. K. (2014). Documentality beyond documents. *The Monist*, 97(2), 179–18.
- Budiwiyanto, Adi. (2015). *Pendokumentasian bahasa dalam upaya revitalisasi bahasa daerah yang terancam punah di Indonesia*. Diakses 9 September 2015 dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1823>
- Day, R. E. (2001). Totality and representation: a history of knowledge management through European documentation, critical modernity, and post-fordism. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 52(9), 725–735.
- Day, R. E. (Desember 2006/Januari 2007). Suzanne Briet: an appreciation. *ASIST Bulletin*. Diakses 12 Desember 2013 dari <http://www.asis.org/Bulletin/Dec-06/day.html>
- Endarmoko, E. (2007). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ferraris, M. (2012). *Documentality: Why it is necessary to leave traces*. R. Davies (Trans.). Bronx, NY: Fordham University Press.
- Ferraris, M., & Caffo, L. (2014). Documentality. *The Monist*, 97(2), 201–222.
- Ferraris, M., & Torrenco, G. (2014). Documentality: a theory of social reality. *Rivista di Estetica*, 57(3), 11–25.
- Ferraris, M. (2014). New realism, documentality and the emergence of normativity. Dalam F. Bacchini, S. Caputo, & M. Dell’Utri (Eds.), *Realism and ontology without myths* (pp. 110–124). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Ferraris, M. (2014). Total Mobilization. *The Monist*, 97(2), 200–221.
- Hansson, J. (2010). Document studies-an alternative “paradigm” in library and information science? Diakses 21 Januari 2013 dari [244 || Menuju Era Baru Dokumentasi](http://docu-</p>
</div>
<div data-bbox=)

mentationandlibrarianship. blogspot.co.id/search?updatedmin=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=15

- Hornby. (1990). *Oxford advanced learner's dictionary of current English*. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga*. (2005). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama*. (1988). Jakarta: Balai Pustaka.
- LAMMS Coordinating Council Secretariat. (2012). *Statement of principles on global cross sectoral digitisation initiatives*. The Hague, Netherlands.
- Lund, N. W. (2003). Doceo + mentum - a ground for a new discipline. Paper to the *DOCAM '03 conference*, SIMS, UC-Berkeley, CA, Aug.13–15. Diakses 2 Maret 2014 dari <http://www.thedocumentacademy.org/resources/2003/papers/lund.paper.html>
- Lund, N. W. (2004). Building a discipline, creating a profession: An essay on the childhood of “dokvit”. Diakses 26 April 2009 dari <http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/966/paper.pdf?sequence=1>
- Lund, N. W. (2004). Doceo +mentum = document -a medium concept, theory and discipline. Diakses 2 Desember 2008 dari http://www.informationdesign.org/doceo_mentum_-a_ground_for_a/
- Lund, N.W. (2007). Building a discipline, creating a profession: An essay on the childhood of “dokvit”. Dalam Roswitha Skare, Niels Windfeld Lund, & Andreas Varheim (Eds.), *Document (re)turn. Contributions from a research field in transition* (pp. 11–26). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Lund, Niels Windfeld (2009). Document theory. *Annual Review of Information Science & Technology* 43, 399–432.
- Lund, N.W., & Buckland, M. (2009). Document, documentation, and the Document Academy: Introduction. *Arch Sci*, 8(3), 161–164.
- Lund, N.W., & Skare, R. (2009). Document theory. Dalam M. Bates, & M.N. Maack (Eds.), *Encyclopedia of library and information sciences*, 3rd ed. (pp. 1632–9). New York, NY: Taylor & Francis.
- Lund, N. W. (2010). Document, text and medium: Concepts, theories and disciplines. *Journal of Documentation*, 66(5), 734–749.
- Maack, M. N. (1983). Women librarians in France: The first generation. *Journal of Library History*, 18(4), 407–49.

- Maack, M. N. (2004). The lady and the antelope: Suzanne Briet's contribution to the French documentation movement. *Library Trends*, 52(4), 719–747.
- Manfroid, S., Gillen, J., & Phillips-Batoma, P.M. (2013). The archives of Paul Otlet: Between appreciation and rediscovery, 1944–2013. *Library Trends*, 62(2), 311–328.
- Marty, P.F. (2014). Digital Convergence and the information profession in cultural heritage organizations: Reconciling internal and external demands. *Library Trends*, 62(3), 612–627.
- Mualim, T.P. (1973). “Perpustakaan khusus dan dokumentasi”. Makalah diajukkan dalam *Kongres Pustakawan Indonesia*, 5–7 Juli 1973, di Ciawi, Bogor.
- Nurul Islam, Md. (Juni 10, 2015). S. R. Ranganathan: Library and documentation scientist. *Current Science*, 108(11), 2.110–2.111.
- Online Computer Library Center (OCLC). (2008). *Beyond the silos of the LAMs: Collaboration among libraries, archives, and museums*. Dublin: OCLC Programs and Research.
- Oxford Latin Dictionary*. (1982). P.G.W. Glare (Ed.). New York: Oxford University Press.
- Pleshkevich, E. A. (2010). The source study concept of general document theory: Theoretical and organizational aspects (a review). *Scientific and Technical Information Processing*, 37(1), 43–48.
- Pleshkevich, E.A. (2010). Formation of the scientific concepts about the documental forms of information. The legal and source study concepts of a document. *Scientific and Technical Information Processing*, 37(4), 217–226.
- Pleshkevich, E.A. (2010). The formation of the scientific concepts about the documental forms of information: The gnoseological and managerial concepts of a document. *Scientific and Technical Information Processing*, 37(4), 227–249.
- Pleshkevich, E. A. (2013). Documentality as a document's attribute feature. *Scientific and Technical Information Processing*, 40(3), 146–151.
- Pleshkevich, E. A. (2013). The philosophical problems of identifying a document as an object of cognition. *Scientific and Technical Information Processing*, 40(4), 245–252.

- Prawirohardjo, S. (1957). Tugas dan rencana kerja Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam masa depan dan soal penghubungannya dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia. Prasaran Ketua MIPI pada *Konferensi Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia I*. Bandung, 7–9 Januari, 1957. *Berita MIPI*, 1(2), 16–18.
- Presiden Republik Indonesia. (1961). Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tentang Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah*.
- Pringgoadisurjo, L. (1967). Federation Internationale de Documentation (FID) dan Konferensi ke-33 di Tokyo. Laporan sidang FID di Tokyo.
- Rand, Ayn. (2003). *Pengantar epistemologi objektif*. Cuk Ananta Wijaya (Penerj.). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Rayward, W. B. (1975). *The universe of information: The work of Paul Otlet for documentation and international organization*. Moscow: VINITI for the International Federation for Documentation. Diakses 12 April 2001 dari <http://www.hdl.handle.net/2142/651>.
- Rayward, W. B. (1991). The case of Paul Otlet, pioneer of information science, internationalist, visionary: reflection on biography. *Journal of Librarianship and Information Science* 23(3), 135–145.
- Rayward, W. B. (Ed. & Trans.). (2010). *Mundaneum: archives of knowledge (occasional paper 215)*. Urbana-Champaign: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science.
- Rayward, W. B. (2012). Paul Otlet, an encounter. Dalam *Cahiers de la documentation – Bladen voor documentatie* 2, 71–73.
- Republik Indonesia. (1956). Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. *UU No. 6 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia*.
- Royal Society of Canada Expert Panel Report. (2014). *The future now: canada's libraries, archives, and public memory*. Ottawa, Canada.
- Searle, John R. (1995). *The construction of social reality*. New York: Simon and Schuster.
- Setyodiwiryo, Kusnoto (1957). Prasaran perihal ikut sertanya Indonesia dalam kongres-kongres ilmu pengetahuan internasional dan perihal menyelenggarakan kongres-kongres ilmu pengetahuan nasional

- (symposia, seminar dan sebagainya). Disampaikan dalam KonFerensi MIPI I, Bandung, 7-9 Januari 1957. *Berita Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 1(2), 18–23.
- Sudarminta, J. (2002). *Epistemologi dasar: pengantar filsafat pengetahuan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudarsono, B. (1992). Pendekatan untuk memahami kepastakawanan. Dalam *Kepustakawanan Indonesia: potensi dan tantangan* (pp. 149–160). Jakarta: Kesaint Blanc.
- Sudarsono, B. (1996). Satu dasa warsa menjelang kelahiran PDIN. *BACA*, XXI(1–2), 2–5.
- Sudarsono, B. (2007). *Menyongsong fajar baru, merancang masa depan*. Jakarta: LIPI Press.
- Sudarsono, B. (2013). *Memaknai dokumentasi: pidato kepastakawanan sebagai memori akhir masa tugas*. Jakarta: PDII-LIPI.
- Sumaryono, E. (1998). *Dasar-dasar logika*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Turner, D. (2012). Oral documents in concept and in situ, part I: Grounding an exploration of orality and information behavior. *Journal of Documentation*, 68(6), 852–863.
- Turner, D. (2012). Oral documents in concept and in situ, part II: Managerial decrees. *Journal of Documentation*, 68(6), 864–881.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Wright, A. (2014). *Cataloging the world: Paul Otlet and the birth of the information age*. New York: Oxford University Press.

INDEKS

- All-Union Institute for Scientific and Technical Information (VINITI), 34, 43, 105, 198
- American Documentation Institute (ADI), 88, 92, 197, 200
- American Library Association (ALA), 10, 138, 202
- Anthroposophy, 122
- Association of College and Research Libraries (ACRL), 10, 138
- Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI), 57, 96
- Arsip, xiv, xv, xvi, vxii, 4, 10, 11, 14, 21, 23, 38, 39, 48, 52, 56, 57, 63, 69, 83, 96, 111, 133, 135–140, 144–147, 189, 239
- Artefak, 2, 4, 10, 11, 54, 69, 121, 135, 137, 138, 147, 162
- Association for Library and Information Science Education (ALISE), 139
- Bahasa, xiii, 6–8, 28, 31, 44, 46, 51, 108, 112, 124, 125, 126, 151, 154, 155, 157, 158, 160, 162, 188
- Bibliografi, 2, 13, 15, 34, 35, 39–42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 88, 90, 125, 127, 187–190, 236
- Biodiversity, 3, 58, 87
- Briet, Suzanne, xvii, 7, 8, 13, 33–35, 44–47, 50, 53–55, 89, 95, 106–108, 114, 121–123, 162, 188, 193, 194, 204, 212, 214, 215, 226, 239
- Buckland, Michael Keeble, xvii, 7–9, 15, 34, 35, 41, 44, 46–48, 51–53, 89–93, 103–109, 117, 119, 122–124, 127–129, 131, 132, 202, 204–209, 214, 215, 217–219, 224–226, 228, 235
- Complementary theory of documents, 126
- Conference of Directors of National Libraries (CDNL), 140
- Coordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA), 141
- Doceo, 110, 125, 126, 210, 212
- Document Academy, xii, 9, 103, 109, 124, 188, 210, 212, 213, 217, 219, 227–236

- Document Academy Meeting (DOCAM), xii, 9, 103, 109, 110, 117, 120, 124, 188, 210, 213, 227, 230–236
- Document society, 124, 129
- Documentology, 116
- Documentum, 124
- Dokumen, xii, xvii, 4, 7–11, 14, 15, 19, 21–28, 30, 33, 35–40, 46–50, 53–56, 65, 68, 72–75, 80, 82, 83, 87, 88, 95, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 113–115, 117, 119–136, 138, 145–148, 155, 158, 161, 162, 163, 169, 175, 185, 186, 188, 237
- Dokumen Sekunder, 47, 48, 121
- Dokumentalis baru, xii, 7, 9, 103, 107, 111, 117, 119, 120, 163, 188
- Dokumentasi, ix–xii, xvi, xvii, 1–15, 17–39, 42, 44–50, 52–59, 61–83, 85–90, 92, 94, 111, 115–117, 119–121, 123–128, 132, 136, 140, 145, 147, 149, 155, 156, 158–165, 167–169, 171, 173–175, 177–190, 236, 237–240
- Dokumentasi baru, ix, xii, xvii, 9, 11–15, 39, 54, 86, 89, 100, 101, 103–105, 108, 109, 111, 115, 117, 132, 163, 169, 185, 186, 188, 190, 237, 238
- Dokumentasi literair, 5, 65, 72
- Dokumentasi proses, 3, 149
- Dokumentasi pustaka, 3–5, 12, 13, 30, 57, 65, 68, 72, 81, 86, 87, 94, 95, 111, 175
- Dokumentasi umum, 5, 82
- Dokumentatie corporeel, 5, 66, 72
- Dokumenten, xii, 3, 11, 12, 14, 38, 102, 133, 135, 138, 141, 145–147, 186, 189, 237, 238
- Dokumentalitas, 11, 12, 112–114, 129, 130
- Documentality, 11, 112–114, 129, 130, 214, 215, 219, 224, 226–233, 235
- Dokumentografi, 47, 50
- Dyadic, 150
- Ferraris, Maurizio, 9, 103, 110–113, 117, 119, 129, 130, 131, 214, 215, 219, 224, 228, 229, 232
- Foto, xv, 3, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 121, 158
- General documentation, 5, 50
- General Scientific Discipline of Documentation, 116
- Graphic record, 123
- Hansson, Joacim, 9, 103, 110–111, 117, 210, 212, 220, 224–226, 229, 233, 235
- Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia (HPKI), 58, 97
- Informatics, 43, 89
- Information Science, 8, 43, 46, 88–90, 93, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 114, 119, 139, 193, 197, 199, 200, 203–210, 218–220, 222–226, 228, 230, 238
- Informology, 116
- Ingatan, 37, 113, 122, 130, 151, 152, 155, 160
- Institut International de Documentation (IID), 42

- Institute of Museum and Library Services (IMLS), 10, 138
- International Council on Archives (ICA), 141
- International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), 139, 141
- International Council of Museums (ICOM), 141
- International Council for Scientific and Technical Information (ICSTI), 141
- International Federation for Documentation (FID), 34, 40, 56, 88, 105, 192–194, 198, 205, 227, 228
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 58, 141, 194, 209
- International Institute for Bibliography (IIB), 41, 88, 198
- Irreversible, 150
- Keanekaragaman hayati, 3, 58, 87
- Kebutuhan Hidup Manusia, 151, 154
- Kesaksian, 151, 152, 155
- Knowledge management, 20, 82, 208, 217
- Kolokium keilmuan, 11
- Konsorsium ilmu dokumentasi, 236, 238, 239
- Konvergensi, xii, 10–12, 14, 111, 133, 135–137, 139, 144–147, 186, 189
- La Fontaine, Henri, 7, 8, 33–35, 40, 41, 51, 53, 88, 120, 123, 136, 188, 200, 239
- Lady and the antelope, 46, 212
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 3, 29, 56, 59, 240, 241
- Library, Archives, and Museum (LAM), 10
- Living documentation, 6
- Logika, ix, 1, 5–7, 12, 14, 30, 94, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 164, 169, 181, 184, 186
- Long-term access to cultural heritage, 143
- Lund, Niels Windfeld, xvii, 7–9, 103, 104, 108–110, 117, 119, 123–128, 162, 210, 212, 216, 217, 219, 221, 225, 226, 230, 231, 235
- Madame of Documentation, 45
- Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), 4, 13, 54, 55, 59, 169–172
- Marty, Paul F., 11, 144, 230
- Minat, 14, 15, 18, 46, 90, 100, 103, 105, 109, 124, 127, 151, 152, 188, 189, 236
- Monde: Essai d'universalisme, 34, 37
- Monographic Principle, 40, 42
- Mualim, Tjandra Permadi, 88, 98, 99, 101
- Mundaneum, 8, 36, 39, 41, 105, 206, 213, 217, 222
- National Biodiversity Information Network, 3, 58
- Neo-documentalist, xii, 7, 9, 103, 104, 234
- Noocommunicology, 116

- Objek Nyata, 160, 162, 164
 Objek Maya, 160, 162, 164
 Objek Digital, 161, 162
 Online Computer Library Center (OCLC), 138
 Organization for Scientific Research (OSR), 13, 56
 Otlet, Paul, 7, 8, 33–42, 45, 46, 52–54, 88–90, 92, 103, 105, 107, 108, 119–123, 136, 162, 186, 188–191, 197–203, 205, 206, 211, 213, 216, 217, 219, 222–225, 227, 228, 230, 231, 239
- Palais Mondial, 40, 41
 Partaningrat, Winarti, 64
 Pengalaman, ix, 1, 74, 76, 77, 80, 97, 151, 152, 155
 Peraturan Presiden, 4, 5, 14, 54, 55, 57, 65, 66, 69–73, 79, 80, 82, 83, 94, 95, 169, 174–177, 186
 Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI), 56, 96
 Perhimpunan Pustakawan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPDIY), 98
 Pikiran, 37, 122, 151, 153, 154, 159, 161
 Penalaran, 151, 153–155
 Pleshkevich, E.A., 9, 103, 110, 111, 113–117, 218, 220, 221, 223, 227
 Pringgoadisurjo, Luwarsih, 63, 88, 96, 238–240
 Proses berpikir, 1, 156, 169
 Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN), 13, 57, 59, 63, 64, 239, Pusedokinfo, 18, 86
- Qu'est-ce que la documentation, 7, 46, 106
- Ranganathan, Siyali Ramamrita, 33, 53, 122, 123
 Rare Books and Manuscripts Section (RBMS), 10, 138
 Rasa Ingin Tahu, 151–154
 Rayward, Warden Boyd, 7–11, 34–37, 46, 51, 89, 103–107, 109, 110, 117, 123, 144, 145, 188, 190, 191, 197–203, 205, 206, 211–213, 215–218, 222, 225, 226, 230
 Repository of an expressed thought, 122
 Reversible, 150
 Royal Society of Canada, 139
- School of Documentation Studies, xii, 123
 Scientific Discipline of Documentation, 116, 218
 Special Scientific Discipline of Documentation, 116
 Statement of Principles on Global Cross Sectoral Digitisation Initiatives, 141
- Traité de documentation, 34, 37, 42
 Triadic, 149
- Universal Book of Knowledge, 40
 Universal Decimal Classification (UDC), 38, 42, 51, 54, 136
- World Wide Web (WWW), 34, 217

BIOGRAFI PENULIS



BLASIUS SUDARSONO

Blasius Sudarsono lahir di Solo, Jawa Tengah pada 2 Februari 1948. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota yang sama. Melanjutkan pendidikan di Kota Yogyakarta, belajar di Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam. Mendapatkan Bachelor of Science (B.Sc.) Bidang Fisika pada 1973. Menyelesaikan studi Master of Library Studies (MLS) di University of Hawaii, Graduate School of Library Studies, USA pada 1979. Studi ini ditempuh karena tugasnya sejak 1 Agustus 1973 sebagai karyawan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN). Pertanyaan mendasar tentang dokumentasi sudah muncul saat akan bekerja di PDIN. Waktu itu menduga dokumentasi ilmiah adalah museum ilmiah. Kontradiksi dokumentasi dan perpustakaan mengawali perjalanan pemikirannya tentang dokumentasi.

Pada 1980 ditugaskan menjadi Kepala Pusat Perpustakaan PDIN sampai 1987. Seiring re-organisasi PDIN menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII-LIPI) pada 1987, ia mendapat tugas

baru sebagai Kepala Bidang Sarana Teknis PDII-LIPI sampai Maret 1990. Sejak April 1990, ia memimpin PDII-LIPI sampai Agustus 2001. Sering melontarkan pertanyaan atau pernyataan yang mendasar, seperti perpustakaan itu bukan ilmu, namun lebih sebagai *art*, mungkin lebih cocok disebut *library arts and sciences* (1974), Ilmu komputer akan mengancam ilmu perpustakaan (1988), dan kapan akan ada yang mulai memikirkan filsafat kepustakawanan (1988).

Memasang sistem komputer mini di PDIN pada 1983 serta mulai membangun pangkalan data literatur ilmiah Indonesia. Dalam rangka peresmian Gedung Perpustakaan Nasional (1989), meragakan akses jarak jauh ke pangkalan data literatur ilmiah PDIN dari Gedung Perpustakaan Nasional di Salemba di hadapan Kepala Negara RI. Aktif dalam kerja sama dengan berbagai perpustakaan dan pusat informasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam mengembangkan South East Asia Machine Readable Cataloging (SEAMARC) sebagai pendahulu Indonesia MARC (INDOMARC). Sejak 1986, ia ikut serta memulai program IPTEKnet sebagai rintisan aplikasi internet di Indonesia. Mulai membangun jaringan intranet dan internet di PDII-LIPI pada 1996.

Dengan dana dari Yayasan Ford pada 1988, ia merintis pengembangan kemampuan pelestarian bahan pustaka dan arsip. Lembaga terkait adalah Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, PDII-LIPI, Pusat Pembinaan Perpustakaan, dan Direktorat Permuseuman. Pada 1980, kerja sama PDII-LIPI dengan Kantor Menteri Muda Peranan Wanita merintis pembangunan Pusat Informasi Wanita dan Pembangunan (PIWP). Pada 1990, terlibat rintisan program keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di LIPI. Tugas keanekaragaman hayati ini menguatkan niat mempelajari ilmu dokumentasi untuk merumuskan logika penalarannya.

Menjadi konsultan US-AID untuk Perpustakaan FKM-UI (1989) dan Konsultan Bank Dunia untuk Sistem Perpustakaan

Departemen PU (1991–1995). Pernah mengajar Mata Kuliah Perpustakaan Khusus di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk program S1 (1981–1991). Juga mengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia bidang studi ilmu informasi, perpustakaan, dan arsip (1992–1996). Pada 2003, ia juga mengajar pada program S2 Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung.

Sebagai pustakawan dan karena tugas terkait, ia melakukan perjalanan dinas ke berbagai negara seperti Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Taiwan, Korea, Jepang, Hongaria, Belanda, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Peru, dan Ethiopia. Menulis dan menyampaikan berbagai makalah pada berbagai seminar, lokakarya, atau pertemuan ilmiah lainnya di Indonesia dan di negara tersebut. Beberapa buku telah dihasilkan, antara lain *Antologi Kepustakawanan Indonesia* (2006), *Menyongsong Fajar Baru Merancang Masa Depan* (2007), *Literasi Informasi: Pengantar untuk Perpustakaan Sekolah* (2007), *Pustakawan, Cinta, dan Teknologi* (2009), dan *Perpustakaan untuk Rakyat: Dialog Anak dan Bapak* (2012).

Purna tugas dari Pegawai Negeri Sipil pada Maret 2013 setelah mencapai pangkat tertinggi dalam jabatan Pustakawan Utama. Penghargaan yang diperoleh antara lain Piagam Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka: *Lifetime Achievement* pada 29 Oktober 2013 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai PNS memperoleh Satyalancana Karya Satya XX tahun, Satyalancana Karya Satya XXX, dan Satyalancana Pembangunan. Saat ini masih belajar dan menekuni bidang dokumentasi dan kepustakawanan. Mendirikan dan memimpin Kelompok Studi Kappa Sigma Kappa Indonesia sejak 2012.



BIOGRAFI EDITOR



MUSIANA YUDHAWASTHI

Musiana Yudhawasthi lahir di Palembang, menyelesaikan sekolah dasar di Jakarta, sekolah menengah pertama di Cimahi-Bandung dan kembali ke Jakarta untuk menuntaskan sekolah menengah atas. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1988, mengambil studi Ilmu Perpustakaan.

Pada 2000, melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya pada universitas yang sama dengan mengambil studi Ilmu Kearsipan dengan beasiswa Mahasiswa Berprestasi FSUI serta beasiswa Sasakawa Kyoto Foundations. Pada 2014, ia sempat memutakhirkan wawasannya melalui *Library & Museum Internship-Exchange Program* Thailand Knowledge Park di Bangkok.

Sangat mencintai bidang pendidikan, membuat Ibu dua putra ini menekuni dunia mengajar dari tingkat mahasiswa di Universitas Indonesia sejak tahun 1993, hingga akhirnya memilih menekuni pendidikan usia dini, dasar, dan menengah pada 2004. Konsep pendidikan bagi pencinta museum ini berubah ketika mulai memikirkan diseminasi konsep belajar sepanjang hayat untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat marginal. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, ibu yang menulis bukunya sendiri untuk kedua buah hatinya ketika bayi, sangat aktif mencurahkan seluruh perhatian untuk mengonsep, meneliti, dan menyebarkan konsep konvergensi lembaga-lembaga dokumenter di Indonesia bersama Bapak Blasius Sudarsono, dosen Ilmu Perpustakaan yang telah ia anggap sebagai bapak sendiri. Pada 2014, pendidik yang lebih senang disebut dokumentalis ini merepresentasikan pemikirannya dalam makalah berjudul “Kolaborasi Perpustakaan, Lembaga Arsip, & Museum” pada Seminar Nasional HUT ke-62 Departemen Informasi & Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Melalui komunitas yang dibidannya pada 2010, yaitu Komunitas Jelajah, istri Hamdhani Masil ini, melahirkan berbagai gagasan untuk program pendidikan, riset, dan apresiasi. Pemilik warung makan “Dapur Mak Haji” di bilangan Kelapa Gading ini juga menfokuskan kegiatan pendidikan bagi masyarakat dengan terjun langsung sebagai fasilitator pengembangan kurikulum sekolah, klub belajar serta menjadi konsultan di berbagai komponen masyarakat dan institusi pendidikan untuk bidang Humaniora, Pendidikan, Manajemen Perpustakaan-Lembaga Arsip-Museum-Taman Nasional-Kebun Raya-Kebun Binatang, *branding* lembaga non-profit serta aktif sebagai penggerak Bacaan Anak. Kini, Ina juga tercatat sebagai Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia tahun 2015–2019 dan sedang menempuh program S3 di Universitas Padjadjaran.

MENUJU ERA BARU DOKUMENTASI

Buku ilmiah populer yang ada di tangan Anda ini merupakan buah karya hasil pemikiran dan pengalaman penulis selama bertahun-tahun mengenai konsep dasar dokumentasi. Dokumen, menurut sang penulis yang juga merupakan seorang pustakawan kenamaan Indonesia, ialah pusat dari perjalanan hidup dan budaya umat manusia. Terkait hal ini, dokumentasi tentunya tidak terbatas hanya pada objek pustaka saja, tetapi juga objek-objek lain seperti artefak, spesimen, dan botani. Wujudnya tidak terbatas hanya pada benda dua dimensi saja, tetapi juga benda tiga dimensi, baik mati maupun hidup. Penjelarasannya pun diulas secara bertahap dan disusun dalam suatu diagram yang disebut “Semesta Dokumentasi” yang mengisahkan konsep mendasar terjadinya proses dokumentasi serta rangkuman pemikiran dalam memahami makna dokumentasi secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Untuk memperkaya informasi mengenai ilmu dokumentasi di seluruh penjuru dunia, turut diulas pula kronologi perkembangan ilmu dan konsep dokumentasi yang pada akhirnya melandasi gerakan dokumentasi baru. Hadirnya gerakan dokumentasi baru ini dinilai penting dan mendesak karena berkaitan erat dengan upaya revitalisasi agenda penelitian dan pendidikan dari sekolah perpustakaan dan informasi.

Buku ini dapat menjadi referensi yang tepat bagi pihak-pihak yang tertarik dengan ilmu dokumentasi, misalnya para pemerhati di bidang dokumentasi dan informasi, akademisi (dosen, peneliti, mahasiswa) yang mendalami bidang ini, dan tentunya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang dokumentasi dan informasi seperti lembaga kearsipan, lembaga perpustakaan, atau lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan koleksi, misalnya museum, herbarium, kebun raya, dan kebun binatang.



Distributor:
Yayasan Obor Indonesia
Jln. Plaju No.10 Jakarta 10230
Telp. (021) 319 26978, 3920114
Faks. (021) 319 24488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id

LIPI Press

ISBN 978-979-799-705-2



9 789797 997052